



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penjabaran visi, misi, serta program Gubernur Provinsi Papua untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Papua tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang/2

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan/3

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. *Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);*
22. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;
23. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
24. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 571);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2013 – 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang yang mengatur Otonomi Khusus Papua.

4. Gubernur/4

4. Gubernur ialah Kepala Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah badan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Papua untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Papua yang terdiri dari rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang kabupaten dan kota.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.
12. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Papua untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Papua dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan Sasaran adalah arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Kerangka pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) RPJMD disusun berdasarkan asas :
 - a. demokrasi;
 - b. berkeadilan;
 - c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - d. transparansi;
 - e. tata kelola pemerintahan yang baik;
 - f. berkelanjutan;
 - g. Kearifan lokal dan
 - h. berwawasan lingkungan.
- (2) RPJMD disusun secara sistematis, sinergis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJPD dan RTRW.

Pasal 3

- (1) RPJMD bertujuan untuk menjadi acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui:
 - a. koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat;
 - c. partisipasi masyarakat; dan
 - d. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
- (2) Program Lintas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, sebagai dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- (4) Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h, merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.
- (5) Uraian secara rinci RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :
 - a. Pendahuluan : latar belakang, maksud dan tujuan, hubungan antar RPJMD dengan dokumen lainnya, dan sistematika penulisan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah : aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah;
 - c. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan : kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelola keuangan masa lalu, kerangka pendanaan, dan kebijakan pengelola keuangan daerah;
 - d. Analisis Isu-Isu Strategis : permasalahan pembangunan, dan isu strategis;
 - e. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran : visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. Arah Kebijakan dan Strategi : strategi, dan arah kebijakan;
 - g. Kebijakan/6

- g. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah : kebijakan umum program pembangunan daerah;
- h. Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan : bidang pemerintahan dan reformasi birokrasi, bidang penguatan otonomi khusus, bidang kesejahteraan rakyat, bidang perekonomian, bidang infrastruktur dan sarana prasarana;
- i. Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
- j. Pedoman Transisi : pedoman transisi, dan kaedah pelaksanaan; dan
- k. Penutup.

Pasal 5

RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Bappeda.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Kepala SKPD.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah, dengan menggunakan hasil evaluasi RKPD.
- (4) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD dimuat dalam RKPD tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan yang mendasar yaitu suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD dapat dilakukan perubahan dengan persetujuan DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, DPRP melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah lainnya yang terkait dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, maka penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD Provinsi Papua 2005-2025 dan mengacu pada RPJMN 2015-2019.
- (2) Gubernur pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode Pemerintahan berikutnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.
- (4) Apabila sampai dengan tahun kedua sejak habisnya masa jabatan Gubernur sebagaimana diatur pada ayat (2) belum terpilih Gubernur untuk masa jabatan berikutnya, RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan pada tahun berikutnya sampai terpilih Gubernur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 November 2013

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 8 November 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP
LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2013 NOMOR 14**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM**

ROSINA UPESSY, SH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
NOMOR 14 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2013-2018

I. UMUM

Provinsi Papua pada awalnya adalah Provinsi Irian Jaya yang terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Hingga tahun 2013, Provinsi Papua telah 50 tahun menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua memberikan pengakuan dan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki sehingga penyelesaian permasalahan pembangunan dapat ditanggulangi secara lebih kontekstual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hingga tahun 2013, pemerintahan era otonomi khusus telah berjalan 11 tahun sejak efektifnya pelaksanaan pemerintah di era otonomi khusus tahun 2012 dan telah banyak memberikan warna dan perubahan diberbagai sendi kehidupan masyarakat. Namun, belum secara optimal dapat menyentuh permasalahan pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antardaerah. Untuk itu, diperlukan perencanaan guna melaksanakan langkah peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, sehingga dapat lebih terfokus pada upaya pengurangan ketimpangan (*in-equity*) pembangunan dengan memperkuat aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis kearifan lokal (*local wisdom*). Penyusunan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 ini, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatan dari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat memberi pelayanan kepada segenap lapisan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah.

Huruf/2

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus memberi ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat dan menjadi ikatan sosial dalam komunitas sebagai pedoman berperilaku dalam kehidupan bersama.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD memuat visi, misi, dan program pembangunan dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang diterjemahkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program prioritas selama lima tahun. Selanjutnya, RPJMD ini harus dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

1.1. Latar Belakang

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih. Provinsi Papua telah berhasil melaksanakan proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara demokratis dan telah dilantik dan diambil sumpahnya pada 9 April 2013. Untuk itu, sesuai amanat undang-undang maka harus disusun RPJMD Provinsi Papua periode 2013-2018.
- 2 Provinsi Papua pada awalnya adalah Provinsi Irian Jaya yang terbentuk berdasarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat. Hingga tahun 2013, Provinsi Papua telah 50 tahun lebih menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian berbagai persoalan multidimensional masih terjadi sehingga menimbulkan berbagai ketidakpuasan dari kalangan masyarakat asli Papua dan bahkan mengarah pada munculnya potensi disintegrasi bangsa. Isu ketertinggalan diberbagai bidang pembangunan di Provinsi Papua selalu menjadi agenda prioritas pembangunan disetiap periode pemerintahan, tetapi belum kunjung memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua (OAP).
- 3 Untuk itu, pemerintah mengajukan skema khusus pendekatan pembangunan untuk menggantikan pendekatan militeristik dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Undang-undang ini memberikan pengakuan dan kewenangan khusus bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan adat istiadat dan potensi yang dimiliki sehingga penyelesaian permasalahan pembangunan dapat ditanggulangi secara lebih kontekstual untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua. Hingga tahun 2013, pemerintahan era otonomi khusus telah berjalan 11 tahun sejak efektif pelaksanaannya pada tahun 2002, telah banyak memberikan warna dan perubahan diberbagai sendi kehidupan masyarakat, meskipun belum dapat menyentuh permasalahan pembangunan secara substantif untuk mengurangi ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan antar daerah. Untuk itu, diperlukan satu kajian mendalam untuk perbaikan pelaksanaan otonomi khusus di Papua sehingga dapat lebih fokus pada upaya pengurangan ketimpangan (in-equity) pembangunan dengan memperkokoh aspek kemandirian orang asli Papua dalam kapasitas ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
- 4 Untuk itu, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Bapak Lukas Enembe dan Bapak Klemen Tinal, mengajak semua komponen masyarakat di Provinsi Papua untuk bersatu membangun masa depan Papua dengan **mengisi lembaran baru di babak baru menuju peradaban baru.**

- 5 Untuk memulai langkah besar tersebut harus dirumuskan strategi pembangunan yang tepat, desain kebijakan yang lebih menyentuh dan terukur yang didukung pelaksanaan kewenangan penuh, skema anggaran yang terbagi secara adil dan merata, serta pengawasan yang terkendali yang dibingkai dalam satu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018. RPJMD 2013-2018 akan menjadi landasan dalam pelaksanaan tahapan pembangunan di Provinsi Papua selama lima tahun ke depan, sebagai arah dan panduan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua untuk bersama mewujudkan **Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera**.

Penyusunan RPJMD Propinsi Papua 2013-2018 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan penyusunan RPJMD

Persiapan penyusunan dilakukan dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari kelompok perumus dan kelompok pembahas, menyusun jadwal/agenda pelaksanaan, dan menetapkan narasumber dan tim ahli untuk membantu dalam penyusunan RPJMD.

2) Penyusunan rancangan awal RPJMD

Penyusunan rancangan awal dilakukan melalui tahap-tahap penelaahan dokumen-dokumen terkait, analisis gambaran umum, analisis pengelolaan keuangan, perumusan permasalahan dan isu-isu strategis, perumusan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, hingga penyusunan program SKPD dan lintas SKPD dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan indikatif.

3) Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan dilakukan berdasarkan verifikasi dan integrasi seluruh Renstra SKPD dengan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

4) Pelaksanaan musrenbang RPJMD

Merupakan forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Propinsi Papua. Tujuan Musrenbang RPJMD untuk mendapatkan masukan dan komitmen para pemangku kepentingan pembangunan daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan RPJMD Provinsi Papua menjadi rancangan akhir RPJMD Provinsi Papua.

5) Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir dilakukan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Rancangan akhir RPJMD yang telah disempurnakan berdasarkan kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD, selanjutnya dibahas dengan seluruh kepala SKPD untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah terkait dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing telah disempurnakan dengan kesepakatan hasil Musrenbang dan ditampung dalam rancangan akhir RPJMD.

Penetapan peraturan daerah tentang RPJMD, yaitu Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD Propinsi Papua 2013–2018 dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Papua 2013-2018.

1.2. Maksud dan Tujuan

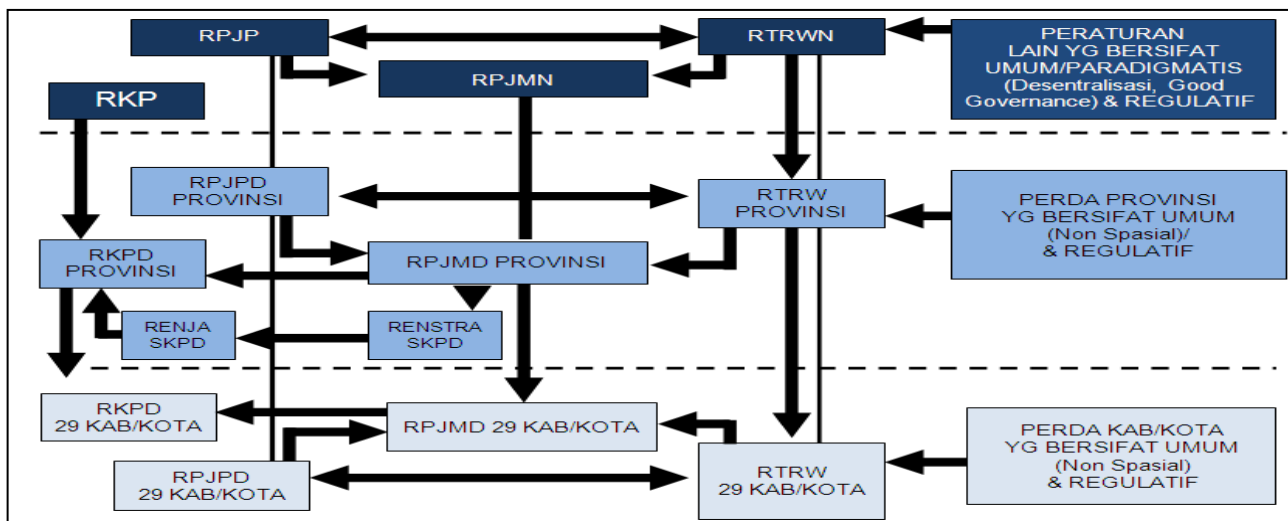
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang berkesinambungan. RPJMD ini sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang bermitra masyarakat, secara berjenjang.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018 adalah :

1. Menjabarkan visi, misi, dan program prioritas kepala daerah terpilih.
2. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, harmonis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Menjaga kesinambungan dan kesatuan arah antara Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi.

1.3. Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional. Oleh karena itu, sistem perencanaan pembangunan daerah harus saling bersinergi mulai dari tingkat nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota. Masing-masing tingkatan perencanaan memiliki tujuan dan sasaran yang spesifik, tetapi juga memiliki tujuan dan sasaran agregatif dari sistem perencanaan yang ada di bawahnya.



Gambar I.1
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hirarki penyusunannya RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua 2005-2025. Adapun keterkaitan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

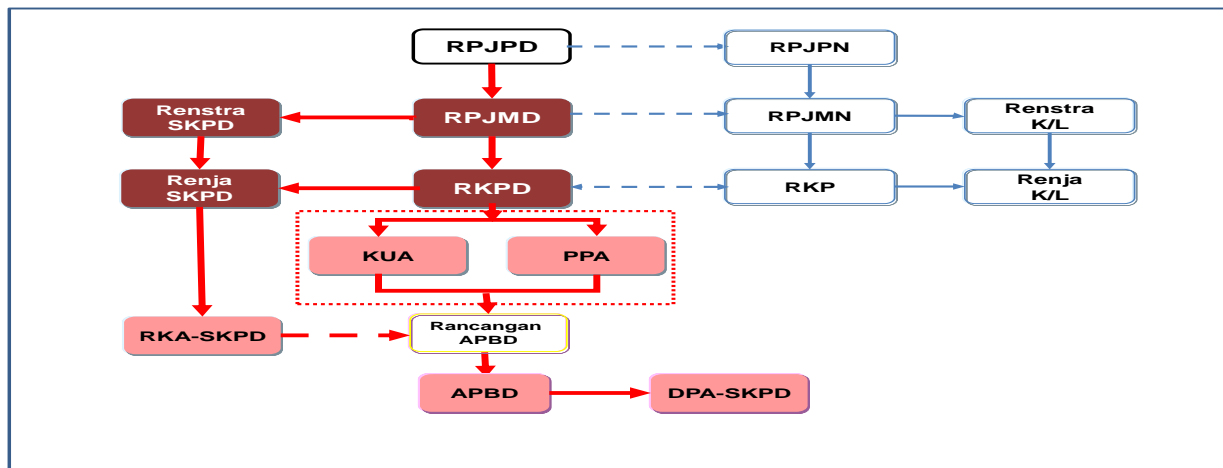
- a. RPJMD Provinsi Papua merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan nasional dengan mengacu kepada RPJP Daerah Provinsi Papua 2005-2025 serta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua;
- b. RPJMD Provinsi Papua menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra-SKPD untuk jangka 5 (lima) tahun serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya;
- c. RPJMD Provinsi Papua menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

Selain dalam keterkaitannya dengan dokumen perencanaan yang lain, dokumen RPJMD juga terkait dengan dokumen anggaran. Hubungan antardokumen perencanaan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan RPJP, RPJM dan RKP. RPJP Provinsi Papua merupakan hasil integral dari perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap dinamika lingkungan, baik skala internasional, nasional, maupun regional.

Secara hirarki, RPJP Provinsi Papua disusun berdasarkan analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis serta mengacu pada RPJP Nasional. Adapun RPJM Provinsi Papua merupakan penjelmaan dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Provinsi Papua dengan memperhatikan RPJM Nasional. RPJM Provinsi Papua juga menjelaskan arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, dan program kewilayahan dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Keterhubungan antardokumen perencanaan pembangunan dan kesinambungannya dengan fungsi penganggaran dapat dilihat dalam gambar berikut ini.



Gambar I.2
Keterhubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran

Dari gambar di atas dapat disimpulkan :

1. Sistem perencanaan pembangunan daerah, baik jangka panjang, menengah, dan tahunan, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
2. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.
3. Sistem perencanaan pembangunan daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui tahap penganggarannya.

Demi mengefektifkan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui alokasi dana APBD, perbaikan sistem perencanaan pembangunan secara integral tidak dapat ditunda lagi demi memberikan hasil berupa perbaikan hasil-hasil pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Provinsi Papua.

Penyusunan RPJMD Provinsi Papua antara lain didasarkan pada kajian aspek tata ruang yang ada. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan aspek penataan ruang merupakan suatu keharusan untuk memastikan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua 2013-2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Hubungan Antar RPJMD Dengan Dokumen Lainnya
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3 Aspek Pelayanan Umum
- 2.4 Aspek Daya Saing Daerah

BAB III	GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN
	3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
	3.3. Kerangka Pendanaan
BAB IV	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
	4.1. Permasalahan Pembangunan
	4.2. Isu Strategis
BAB V	VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
	5.1. Visi
	5.2. Misi
	5.3. Tujuan dan Sasaran
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
	6.1 Arah Kebijakan
	6.2 Strategi
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
	7.1 Kebijakan Umum
	7.2 Program Pembangunan Daerah
BAB VIII	INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX	INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X	PEDOMAN MASA TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
BAB XI	PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran Umum kondisi Provinsi Papua memberikan informasi tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Provinsi Papua secara umum saat ini. Gambaran umum menjadi pijakan penyusunan rencana pembangunan melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah. Hal-hal lain yang dianggap perlu dapat ditambahkan pada subbab aspek geografi dan demografi.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi Provinsi Papua perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

a. Karakteristik lokasi dan wilayah

Bab ini menggambarkan tentang luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari, kondisi/kawasan, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan.

Letak dan Kondisi Geografis

Provinsi Papua secara geografis terletak antara garis koordinat 1⁰⁰' LU - 9³⁰' LS dan 134⁰ BT - 141⁰¹' BT. Dengan luas 317.062,05 km², Papua merupakan Provinsi terluas di Indonesia. Provinsi ini secara administratif berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Samudra Pasifik
 Sebelah Selatan : Laut Arafuru
 Sebelah Barat : Papua Barat
 Sebelah Timur : Papua Nugini

Provinsi Papua hingga tahun 2012, terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota dengan perkembangan jumlah distrik 389 dan 3.619 kampung. Dari kabupaten ini dibagi dalam kelompok geografis sebagai berikut :

Tabel II.1 Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung

NAMA KABUPATEN	IBU KOTA	DISTRIK	KAMPUNG
DATARAN MUDAH AKSES		113	915
Kab. Biak Numfor	Biak	19	187
Kab. Jayapura	Sentani	19	144
Kab. Keerom	Arso	7	61
Kab. Merauke	Merauke	20	168
Kab. Nabire	Nabira	14	81
Kab. Sarmi	Sarmi	10	86
Kab. Yapen Waropen	Serui	14	111
Kota Jayapura	Jayapura	5	39
Kab. Supiori	Sorendiwari	5	38
DATARAN SULIT AKSES		75	713
Kab. Asmat	Agats	10	175
Kab. Boven Digoel	Tanah Merah	20	112
Kab. Mamberamo Raya	Burmeso	8	58
Kab. Mamberamo Tengah	Kobakma	5	59
Kab. Mappi	Keppi	10	137
Kab. Mimika	Timika	12	85
Kab. Waropen	Waren	10	87
PEGUNUNGAN TENGAH		201	1991
Kab. Deiyai	Tigi	5	30
Kab. Dogiyai	Kigamani	10	79
Kab. Intan Jaya	Sugapa	6	37
Kab. Jayawijaya	Wamena	11	117
Kab. Lanny Jaya	Tion	10	143
Kab. Nduga	Kenyam	8	32
Kab. Paniai	Enarotali	10	70
Kab. Pegunungan Bintang	Oksibil	34	277
Kab. Puncak	Ilaga	8	80
Kab. Puncak Jaya	Mulia	8	67
Kab. Tolikara	Karubaga	35	514
Kab. Yahukimo	Dekai	51	518
Kab. Yalimo	Elelim	5	27
JUMLAH		389	3619



Gambar II.1 Peta Administratif Provinsi Papua

Selain berupa daratan, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik. Keadaan ini membuat Papua sangat kaya akan potensi di bidang perikanan laut tangkap. Kabupaten Mimika dan Mamberamo Raya merupakan dua kabupaten yang memiliki luas wilayah laut terluas yaitu masing-masing 2.832,30 km² dan 1.650 km². Pengembangan ekonomi berdasarkan potensi ikan tangkap sangat potensial.

Tabel II.2 Luas Laut dan Panjang Garis Pantai di Provinsi Papua

Kabupaten/ Kota	Satuan	Luas Wilayah Laut	Satuan	Panjang Garis Pantai
Supiori	Km ²	35,83	Km	281
Biak Numfor	Km ²	47,85	Km	548,9
Yapen	Km ²	40,03	Km	897,72
Waropen	Km ²	666,69	Km	225,59
Sarmi	Km ²	31,85	Km	306, 10
Nabire	Km ²	234,97	Km	560,18
Mamberamo Raya	Km ²	1650,37	Km	291,55
Jayapura	Km ²	1,35	Km	134,5
Kota Jayapura	Km ²	2,81	Km	116,77
Mimika	Km ²	2832,3	Km	444,44
Mappi	Km ²	582,14	Km	161,5
Asmat	Km ²	2845,91	Km	287,71
Merauke	Km ²	3179,51	Km	775,16

Sumber : BPS, Provinsi Kabupaten dan Kota tahun 2008, Bakorsutanl, dan hasil pengukuran GIS skala 1:250.000 tahun 2009 dari citra landsat 2000.

Selain karena letaknya yang berbatasan dengan laut, Provinsi Papua juga merupakan kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan Australia di mana sebagian pulau yang berbatasan dengan kedua negara tersebut ada yang berpenduduk dan ada yang tidak berpenduduk.

Wilayah Provinsi Papua terdiri dari wilayah dataran rendah, pesisir dan pegunungan yang berada pada ketinggian diantara 0 - 3.000 meter dari permukaan laut (mdpl). Wilayah tertinggi terdapat di Kabupaten Puncak Jaya dengan ketinggian 2.980 mdpl sedangkan yang paling rendah adalah Kota Jayapura dengan ketinggian rata-rata 4 mdpl. Berdasarkan ketinggian wilayah, rata-rata suhu udara di Papua berkisar antara 19,8° hingga 28,4°.

Iklim Papua termasuk dalam iklim hutan hujan tropis (*tropical rain forest*), yang dipengaruhi oleh musim kemarau, hujan dan angin muson menyebabkan Papua kaya akan flora dan faunan khas hutan hujan tropis. Secara umum musim kemarau di Papua terjadi di bulan Juni–September, dan musim hujan di bulan Desember - Maret, dengan masa peralihan pada bulan April - Mei dan bulan Oktober - November. Terdapat 32,4% tanah di wilayah Papua berada di kelas kemiringan di atas 40 derajat dan rawa-rawa yang luas terutama disepanjang pesisir pantai selatan Papua yang terbentang hingga ke hulu sungai-sungai di pedalaman.

Provinsi Papua merupakan tepi dari *The Australian Continent* dan merupakan pertemuan dua lempeng bumi yang menyebabkan adanya tiga deretan pegunungan yaitu (1) di lingkaran luar terdapat Pegunungan Utara, (2) di lingkaran dalam terdapat deretan Pegunungan Selatan, dan (3) deretan Pegunungan Tengah. Kondisi ini menjadikan Papua rawan gempa dan masuk dalam cincin api gempa (*ring of the fire*), tetapi juga kaya akan mineral seperti emas, perak, dan tembaga.

Provinsi Papua memiliki 64 DAS (Daerah Aliran Sungai) dengan total panjang sungai adalah 35,924.737 dan total luas daerah tangkapan adalah 572,753.823 KM². Keberadaan DAS ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua memiliki kekayaan sumber daya air yang berlimpah. Sungai-sungai besar yang terbentang dan danau yang tersebar di Papua dapat menjadi sumber energi listrik yang terbaharukan sebagai modal dasar pembangunan ekonomi produktif, pendapatan asli daerah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dibutuhkan terobosan khusus untuk melakukan terobosan dan lompatan pembangunan melalui investasi besar penyediaan listrik yang terbaharukan.

Provinsi Papua memiliki kawasan hutan yang luas dengan tutupan lahan yang relatif masih utuh. Dari data luas tutupan lahan tampak bahwa hutan lahan kering primer dan hutan rawa primer merupakan daerah yang terluas yaitu masing-masing sekitar 15 juta ha (49%) dan 4,5 juta ha (14,5%); kemudian hutan lahan kering sekunder seluas 3,2 juta ha (10,5%) dan savana seluas 1,4 juta ha (4,5%). Selebihnya terbagi dalam klasifikasi pertanian, permukiman, tanah terbuka, dan rawa. Berdasarkan fungsinya, hutan lindung dan hutan produksi memiliki luasan yang hampir sama masing-masing sekitar 8,3 juta Ha dan 8,2 juta Ha. Sedangkan untuk jenis penggunaan hutan produksi konversi dan KSA/KPA mencapai luasan 6,4 juta Ha dan 5,6 juta Ha. Sisanya adalah untuk jenis fungsi hutan produksi terbatas (1,8 juta Ha), APL seluas 0,8 juta Ha, dan Perairan sekitar 0,5 juta Ha.

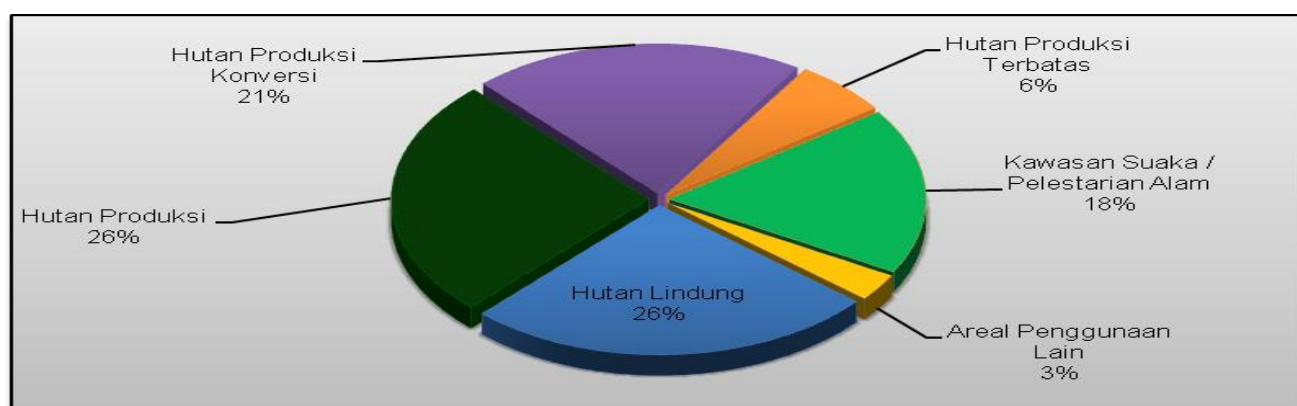
Tabel II.3 Jenis Tutupan Lahan di Provinsi Papua

No	Jenis Tutupan Lahan	Satuan	Jumlah	Jumlah (%)
1	Hutan Lahan Kering Primer	Ha	15.095.379	48,566
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	Ha	3.242.254	10,431
3	Hutan Mangrove Primer	Ha	1.108.293	3,566
4	Hutan Mangrove Sekunder	Ha	66.992	0,216
5	Hutan Rawa Primer	Ha	4.490.323	14,447
6	Hutan Rawa Sekunder	Ha	606.928	1,953
7	Hutan Tanaman Industri	Ha	3.578	0,012
8	Pelabuhan Udara/Laut	Ha	894	0,003
9	Perkebunan	Ha	45.449	0,146
10	Permukiman	Ha	69,49	0,000
11	Pertambangan	Ha	1.417	0,005
12	Pertanian Campur Semak	Ha	819.624	2,637
13	Pertanian Lahan Kering	Ha	68.304	0,220

No	Jenis Tutupan Lahan	Satuan	Jumlah	Jumlah (%)
14	Rawa	Ha	551.113	1,773
15	Savana	Ha	1.404.474	4,519
16	Sawah	Ha	11.052	0,036
17	Semak/Belukar	Ha	755.429	2,430
18	Semak/Belukar Rawa	Ha	1.272.003	4,092
19	Tambak	Ha	471	0,002
20	Tanah Terbuka	Ha	606.038	1,950
21	Transmigrasi	Ha	86.968	0,280
22	Tubuh Air	Ha	500,52	0,002
23	Tidak Teridentifikasi	Ha	844.521	2,717
	Jumlah	Ha	31.082.074	100,000

Sumber : RTRW 2009, Pemerintah Provinsi Papua

Jika dilihat dari persentasenya, penggunaan lahan di Provinsi Papua dapat dilihat pada grafik berikut :



Grafik II.1 Persentase Penggunaan Lahan Provinsi Papua

Dengan kondisi hutan di Papua berkomitmen untuk menjaga 90% luas hutan menempatkan Provinsi Papua sebagai paru-paru dunia dan penjaga iklim regional. Tetapi hingga kini masyarakat Papua belum mendapatkan nilai tambah dari kesediaan menjaga hutan dan ekosistem lainnya untuk kepentingan bersama, melalui skema kompensasi yang telah banyak didengungkan masyarakat internasional berkaitan dengan upaya penurunan gas emisi akibat perusakan hutan dan lahan (REDD) yang berakibat pada ancaman pemanasan global (global warming).

Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2010-2030 maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang adalah sebagai berikut :

Potensi Pertanian dan Perkebunan

Potensi pengembangan lahan pertanian di Papua masih terbuka sangat lebar melalui klarifikasi status lahan untuk pembangunan pertanian oleh Pemerintah dan masyarakat adat, pengembangan infrastruktur pertanian termasuk jaringan irigasi, jaringan jalan pendukung pertanian, pasar, peningkatan SDM secara konsisten dan terpadu, dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun sektor pertanian. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan yang tersedia secara tepat dan lestari bukan tidak mungkin mengangkat Provinsi Papua sebagai sentra produksi pertanian di wilayah timur, memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, dan melestarikan sumber pangan lokal yang sudah terbukti adaptif untuk ketahanan pangan dan kelestarian budaya setempat.

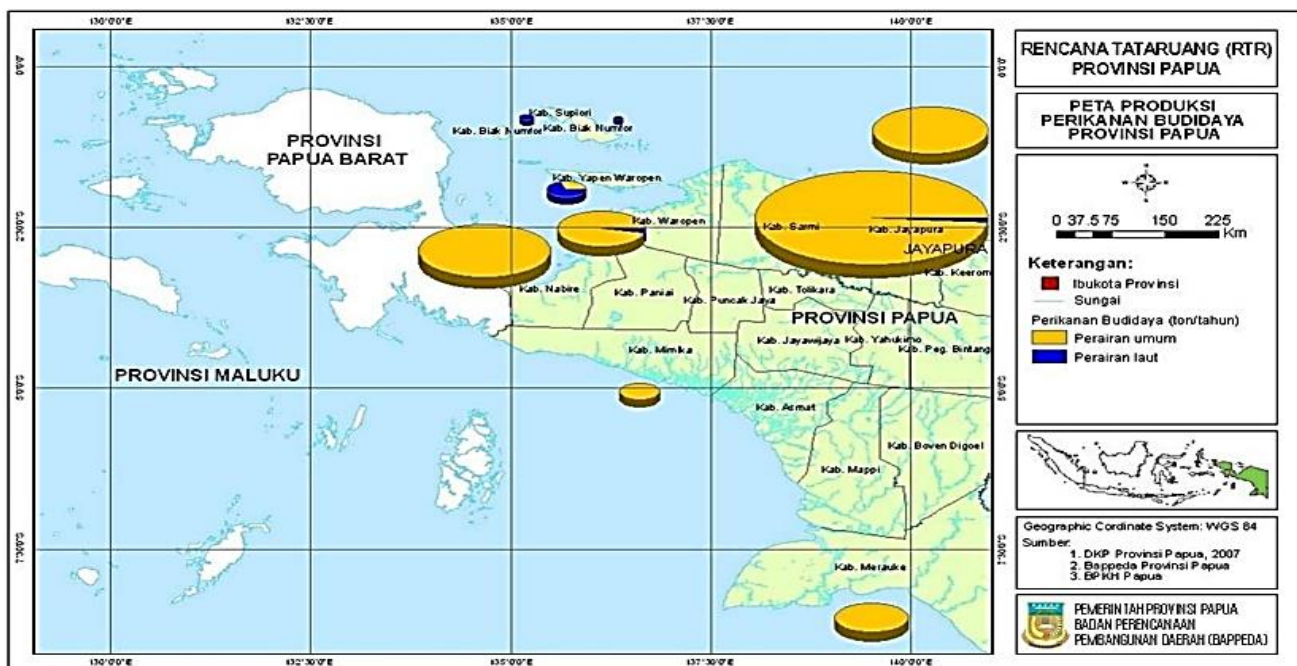
Kegiatan perkebunan juga masih terbatas pada komoditas dengan orientasi pada pasar lokal. Meski demikian, beberapa investasi perkebunan untuk kakao dan kopi telah menunjukkan kemajuan dan layak dikembangkan dengan basis pengelolaan oleh masyarakat adat.

Perikanan Tangkap

Potensi lestari untuk ikan pelagis besar secara keseluruhan adalah 612.200 ton/tahun dan perikanan demersal untuk perairan Arafuru dan sekitar perairan Papua sendiri sebesar 230.400 ton/tahun. Namun demikian, jika mengacu pada hasil penelitian Uktoselja (1998), khususnya pada ikan cakalang yang ditangkap di perairan Indonesia Timur termasuk Papua, peningkatan produksi di atas perlu dicermati secara mendalam dan hati-hati. Sebagai petaan dapat dikemukakan bahwa persentase ukuran ikan cakalang > 2.6 kg yang tertangkap mengalami penurunan, dari 85,3% pada tahun 1991 menjadi 36,8% pada tahun 1996 (Uktolseja, 1998). Untuk jelasnya lihat pada Peta 3.44 mengenai Peta Potensi Perikanan Laut di Provinsi Papua.

Di samping itu, selain potensi ikan-ikan pelagis dan ikan demersal yang telah disebutkan diatas, masih terdapat beberapa potensi perikanan laut Papua antara lain kepiting lobster, pari, udang serta beberapa potensi budidaya kerapu dan rumput laut. Kepiting banyak ditemui di Kabupaten Waropen, sedangkan udang banyak ditemui di sekitar pesisir Asmat, Mappi, Sarmi dan Kabupaten Nabire. Begitu pula lobster banyak ditemui di Kabupaten Sarmi. Sebagaimana tertera pula dalam Lampiran IX PP nomor 26 tahun 2008 tentang RTRWN, tertulis tentang kawasan andalan perikanan berada di daerah-daerah berikut :

- Timika (Tembagapura) dan sekitarnya
- Kawasan Biak
- Kawasan Merauke dan sekitarnya
- Kawasan Mamberamo – Lereh (Jayapura) dan sekitarnya
- Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih – Biak dan sekitarnya
- Kawasan Andalan Laut Jayapura – Sarmi



Gambar II.2 Peta Produksi Perikanan Budidaya

Perikanan Budidaya

Peta produksi Perikanan budidaya di Propinsi Papua tersebar diseluruh pesisir dan pulau-pulainya meski masih termanfaatkan terbatas di daerah Pesisir Jayapura dan Kabupaten Nabire. Di kedua kabupaten potensial tersebut jenis perikanan budidaya perairan umum, dengan jenis ikan unggulan kerapu dan baronang, sedangkan untuk perairan laut terbesar di Kabupaten Biak dengan budidaya unggulan rumput laut yang dapat terus ditingkatkan produktivitasnya. Perlu perhatian melalui penguatan infratraktur dan persiapan sumberdaya manusia perikanan yang handal melalui sekolah kejuruan dan kursus ketrampilan dan fasilitasi pemerintah dalam membuka pasar komoditas yang lebih luas dan menjanjikan.

Pertambangan

Pulau Papua terbentuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (*Australia Plate*) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*Pacific Crustal Plate*) yang bergerak ke arah Barat. Akibat benturan antara lempeng tersebut di atas menimbulkan keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah dengan terjadinya penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang ke dalam batuan sedimen di atasnya, memungkinkan terbentuknya mineralisasi logam yang berasosiasi dengan perak dan emas. Konsentrasi mineral - mineral logam diperkirakan terdapat pada Lajur Pegunungan Tengah Papua.

Posisi tektonik Papua yang berada di Lingkar Pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral yang besar seperti emas dan tembaga, telah diketahui sepanjang jalur tersebut dari Amerika Selatan, Philipina, Papua New Guinea sampai ke Selandia Baru. Potensi ini sangat menguntungkan bagi Provinsi Papua seperti yang saat ini tengah dieksploitasi oleh PT. Freeport Indonesia (PFI).

Dari data sekunder yang terhimpun, diperoleh data potensi mineral logam maupun non logam yang dapat dilihat pada Tabel. Potensi Mineral Logam dan Non Logam untuk daerah-daerah yang potensial di seluruh Provinsi Papua.

Tabel II.4 Potensi Mineral Logam dan Non Logam

KABUPATEN/ KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
Kota Jayapura*	S.Numbai, Kodam	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
	S. Yapis, Kel. Imbi	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. APO	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Entrop	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Perumnas IV	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
	S. Borgonjje	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Kujabu, Waena	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
Kab. Jayapura	Sentani	Kobal	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
		Tungsten	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
		Nikel	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
		Asbes	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
	S. Kemiri	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
	S. Deyau, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
S. Sawe, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)	
	S. Ayapo, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
	S. Tami	Krom	Kadar 3.45-42.52% (Data Kanwil DPE)

KABUPATEN/ KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
	Tg. Tanahmerah	Talk	Sebagai Lapisan Atau Lensa Dengan Tebal 1 Meter, Dijumpai Pada Batas Serpentin Dan Sekis Kristalin
	Waris	Emas	Data Kanwil DPE
		Tembaga	Cu 1284 Ppm
		Timah Hitam	Pb 3312 Ppm
	Web	Emas	Anomali Geokimia
		Perak	
	Arso	Krom	Indikasi
		Batubara	Indikasi
	Depapre	Marmer	Data Kanwil DPE
	Bonggo	Batubara	Indikasi
	Genyem,	Batubara	Kadar 4470 Kal/Gram, Belerang 5.6%, Abu 12.5%, Kelembaban 18.2% Karbon Tertambat 27.3%, Zat Terbang 42.1%
	Nimboran		Abu 12.5%, Kelembaban 18.2% Karbon Tertambat 27.3%, Zat Terbang 42.1%
	Siduarsi	Nikel Laterit	Indikasi
	S. Pis dan S.Pas	Emas	Indikasi
Senggi	Tembaga	Anomali 669 Ppm	
	Timah Hitam	Anomali 2482 Ppm	
Kab. Jayawijaya	Kurulu	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 387 Juta Metrik Ton, Kadar Sio 292.2-99.6%
		Batu Gamping	Kadar Cao 39.05-50.75% Dan Mgo 0.35-3.76%
	Assolokobal	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 21.594.200 Ton
		Batu Gamping	Cadangan 3.391.300 Ton
	Asologaima	Batubara	Data Kanwil DPE (Indikasi)
	Borne Utara	Emas	Anomali Geokimia (Indikasi)
	Okbibab	Tungsten	Indikasi
	Soba	Pb-Zn	Indikasi
		(Timbal-Seng)	Indikasi
	Holuwon	Pb-Zn	Indikasi
		(Timbal-Seng)	Indikasi
	Bokondini	Tembaga	Indikasi
		Emas	Indikasi
	Tiom	Emas, Batugaram	Indikasi
	Mbua	Batubara	Indikasi
	Nalca	Emas	Anomali Geokimia (Indikasi)
Dabra	Emas	Data PT Freeport Ind	
	Tembaga	Indikasi	
Aboyi	Emas	Indikasi	
	Molibdenum	Indikasi	
Kab. Nabire	Yaur (Kwatisore)	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 4.095 Juta Ton
		Granit	Sumberdaya 125 Juta Ton
	Marmer		Penyebaran 16.25 Km ² Sumberdaya 163 Juta Ton
			Berwarna Abu-Abu Kehitaman, Kuat Tekan 942-100 Kg/Cm ²

KABUPATEN/ KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
			Penyerapan Air 0.09-10, Berat Jenis 2.76-2.78
Kab. Nabire	Logari	Emas	Anomali Geokimia, Data PT IEMC
	S. Sanoba, Nabire	Emas	Data Kanwil DPE (Positif)
	S. Nabaruwa, Nabire	Emas	Data Kanwil DPE (Positif)
	Nabaruwa, Nabire	Marmer	Sumberdaya 150 Juta Ton
	Uwapa	Seng	Indikasi
		Kaolin	Sumberdaya 12 Juta Ton
	S. Bumi, Topo	Emas	Data Kanwil DPE
	S. Cemara, Topo	Emas	Data Kanwil DPE
	Haiura	Emas	Anomali Geokimia
		Tembaga	Data PT IEMC
Wapoga	Emas	Anomali Geokimia	
		Data PT IEMC	
Kab. Biak Numfor	Supiori	Emas	Data Kanwil DPE
		Batukapur	Indikasi
	Korido	Kalsit	Berupa Bongkah Berukuran 15-20 Cm
	Biak	Phosphat	Indikasi
Pasir Besi		Indikasi	
Yapen Waropen	Waropen Bawah	Emas	Data Kanwil DPE
	Waropen Atas	Batubara	Indikasi
	Yapen	Pasir Besi	Indikasi
	P. Num	Nikel	Indikasi
Merauke	Jair	Emas	Indikasi
		Perak	Indikasi
	Mediptana	Tembaga	Kadar Cu 50.90 Ppm
		Timah Hitam	Kadar Pb 55.80 Ppm
		Seng	Kadar Zn 7.87 Ppm
Kuoh	Emas	Indikasi	
Puncak Jaya	Obaa	Emas	Indikasi
		Perak	Indikasi
	Ilu	Arsenit	Indikasi
		Tembaga	Nilai Anomali, Cu 16-60.6 Ppm, Pb 11.1-37.1 Ppm
		Arsenit	Anomali Geokimia
	Ilaga	Tembaga	Data PT Freeport Ind
		Emas	PT NBM
		Perak	

KABUPATEN/ KOTA	LOKASI	JENIS GALIAN MINERAL	KETERANGAN
Paniai	Enarotali	Pasir Kuarsa	
	Bilogai (Wabu)	Emas	Cadangan Terindikasi
		Garnet	Data PT Freeport Ind
	Mapia	Emas	Cadangan Terindikasi
		Tembaga	PT NBM
	Kemabu	Tembaga	Anomali Geokimia
		Emas	Data PT Freeport Ind
	Uwagimamo	Emas	Anomali Geokimia
		Tembaga	Data PT Freeport Ind
		Bismuth	
	Mandoga	Tembaga	Anomali Geokimia
Emas		Data PT Freeport Ind	
Komopa	Tembaga	Cadangan Terindikasi	
	Emas	PT NBM	
Mimika	Tembagapura	Tembaga	Telah Diusahakan PT FI
		Perak	Kadar Cu 1.59%,Au 1.78Ppm
		Emas	

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua

Keterangan : Kabupaten pemekaran masih digabung dengan kabupaten induk

Pariwisata

Papua memiliki kekayaan multidimensional mulai dari keadaan alamnya yang menakjubkan mulai dari puncak gunung tertinggi, lembah dan ngarai yang indah, hutan terbentang luas dengan flora dan fauna unik dan endemik, pesisir pantai terbentang dan gugusan pulau yang indah, isi laut yang tiada tara, adat budaya masyarakat asli yang unik dan sejarah internasional maka potensi wisata Papua patut ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah.

Provinsi Papua juga memiliki taman nasional, yaitu Taman Nasional Lorentz di Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Asmat, Taman Nasional Wasur di Merauke dan Taman Nasional Teluk Cendrawasih di Nabire sehingga Papua memiliki potensi pariwisata terlengkap di Indonesia dan dunia. Meski demikian, kekayaan maha dahsyat ini belum tersentuh secara profesional sehingga potensi belum tergali dan belum memberikan dampak secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian, hingga saat ini telah ditetapkan obyek wisata potensial Papua dibagi menjadi tujuh kawasan/obyek wisata ditambah satu jenis obyek wisata yang belum berhasil teridentifikasi jenisnya, seperti berikut ini :

- ❖ Kawasan Wisata Bahari : termasuk kategori Wisata Bahari adalah obyek wisata yang terdapat di pantai, teluk, danau, tanjung, dan laut.
- ❖ Kawasan Wisata Air Terjun : Obyek Wisata Air Terjun, termasuk obyek wisata sungai.
- ❖ Kawasan Wisata Pulau: Provinsi Papua selain sebagai salah satu pulau besar di Indonesia, juga memiliki ratusan pulau-pulau kecil.
- ❖ Kawasan Wisata Budaya: Provinsi Papua, selain kaya akan sumberdaya alam, juga memiliki keragaman budaya lokal yang tinggi dan unik. Budaya orang Papua didominasi oleh refleksi hubungan mereka dengan alam dan leluhurnya.
- ❖ Kawasan Wisata Sejarah: Provinsi Papua selain memiliki obyek wisata seperti yang telah disebutkan di atas, juga memiliki obyek wisata yang bernuansa sejarah, terutama yang memetakan jejak sejarah perjuangan Provinsi Papua.
- ❖ Obyek Wisata Religi: Di Provinsi Papua juga terdapat obyek wisata yang berlatar belakang keagamaan, yang disebut sebagai Obyek Wisata Religi.
- ❖ Kawasan Wisata Alam: Panorama alam di Provinsi Papua, baik di darat maupun di laut, banyak menyimpan pesona alam yang bisa menyejukkan hati dan pandangan bagi pencinta keindahan alami.

Obyek Wisata Lain-lain: Dari sumber-sumber kawasan/obyek wisata potensial terdapat beberapa obyek wisata yang belum teridentifikasi jenisnya, yaitu: KP Asmat (Kabupaten Asmat), TW Parieri (Kabupaten Biak Numfor), SM. D. Bian (Kabupaten Boven Digoel), DS. Anguruk (Kabupaten Mappi), TR. Timika dan Kuala Kencana (Kabupaten Mimika), KP Paradoi (Kabupaten Nabire), dan KP. Kurudu dan KP. Paradoi (Kabupaten Waropen).

Pemanfaatan potensi wisata di atas harus terus dioptimalkan dengan menyediakan sumberdaya manusi pengelola yang handal dengan memanfaatkan jaringan pariwisata internasional untuk kepentingan promosi dengan penyediaan paket wisata dan pengelolaan potensi pariwisata yang memenuhi standart internasional, dengan tetap melibatkan peran aktif masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat. Pemerintah Provinsi mendorong pengembangan jalur transportasi pariwisata dengan mengoptimalkan prasarana yang telah ada dan pembangunan jaringan baru yang potensial di beberapa titik strategis serta menjamin rasa aman para wisatawan.

2.1.1. Wilayah Rawan Bencana

Beberapa wilayah di Provinsi Papua rentan terhadap bencanadan telah diidentifikasi seperti tampak pada (Tabel II.8). Berdasarkan hasil identifikasi tampak bahwa bahaya geologi sering terjadi di wilayah Pesisir Selatan Papua dan Pesisir Utara dan Kepulauan Papua. Sedangkan bahaya tanah longsor juga teridentifikasi sering terjadi dikedua wilayah tersebut ditambah sebagian wilayah Pegunungan Tengah. Pulau Papua terbetuk dari hasil benturan Lempeng Benua Australia (*Australia Plate*) yang bergerak ke Utara dengan Lempeng Pasifik (*Pacific Crustal Plate*) yang bergerak ke arah Barat. Hal ini menempatkan Papua sebagai wilayah rawan gempa tektonik yang terjadi hingga 36 kali di tahun 2012. Untuk bahaya Tsunami pernah terjadi di wilayah Pesisir Utara dan Kepulauan. Sedangkan bahaya iklim seperti banjir terjadi di wilayah Papua Selatan dan Utara. Adapun bahaya kekeringan terjadidi wilayah Pegunungan Tengah meskipun seluruh wilayah Papua juga berpotensi untuk mengalami kekeringan.

Sedangkan untuk bahaya kekeringan di Papua, rata-rata pada wilayah pembagian menunjukkan bahwa bahaya tersebut mungkin terjadi pada sebagian besar wilayah di Papua. Khususnya pada wilayah Pegunungan tepatnya Jayawijaya, Tolikara dan Yahukimo tampak terlihat bahwa bahaya iklim kekeringan sering terjadi pada ketiga daerah tersebut.

Tabel II.5 Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah

Pembagian Wilayah	Kabupaten/ Kota	Bahaya Geologi				Bahaya Iklim		
		Gempa Bumi	Tsunami	Gunung Api	Tanah Longsor	Badai Tropis	Banjir	Kekeringan
Pesisir Selatan Papua	Asmat	o	x	x	v	o	v	o
	Boven Digoel	o	x	x	v	x	o	o
	Mappi	o	x	x	o	v	v	o
	Merauke	o	x	x	o	v	v	v
	Mimika	o	x	x	v	o	vv	o
Pesisir Utara Papua dan Kepulauan	Biak	vv	v	x	o	v	v	o
	Dogiyai	v	o	x	o	o	o	o
	Jayapura	vv	o	x	vv	o	vv	o
	Keerom	vv	o	x	vv	o	vv	o
	Kota Jayapura	vv	o	x	vv	v	vv	o
	Mamb. Raya	v	o	x	v	o	v	o
	Nabire	vv	o	x	v	o	o	o
	Sarmi	vv	o	x	v	v	o	o
	Supiori	vv	v	x	o	v	o	o
	Waropen	v	v	x	v	o	o	o
Yapen	v	v	x	v	v	o	o	

Pembagian Wilayah	Kabupaten/ Kota	Bahaya Geologi				Bahaya Iklim		
		Gempa Bumi	Tsunami	Gunung Api	Tanah Longsor	Badai Tropis	Banjir	Kekeringan
Pegunungan	Jayawijaya	v	x	x	vv	x	v	vv
Tengah	Lanny Jaya	v	x	x	o	x	o	v
Papua	Mamb. Tengah	v	x	x	o	x	v	o
	Nduga	v	x	x	o	x	o	o
	Paniai	v	x	x	v	x	v	o
	Peg. Bintang	v	x	x	vv	x	o	o
	Puncak	v	x	x	o	x	o	v
	Puncak Jaya	v	x	x	v	x	o	v
	Tolikara	v	x	x	o	x	o	vv
	Yahukimo	v	x	x	vv	x	v	vv
	Yalimo	v	x	x	o	x	o	o

Keterangan:

x = Tidak terjadi
o = Mungkin terjadi
v = Telah terjadi
vv = Sering terjadi

Sumber:

1. Katalog gempa bumi merusak, BADAN GEOLOGI (2006)
2. Atlas Nasional Indonesia, BAKOSURTANAL (2008)
3. Badan Kesatuan Bangsa Prov. Papua (2009)

2.1.2. Aspek Demografi

Berdasarkan hasil Sensus 2010 penduduk Papua berjumlah 2.833.381 jiwa atau rata-rata mengalami pertumbuhan 5,24% per tahun. Angka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) ini adalah yang tertinggi di Indonesia selama kurun waktu 2000-2010. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2009-2010 sebesar dari 2.097.482 jiwa dan meningkat menjadi 2,833,381 jiwa yang diakibatkan oleh migrasi. Keterbukaan informasi, tingginya potensi pemanfaatan sumber daya alam dan kesempatan berusaha menjadi salah satu faktor pemicu migrasi ke wilayah ini. Daerah dengan pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kabupaten Tolikara (12,59%) sedangkan yang paling rendah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang hanya sekitar 2,48 %.

Tabel II.6 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, dan Kepadatan Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Luas Wilayah	Kepadatan (org/km ²)
1.	Merauke	195.716	43.240.95	4,53
2.	Jayawijaya	196.085	27.649.45	7.09
3.	Jayapura	111.943	14.350.95	7.80
4.	Nabire	129.893	11.544.68	11.25
5.	Yapen Waropen	82.951	2.424.56	34.21
6.	Biak Numfor	126.798	1.965.05	64.53
7.	Paniai	153.432	11.479.21	22.30
8.	Puncak Jaya	101.148	5.329.30	18.98
9.	Mimika	182.001	22.903.78	7.95
10.	Boven Digoel	55.784	27.880.73	2.00
11.	Mappi	81.658	25.944.01	3.15
12.	Asmat	76.577	18.427.31	4.16
13.	Yahukimo	164.512	12.955.75	12.70
14.	Pegunungan Bintang	65.434	16.043.91	4.08
15.	Tolikara	114.427	5.176.42	22.11
16.	Sarmi	32.971	10.704.98	3.08
17.	Keerom	48.536	8.767.58	5.54
18.	Waropen	24.639	15.255.78	1.62

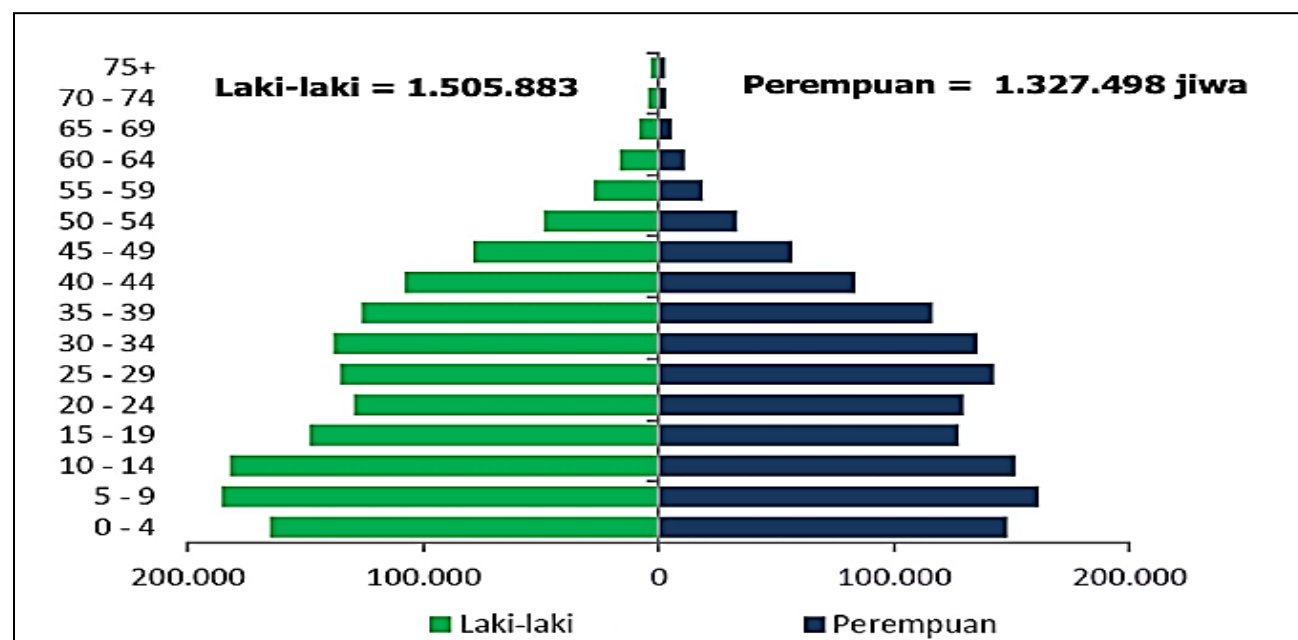
No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Luas Wilayah	Kepadatan (org/km ²)
19	Supiori	15.874	969.260	16.38
20	Mamberamo Raya	18.365	16.852.18	1.09
21	Nduga	79.053	4.748.97	16.65
22	Lanny Jaya	148.522	2.961.09	50.16
23	Mamberamo Tengah	39.537	9.100.01	4.34
24	Yalimo	50.763	36.739.30	1.38
25	Puncak	93.218	10.421.83	8.94
26	Dogiyai	84.230	5.258.67	16.02
27	Intan Jaya	40.490	-	-
28	Deiyai	62.119	-	-
29	Kota Jayapura	256.705	786.18	326.52
	Jumlah	2.833.381	756.882	3.74

Sumber : Papua Dalam Angka (2011)

Wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak adalah di Kota Jayapura sebanyak 9,56% diikuti oleh Kabupaten Merauke dan Kabupaten Jayawijaya dengan persentase yang hampir sama yaitu masing-masing sekitar 6,9%. Wilayah lain dengan jumlah penduduk tinggi adalah di Kabupaten Yahukimo, Mimika, Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Paniai, Puncak Jaya, Tolikara, dan Lanny Jaya. Sedangkan sisanya rata-rata berpenduduk kurang dari 100.000 jiwa. Sebaran penduduk rata-rata 8,9 jiwa per km² dengan kepadatan tertinggi di Kota Jayapura 326 jiwa per km².

Kondisi di atas menunjukkan terjadinya ketidak seimbangan antara pertambahan jumlah penduduk dengan ketersediaan fasilitas kesejahteraan sehingga menyebabkan indikator kesejahteraan penduduk selama 30 tahun belakangan ini hanya meningkat tipis. Kemampuan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat yang mempengaruhi kualitas SDM ke depan seperti pendidikan, kesehatan, dan akses pada sarana dan prasarana kebutuhan hidup dasar. Jika pemerintah gagal membangun penduduk menjadi SDM yang bermutu maka justru akan menjadi beban pembangunan yang sangat berat, namun sebaliknya, jika mampu membangun SDM yang handal maka akan menjadi bonus pembangunan di masa depan.

Gambar II.3 Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010



Sumber : Papua Dalam Angka (2011)

Data piramida penduduk (Gambar II.3) menunjukkan komposisi penduduk usia 0 – 14 tahun masih lebih banyak dibandingkan usia 14 tahun ke atas, yang mengindikasikan telah terjadi tingginya angka kelahiran bayi, dan tingginya angka kematian ketika memasuki usia tua, terutama di atas 60 tahun. Rasio ketergantungan penduduk cukup tinggi yaitu 48,3%, artinya setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 48 jiwa tidak produktif sehingga pendapatan keluarga banyak yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Dari penduduk Papua pada tahun 2009 yang berjumlah sekitar 2,9 juta jiwa, sebagian besar (77%) tinggal di perdesaan sedangkan 33% sisanya tinggal di perkotaan. Lebih lanjut, dari jumlah penduduk Papua, 37,53% merupakan penduduk miskin dengan rata-rata garis kemiskinan mencapai Rp 282.776,-/kapita/bulan, di mana 96% penduduk miskin tinggal di perdesaan dan 4% sisanya di perkotaan. Pembangunan masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas penduduk Papua harus menjadi agenda utama pembangunan.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

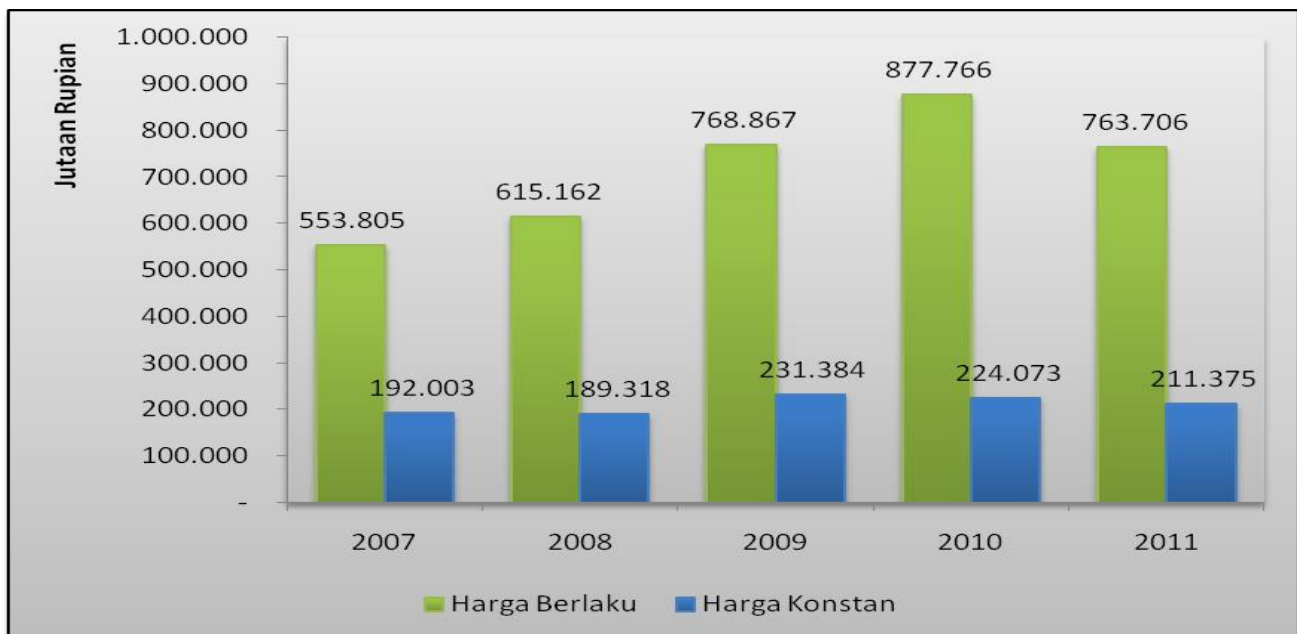
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan perkembangan hasil pembangunan ditinjau dari sisi ukuran kesejahteraan ekonomi dan sosial, serta seni dan olahraga.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemertaan Ekonomi

a. PDRB (Product Domestic Regional Bruto)

PDRB (*Product Domestic Regional Bruto*) Provinsi Papua pada tahun 2011 dengan tambang diestimasi berdasarkan harga berlaku sebesar Rp 76,37 Triliun dan berdasarkan harga konstan 2000 sebesar 21,13 Triliun rupiah. Perbedaan nilai PDRB dengan tambang dan tanpa tambang baik pada harga konstan tahun 2000 dan harga berlaku, dan menunjukkan tingginya ketergantungan Papua pada sektor ekstraktif sebagai sumber penerimaan utama bagi Provinsi Papua. Pertumbuhan PDRB dengan tambang yang tidak konsisten pada kedua jenis harga, tetapi dengan kecenderungan konsisten menurun terhadap PDRB. Untuk itu perlu digali sumber-sumber penerimaan yang baru yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan maupun dari kegiatan ekonomi lainnya yang tidak bersifat ekstraktif sumber daya alam.

Grafik II.2 PDRB Provinsi Papua 2007-2011



Trend pertumbuhan PDRB Harga Berlaku di Papua dari tahun 2007 – 2011 mengalami fluktuasi, pada tahun 2010 nilai PDRB mencapai 800 miliar lebih, dan ditahun 2011 mengalami penurunan menjadi 700 miliar lebih.

Tabel II.7 Persentase Kontribusi PDRB Sektor Provinsi Papua Dengan Tambang Tahun 2007-2011

Dengan Tambang

No.	LAPANGAN USAHA	Harga Berlaku					Harga Konstan				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	10,01	10,32	9,53	9,32	11,71	17,01	18,06	15,40	16,55	18,18
2.	Pertambangan	68,72	64,73	65,79	64,35	52,46	51,58	45,29	49,68	42,29	33,18
3.	Industri Pengolahan	1,62	1,62	1,42	1,41	1,86	2,48	2,56	2,23	2,49	2,85
4.	Listrik dan Air Bersih	0,16	0,16	0,14	0,14	0,17	0,23	0,24	0,21	0,23	0,26
5.	Bangunan	4,66	6,01	6,12	7,24	10,66	6,34	7,67	7,21	9,11	11,25
6.	Perdagangan	4,44	4,87	4,48	4,49	5,94	6,39	7,19	6,56	7,49	8,71
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,05	4,52	4,36	4,43	5,76	6,10	7,10	6,64	7,80	9,04
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa	1,48	1,77	2,17	2,12	2,74	2,30	2,72	3,22	3,54	4,06
9.	Jasa-jasa	4,86	6,00	5,98	6,50	8,69	7,57	9,16	8,84	10,51	12,48
	(P D R B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

PDRB Papua pada tahun 2010 tanpa tambang didominasi oleh sektor pertanian yang mencapai 24,38% dan menurun dari 30% ditahun 2007. Penurunan kontribusi sektor pertanian ini harus mendapatkan perhatian khusus karena merupakan kegiatan perekonomian utama (70%)di Papua. Penurunan ini harus dilihat pula dari aspek sosial, karena telah terjadi revolusi perubahan konsumsi karbohidrat utama masyarakat Papua dari sagu dan ubi-ubian ke beras yang bukan produk lokal (*eksternal supply*).

Tabel II.8 Persentase Kontribusi PDRB Sektor Provinsi Papua Tanpa Tambang Tahun 2007-2011

Tanpa Tambang

No.	LAPANGAN USAHA	Harga Berlaku					Harga Konstan				
		2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	32,00	29,26	27,85	26,13	24,64	35,13	33,01	30,61	28,67	27,21
2.	Pertambangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Industri Pengolahan	5,18	4,59	4,15	3,96	3,92	5,13	4,69	4,43	4,32	4,26
4.	Listrik dan Air Bersih	0,52	0,45	0,42	0,38	0,36	0,48	0,44	0,42	0,40	0,38
5.	Bangunan	14,89	17,03	17,89	20,32	22,42	13,09	14,02	14,33	15,78	16,84
6.	Perdagangan	14,20	13,80	13,11	12,60	12,50	13,20	13,14	13,04	12,97	13,03
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	12,95	12,83	12,73	12,43	12,11	12,59	12,98	13,20	13,51	13,52
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa	4,73	5,01	6,35	5,94	5,77	4,75	4,98	6,40	6,13	6,08
9.	Jasa-jasa	15,53	17,02	17,49	18,23	18,28	15,63	16,74	17,58	18,21	18,68
	(P D R B)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

Perubahan pola konsumsi ini mendorong penurunan kebutuhan pasar lokal (*demand*) atas bahan pangan lokal yang tergantikan beras sehingga masyarakat (petani) menurunkan *supply* nya. Dampaknya, Papua saat ini telah memasuki kerentanan pangan akibat ketergantungan yang besar pada pangan luar. Hal ini juga cenderung terjadi pada berbagai jenis pangan lain seperti daging dan ikan. Jika tidak diantisipasi, dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi tidak mungkin mendorong terjadinya kerawanan sosial. Hingga tahun 2011, pertumbuhan ekonomi Papua berdasar ADH kontran mengalami kontraksi sebesar -5,67 persen dimana setahun sebelumnya juga turun -3,16 persen. Pertumbuhan negatif juga terjadi pada tahun 2008 (-1,40 persen). Sementara dengan mengeliminir nilai tambah sub sektor pertambangan tanpa migas, pertumbuhan ekonomi Papua lebih stabil. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2009 (12,38 persen) dan yang terendah pada tahun 2007 (8,77 persen). Sedangkan pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang sebesar 9,27 persen.

Tabel II.9 Nilai PDRB Sektoral Provinsi Papua Menurut Harga Berlaku Tahun 2007-2011

No.	LAPANGAN USAHA	Harga Berlaku				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	5.544.526	6.349.117	7.324.831	8.177.698	8.946.428
2.	Pertambangan	38.056.447	39.820.882	50.587.068	56.484.335	40.067.808
3.	Industri Pengolahan	896.875	996.533	1.091.227	1.239.178	1.421.574
4.	Listrik dan Air Bersih	89.277	97.926	109.227	119.917	129.435
5.	Bangunan	2.579.329	3.695.789	4.706.277	6.359.197	8.139.832
6.	Perdagangan	2.460.000	2.993.356	3.447.701	3.943.339	4.538.793
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2.244.086	2.782.868	3.348.771	3.890.630	4.397.800
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa	820.177	1.086.379	1.670.981	1.858.564	2.092.983
9.	Jasa-jasa	2.689.736	3.693.389	4.600.595	5.703.719	6.635.964
(P D R B)		55.380.453	61.516.238	76.886.679	87.776.577	76.370.616

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

Nilai PDRB Papua jika dilihat berdasarkan Harga berlaku ditahun 2007 sampai dengan 2011 terus mengalami kenaikan, meski ditahun 2011 terjadi penurunan dari 87 miliar rupiah menjadi 76 miliar rupiah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi di Papua mengalami pertumbuhan yang sedikit menurun, akan tetapi jika dilihat secara rinci per komponen PDRB terlihat jelas bahwa penurunan PDRB yang terjadi hanya ada pada sektor Pertambangan, untuk itu jika ingin melihat secara riil pertumbuhan ekonomi di Papua alangkah baiknya menggunakan nilai PDRB tanpa tambang, sebab penggerak ekonomi terbesar di Papua berasal bukan dari sektor Pertambangan melainkan sektor-sektor lain seperti Pertanian dan Bangunan.

Tabel II.10 Nilai PDRB Sektoral Provinsi Papua Menurut Harga Konstan Tahun 2007-2011

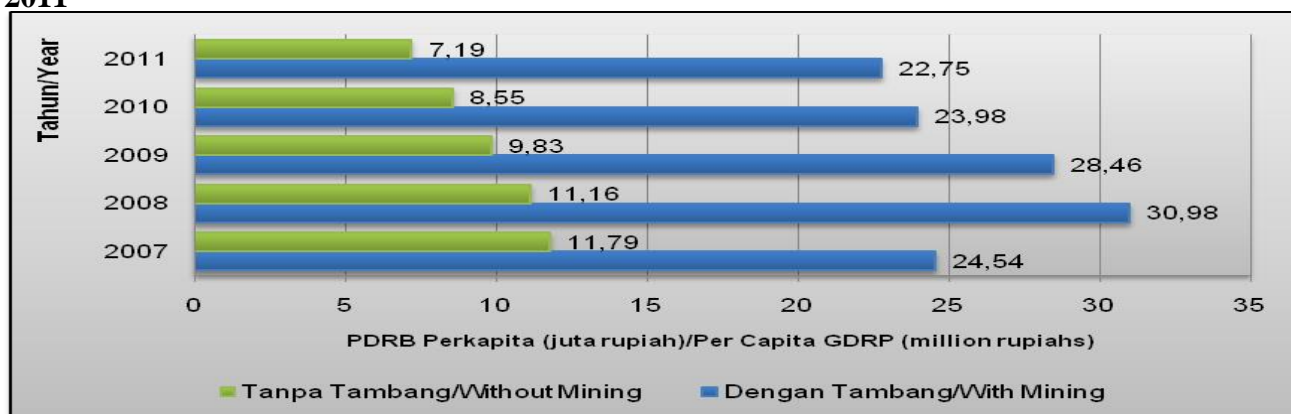
No.	LAPANGAN USAHA	Harga Konstan				
		2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pertanian	3.265.898	3.419.070	3.563.404	3.707.520	3.842.414
2.	Pertambangan	9.903.030	8.574.105	11.495.767	9.475.035	7.014.070
3.	Industri Pengolahan	476.966	485.599	515.784	558.797	601.471
4.	Listrik dan Air Bersih	44.284	45.990	48.651	51.569	54.159
5.	Bangunan	1.216.807	1.452.253	1.668.187	2.041.293	2.378.490
6.	Perdagangan	1.227.526	1.360.778	1.518.245	1.677.490	1.840.838
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	1.170.528	1.344.367	1.536.705	1.747.416	1.910.113
8.	Keuangan, Sewa, dan Jasa	441.792	515.545	745.120	792.777	858.343
9.	Jasa-jasa	1.453.465	1.734.136	2.046.580	2.355.386	2.637.638
(P D R B)		19.200.297	18.931.842	23.138.444	22.407.284	21.137.538

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

Dari data PDRB berdasarkan penggunaan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Papua pada tahun 2010 masih digerakkan oleh konsumsi masyarakat di mana dari tahun ke tahun persentasenya meningkat yaitu dari 35,78% pada tahun 2006 menjadi 43,42% pada tahun 2010. PDRB penggunaan berdasarkan harga konstan akan tampak bahwa kegiatan ekonomi di bidang ekspor-impor di Papua sangat fluktuatif dan dengan devisa sangat tinggi dari Rp 2,2 triliun pada tahun 2008 menjadi Rp 5 triliun pada tahun 2010, meskipun sempat mengalami perbaikan pada tahun 2009 yaitu mengalami minus Rp 1,1 triliun. Sebagian besar nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi di Papua tahun 2011 digunakan untuk konsumsi rumah tangga (54,86 persen pada tahun 2011). Disusul untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi fisik 36,38 persen, konsumsi pemerintah 27,03 persen dan net ekspor 26 persen. Pada tahun 2011 konsumsi rumah tangga tumbuh 6,55 persen daritahun sebelumnya. Tidak jauh berbeda, komponen konsumsi pemerintah dan PMTB tumbuh 9,21 persen dan 7,92persen. Sementara itu, di tahun yang sama nilai ekspor mengalami penurunanyang signifikan yakni sebesar -30,11persen. Kondisi ini menegaskan kembali bahwa tingkat ketergantungan Papua terhadap produk dan jasa dari luar sangat tinggi, dan pertumbuhan sektor riil di Papua yang cenderung konsisten pada angka sangat rendah.

Pada tahun 2009, PDRB per kapita tertinggi terdapat di Kabupaten Mimika, Boven Digoel, Kota Jayapura dan Supiori yaitu masing-masing sebesar Rp 295,51 juta, Rp 37,31 juta dan Rp 26,57 juta,serta Rp 26,49 juta.Tingginya PDRB perkapita Mimika disebabkan tingginya produksi PT Freeport di sektor pertambangan yang menyumbang sekitar 60 persen dari PDRB Papua. Jika hasil sektor pertambangan dihilangkan, PDRB perkapita Mimika hanya Rp 14,24 juta. PRDB perkapita terkecil adalah Kabupaten Yahukimo yang hanya mencapai Rp. 1,55 juta.

Grafik II.3 PDRB Perkapita dengan Tambang dan Tanpa Tambang(juta Rupiah)Tahun 2007-2011



Sumber : PDRB Provinsi Papua, 2012

Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, distribusi pendapatan Provinsi Papua cenderung tidak mengalami perbaikan selama 5 tahun terakhir (2006-2010). Sepanjang periode ini 40 persen rumah tangga yang tergolong berpendapatan rendah setiap tahunnya rata-rata memperoleh bagian pendapatan per kapita hanya sekitar 16,74 persen, sedangkan untuk 20 persen rumah tangga yang berpendapatan tinggi memperoleh pembagian yang sangat besar dengan rata-rata per tahun sekitar 45,31 persen. Kondisi tersebut menandakan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Papua mengalami ketimpangan sedang (*moderate inequality*). Namun, bila menggunakan indikator angka Rasio Gini, sepanjang tahun 2005-2010 Rasio Gini berada pada rata-rata 0,36 yang berarti termasuk dalam kategori ketimpangan rendah.

b. Laju Inflasi Daerah

Laju inflasi digambarkan oleh BPS Papua dalam Papua dalam Angka 2012 dengan kondisi inflasi di Kota Jayapura tahun 2011. Paket komoditas Kota Jayapura naik dari 318 komoditas menjadi 352 komoditas.Kota Jayapura pada tahun 2011 mengalami inflasi sebesar 3,40 persen lebih rendah dibanding Nasional sebesar 3,79 persen.Inflasi yang terjadi di Kota Jayapura disebabkan adanya kenaikan indeks dari 122,80 pada bulan Desember 2010 menjadi 126,97 pada bulan Desember 2011.

Tabel II.11 Laju Inflasi di Provinsi Papua Tahun 2007-2011

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata pertumbuhan
Inflasi	10,35	12,55	1,92	4,48	3,40	6,54

Sumber : Papua Dalam Angka (2007-2012)

Kelompok Bahan Makanan yang memberikan andil terbesar terjadinya inflasi di Kota Jayapura Tahun 2010 yakni sebesar 1,64 persen disusul kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,53 persen; kelompok Sandang sebesar 0,44 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,43 persen; Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,32 persen; Sedangkan kelompok lainnya memberikan andil yang tidak terlalu besar yaitu: kelompok kesehatan sebesar dan kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga masing-masing sebesar 0,02 persen.

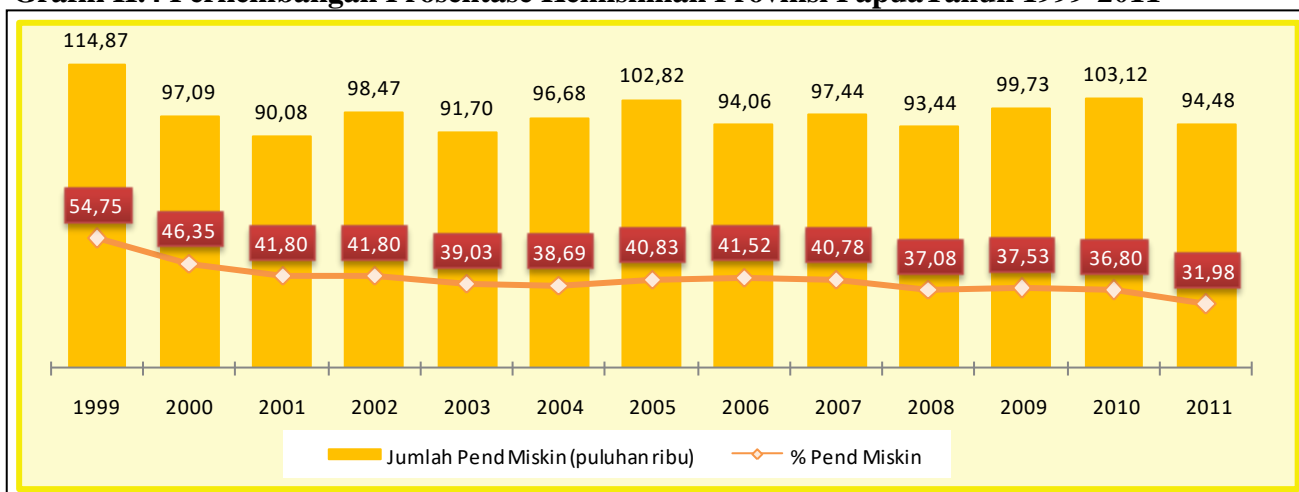
c. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang paling mendesak dan selalu menjadi prioritas untuk ditanggulangi, mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan, misalnya dapat mengurangi produktifitas, memperbesar konflik multidimensi, meningkatkan eksploitasi sumber daya yang berlebihan, dan sebagainya. Oleh karena itu, seberapa besar pun jumlahnya, selama masih ada penduduk yang dikategorikan miskin, pemerintah provinsi telah berkomitmen untuk mengentaskannya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Papua ketika dihadapkan dengan kondisi bahwa kebanyakan jumlah penduduk miskin berada di daerah-daerah pegunungan dan pedalaman yang sangat sulit di jangkau dari pusat ibu kota, menjadikan terisolasinya penduduk darijangkauan pasar, informasi dan teknologi.

Jika dilihat capaian selama 10 Tahun terakhir dimana tingkat kemiskinan menurun hingga 17,95%. Papua harus optimis target tersebut dapat tercapai meskipun harus bekerja dua kali lebih keras dari sepuluh Tahun terakhir.

Pada Tahun 2011 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 31,98%. Namun demikian persentase penduduk miskin di Provinsi Papua masih lebih tinggi dari rata-rata Nasional, yaitu sebesar 14,15%. Kondisi tersebut menempatkan Papua pada peringkat ke-33 dari 33 Provinsi di Indonesia. Kecenderungan proporsi penduduk miskin di Papua dari Tahun 1999–2010 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik II.4 Perkembangan Prosentase Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 1999-2011

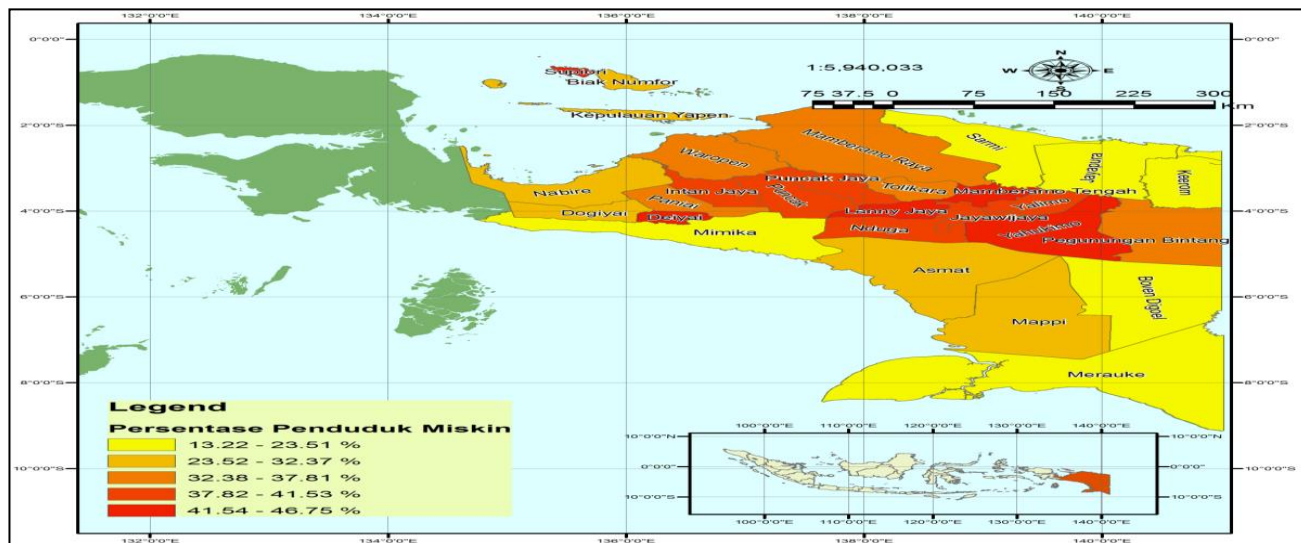


Sumber: BPS Provinsi Papua (2011)

Namun apabila melihat peta kemiskinan di bawah ini, meskipun prosentase kemiskinan Papua mengalami penurunan, tapi nampak ketimpangan wilayah masih sangat tinggi khususnya di daerah atau kabupaten pegunungan.

Dari grafik di dibawah dapat dilihat bahwa konsentrasi kemiskinan lebih banyak di daerah pegunungan tengah dan wilayah kota. Tingginya kemiskinan di wilayah pegunungan tengah tidak terlepas dari rendahnya ketersediaan infrastruktur dan rendahnya akses pasar di wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan kemiskinan di wilayah perkotaan disebabkan oleh tingginya arus migrasi yang tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan kerja di daerah perkotaan di daerah perkotaan yang disebabkan masih terkonsentrasinya pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan. Kesenjangan antar-wilayah di Provinsi Papua terlihat dalam hal angka kemiskinan. Ketimpangan tersebut terjadi baik antara daerah pegunungan tengah yang terisolir dan daerah yang berdekatan dengan pantai maupun antara daerah perkotaan dan perdesaan. Menurut hasil Susenas tahun 2010, persentase penduduk miskin di wilayah dekat pantai lebih kecil (kurang dari 40%) bila dibandingkan dengan 14 kabupaten di wilayah pegunungan tengah yang masing-masing dihuni lebih dari 40% penduduk miskin.

Gambar II.4 Peta Kemiskinan Tahun 2011



Tabel II.12 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Tipe Daerah di Indonesia dan Papua Tahun 2010-2011

Tingkat Kemiskinan (%)	Papua			Indonesia		
	2010	2011	Perubahan	2010	2011	Perubahan
Perkotaan	5,55	4,60	-0,95	9,87	9,23	-0,64
Perdesaan	46,02	41,58	-4,45	16,56	15,72	-0,84
Jumlah	36,80	31,98	-4,81	13,33	12,49	-0,84
Kesenjangan Kota-Desa	40,48	36,98	-	6,69	6,49	-

Sumber: BPS, 2011 (Kondisi Maret)

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat di perdesaan sangat bergantung pada alam. Selain mencari ikan di laut, menokok sagu, mereka terbiasa berburu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahan makanan yang mereka peroleh tidak dapat diperjualbelikan, karena tidak tersedianya pasar sebagai tempat jual beli barang. Alhasil mereka hanya mengonsumsi makanan yang diperoleh dengan jenis makanan kurang bervariasi dan kemungkinan memiliki kandungan gizi rendah.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Prestasi pembangunan kesejahteraan sosial suatu wilayah telah banyak menggunakan ukuran non ekonomi. Salah satu pendekatan nonekonomi yang lazim digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Dalam prakteknya ada 4 komponen pokok yang digunakan untuk mengukur besarnya angka IPM, yaitu (1) angka harapan hidup, (2) angka melek huruf, (3) rata-rata lama sekolah, dan (4) angka pengeluaran riil perkapita.

Jika diamati selama tahun 2004-2011, pencapaian angka IPM di Provinsi Papua selalu mengalami pertumbuhan yang positif, lihat Tabel 2.13. Pada tahun 2004 misalkan, angka IPM Provinsi Papua mencapai 60,90. Selanjutnya di tahun 2006 mengalami peningkatan yang cukup berarti yakni sebanyak 1,18 poin sehingga angka IPM bergerak naik menjadi 62,08. Peningkatan ini terus berlanjut, hingga pada tahun 2011, angka IPM Papua telah mencapai 65,36 walaupun mengalami kecenderungan mengecil. Capaian IPM ini menurut konsep pembangunan manusia yang dikembangkan oleh UNDP masuk dalam kategori menengah bawah yaitu capaian IPM antara 50,0 – 65,9.

Tabel II.13 Perbandingan IPM Papua dengan Provinsi Lainnya di Indonesia

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Urutan 10 Besar Teratas								
01. DKI Jakarta	75.80	76.07	76.33	76.59	77.03	77.36	77.60	77.97
02. Sulawesi Utara	73.40	74.21	74.37	74.68	75.16	75.68	76.09	76.54
03. Riau	72.20	73.63	73.81	74.63	75.09	75.60	76.07	76.53
04. Yogyakarta	72.90	73.50	73.70	74.15	74.88	75.23	75.77	76.32
05. Kaltim	72.20	72.94	73.26	73.77	74.52	75.11	75.56	76.22
06. Kepulauan Rian	70.80	72.23	72.79	73.68	74.18	74.54	75.07	75.78
07. Kalteng	71.70	73.22	73.40	73.49	73.88	74.36	74.64	75.06
08. Sumatera Utara	71.40	72.03	72.46	72.78	73.29	73.80	74.19	74.65
09. Sumatera Barat	70.50	71.19	71.65	72.23	72.96	73.44	73.78	74.28
10. Sumatera Selatan	69.60	70.23	71.09	71.40	72.05	72.61	72.95	73.42
Urutan 5 Terbawah								
29. Papua Barat	63.70	64.83	66.08	67.28	67.95	68.58	69.15	69.65
30. Maluku Utara	66.40	66.95	67.51	67.82	68.18	68.63	69.03	69.47
31. NTT	62.70	63.59	64.83	65.36	66.15	66.60	67.26	67.75
32. NTB	60.60	62.42	63.04	63.71	64.12	64.66	65.20	66.23
33. Papua	60.90	62.08	62.75	63.41	64.00	64.53	64.94	65.36
Indonesia (BPS)	68.70	69.57	70.10	70.59	71.17	71.76	72.27	72.77

Sumber : BPS Indonesia

Membandingkan perkembangan antarprovinsi di Indonesia sepanjang tahun 2004-2011, bisa disimpulkan bahwa IPM Provinsi Papua meningkatrelatif cepat, dengan pertumbuhan diatas rata-rata nasional.

Rata-rata nasional, capaian IPM untuk periode 2004-2011 mengalami pertumbuhan 0,83% pertahun atau rata-rata meningkat 0,64 point. Sedangkan capaian IPM Papua untuk kurun waktu yang sama, mengalami kenaikan yang lebih tinggi meskipunkemudian cenderung mengecil. Dari tahun 2004-2005, misalnya, capaian IPM Papua mengalami peningkatan sebesar 1,18 point (1,94%), kemudian melambat pada tahun 2010-2011menjadi sebesar 0,42 point (0,65%).

Bila dibandingkan dengan perkembangan IPM di beberapa daerah lain, angka IPM Provinsi Papua terlihat paling rendah. Dengan kata lain kualitas pembangunan manusia yang berhasil diciptakan oleh Pemerintah Papua selama ini masih rendah dibandingkan misalnya dengan Maluku Utara, NTT, NTB. Keenam provinsi ini memiliki angka IPM rata-rata di atas 67,00. Bahkan dengan daerah pemekarannya sendiri yakni Papua Barat, kualitas pembangunan manusia Papua masih terbilang lebih rendah. Provinsi Papua Barat setiap tahunnya mampu mencetak angka IPM rata-rata sebesar 67,00. Seluruh fakta tersebut mengindikasikan bahwa sumber daya perencanaan dan penganggaran yang disediakan selama ini belum dapat dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal oleh Pemerintah Provinsi Papua dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan manusia, meskipun sebenarnya sudah *on the righth track*. Misalkan dalam hal bidang pendidikan yang direpresentasikan melalui komponen melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Berbagai hambatan peningkatan mutu sumber daya manusia di wilayah Papua, adalah terbatasnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang berkualitas, belum meratanya penyebaran tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dan terbatasnya prasarana dan sarana transportasi serta kemiskinan yang masih sangat tinggi dan besarnya senjangan sosial-ekonomi antar penduduk.

Tabel II.14 Kecenderungan Komponen-Komponen IPMTahun 2006-2011

Tahun	Harapan Hidup (Tahun)	Angka Melek Huruf (Persen)	Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rp)	IPM Provinsi
2006	67,60	75,41	6,30	589,30	62,75
2007	67,90	75,41	6,52	593,42	63,41
2008	68,10	75,41	6,52	599,65	64,00
2009	68,35	75,58	6,57	603,88	64,53
2010	68,60	75,60	6,66	606,38	64,94
2011	68,85	75,81	6,69	609,18	65,36

Sumber : Indikator Penting, BPS Provinsi Papua, 2011 sampai 2012

Sepanjang tahun 2006-2011, tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua paling rendah di seluruh Indonesia. Perkembangannya setiap tahun juga menunjukkan tidak ada perubahan yang berarti, cenderung stagnan. Sebagai misal diantara tahun 2006 - 2011 persentase melek huruf penduduk di Provinsi Papua mengalami perkembangan yang stagnan sebesar 75,81 persen setiap tahun. Begitu juga dengan lama sekolah dapat dikatakan juga berkembang stagnan, dimana selama tahun 2006 hingga 2008 tidak mengalami penambahan, selalu 6,5 tahun. Terjadi kenaikan ditahun 2011 menjadi 6,69 tapi kenaikannya hanya 0,1 persen. Baik melek huruf maupun rata-rata lama sekolah di Papua ini terpaut sangat jauh bila dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan. Di Indonesia rata-rata melek huruf penduduk 15 tahun ke atas adalah 92,4 persen, sedangkan rata-rata lama sekolah adalah 7,6 tahun.

Selain IPM yang rendah, terjadinya ketimpangan pencapaian IPM antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua juga merupakan masalah yang krusial untuk dipecahkan. Oleh karena adanya ketimpangan IPM sekaligus juga menandakan terjadinya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hal ini berdampak buruk bagi proses pembangunan yang berkelanjutan di Papua. Ketimpangan IPM antar wilayah dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya yang berlebihan yang pada akhirnya menimbulkan pemborosan atau inefisiensi dalam memanfaatkan anggaran belanja pembangunan. Untuk itu penting sekali bagi Papua untuk mengurangi ketimpangan IPM yang terjadi, terutama sekali ketimpangan IPM antara daerah-daerah di pegunungan dan pedalaman dengan pesisir dan dataran rendah.

Tabel II.15 Perbandingan IPM Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Tahun 2006-2011

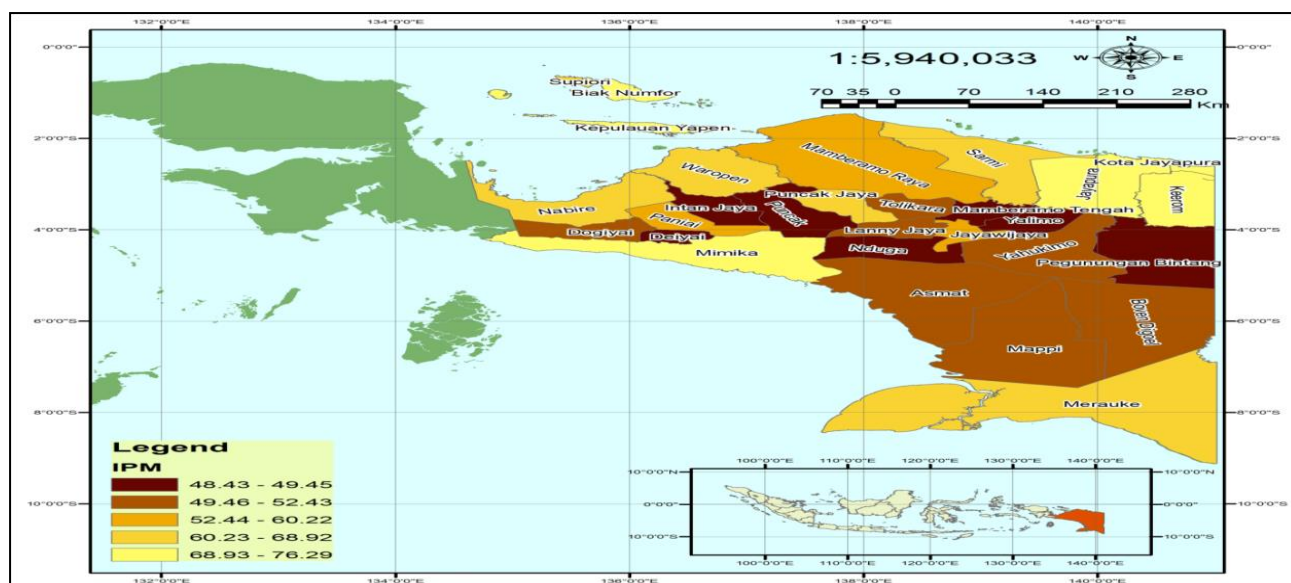
No	Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Merauke	62,50	64,03	64,44	64,77	65,73	66,19
2.	Jayawijaya	52,40	52,97	54,72	55,09	56,24	56,60
3.	Jayapura	68,80	69,97	71,02	71,66	72,25	72,75
4.	Nabire	65,20	65,60	66,10	66,54	66,81	67,33
5.	Kepulauan Yapen	67,00	68,06	68,68	69,13	69,69	70,19
6.	Biak Numfor	67,30	68,55	68,99	69,35	69,95	70,33
7.	Paniai	58,50	58,74	59,17	59,53	59,90	60,22
8.	Puncak Jaya	67,00	67,20	67,78	68,21	68,27	68,34
9.	Mimika	67,10	67,84	67,99	68,49	69,09	69,68
10.	Boven Digoel	48,30	48,65	49,20	49,56	50,21	50,64
11.	Mappi	48,00	49,04	49,59	49,88	50,45	50,83
12.	Asmat	48,30	49,53	50,27	50,86	51,55	51,92
13.	Yahukimo	48,00	48,31	48,85	49,22	49,59	50,30
14.	Pegunungan Bintang	47,20	47,38	47,94	48,54	48,99	49,45
15.	Tolikara	49,60	50,38	50,85	51,48	52,00	52,43
16.	Sarmi	65,20	65,90	66,35	66,65	66,84	67,15
17.	Keerom	66,90	67,99	68,55	68,89	69,26	69,64
18.	Waropen	61,60	61,97	62,46	62,85	63,27	63,71
19.	Supiori	66,20	66,92	67,55	68,06	68,46	68,92
20.	Mamberamo Raya	-	-	-	58,57	59,39	59,86

No	Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011
21.	Nduga	-	-	-	47,74	48,02	48.43
22.	Lanny Jaya	-	-	-	48,57	49,90	50.20
23.	Mamberamo Tengah	-	-	-	48,18	48,96	49.32
24.	Yalimo	-	-	-	48,16	48,55	48.90
25.	Puncak	-	-	-	48,71	49.00	49.35
26.	Dogiyai	-	-	-	49,23	50,03	50.49
27.	Intan Jaya	-	-	-	47,94	48,42	48.74
28.	Deiyai	-	-	-	48,02	48,57	49.31
29.	Kota Jayapura	73,10	73,84	74,56	75,16	75,76	76.29
Papua		70,10	70,80	71,70	64,53	64,94	65,36

Sumber : BPS Papua (2012)

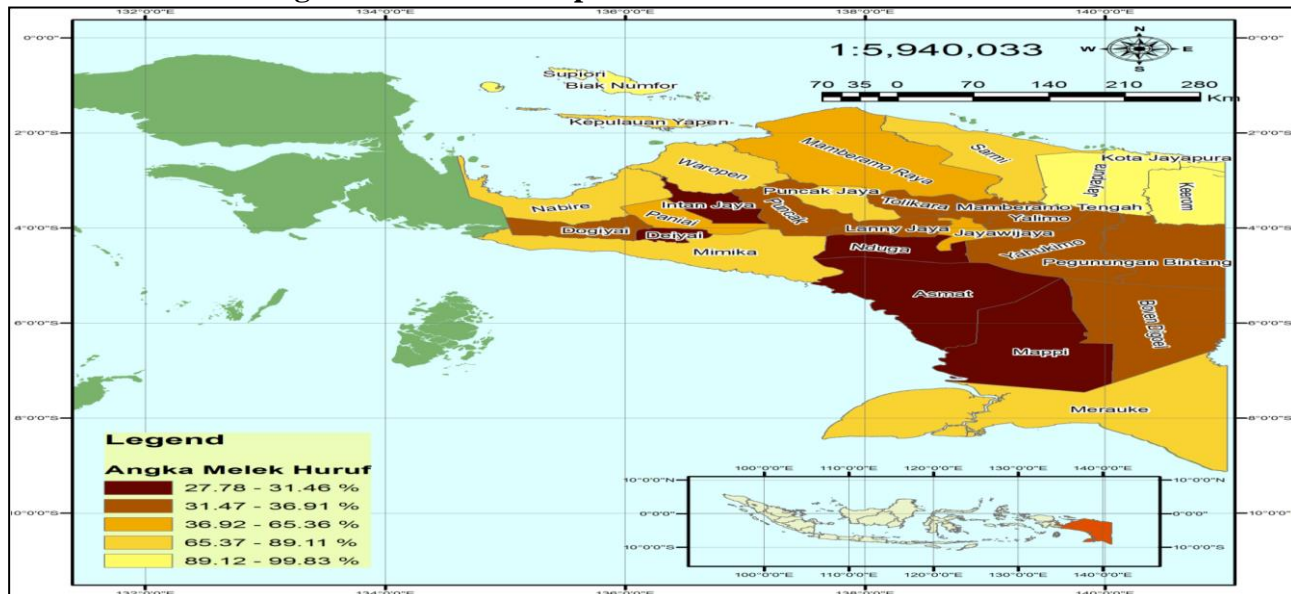
Ketika membandingkan IPM untuk kabupaten dan kota di Provinsi Papua dengan rata-rata nasional, terjadi peningkatan agregasi IPM secara tetap. Namun, jumlah kabupaten kota yang setara atau lebih tinggi dari rata-rata nasional hanya 2-3 kabupaten/kota. Sejak tahun 2007 akibat terjadinya pemekaran, kabupaten yang berada di bawah rata-rata nasional telah meningkat dari 18 menjadi 27 kabupaten. Dengan munculnya Daerah Otonomi Baru (DOB) menyebabkan alokasi APBD banyak terserap untuk pembangunan infrastruktur kantor, jalan dan belanja pegawai, sedangkan alokasi APBD untuk sektor yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat mengecil.

Gambar II.5 Peta IPM Papua Tahun 2011



Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan antar wilayah yang sangat mencolok tampaknya menjadi *trigger* terjadinya ketimpangan pembangunan manusia tersebut. Sebagai indikatornya dapat diperhatikan pada kesenjangan yang sangat lebar dalam bidang pendidikan yang diwakili oleh tingkat melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Semua kabupaten yang berada di daerah pegunungan dan pedalaman seperti Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Puncak, Lanny Jaya, Dogiyai, Nduga, dan lain-lain, rata-rata memiliki tingkat melek huruf hanya 40 persen dari total penduduk di atas usia 15 tahun, dengan rata-rata lama sekolah sekitar 3,5 tahun. Kondisi yang jauh berbeda dengan daerah-daerah yang terletak di pesisir dan dataran rendah seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika, Supiori, Keerom, Kepulauan Yapen, dan lain-lain, rata-rata memiliki tingkat melek huruf sebesar 90% dan lama sekolah sekitar 7,7 tahun. Jelas hal ini terjadi akibat ketidakmerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun informal diantara kedua wilayah tersebut, seperti jumlah guru, buku-buku pelajaran, gedung sekolah, perpustakaan, dan sebagainya.

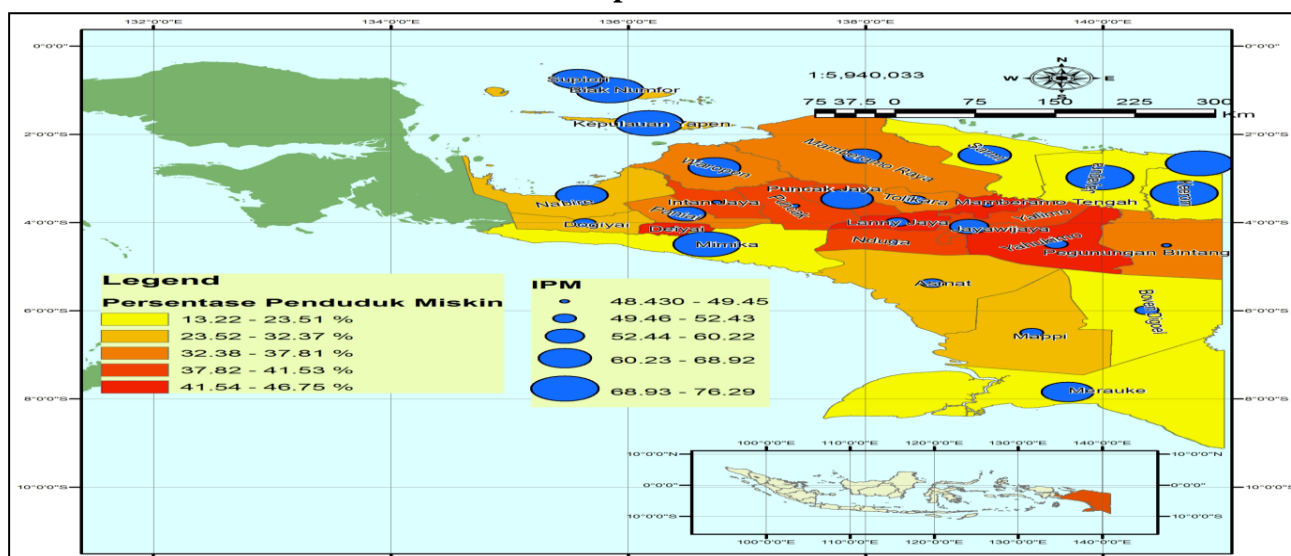
Gambar II.6 Peta Angka Melek Huruf Papua Tahun 2011



Sumber : BPS 2011

Lain halnya dengan aspek kesehatan yang terpantau pada komponen harapan hidup. Semua daerah kabupaten/kota baik itu di pegunungan dan pedalaman maupun pesisir dan dataran rendah mempunyai harapan hidup yang relatif sama yaitu diantara 62 tahun paling rendah di Merauke dan 69.6 tahun paling tinggi di Mimika.

Gambar II.7 Peta IPM dan AHH Provinsi Papua tahun 2011

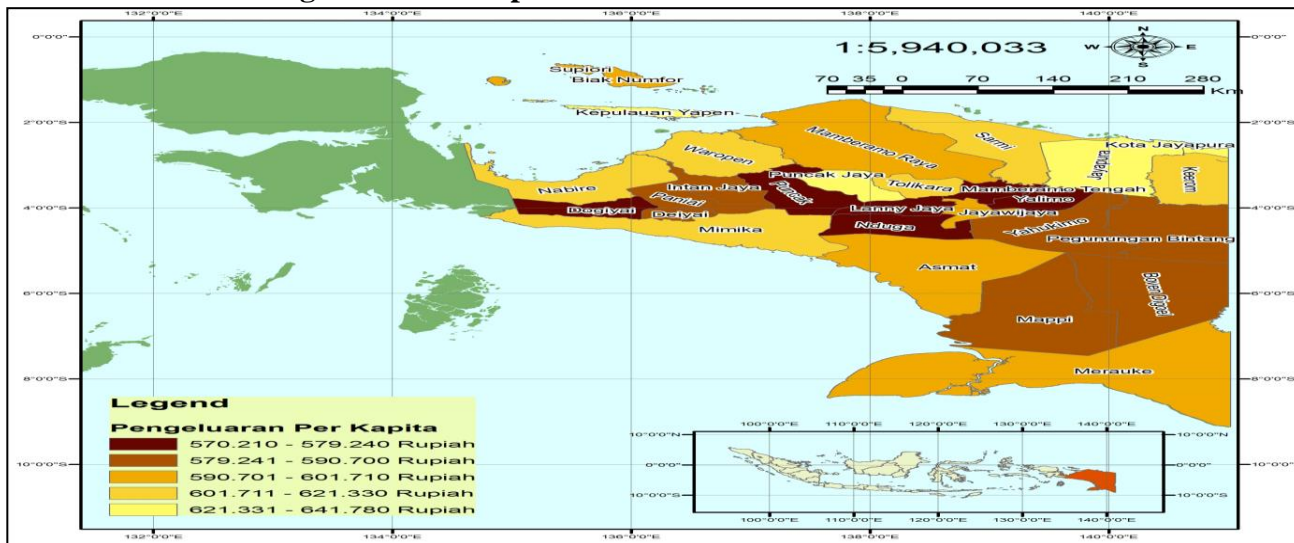


Sumber : BPS 2011

Begitu juga dengan aspek ekonomi, seperti yang tergambar pada komponen pendapatan per kapita, relatif merata. Meski pun di sebagian besar daerah pesisir dan dataran rendah mempunyai pendapatan per kapita yang lebih tinggi dengan daerah pegunungan dan pedalaman namun perbedaannya tidak begitu jauh, kurang lebih deviasinya hanya 27 ribu rupiah.

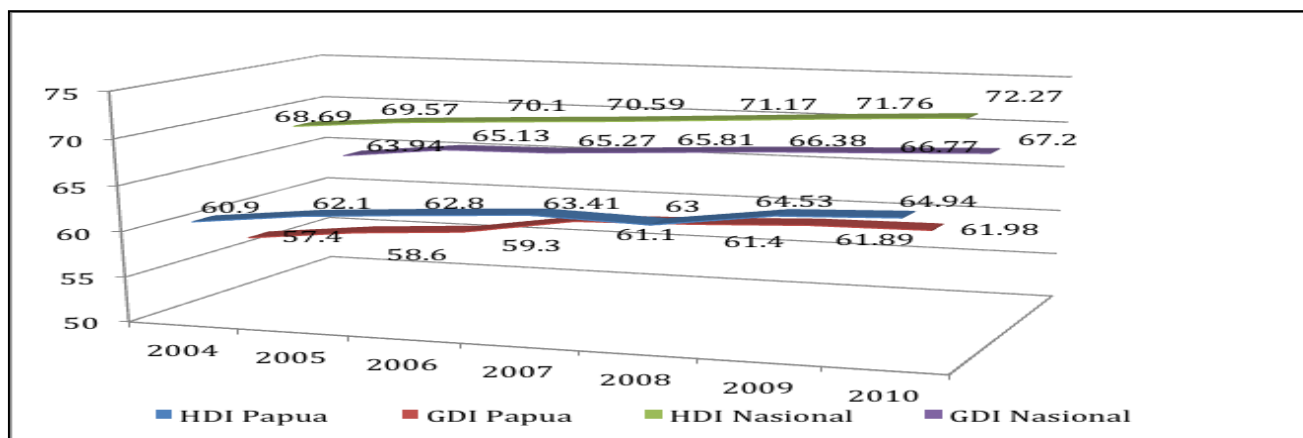
Meski dari tahun ke tahun terus meningkat, rata-rata IPG Provinsi Papua dengan nilai 61,98, berada jauh dibawah rata-rata nasional, yaitu 67,20 pada tahun 2010. Hal yang sama berlaku pula terhadap IPG kabupaten dan kota. Analisis nilai IPG di setiap kabupaten di Provinsi Papua menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun ke tahun, dengan sebuah pengecualian yaitu Kabupaten Torikara yang mengalami sedikit penurunan nilai dari 51,50 pada tahun 2007, menjadi 50,84 pada tahun 2008, untuk kemudian meningkat lagi menjadi 51,80 pada tahun 2010.

Gambar II.8 Peta Pengeluaran Perkapita Tahun 2011



Selain IPM, kualitas pembangunan manusia dapat juga diukur dengan menggunakan *Gender Development Index* (GDI). GDI merupakan indikasi dari standar hidup di sebuah negara, yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indikator ini adalah salah satu dari lima indikator yang digunakan oleh UNDP dalam Laporan tahunan Pembangunan Manusia. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang-bidang tingkat harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Ketimpangan tersebut dapat juga ditelusuri dengan menghitung deviasi antara angka IPM dengan GDI, perhatikan Gambar II.9

Grafik II.5 Perbedaan Capaian IPM dan IPG antara Provinsi Papua dan Nasional 2004 – 2010



Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012 Provinsi Papua

Tingkat kesenjangan relatif gender di Provinsi Papua lebih kecil dibandingkan kesenjangan relatif gender secara nasional. Seperti yang divisualisasikan pada diatas, kesenjangan relatif gender di Provinsi Papua yang digambarkan melalui deviasi antara

IPM dan GDI selama tahun 2004-2007 rata-rata 4,3 poin per tahun, kemudian menurun drastis menjadi 2,6 poin di tahun 2008 dan naik kembali ditahun 2010 menjadi 2,96 poin. Sedangkan secara nasional kesenjangan antara IPM dan GDI rata-rata sebesar 5,3 poin per tahun selama tahun 2004-2011. Berdasarkan kecenderungan kesenjangan gender tersebut, dapat dikatakan bahwa kesetaraan gender di Provinsi Papua masih lebih baik dibandingkan secara nasional, sehingga perbedaan manfaat pembangunan yang diterima antara perempuan dengan laki-laki di Provinsi Papua lebih kecil dibandingkan secara nasional.

Namun yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kenyataan bahwa Papua memiliki 10 kabupaten dengan IPG terendah di Indonesia.

Tabel II.16 Sepuluh Kabupaten/Kota dengan Indeks Pembangunan Gender Terendah di Seluruh Indonesia tahun 2009-2010

Tahun 2009 Kab/Kota Terendah	IPG	Tahun 2010 Kab/Kota Terendah	IPG
1	2	3	4
Bangka Selatan	49,46	Mamberamo Tengah	48,01
Yahukimo	49,12	Nduga	47,58
Sampang	48,71	Asmat	47,56
Indramayu	48,51	Sumbawa Barat	47,37
Mappi	48,07	Lombok Utara	46,86
Asmat	47,43	Boven Digoel	46,69
Pegunungan Bintang	47,18	Intan Jaya	46,29
Probolinggo	47,01	Dogiyai	45,63
Boven Digoel	46,46	Puncak	45,17
Sumbawa Barat	46,03	Deiyai	42,70

Sumber : Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2012 Provinsi Papua

Tabel di atas mempresentasikan sepuluh (10) kabupaten/kota dengan IPG terendah pada tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 2009, terdapat lima (5) kabupaten di Provinsi Papua dari sepuluh (10) kabupaten/kota dengan IPG terendah. Namun demikian, untuk tahun 2010, terdapat delapan (8) kabupaten di Provinsi Papua yang termasuk dalam daftar sepuluh kabupaten/kota dengan IPG terendah. Dari daftar tersebut, dapat dilihat bahwa tidak hanya Kabupaten pemekaran seperti Deiyai, Mamberamo Tengah, Nduga, Puncak, dan Dogiyai yang masuk dalam daftar tersebut, namun kabupaten lama seperti Asmat, Boven Digoel, dan Intan aya juga masuk daftar di atas. Variabel yang berkontribusi pada rendahnya ranking kedelapan kabupaten/kota di Provinsi Papua di atas perlu dianalisis lebih dalam.

PENDIDIKAN

a. Angka Melek Huruf

Sepanjang tahun 2007-2011, tingkat melek huruf di Provinsi Papua tidak mengalami perkembangan yang signifikan dimana tahun 2007 dari 75,41% sampai tahun 2008 dan meningkat menjadi ditahun 2009 75,58 dan menjadi 75,60% di tahun 2010, memasuki tahun 2011 angka melek huruf di Papua menjadi 75,81%. Angka tersebut termasuk yang paling terendah dari seluruh provinsi yang ada diseluruh Indonesia.

Tabel II.17 Perkembangan Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	NA	NA	NA	NA	NA
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	1.294.494	1.028.023	1.450.851	1.864.589	1.958.892
3	Angka Melek Huruf	75,41	75,41	75,58	75,60	75,81

Kondisi buta aksara terbesar terdapat di daerah sulit akses dan pegunungan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan layanan pendidikan baik untuk jalur formal dan non formal. Selain itu, penyediaan sarana pendidikan di daerah pegunungan dan pedalaman harus menyesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat, sehingga fasilitas harus mengikuti komunitas yang dilayani.

Pada tahun 2010, tercatat penduduk usia 15 tahun ke atas, yang mampu membaca dan menulis hanya sebesar 80,43%. Artinya sekitar satu dari lima pemuda di Provinsi Papua masih buta huruf, baik yang tidak pernah bersekolah maupun yang putus sekolah. Adanya penduduk yang masih buta huruf padahal mereka pernah duduk di bangku sekolah, mengindikasikan kualitas pendidikan di Provinsi Papua juga masih rendah. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, capaian AMH provinsi Papua mengalami peningkatan yang relatif kecil, yaitu sebesar 0,73%, yaitu dari 79,69% pada tahun 2009 menjadi 80,43% pada tahun 2010.

Tabel II.18 Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas					Angka melek huruf Tahun 2011
			2007	2008	2009	2010	2011	
1	MERAUKE	NA	98.108	67.209	111.527	83.570	136.499	88,22
2	JAYAWIJAYA	NA	153.329	151.798	73.494	196.085	N/A	52,76
3	JAYAPURA	NA	61.177	37.767	68.968	109.668	N/A	96,89
4	NABIRE	NA	99.799	83.037	63.573	87.257	93.597	83,66
5	KEP. YAPEN	NA	47.708	37.128	55.050	51.507	N/A	89,11
6	BIAK NUMFOR	NA	62.607	38.361	72.947	80.404	81.533	98,67
7	PANIAI	NA	81.725	68.041	89.331	N/A	N/A	62,94
8	PUNJAK JAYA	NA	91.913	82.058	59.383	100.572	79.703	86,82
9	MIMIKA	NA	83.744	46.613	94.592	122.514	125.598	88,19
10	BOVEN DIGOEL	NA	43.159	15.689	27.102	35.240	N/A	33,25
11	MAPPI	NA	43.021	35.388	50.014	46.954	49.091	31,46
12	ASMAT	NA	39.356	36.644	42.272	43.914	N/A	31,13
13	YAHUKIMO	NA	93.483	94.787	103.131	103.792	279.329	32,76
14	PEG. BINTANG	NA	57.190	51.744	62.788	68.165	N/A	32,50
15	TOLIKARA	NA	33.737	33.997	38.189	N/A	N/A	33,44
16	SARMI	NA	22.575	19.845	18.000	25.819	22.035	87,67
17	KEEROM	NA	29.400	25.475	35.764	32.276	N/A	92,38
18	WAROPEN	NA	15.240	11.291	11.995	15.456	N/A	77,26

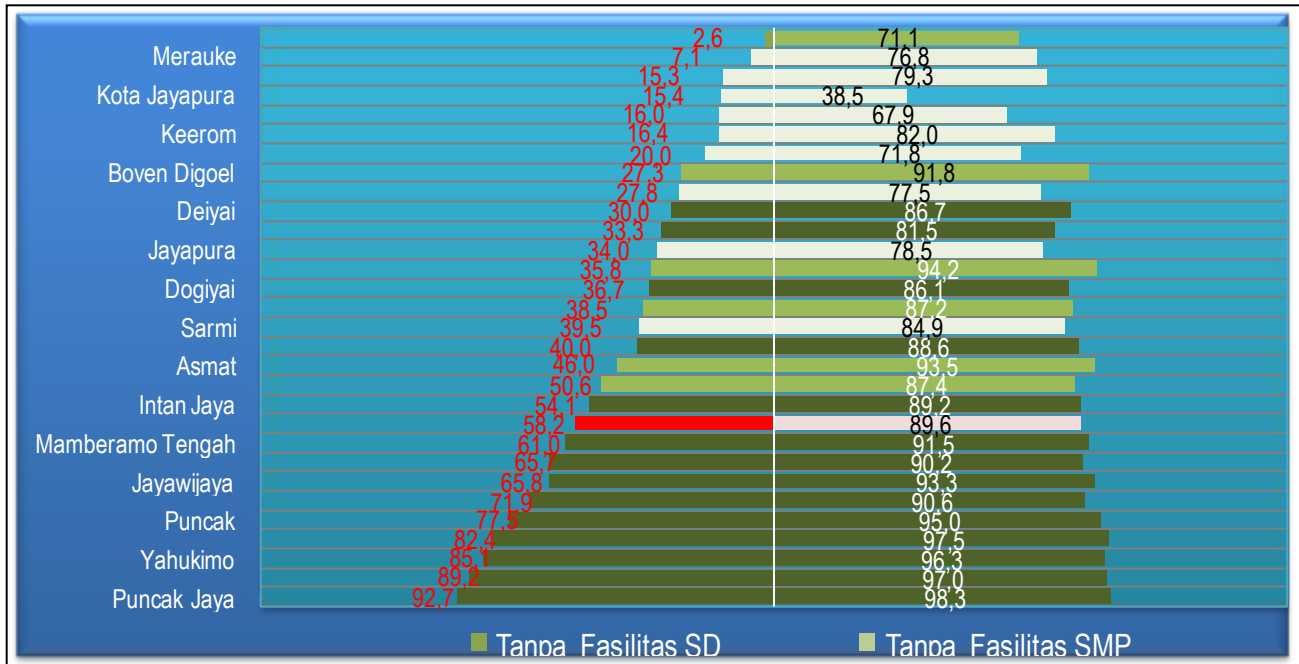
Tabel II.18 Angka Melek Huruf Tahun 2007 s/d 2011 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas					Angka melek huruf Tahun 2011
			2007	2008	2009	2010	2011	
19	SUPIORI	NA	8.641	6.825	9.932	9.184	9.544	96,68
20	MAM. RAYA	NA	N/A	N/A	15.536	N/A	N/A	65,36
21	MAM. TENGAH	NA	N/A	N/A	20.920	N/A	N/A	34,52
22	YALIMO	NA	N/A	N/A	42.017	N/A	N/A	33,51
23	LANI JAYA	NA	N/A	N/A	17.824	N/A	N/A	36,91
24	NDUGA	NA	N/A	N/A	13.727	N/A	N/A	30,54
25	PUNCAK	NA	N/A	N/A	39.476	N/A	N/A	32,13
26	DOGIYAI	NA	N/A	N/A	43.526	N/A	N/A	34,23
27	DEIYAI	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30,12
28	INTAN JAYA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27,78
29	KOTA JAYAPURA	NA	128.582	84.326	169.773	73.991	191.284	99,83

Sumber: BPA Papua (2007-2011)

Bahkan secara umum, perkembangan angka melek huruf antara tahun 2006-2010 /kota di Provinsi Papua, cenderung stagnan. Kemajuan yang cukup berarti, hanya terjadi di Jayawijaya, yang meningkat dari 47,21 % pada tahun 2006 menjadi 51,7% untuk tahun 2010, atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 3,17% per tahun. Namun angka melek huruf Jayawijaya ini, masih dibawah angka yang diharapkan. Kondisi yang ada menunjukkan tingginya kesenjangan pendidikan antarwilayah di Provinsi Papua.

Grafik II.6 Kampung Tanpa Fasilitas Sekolah (%)



Keterangan :

- Pegunungan
- Pesisir Sulit
- Dataran Mudah
- Papua

Dengan menggunakan *range* 0-100, kemudian dikelompokkan kedalam empat kategori, yaitu rendah, menengah bawah, menengah atas dan tinggi, maka kondisi melek huruf di Provinsi Papua secara umum masuk dalam kategori menengah atas. Namun, jika dilihat per kabupaten, maka kabupaten Jayawijaya sampai dengan tahun 2007, begitu pula Kabupaten Boven Digul, Yahukimo, Asmat, Mappi, Pegunungan Bintang dan Tolikara, masuk dalam kategori menengah bawah. Sampai dengan tahun 2010, kemampuan membaca dan menulis ini juga tidak menunjukkan perbaikan, dan berkisar di angka 33%, kecuali untuk Kabupaten Jayawijaya sudah masuk dalam kategori menengah atas dengan angka melek huruf sebesar 52,52%. Kondisi melek huruf yang sama juga terjadi di Kabupaten Paniai yang masuk dalam kategori menengah atas. Sedangkan kabupaten Merauke, Jayapura, Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Puncak Jaya, Mimika, Sarmi, Keerom, Waropen, Supiori, dan Kota Jayapura, telah masuk dalam kategori tinggi walaupun belum mencapai angka maksimal.

Tabel II.19 Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua

No	Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	Merauke	87,1	87,1	87,1	87,4	87,99	88,22
2	Jayawijaya	47,2	47,2	51,6	51,7	52,52	52,76
3	Jayapura	93,6	96,0	96,0	96,3	96,65	96,89
4	Nabire	83,2	83,2	83,2	83,5	83,59	83,66
5	Kepulauan Yapen	86,6	88,1	88,1	88,3	88,82	89,11
6	Biak Numfor	96,6	97,5	97,5	97,8	98,27	98,67
7	Paniai	62,9	62,9	62,9	62,9	62,93	62,94
8	Puncak Jaya	86,8	86,8	86,8	86,8	86,81	86,82
9	Mimika	86,9	86,9	86,9	87,3	87,96	88,19
10	Boven Digoel	31,7	31,7	31,7	31,8	32,94	33,25

No	Kabupaten/kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011
11	Mappi	31,3	31,3	31,3	31,4	31,43	31.46
12	Asmat	31.0	31.0	31.0	31,1	31,10	31.13
13	Yahukimo	31,8	31,8	31,8	31,8	32,52	32.76
14	Peg. Bintang	31,6	31,6	31,6	31,8	32,32	32.50
15	Tolikara	32.0	32,9	32,9	32,9	33,20	33.44
16	Sarmi	87,1	87,1	87,1	87,1	87,55	87.67
17	Keerom	91,1	91,1	91,1	91,1	92,15	92.38
18	Waropen	76,5	76,5	76,5	76,9	77,11	77.26
19	Supiori	94,1	95,4	95,4	95,7	96,19	96.68
20	Mamberamo Raya	-	-	-	64,1	65,04	65.36
21	Nduga	-	-	-	30,5	30,53	30.54
22	Lanny Jaya	-	-	-	32,7	36,72	36.91
23	Mamberamo Tengah	-	-	-	32,1	34,34	34.52
24	Yalimo	-	-	-	32,8	33,30	33.51
25	Puncak Jaya	-	-	-	32,1	32,11	32.13
26	Dogiyai	-	-	-	32,9	34,02	34.23
27	Intan Jaya	-	-	-	27.0	27,39	27.78
28	Deiyai	-	-	-	26,9	28,45	30.12
29	Kota Jayapura	97,9	98,4	99,1	99,1	99,58	99.83
	Papua	66,8	75,4	75,4	75,6	75,60	75.81

Sumber : BPS Papua (2011)

Khusus untuk tahun 2009-2011 Kabupaten Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak Jaya, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai, angka melek hurufnya masih berada di bawah angka 26-35%. Ini mengindikasikan bahwa di kabupaten-kabupaten tersebut kemampuan penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis jumlahnya masih sangat rendah. Kabupaten Deiyai, misalnya, pada tahun 2011 penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis hanya mencapai 30,12%, ini berarti bahwa sekitar 69,88% penduduk usia 15 tahun ke atas masih buta huruf dan belum dapat menikmati pendidikan. Ini berarti juga terjadi ketimpangan angka melek huruf yang sangat mencolok antar kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua. Kesenjangan antara AMH di Kota Jayapura yang menduduki peringkat pertama dengan kabupaten Deiyai yang menempati peringkat 29, sangat jauh sehingga perlu mendapat perhatian serius.

b. Rata-rata lama sekolah

Indikator kinerja pembangunan manusia di bidang pendidikan berikutnya adalah rata-rata lama sekolah. Secara keseluruhan untuk tahun 2007-2011, rata-rata lama sekolah di provinsi Papua yang berkisar antara 6,5 sampai 6,7 tahun, menunjukkan bahwa rata-rata penduduk telah menamatkan SD, namun peningkatan ini berjalan lambat dan belum memenuhi standar wajib belajar 9 tahun.

Tabel II.20 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2007-2011 Kabupaten/Kota di Papua

NO	KABUPATEN/KOTA	2007	2008	2009	2010	2011
1.	MERAUKE	87,10	8,48	8,63	9,33	9,35
2.	JAYAWIJAYA	47,21	3,77	3,79	4,82	4,84
3.	JAYAPURA	96,00	8,75	9,05	9,54	9,56
4.	NABIRE	83,20	6,46	6,48	6,55	6,78
5.	KEP. YAPEN	88,12	6,50	6,53	6,58	6,63
6.	BIAK NUMFOR	97,48	9,25	9,26	9,55	9,58
7.	PANIAI	62,90	6,20	6,21	6,21	6,22
8.	PUNJAK JAYA	86,80	6,10	6,11	6,11	6,12
9.	MIMIKA	86,90	6,70	6,71	6,79	6,87
10.	BOVEN DIGOEL	31,70	3,00	3,10	3,37	3,39

NO	KABUPATEN/KOTA	2007	2008	2009	2010	2011
11.	MAPPI	31,30	3,80	3,89	4,27	4,30
12.	ASMAT	31,00	3,86	3,94	4,33	4,35
13.	YAHUKIMO	31,80	2,40	2,42	2,47	2,86
14.	PEG. BINTANG	31,60	2,20	2,45	2,46	2,54
15.	TOLIKARA	32,86	2,40	2,94	3,35	3,38
16.	SARMI	87,10	6,40	6,41	6,44	6,55
17.	KEEROM	91,10	7,30	7,32	7,36	7,39
18.	WAROPEN	76,50	6,27	6,29	6,33	6,37
19.	SUPIORI	95,37	7,70	7,97	8,03	8,08
20.	MAMBERAMO RAYA	64,10	4,32	4,46	5,17	5,20
21.	MAMBERAMO TENGAH	N/A	2,74	2,79	2,79	2,80
22.	YALIMO	N/A	3,10	3,33	3,70	3,72
23.	LANI JAYA	N/A	2,89	2,90	2,90	2,91
24.	NDUGA	N/A	2,71	2,72	2,74	2,75
25.	PUNCAK	N/A	2,78	2,79	2,80	2,82
26.	DOGIAYAI	N/A	3,04	3,43	3,87	3,89
27.	DEIYAI	N/A	N/A	1,81	2,07	2,10
28.	INTAN JAYA	N/A	N/A	2,24	2,50	2,79
29.	KOTA JAYAPURA	98,41	10,86	10,88	11,00	11,03
Papua		6.5	6.5	6.57	6,7	6,7

Sumber : BPS Provinsi Papua

Kondisi rata-rata lama sekolah di Papua mengalami peningkatan tipis 0,1 (cenderung konstan) 6,6 tahun dari 6,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Papua menyelesaikan pendidikan kelas 7. Kabupaten/kota yang berada di kawasan pesisir dan dataran cenderung memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pegunungan dan pedalaman. Kondisi rata-rata lama sekolah merupakan dampak dari hasil pembangunan dalam penyediaan layanan fasilitas pendidikan berupa gedung dan ruang kelas, guru kelas dan mata pelajaran, serta subsidi wajib belajar. Rata-rata lama sekolah yang dimandatkan dalam undang-undang otonomi khusus Papua adalah 12 tahun atau setara dengan sekolah menengah. Indikator ini tidak mempertimbangkan lama sekolah akibat terjadinya mengulang kelas yang tinggi serta putus sekolah di jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Dalam periode 1999-2010, misalnya, angka IPM Provinsi Papua hanya meningkat sebesar 0.5582 atau 0.94% per tahun menjadi 64.94. Tahun 2012, IPM Provinsi Papua meningkat menjadi 65.34, meski tetap dalam posisinya sebagai peringkat terakhir dalam seluruh provinsi Indonesia, serta jauh di bawah rata-rata Indonesia sebesar 72.64. Data juga menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di beberapa kabupaten Provinsi Papua. Kabupaten Jayawijaya, Boven Digul, Jayawijaya, Mappi, Asmat, misalnya, rata-rata lama sekolah penduduknya hanya setingkat SD kelas 3. Bahkan di Kabupaten Yahukimo, rata-rata bersekolah penduduknya hanya sampai kelas 2 SD. Hal yang hampir sama juga berlaku di Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Tolikara. Kabupaten Nabire, Paniai, Puncak Jaya, Mimika, Sarmi, dan Waropen, rata-rata lama sekolah masyarakatnya sudah lebih baik kondisinya, yaitu telah menamatkan SD. Sedangkan untuk kabupaten Keerom dan Supiori, rata-rata masyarakatnya telah menyelesaikan jenjang kelas 1 SMP. Sementara untuk kabupaten Merauke, Jayapura, rata-rata lama sekolah masyarakatnya sudah diatas 8 tahun, atau sudah mencapai kelas 2 SMP. Dari data yang ada nampak bahwa hanya Kabupaten Biak Numfor dan Kota Jayapura yang rata-rata lama sekolah masyarakatnya telah mencapai jenjang SLTA. Kondisi ini tentunya memprihatinkan, karena dengan demikian bisa disimpulkan bahwa kualitas SDM yang terdapat di provinsi Papua, masih termasuk rendah.

Partisipasi Sekolah

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (2010), menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan dasar yang menyangkut anak-anak usia 7-15 tahun belum seperti yang diharapkan. Dalam sumber data tersebut disebutkan bahwa jumlah anak berusia 7-12 tahun adalah sebesar 427 ribu jiwa, dengan capaian APS 7-12 tahun sebesar 76,22%, berarti bahwa masih terdapat sekitar 24,78% (100% - 76,22%) atau 100 ribu anak usia sekolah yang tidak tersentuh pendidikan. Hal yang hampir sama dialami oleh anak usia 13-15 tahun; capaian APS masih *stagnant* di sekitar angka 74% dalam kurun waktu 5 tahun (2005-2010).

Tabel II.21 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah murid usia 7-12 thn	347.247	350.411	361.681	374.835	393.795
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	247.682	247.440	247.020	408.255	393.795
1.3.	APS SD/MI	84,62	85,44	81,18	84,10	N/A
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	85.916	90.878	92.773	94.466	99.529
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	128.462	125.620	123.120	188.427	330 768
2.3.	APS SMP/MTs	77,86	77,02	76,80	78,69	N/A

Sumber : BPS Provinsi Papua

Adalah sebuah ironi, bahwa meskipun Otsus Provinsi Papua telah dimulai pada tahun 2002, namun ternyata implementasi penyelenggaraan pendidikan murah di Provinsi Papua, baru dijalankan pada awal tahun 2009 melalui Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembebasan Biaya Pendidikan Bagi Wajib Belajar Pendidikan Dasar, dan Pengurangan Biaya Pendidikan Bagi Peserta Didik OAP pada Jenjang Pendidikan Menengah. Artinya, selama 7 tahun masyarakat Papua harus menunggu realisasi dari penjabaran pelaksanaan Otsus pendidikan tersebut.

Akibatnya, pembangunan pendidikan yang dilaksanakan di Provinsi Papua selama masa Otsus berjalan sangat lambat. Sebagai indikatornya dapat diperhatikan pada perkembangan APS (Angka Partisipasi Sekolah) Papua selama tahun 2006-2010 yang menggambarkan bagaimana akses pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Papua selama itu, lihat (Tabel II.19) berikut ini.

Tabel II.22 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua dan Indonesia Tahun 2006-2010

Usia	Wilayah	2006	2007	2008	2009	2010
7 - 12	Papua	80.38	83.36	83.38	76.09	76.22
	Indonesia	97.39	97.64	97.88	97.95	98.02
13-15	Papua	77.54	78.01	78.22	73.68	74.35
	Indonesia	84.08	84.65	84.89	85.47	86.24
16-18	Papua	53.64	54.72	54.13	47.51	48.28
	Indonesia	53.92	55.49	55.50	55.16	56.01

Sumber : BPS Indonesia (2012)

Selain itu, terlihat jelas bahwa APS Provinsi Papua sepanjang tahun 2006-2010 selalu dibawah APS nasional, baik itu untuk usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, maupun 16-18 tahun. Untuk APS dengan usia 7-12 tahun, rata-rata setiap tahun hanya sebesar 79,89%, terpaut jauh dengan APS nasional yang mencapai 97,78% per tahun untuk usia dan periode yang sama. Sedangkan pada usia 13-15 tahun, di Provinsi Papua sebesar 76,36%, sementara nasional sebesar 85,07%. Terakhir untuk APS usia 16-18 tahun, rata-rata per tahun di Papua berkisar 51,66% dan nasional sekitar 55,22%.

Selain permasalahan APS yang masih di bawah rata-rata nasional, kecenderungan APS di Provinsi Papua selama periode tersebut terlihat menurun setiap tahunnya pada semua usia pendidikan, padahal secara nasional terus meningkat. Untuk periode yang sama rata-rata APS Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 1,04% per tahun pada usia 7-12 tahun, sementara APS untuk usia 13-15 tahun menurun sebesar 0,80% per tahun, dan APS usia 16-18 tahun rata-rata menurun 1,34% per tahun.

Hingga tahun 2010, Provinsi Papua belum berhasil menuntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun (usia 7-15 tahun) yaitu 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP. Indikatornya dapat diperhatikan pada rasio APK (Angka Partisipasi Kasar) di tingkat SD dan SMP sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3.4. Dalam gambar tersebut terpampang jelas bahwa berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Papua (2010), APK untuk pendidikan SD baru mencapai 93,27%, sedangkan SMP jauh lebih rendah yakni 60,05%. Sementara untuk pendidikan SMA hanya 48,20%. Kondisi yang memperhatikan bila dilihat pada APM (Angka Partisipasi Murni) untuk semua jenjang pendidikan, dimana APM untuk SD hanya 76,22%, untuk SMP sebesar 49,62%, dan untuk SMA sebesar 36,06%. Dari seluruh keragaman angka partisipasi pendidikan ini dapat dikatakan bahwa pemerataan akses pendidikan di Provinsi Papua hingga tahun 2010 belum berjalan baik. Masih banyak masyarakat yang berada pada usia pendidikan tertentu (khususnya untuk pendidikan 9 tahun) belum menikmati pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

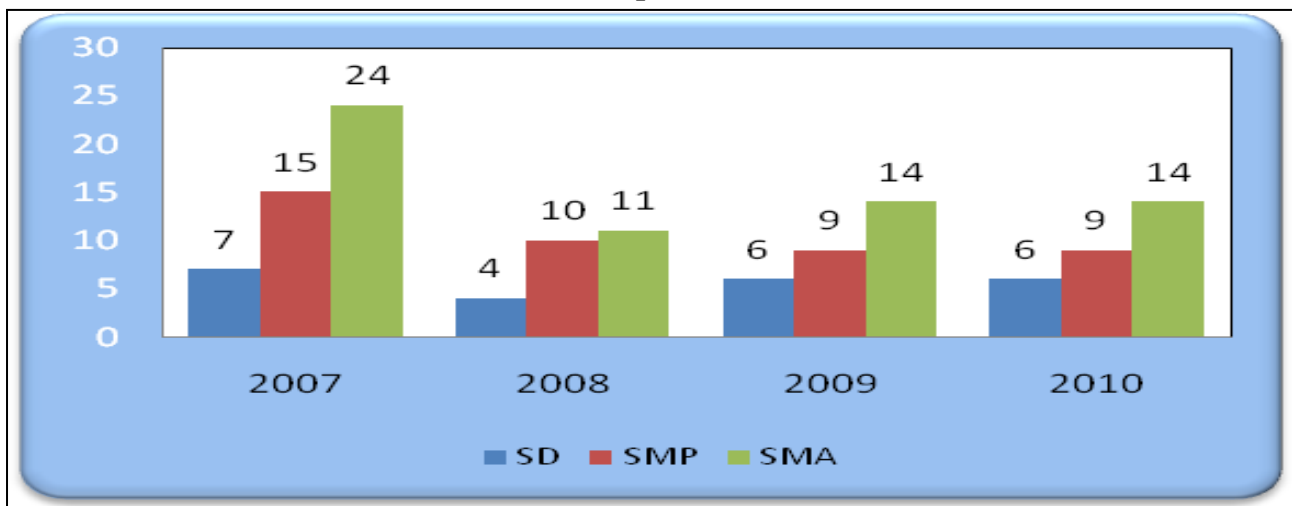
Tabel II.23 Rasio Murid Sekolah dan Guru Di Provinsi Papua Dirinci Menurut Jenjang Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2007-2010

Pendidikan	Tahun	Guru	Kelas	Sekolah
SD	2007	23	27	169
	2008	34	35	149
	2009	39	34	222
	2010	30	27	176
SMP	2007	14	34	209
	2008	20	36	190
	2009	22	34	200
	2010	21	30	197
SMA/SMK	2007	11	32	259
	2008	24	27	269
	2009	19	30	262
	2010	19	29	277

Sumber : BPS Papua, 2011(diolah)

Jika perkembangan pendidikan di Provinsi Papua diamati berdasarkan rasio guru terhadap murid, dapat dikatakan bahwa selama ini kondisinya cukup ideal dan mengarah pada perbaikan. Pada Tabel 3.3. di atas, sepanjang tahun 2007-2010 rata-rata rasio guru-murid di tingkat SD adalah 32 murid per guru per tahun, di tingkat SLTP sebesar 19 murid per guru per tahun, dan SLTA sebesar 18 murid per guru per tahun. Adapun untuk rasio kelas terhadap murid, terlihat selama tahun 2007-2010 masih di bawah rasio ideal yaitu jumlah murid 40 orang per kelas pada setiap satuan dan jenjang pendidikan. Rata-rata untuk tingkat SD rasionya adalah 31 murid per kelas, kemudian SMP sebesar 34 murid per kelas, dan SMA sebesar 30 murid per kelas. Rendahnya rasio murid per kelas ini menandakan bahwa jumlah murid per kelas untuk semua tingkat pendidikan di Papua masih mengalami kekurangan. Dengan kata lain, belum sepenuhnya penduduk yang masuk pada usia pendidikan tertentu mengikuti jenjang pendidikan yang sesuai, sebagaimana yang tergambarkan pada rasio-rasio angka partisipasi pendidikan sebelumnya.

Grafik II.7 Rasio Guru-Sekolah DI Provinsi Papua Tahun 2010



Meskipun kecenderungan rasio guru-murid terlihat cukup ideal, namun kenyataannya masih banyak terdapat kekurangan guru. Indikasi kurangnya jumlah guru dapat ditelusuri dengan melihat perkembangan kebutuhan guru. Misalkan untuk tingkat SD, idealnya satu gedung SD minimal diawasi oleh 9 guru. Namun kecenderungan selama tahun 2007-2010 menunjukkan terjadi kekurangan guru di SD rata-rata 3 orang per tahun, oleh karena ketersediaan guru setiap tahunnya untuk satu sekolah dasar hanya 6 orang per tahun. Kekurangan guru bukan hanya terjadi di SD, namun juga terlihat pada jenjang pendidikan SMP dan yang lebih banyak di SMA. Seperti yang disajikan dalam Gambar 3.5, rata-rata setiap tahun jumlah guru SMP sekitar 11 orang, yang berarti kurang 1 guru dari jumlah yang ideal sesuai kebutuhan minimal mata pelajaran, yaitu sebanyak 12 orang. Sedangkan untuk jenjang pendidikan SMA, rata-rata jumlah guru per sekolah hanya 16 orang per tahun, dengan demikian terdapat kekurangan guru sebanyak 4 orang per tahun dari jumlah ideal 20 mata pelajaran.

KESEHATAN

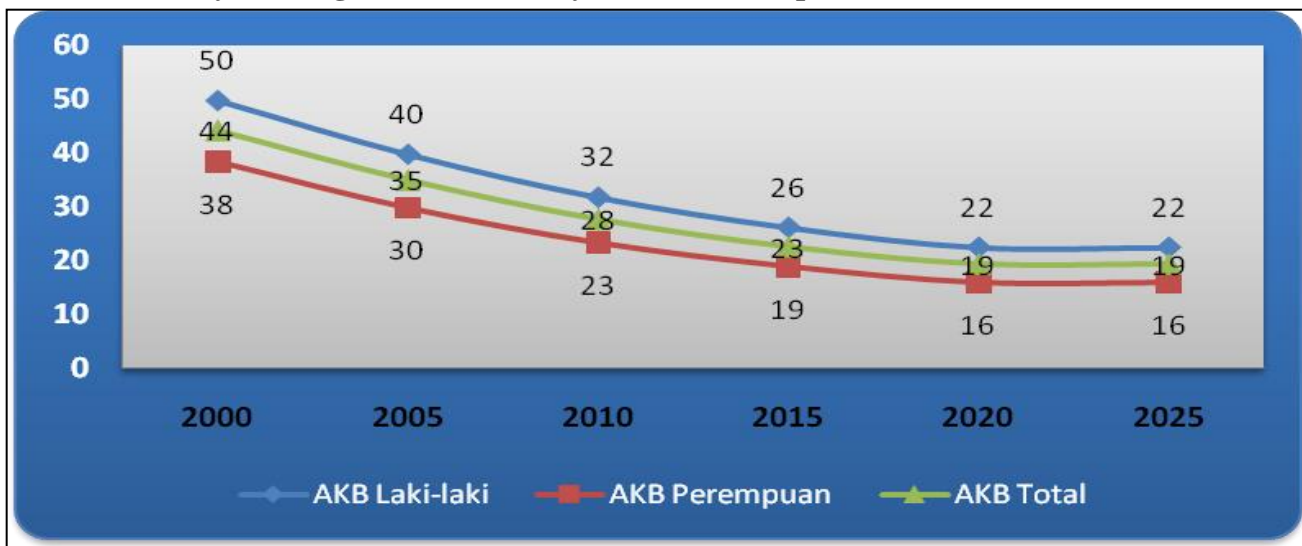
a. Angka Kematian Bayi dan Balita

Kondisi kesehatan di Provinsi Papua, pernah membaik antara kurun waktu 2000 dan 2005. Jumlah kematian bayi di Papua, misalnya, dapat ditekan dari 44 per 10.000 bayi di tahun 2000 menjadi 35 per 10.000 bayi pada tahun 2005. Begitu juga dengan angka harapan hidup (AHH) yang mengalami perbaikan dari 67,90 tahun pada tahun 2007 meningkat menjadi 68,35 tahun pada tahun 2010. Namun demikian, data terbaru mencatat bahwa AHH di Provinsi Papua terbilang masih rendah dan jauh di bawah rata-rata nasional, dengan pertumbuhan di bawah 1.0% per tahun.

Sementara itu, berdasarkan kecenderungan angka kematian bayi (AKB), kondisi kesehatan di Papua terlihat lebih baik dibandingkan NTB (Nusa Tenggara Barat), Maluku (Maluku Utara), Kalsel (Kalimantan Selatan), Sulteng (Sulawesi Tengah), Banten, Maluku, NTT (Nusa Tenggara Timur), dan Kalbar (Kalimantan Barat).

Pada tahun 1980, angka kematian bayi di Provinsi Papua sangat tinggi, yaitu sebesar 105, yang artinya ada 105 bayi yang meninggal di antara seribu kelahiran hidup. Namun upaya menurunkan angka kematian bayi di Provinsi Papua terlihat menunjukkan hasil yang cukup nyata, dengan penurunan hingga mencapai angka 80 per seribu kelahiran hidup pada 1990, kemudian turun lagi hingga 51 per seribu kelahiran hidup pada 2000, dan akhirnya turun tajam hingga mencapai angka 19 per seribu kelahiran hidup pada 2010.

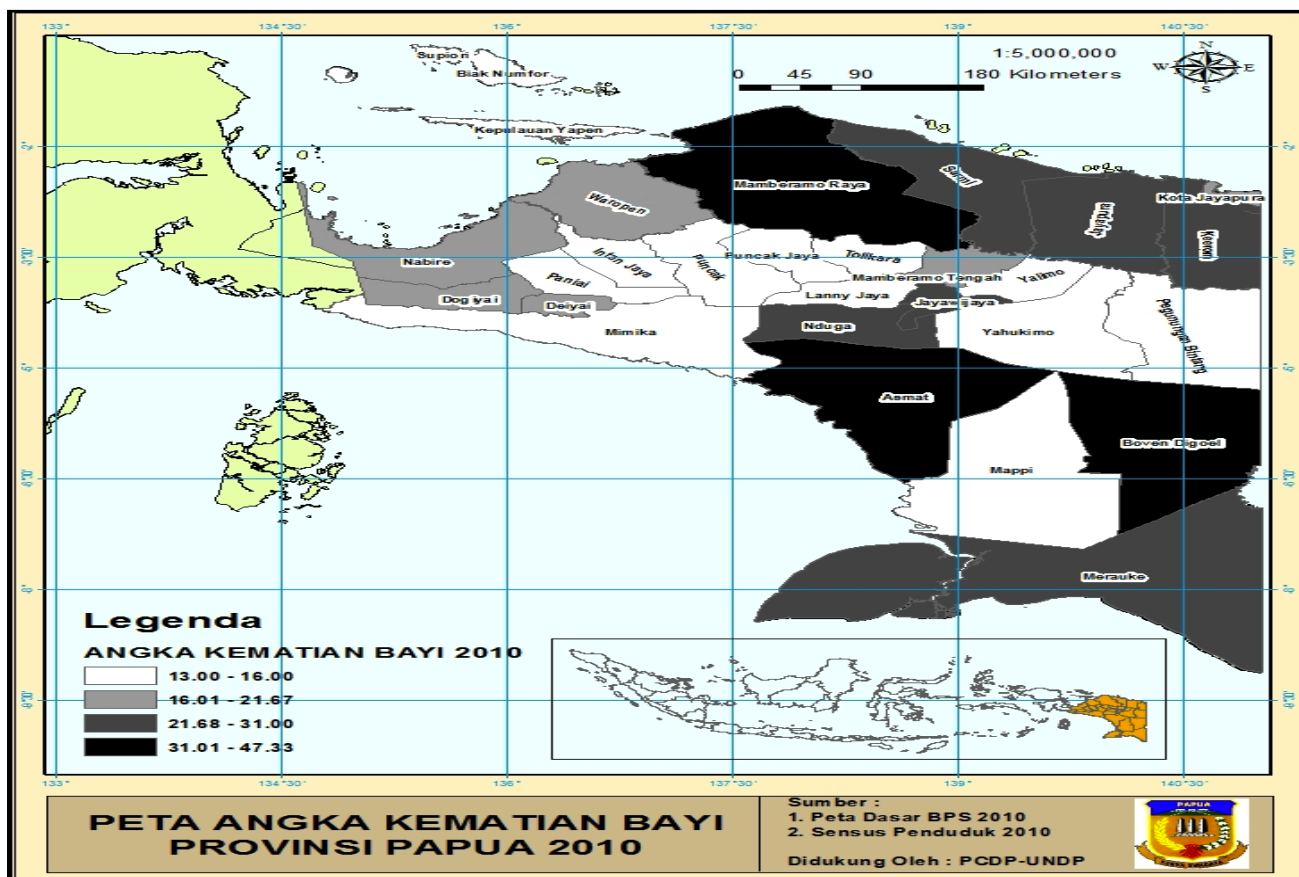
Grafik II.8 Proyeksi Angka Kematian Bayi di Provinsi Papua 2000-2025



Namun, berdasarkan penurunan yang lamban dari AKBA dari tahun 2000, yakni dari sebesar 56 (per 1000 kelahiran) menjadi 41 pada tahun 2007 dan nilai target yang besarnya 32 pada tahun 2015, bisa disimpulkan bahwa masih perlu adanya upaya khusus agar target tersebut dapat tercapai.

Kondisi lapangan juga menunjukkan perlunya ada upaya khusus untuk meningkatkan angka cakupan imunisasi campak agar target cakupan dapat terus meningkat sampai tahun 2015. Proporsi anak berusia 12-23 bulan yang diimunisasi campak memang meningkat dari 44,5% pada tahun 1991 menjadi 49% pada tahun 2007, namun belum cukup cepat untuk segera mencapai angka yang universal. Bahkan data hasil Susenas (BPS) empat tahun terakhir (2005-2009) menunjukkan penurunan jumlah anak umur 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak).

Gambar II.9 Peta Angka Kematian Bayi Provinsi Papua tahun 2010



Departemen Kesehatan menetapkan bahwa imunisasi yang wajib diberikan adalah BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B. Waktu pemberiannya sudah ditetapkan secara bertahap. Imunisasi BCG diberikan satu kali pada anak berusia 0-2 bulan. Imunisasi DPT dan polio diberikan secara bersamaan dan berulang pada usia 2, 3, atau 4 bulan dan pengulangannya 4 bulan kemudian sebanyak 3 kali. Imunisasi campak yang akan memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak diberikan sebanyak 2 kali, yang pertama, pada saat anak berumur 9 bulan atau lebih, dan kedua diberikan pada usia 5-7 tahun. Di Provinsi Papua, persentase balita berumur 1 tahun yang mendapat imunisasi campak menunjukkan adanya penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sekitar 70,56% anak yang berusia 1 tahun telah mendapatkan imunisasi campak, namun angkanya menurun hingga tahun 2009 hanya sekitar 65,73% anak berusia 1 tahun yang telah mendapatkan imunisasi campak. Banyak hal yang perlu mendapat perhatian, terutama dalam upaya untuk meningkatkan angka cakupan imunisasi, terutama untuk wilayah terisolasi. Selain itu, disparitas cakupan imunisasi campak untuk anak berusia 1 tahun antar-wilayah di Provinsi Papua masih merupakan masalah yang harus diselesaikan. Terdapat 14 kabupaten yang persentasenya masih di bawah rata-rata provinsi. Persentase yang tertinggi terdapat di Kabupaten Jayapura yaitu sebesar 96,62%, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Puncak dan Intan Jaya masing-masing nol persen atau tidak ada balita berumur 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak. Berdasarkan topografi wilayahnya, cakupan balita berumur 1 tahun yang mendapatkan imunisasi campak di kabupaten yang terletak di daerah dataran mudah berada di atas rata-rata Provinsi Papua. Sedangkan kabupaten yang terletak di dataran sulit relatif lebih rendah dibanding angka cakupan Provinsi, meskipun beberapa diantaranya seperti: Supiori dan Mappi sudah lebih tinggi cakupannya. Sementara itu, cakupan balita umur 1 tahun di daerah yang terletak di Pegunungan cenderung masih rendah. Hanya beberapa daerah seperti: Nduga, Lanny Jaya, Tolikara dan Mamberamo Tengah memiliki cakupan yang lebih tinggi.

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka harapan hidup di Provinsi Papua menunjukkan angka yang terus meningkat, dari 67,60 tahun di tahun 2006 menjadi 68,60 tahun di tahun 2010, atau naik sebanyak satu point. Angka ini dibetuk dari konsistensi rata-rata lama hidup dengan asumsi tidak terjadi perubahan prola mortalitas.

Tabel II.24 Angka Harapan Hidup (AHH) Papua

Tahun	2006	2007	2008	2009	2010
AHH	67,60	67,90	68,10	68,35	68,60

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Selain itu, AHH juga sebagai proxy atas penyediaan layanan kesehatan yang baik dan terjangkau sehingga memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat.

c. Proporsi Bayi Gizi Buruk

Salah satu ukuran penting dalam kesehatan adalah proporsi bayi gizi buruk dengan gambaran perkembangan sebagai berikut :

Tabel II.25 Kondisi Bayi Lahir di Papua

Tahun	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Bayi Lahir	19.885	19.468	15.005	13.820	26.230
Berat Bayi Lahir Rendah	443 (2,2%)	77 (0,4%)	514 (3,4%)	31 (0,2%)	700 (2,7%)
Bayi Gizi Buruk	4.420 (22,2%)	4.503 (23,1)	1.689 (11,3)	4.503 (32,6)	1.612 (6,1)

Sumber : PDA 2012, BPS Papua 2012

Jika dilihat dari proporsi berat bayi lahir rendah dan bayi gizi buruk terjadi secara fluktuatif. Meski demikian, jumlah kasus yang terjadi masih sangat tinggi yang mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat yang masih sangat rendah terkait pengetahuan kesehatan.

a. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Berdasarkan data yang ada dapat dilihat bahwa tahun 2009 angka kelangsungan hidup bayi mencapai 7,10 % dengan jumlah kelahiran sebanyak 19.468 jiwa dan jumlah kematian sebanyak 138 jiwa ditahun yang sama.

Tabel II. 26 Perkembangan Angka kelangsungan Hidup Bayi Tahun 2007 s/d 2011Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	N/A	N/A	138	415	N/A
2	Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	19.885	19.468	19.448	27.248	N/A
3	Angka kelangsungan hidup bayi	N/A	N/A	7,10	15,23	N/A

Sumber : DDA Papua 2007-2011

b. Persentase Balita Gizi Buruk

Salah satu ukuran penting dalam kesehatan adalah proporsi bayi gizi buruk dengan gambaran perkembangan sebagai berikut :

Tabel II.27 Perkembangan Persentase Balita Gizi Buruk Tahun 2007 s.d 2011Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Balita Gizi Buruk	NA	NA	1.172	1.596	NA
2	Jumlah Balita	105.240	233.900	236.500	313.395	326.496
3	Presentase Gizi Buruk	NA	NA	0,49	0,50	NA

Sumber : DDA Papua 2007-2011

Pada tabel diatas dapat diperhatikan bahwa ditahun 2009 dan 2010 persentase gizi buruk terlihat mengalami peningkatan. Angka ini meningkat secara rill dan nominal.

Gambar II.10 Peta Jumlah Balita Gizi Buruk Provinsi Papua Tahun



a. Penyakit Endemik –Malaria

Hingga saat ini, malaria masih menjadi salah satu penyakit endemik di tanah Papua, dengan bukti bahwa kasus penyakit ini terjadi dengan intensitas yang tinggi.

Tabel II.28 Cakupan Penderita Malaria Di Papua

Metode	2007	2008	2009	2010	2011
Klinis Malaria	371.385	334.122	375.971	407.773	259.634
AMI (0/00)	116	152	170	171	183
SD Diperiksa	230.755	212.002	293.501	406.086	310.728
SD Positif	124.384	122.300	128.164	143.061	51.418

Sumber Data : Sediaan Darah, Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Jumlah kasus malaria ditemukan dengan jumlah yang tinggi dari berbagai metode pemeriksaan penyakit malaria. Hal ini menunjukkan bahwa malaria masih menjadi penyakit endemis di Papua. Melihat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh penyakit malaria, maka perlu kerja keras semua pihak untuk menekan kejadian malaria secara konsisten.

5. Penyakit Berbahaya - HIV dan AIDS

HIV dan AIDS salah satu penyakit yang berbahaya bagi masyarakat dengan tingkat kejadian yang luar biasa per seratus ribu penduduk. Pada tahun 2011, jumlah penduduk Papua penderita HIV sebanyak 5362 orang dan penderita AIDS sebanyak 7914 orang. Kejadian kasus HIV dan AIDS pada kelompok umur di Papua adalah sebagai berikut

Tabel II.29 Cakupan Penderita HIV-AIDS Di Papua

KELOMPOK UMUR	HIV	AIDS	JUMLAH
<1	5	48	53
1 – 14	105	193	298
15 – 19	555	752	1.307
20 – 24	1.246	1.765	3.011
25 – 49	3.044	4.721	7.765
>50	137	291	428
Tidak Diketahui	270	144	414
Total	5.362	7.914	13.276

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua 2012

KETENAGA KERJAAN

Kondisi ketenaga kerjaan di Papua jika dilihat dalam kurun waktu lima tahun terakhir bahwa jumlah penduduk yang bekerja semakin bertambah, dimana ditahun 2007 jumlah penduduk yang bekerja hanya mencapai 941 ribu jiwa dan memasuki tahun 2011 jumlah penduduk yang berkerja mencapai 1,4 juta orang. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa rasio antara penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja memiliki nilai diatas 0,90, hal ini dapat dikatakan bahwa penduduk yang tidak bekerja ataupun dalam usaha mencari pekerjaan lebih banyak.

Tabel II.30 Perkembangan Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2007 s.d 2011Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah Penduduk yang bekerja	941.100	1.028.023	1.082.028	1.456.545	1.476.227
2	Jumlah Angkatan Kerja	990.774	1.075.214	1.127.036	1.510.176	1.536.728
3	Rasio Penduduk yang Bekerja	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96

Rasio penduduk yang mendapatkan pekerjaan di provinsi Papua cukup tinggi dengan rata-rata 0.96% hal ini menunjukkan bahwa pemerinth dan swasta serta masyarakat sendiri telah mampu menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak sehingga dapat menyerap jumlah penduduk angkatan kerja. Demikian pula rasio penduduk yang bekerja di kabupaten kota menunjukkan angka yang menggembirakan, rata-rata 96% penduduk mendaotkan langan pekerjaan.

Namun jika kita melihat kembali data jumlah kemiskinan yang ada di Papua yang cukup tinggi dapat dikatakan hal ini cukup mengherankan, dimana pada rasio penduduk yang bekerja sudah dapat dikatakan hampir seluruh penduduk usia kerja mendapat pekerjaan akan tetapi kemiskinan masih terdapat di hampir seluruh wilayah yang ada di Papua. Memang dalam menganalisis ketenagakerjaan dalam suatu daerah bahkan dalam suatu negara, hal ini pasti ditemukan.

Rasio tenaga kerja jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota yang ada di Papua dapat disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel II.31 Rasio Penduduk yang Bekerja Tahun 2009Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Penduduk yang bekerja	Jumlah Angkatan Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
1.	MERAUKE	75.142	79.978	0,94
2.	JAYAWIJAYA	69.318	70.188	0,99
3.	JAYAPURA	37.074	42.065	0,88
4.	NABIRE	45.802	47.581	0,96
5.	KEP. YAPEN	38.687	42.544	0,91
6.	BIAK NUMFOR	40.796	47.258	0,86
7.	PANIAI	77.009	77.700	0,99
8.	PUNJAK JAYA	51 .328	51 .382	1,00
9.	MIMIKA	52.840	53.673	0,98
10.	BOVEN DIGOEL	18.003	19.892	0,91
11.	MAPPI	37.959	38.321	0,99
12.	ASMAT	35.779	36.112	0,99
13.	YAHUKIMO	99.882	101.273	0,99
14.	PEG. BINTANG	44.021	44.915	0,98
15.	TOLIKARA	36.175	36.368	0,99
16.	SARMI	13.150	13.518	0,97
17.	KEEROM	25.851	27.331	0,95
18.	WAROPEN	6.794	7.383	0,92
19.	SUPIORI	6.814	6.919	0,98
20.	MAMBERAMO RAYA	12.659	12.812	0,99
21.	MAMBERAMO TENGAH	17.543	17.624	1,00
22.	YALIMO	13.104	13.161	1,00
23.	LANI JAYA	41.318	41.454	1,00
24.	NDUGA	20.573	20.643	1,00
25.	PUNCAK	35.973	36.120	1,00

No	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Jumlah Penduduk yang bekerja	Jumlah Angkatan Kerja	Rasio Penduduk yang Bekerja
26.	DOGIAYAI	38.765	39.008	0,99
27.	DEIYAI	N/A	N/A	N/A
28.	INTAN JAYA	N/A	N/A	N/A
29.	KOTA JAYAPURA	89.669	101.813	0,88
	Jumlah	1.082.028	1.127.036	0,96

Berdasarkan data Dinas TenagaKerja dan Kependudukan, jumlah pencarikerja terdaftar pada tahun 2011 mencapai 100.595 orang, turun sekitar 9,44 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar 111.077 orang. Mereka terdiri dari 60,06 persen laki-laki dan 39,94 persen perempuan. Berdasarkan tingkat pendidikannya, 30,67 persen pencari kerja berpendidikan Sarjana dan Diploma, 59,59 persen SMA/ sederajat 5,07 persen SMP 4,67 persen tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD. Sedangkan persentase lowongan kerja terdaftar hanya 11,69 persen dari total pencari kerja.

Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan masyarakat Papua tidak dapat terlepas dari unsur kebudayaan. Berhasil tidaknya pembangunan di Papua sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas dan responsibilitas budaya orang papua terhadap program-program pembangunan yang dijalankan. Oleh karenanya mengenal lebih jauh budaya Papua merupakan salah satu *key word* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Papua dalam perspektif jangka panjang.

Penduduk asli Papua sebenarnya termasuk dalam rumpun bangsa Papua-Melanesia yang bermukim di daerah Melanesia yakni sekelompok pulau yang berada di sebelah timur laut Australia. Masyarakatnya terdiri atas suku-suku bangsa dan beraneka ragam kebudayaannya. Menurut Tim Peneliti Universitas Cenderawasih di tahun 1991 telah diidentifikasi adanya 44 suku bangsa yang masing-masing merupakan sebuah kesatuan masyarakat, kebudayaan dan bahasa yang berdiri sendiri. Sebagian besar dari 44 suku bangsa itu terpecah lagi menjadi 177 suku (Djoht, 2002).

Van Baal (1951) dalam Djoht (2002) mengatakan bahwa ciri utama kebudayaan Papua adalah tidak adanya integrasi yang kuat dari kebudayaan-kebudayaan mereka. Ciri-ciri kebudayaan tersebut muncul karena kebudayaan orang Papua yang rendah tingkat teknologinya dan yang dihadapkan pada lingkungan hidup yang keras sehingga dengan mudah menerima dan mengambil alih suatu unsur kebudayaan lain yang lebih maju atau lebih cocok. Adapun ciri-ciri yang menonjol dari Papua adalah keanekaragaman kebudayaannya, namun dibalik keanekaragaman tersebut terdapat kesamaan ciri-ciri kebudayaan mereka. Berdasarkan kecirian yang khas tersebut beberapa ahli antropologi telah membuat pengelompokan mengenai kehidupan masyarakat dan budaya Papua sebagai berikut. Secara garis besarnya budaya asli orang Papua dapat dipetakan berdasarkan mata pencaharian dan atau letak geografi, lihat Tabel 2.32. Umumnya jika dipetakan berdasarkan mata pencaharian, budaya Papua dapat dibagi menjadi budaya orang Papua yang sudah mengenal pasar, dan yang masih subsistens.

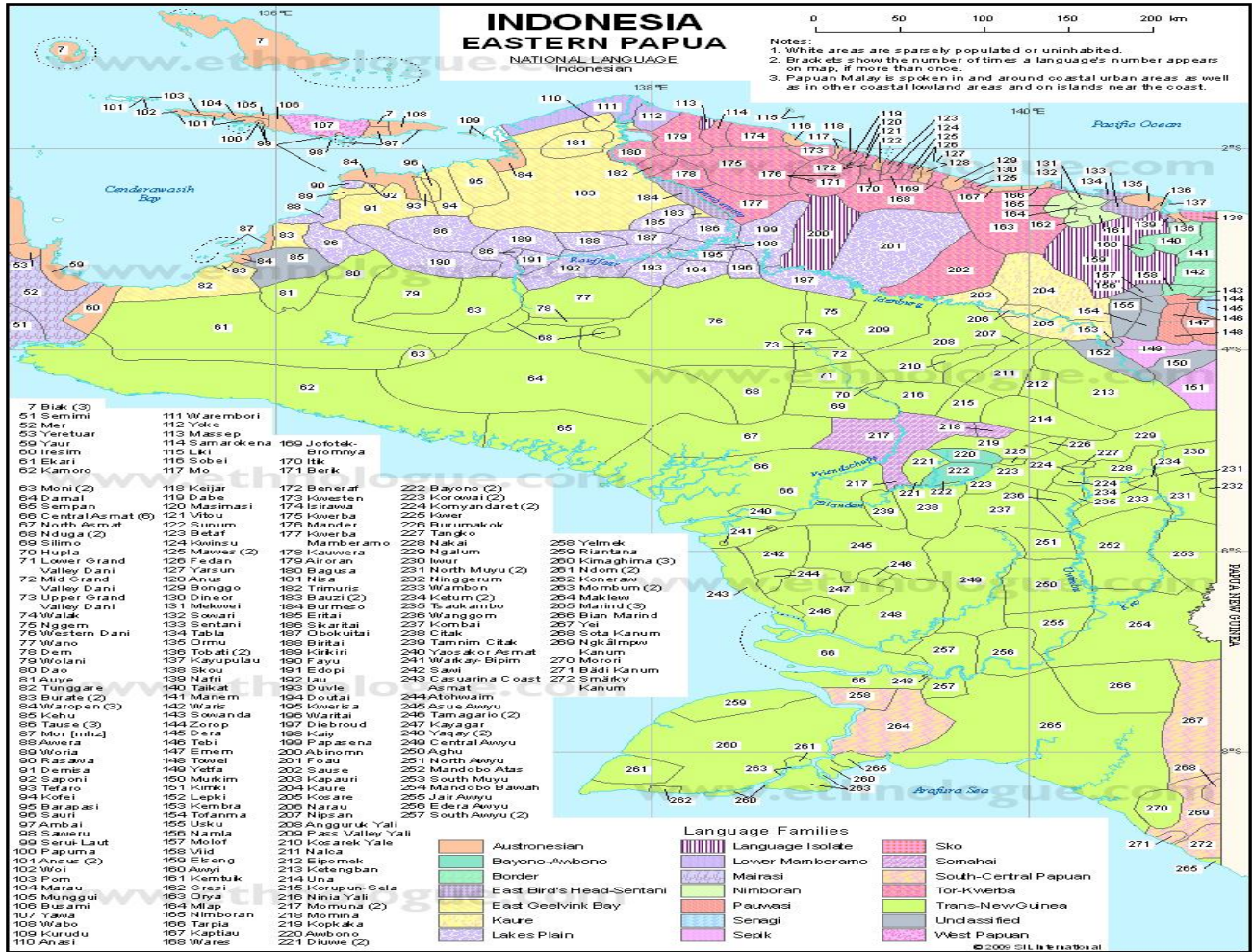
Tabel II.32 Beberapa Pendapat Ilmuwan Antropolog iMengenai Pengelompokan Masyarakat Dan Budaya Asli Papua

NO	PENULIS/KONSEPTOR	PENGELOMPOKKAN
1.	Petocz (1987)	<p>Kategori masyarakat Papua di dasarkan pada tinggi daratan diatas permukaan laut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hutan Bakau, terdapat di rawa-rawa berair asin payau. Vegetasi ini tumbuh di sepanjang cekungan yang landai dan paling berkembang di daerah yang terlindung dari gampanan gelombang air laut. Hutan bakau yang paling luas terdapat di muara teluk Bintuni. • Rawa, disepanjang pantai selatan, dataran rendah daerah Kepala Burung dan pantai utara delta Mamberamo kearah barat sampai muara teluk Cenderawasih.

NO	PENULIS/KONSEPTOR	PENGELOMPOKKAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Hutan basah dataran rendah • Zone pegunungan bawah • Zone pegunungan atas • Zone Alpin
2.	Walker dan Mansoben (1990)	<p>Menggolongkan masyarakat dan kebudayaan Papua menurut tipe-tipe mata pencaharian yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daerah rawa-rawa, pantai dan banyak sungai • Daerah kaki bukit dan lembah-lembah kecil • Daerah dataran tinggi.
3.	Parsudi Suparlan (1994)	<p>Membagi pola-pola kebudayaan Papua dalam spektrum yang lebih umum dan luas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pantai dan pulau, yang terdiri atas : (1) Daerah pantai utara, (2) Daerah-daerah pulau-pulau Biak-Numfor, Yapen, Waigeo dan pulau-pulau kecil lainnya, (3) Daerah pantai selatan yang penuh dengan daerah berlumpur dan pasang surut serta perbedaan musim kemarau dan hujan yang tajam. • Wilayah pedalaman yang mencakup : (1) Daerah sungai-sungai dan rawa-rawa (2) Daerah danau dan sekitarnya (3) Daerah kaki bukit dan lembah-lembah kecil. • Wilayah dataran tinggi
4.	Koentjaraningrat (1994)	<p>Pengelompokan budaya Papua berdasarkan letak geografis dan mata pencahariannya yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penduduk Pantai dan Hilir. Kelompok ini telah lama mengadakan kontak dengan dunia modern/luar. Mereka sudah mengalami pendidikan formal dan kebutuhan hidup tergantung pada pasar dengan sumber alam yang melimpah. • Masyarakat Pedalaman. Kelompok-kelompok kecil yang tinggal di sepanjang sungai, di hutan-hutan rimba. Mereka adalah peramu yang sering berpindah-pindah tempat tinggal, jumlah penduduknya tidak besar. • Masyarakat Pegunungan Tengah. Kelompok masyarakat ini terdiri dari beberapa suku bangsa yang tinggal di lembah-lembah, di pegunungan tengah yang terdiri dari pegunungan Mooke, Sudirman. Pemeliharaan ternak babi dan pembudidayaan Ubi jalar merupakan kegiatan ekonomi yang maha penting.

Sedangkan menurut letak geografi dapat dibagi berdasarkan masyarakat yang menetap di pantai, rawa, dataran rendah, pedalaman dan pegunungan. Akan tetapi jika mengikuti bahasa yang digunakan, maka peta budaya orang Papua sesungguhnya dapat di bagi menjadi 272 ragam budaya sesuai dengan banyaknya jumlah bahasa yang digunakan di Tanah Papua, lihat Gambar II.8.

Gambar II.11 Peta Budaya Papua Berdasarkan Penyebaran Bahasa



Untuk cabang olah raga Provinsi Papua terkenal dengan gudangnya atlet. Cabang olahraga sepak bola misalnya, banyak pemain-pemain nasional berbakat yang berasal dari Provinsi Papua. Antusiasme masyarakat terhadap cabang olahraga inipun sangat tinggi. Berkaitan dengan bidang pemuda dan olahraga, Provinsi Papua memiliki bakat-bakat yang unggul di berbagai cabang olah raga, sayangnya masih banyak bakat-bakat yang belum tersalurkan. Oleh karena itu pengembangan cabang olahraga sepak bola seperti perlu dilakukan untuk meningkatkan Kualitas pemuda dan juga keolahragaan di Provinsi Papua.

Selain itu, agar kegiatan olahraga di Provinsi Papua semakin berkembang, maka perlu diselenggarakan acara-acara olahraga, baik lokal, nasional dan internasional. Dengan banyaknya kegiatan ini maka diharapkan masyarakat Provinsi Papua akan mampu meningkatkan prestasi olahraga, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu contoh kegiatan adalah olahraga yang dilakukan di laut atau danau yang juga bisa menarik daya tarik wisatawan.

2.2. ASPEK PELAYANAN UMUM

Aspek pelayanan umum berkaitan dengan perkembangan kinerja layanan yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Papua, baik pada urusan wajib maupun pilihan.

2.3.1. Urusan Layanan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pendidikan

a. Angka Partisipasi

Berdasarkan data Susenas tahun 2008, jumlah anak usia dini (3-6 tahun) di Provinsi Papua adalah sebanyak 222.456 anak, dimana sebanyak 18.737 (8,42%) anak telah (2,97%) atau sedang (5,45%) mengikuti pendidikan PAUD baik melalui jalur formal maupun non formal. Angka PAUD pada tahun 2008 terlihat menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2007, anak yang memperoleh akses PAUD di Papua sebesar 12,64 persen. Kondisi ini masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan angka partisipasi PAUD di Indonesia sebesar 20 persen dari 20 juta anak yang ada, dan berdasarkan data UNESCO, ini merupakan angka terendah di dunia. Angka Partisipasi disajikan dalam partisipasi sekolah berkelompok usia sekolah dan partisipasi murni dan kasar untuk jenjang pendidikan SD, SMP dan SM.

Tabel II.33 Angka Partisipasi Sekolah menurut kelompok Umur di Papua Tahun 2009-2011

Angka Partisipasi Sekolah APS/tahun	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)
7 - 12	76,16	76,22	73,36
13 - 15	73,69	74,35	71,29
16 - 18	47,59	48,28	50,55

Sumber : PDA 2012, BPS Papua 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa 73,36 anak usia 7-12 tahun sedang mendapatkan layanan pendidikan, sehingga masih ada 14,64% anak usia tersebut tidak mendapatkan layanan. Untuk usia 13-15 tahun 71,29% penduduk telah mendapatkan layanan pendidikan sehingga 29% belum mendapatkan layanan. Untuk usia 16-18 tahun menunjukkan bahwa 50,55% telah mendapatkan layanan pendidikan dan separoh lainnya belum mendapatkan layanan.

Tabel II. 34 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	jumlah murid usia 7-12 thn	347.247	350.411	361.681	374.835	393.795
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	247.682	247.440	247.020	408.255	393.795
1.3.	APS SD/MI	84,62	85,44	81,18	84,10	N/A
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah murid usia 13-15 thn	85.916	90.878	92.773	94.466	99.529
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	128.462	125.620	123.120	188.427	330.768
2.3.	APS SMP/MTs	77,86	77,02	76,80	78,69	N/A

Sumber : PDA 2007-2012, BPS Papua 2007-2012

Tabel diatas menjelaskan Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs. Dimana dapat dilihat bahwa APS untuk SD ditahun 2010 mencapai 84,10 dan untuk tingkat SMP mencapai 78,86.

Tabel II.35 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Papua Tahun 2011

JENJANG PENDIDIKAN	APM (%)	APK (%)
SD	69,64	91,89
SMP	34,98	51,56
SM	28,72	40,83

Sumber : PDA 2012, BPS Papua 2012

Kinerja penyediaan layanan akses pendidikan di semua jenjang pendidikan menunjukkan kondisi yang nyata dengan terjadi kesenjangan antara angka partisipasi murni dengan partisipasi kasar. Di jenjang SD ditunjukkan bahwa pada tahun 2011, hampir 70% anak yang di SD ada pada usia 7-12 tahun sehingga sekitar 20% anak yang bersekolah di SD tidak pada usia tersebut. Jika dikaitkan dengan APS 7-12 tahun yang mencapai 73,36% maka dapat dinyatakan bahwa anak usia 7-12 tahun hampir seluruhnya sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD. APM jenjang SMP dicapai tahun 2011 sebesar 34,98% sehingga dengan APK 51,56% menggambarkan bahwa 16,58% siswa di SMP ada diluar usia sekolah SMP. Jika dikaitkan dengan APS yang mencapai 71,29 menunjukkan bahwa 36,3% anak usia 13-15 tahun sedang tidak bersekolah di SMP. Dengan memperhatikan kesenjangan antar capaian angka partisipasi, dan dengan rasio ketersediaan sekolah SD dengan kampung 0,6 (setiap SD rata-rata melayani 2 kampung) dan SMP dengan distrik 1,2 (setiap sekolah melayani satu distrik) maka APK ini terjadi karena anak-anak terlambat mendapatkan layanan pendidikan dasar. Dengan demikian, APK di Papua menjadi indikasi baik kualitas layanan pendidikan.

Dengan tipe pemukiman penduduk yang terpencil dan tersebar di daerah pedalaman, maka layanan pendidikan dasar disediakan melalui SD kecil untuk kelas awal disetiap kampung di pedalaman dengan pendekatan guru kunjung dari lulusan Kolase Pendidikan Guru khas Papua (KPG) dan memberikan muatan lebih pada lulusan Sekolah Teologi melalui para *Vikaris* melalui kegiatan *deakonia* yang sedang praktik lapangan sebagai penguatan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan gereja. Untuk itu, perlu peningkatan intervensi bagi KPG dan STT yang ada untuk meningkatkan kualitas implementasi program. SD-SMP Satu Atap berasrama disediakan untuk menampung lulusan SD kecil, dan dapat juga dikembangkan sampai penyediaan layanan jenjang pendidikan Sekolah menengah.

d. Rasio Ketersediaan Sekolah

Dari sisi jumlah maupun rasio guru murid, terlihat bahwa jumlah guru cukup memadai. Masalahnya, banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, sehingga terjadi kesenjangan jumlah guru antara daerah yang dekat dengan pusat kota dengan daerah-daerah terpencil seperti di wilayah pegunungan dan pesisir pantai.

Tabel II.36 Rasio Guru dan Murid Tahun 2011

JENJANG	TK	SD	SMP	SMA	SMK
Rasio Guru/Murid	25,12	31,69	21,41	17,61	18,36
Murid/ Sekolah	Na	175,65	197,22	277,21	

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Data rasio guru dengan jumlah siswa kasar yang tersaji pada tabel di atas harus dibandingkan dengan standart pelayanan minimal (SPM) jumlah siswa per rombongan belajar yang ditetapkan. Rasio ini masuk dalam perhitungan kasar karena untuk jenjang pendidikan SMP dan SMTA tidak menggunakan pembagi siswa per rombongan belajar tetapi pada perbandingan lurus jumlah jam mata pelajaran dengan jumlah rombongan belajar dibagi dengan jumlah beban kerja minimal mengajar 24 jam. Rasio di atas, secara kasar menunjukkan bahwa ketersediaan guru TK yang kekurangan, karena setiap guru TK hanya mengampu 10 siswa dengan 2 orang guru per kelas. Untuk SD telah mendekati ideal dengan jumlah siswa per rombongan belajar adalah 32 siswa dengan pendekatan guru kelas. Untuk SMP dan SMTA pemerintah lebih berhadapan dengan masalah distribusi. Untuk itu perlu dilakukan analisis distribusi guru proporsional untuk kepentingan efisiensi penyediaan layanan.

Rasio siswa per sekolah menunjukkan kondisi untuk jenjang SD mendekati ideal 102 siswa, dan SMP dan SMA dengan asumsi 3 ruang kelas maka kondisinya Papua sangat kekurangan ruang kelas. Rasio ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah jika diperhatikan pada tabel dibawah dapat dikatakan bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia sekolah khususnya jenjang pendidikan SD/MI. tahun 2007 jumlah gedung sekolah sebanak 1.221 unit dan ditahun 2011 naik menjadi 2.179. Hal ini perlu di tingkatkan pada tahun-tahun berikutnya demi memenuhi kebutuhan penduduk usia sekolah untuk merasa bangga pendidikan SD/MI.

Tabel II.37 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	1.221	1.270	1.315	2.134	2.179
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	347.247	343.857	361.681	374.835	400.235
1.3.	Rasio	35,16	36,93	36,36	56,93	54,44
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	277	306	330	479	495
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	128.462	125.620	123.120	188.427	330.768
2.3.	Rasio	21,56	24,36	26,80	25,42	14,97

Sumber: PDA 2012, BPS Papua 2012

Rasio guru dan murid dari tahun 2007 sampai 2011 menunjukkan perkembangan baik untuk SD/MI maupun untuk SMP/MTs. Pada tahun 2007 rasio murid dn guru untuk SD/MI adalah 432,55 sedang pada tahun 2011 menjadi 315,79 hal ini dikarenakan penambahan jumlah guru yang proporsional dengan penambahan anak usia sekolah . ditingkat Kabupaten Kota gambarannya lebih baik lagi. Rasio guru dan murid rata-rata 30.02 artinya setiap guru mengajar untuk 30 orang siswa.

Tabel II.38 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2007 s.d 2011 Provinsi Papua

No	Jenjang Pendidikan	2007	2008	2009	2010	2011
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah Guru	15.020	10.259	12.223	12.424	12.424
1.2.	Jumlah Murid	347.247	350.411	361.681	374.835	393.795
1.3.	Rasio	432,55	292,77	337,95	331,45	315,49
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah Guru	6.098	3.452	4.247	4.429	4.517
2.2.	Jumlah Murid	85.916	90.878	92.773	94.466	99.529
2.3.	Rasio	709,76	379,85	457,78	468,85	453,84

Sumber : PDA 2012, BPS Papua 2012

Tingkat kelulusan sekolah menunjukkan kecenderungan yang baik, dengan kondisi 2010/2011 yang sangat memuaskan, dimana hampir semua peserta pada masing-masing jenjang pendidikan mencapai kelulusan bahkan ada yang mencapai 100 persen kelulusan. SMK memiliki tingkat kelulusa yang paling rendah dibandingkan dengan SMA dimana tingkat kelulusannya hanya 92,9 persen.

Tabel II.39 Tingkat Kelulusan Siswa di Provinsi Papua

PESERTA UJIAN	TAHUN					
	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
	PERSENTASE KELULUSAN					
SMP	81,90	89,25	90,42	91,15	99,25	99,29
SMA (IPA)	93,09	88,24	85,51	92,41	99,40	98,95
SMA (IPS)	81,89	80,21	75,42	81,62	98,21	97,96
SMA (BAHASA)	95,50	85,96	80,68	76,16	100,00	100,00
SMK	88,98	82,22	90,55	88,90	97,00	92,9

Sumber : Buku Refleksi Pembangunan Provinsi Papua

Tabel II.40 Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru (2010)	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru (2010)	Jumlah Murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)	(6)	(7)	(8=6/7)
1	Merauke	1.324	31.041	24,58	566	9.734	17,69
2	Jayawijaya	712	18.194	25,71	204	6.318	30,97
3	Jayapura	973	17.923	19	411	7.083	17,91
4	Nabire	737	19.008	26,9	337	5.759	17,57
5	Kep. Yapen	811	15.732	19,94	249	5.011	20,31
6	Biak Numfor	1.290	22.571	17,54	378	7.319	19,43
7	Paniai	224	10.538	47,04	57	2.204	38,67
8	Punjak Jaya	159	5.404	33,99	57	1.273	22,33
9	Mimika	863	30.411	35,24	259	6.442	24,87
10	Boven Digoel	278	9.230	33,2	78	2.222	28,49
11	Mappi	397	17.389	43,3	125	3.185	25,48
12	Asmat	525	13.469	25,65	72	1.713	23,79
13	Yahukimo	459	26.466	57,66	104	2.903	27,91
14	Peg. Bintang	402	8.437	20,98	81	1.083	13,37
15	Tolikara	209	14.546	71,04	67	2.486	37,1
16	Sarmi	168	6.007	35,75	89	1.598	18,24
17	Keerom	473	8.745	20,29	193	2.059	12,53
18	Waropen	309	4.201	13,59	88	1.143	13,11
19	Supiori	144	3.591	24,93	53	1.065	20,09
20	Mam. Raya	148	5.845	39,49	47	551	11,72
21	Mamb. Tengah	72	4.867	137	33	758	22,97
22	Yalimo	23	3.492	44,78	23	719	31,26
23	Lani Jaya	276	12.362	67,59	63	4.217	49,43
24	Nduga	15	2.060	151	3	144	48
25	Puncak	101	4.467	44,23	37	820	22,16
26	Dogiyai	165	14.383	87,17	53	1.854	34,98
27	Deiyai	193	8.190	79,03	32	1.272	39,75
28	Intan Jaya	52	4.110	42,43	8	532	66,5
29	Kota Jayapura	1.163	32.156	28,59	662	12.999	20,36

Dari sisi jumlah maupun rasio guru murid, terlihat bahwa jumlah guru cukup memadai. Masalahnya, banyak guru yang enggan ditempatkan di daerah-daerah terpencil, sehingga terjadi kesenjangan jumlah guru antara daerah yang dekat dengan pusat kota dengan daerah–daerah terpencil seperti di wilayah pegunungan dan pesisir pantai.

Kesehatan

Sementara itu, proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga medis terlatih terus mengalami penurunan dari 59,53 persen pada tahun 2004 menjadi sebesar 46,90 persen pada tahun 2008. Persentase penolong kelahiran dengan tenaga medis terendah terdapat di Kabupaten Yahukimo yaitu 10.71 persen sedangkan yang tertinggi di Kabupaten Mimika sebesar 79.76 persen. Semakin rendahnya peranan tenaga medis terlatih (dokter/bidan/mantri kesehatan) dalam menolong proses kelahiran merupakan salah satu faktor besarnya angka kematian ibu (Capaian MDG’s Papua 2008). Berdasarkan data tahun 2006 – 2010, ketersediaan rumah sakit dan fasilitas lainnya seperti Puskesmas, Posyandu dan lainnya, terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2006 terdapat 18 rumah sakit, baik rumah sakit umum pemerintah maupun swasta dan meningkat menjadi 30 rumah sakit di tahun 2010. Pada tahun 2006, rasio penduduk terhadap jumlah rumah sakit adalah 1: 111.152 orang. Sementara pada tahun 2010, rasio tersebut tersebut adalah 1: 94.446 orang. Meski demikian, penyediaan obat-obatan masih mejadi kendala bagi pelayanan intensif. Sementara itu, perkembangan ketersediaan fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskemas, Pustu dan lainnya, juga mengalami pertumbuhan yang positif seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini :

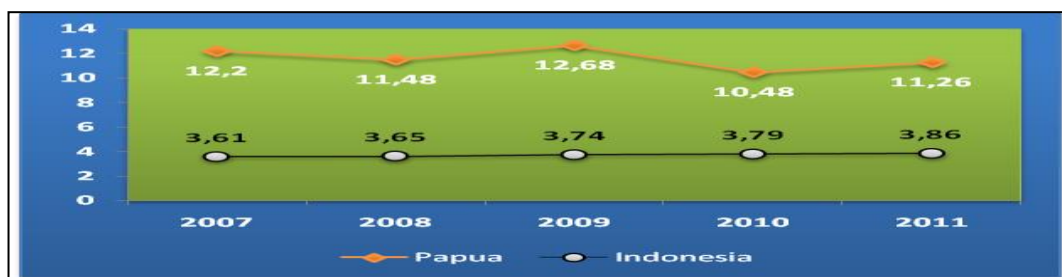
Tabel II.41Perkembangan Jumlah Puskesmas, Pustu, Puskesmas Keliling dan Posyandu Provinsi Papua Tahun 2006 - 2010

Tahun	Puskesmas	Pustu	Puskesmas Keliling	Posyandu
2006	164	589	281	-
2007	245	735	539	4.512
2008	260	731	783	-
2009	296	731	783	4.165
2010	320	791	857	4.427
2011	313	847	873	3.284

Sumber : Papua Dalam Angka, BPS Provinsi Papua, 2011

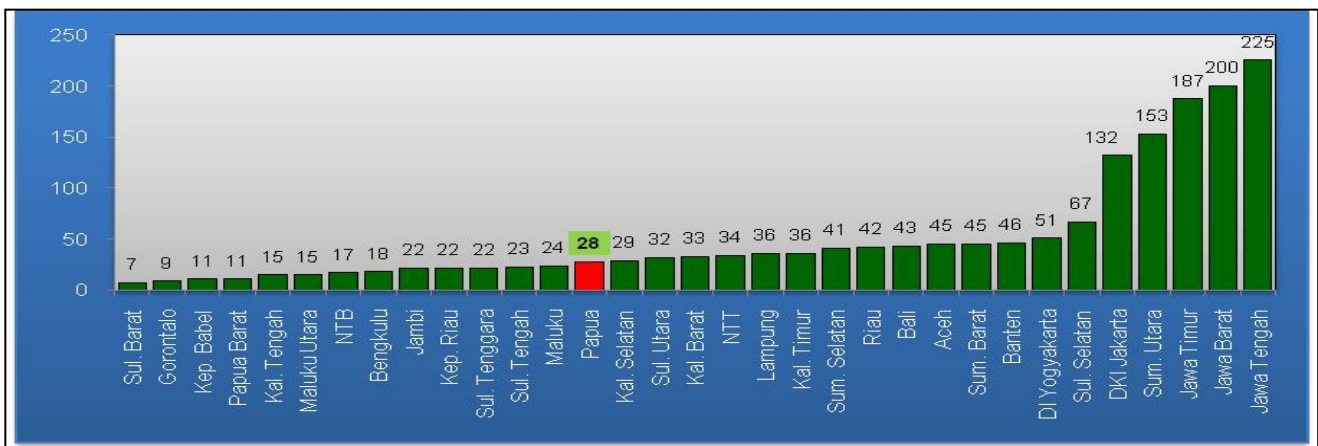
Dari segi pelayanan kesehatan dasar, dapat dilihat dari ketersediaan sarana dan tenaga kesehatan terhadap penduduk, misalnya Puskesmas dan Pustu terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan dua kali lipat, antara tahun 2006 dan 2010. Pada tahun 2006 jumlah Puskesmas adalah 164 unit, sementara pada tahun 2010 terdapat 320 unit. Jarak terjauh komunitas masyarakat ke fasilitas puskesmas terdekat terjadi di Kabupaten Jayawijaya yang mencapai lebih dari 100 km. Hal ini terlihat dari jumlah apotek yang ada. Pada tahun 2009, jumlah Apotek paling banyak terdapat di Kota Jayapura yaitu sebanyak 70 buah, diikuti oleh Mimika dan Merauke masing-masing sebanyak 16 buah dan Jayapura sebanyak 15 buah, sedangkan di beberapa wilayah lain bahkan belum tersedia.

Grafik II.9 Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk(Per 100.000 Penduduk) Papua Dan Indonesia 2007-2011



Sumber : BPS Papua

Grafik II.10 Jumlah Rumah Sakit (Umum+Khusus) Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2011



Sumber : BPS Papua

Tantangan lain di bidang kesehatan adalah antara lain masih terbatasnya tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan di puskesmas, terutama di daerah terpencil. Ini disebabkan oleh sedikit sekali dokter dan bidan yang bersedia untuk ditempatkan di wilayah terpencil. Di sini terlihat bahwa permasalahan tidak saja terbatas pada jumlah tenaga kesehatan, melainkan juga masalah motivasi dan komitmen dari para tenaga kesehatan ini. Selain itu juga dari segi pendidikan dan keterampilan, para tenaga kesehatan yang ada rata-rata belum mengenyam pendidikan sarjana.

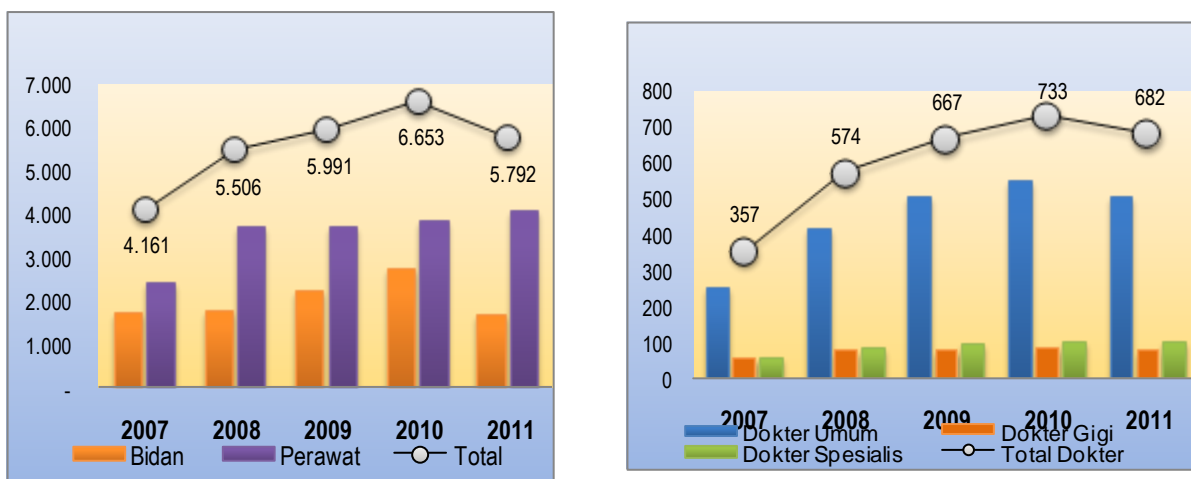
Tabel II.42 Perkembangan Jumlah Tenaga Dokter dan Medis Lainnya di Provinsi Papua

Tahun	Jumlah Puskesmas	Dokter	Dokter Gigi	Bidan	Perawat
2007	245	241	42	1.724	2.437
2008	260	294	44	1.571	2.514
2009	296	297	44	1.412	2.396
2010	320	342	47	1.434	2.630
2011	334	346	50	855	2.605

Sumber : BPS Papua

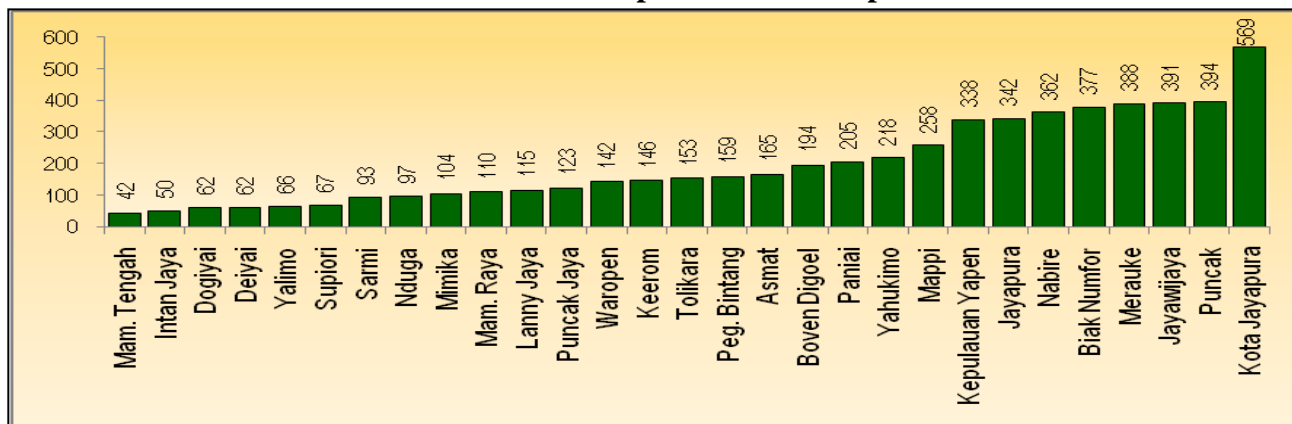
Jika memperhatikan kondisi budaya masyarakat Papua, maka kegiatan promosi kesehatan harus ditingkatkan dengan bekerjasama lembaga gereja, karena banyak penduduk yang lebih percaya kepada dukun daripada dokter atau bidan, khususnya dalam perawatan ibu hamil, melahirkan, dan balita. Akibatnya kasus ibu yang meninggal saat melahirkan dan bayi yang meninggal cukup banyak.

Grafik II.11 Jumlah Dokter, Bidan dan Perawat Di Papua Tahun 2007-2011



Sumber : BPS Papua

Grafik II.12 Jumlah Bidan dan Perawat Kabupaten/Kota di Papua Tahun 2011



Sumber : BPS Papua

Tantangan lain Papua adalah masalah sanitasi, khususnya mereka yang tinggal di pedalaman. Fasilitas air bersih sangat sulit di wilayah tersebut. Ketersediaan akses dan air bersih di Papua baru menjangkau sekitar 34% penduduk. Sumber mata air juga relatif berjarak cukup jauh dengan kampung. Selain itu, arsitektur rumah tradisional sebagian besar belum memperhatikan sistem sirkulasi udara dan saluran pembuangan yang memadai. Dengan kondisi ini, maka orientasi kerja tenaga kesehatan adalah lebih fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat melalui promosi kesehatan.

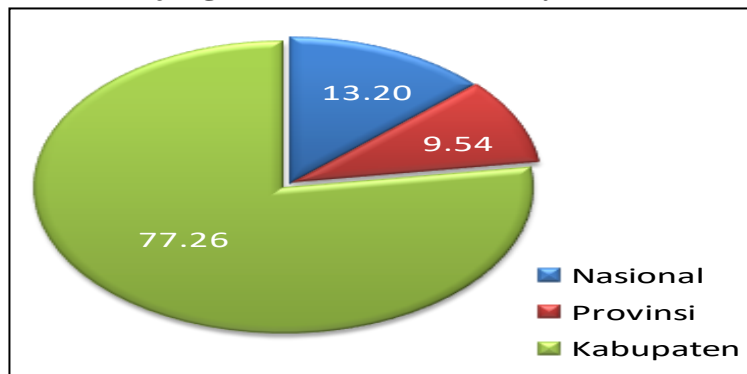
Pekerjaan Umum

Dengan infrastruktur yang baik, mobilitas masyarakat akan lebih mudah dilakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat termasuk mendorong peningkatan produktifitas bagi faktor-faktor produksi. Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana masih sangat terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kondisi ini diakibatkan oleh 1) Luasnya jangkauan pelayanan akibat penyebaran masyarakat dalam kelompok-kelompok kecil; 2) Kondisi topografi dan morfologi wilayah yang sangat beragam; dan 3) Keterbatasan pendanaan pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

Setiap tahunnya terdapat peningkatan panjang jalan kurang lebih 2 persen, atau setara 5 km per tahun. Sehingga total panjang jalan di Papua sampai dengan tahun 2009 adalah 15.702,78 km dengan rincian menurut statusnya yakni jalan nasional sekitar 13,20 persen, jalan provinsi sebanyak 9,54 persen, dan jalan kabupaten/kota sebesar 77,26 persen.

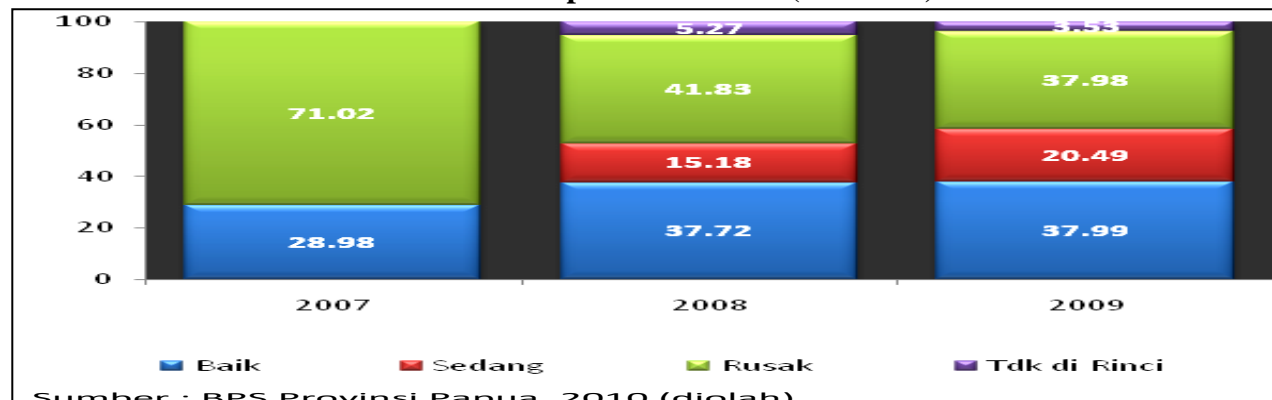
Dengan luas wilayah sebesar 319.036,05 km², ini berarti rasio aksesibilitas jalan di Provinsi Papua hingga tahun 2009 adalah 0,0492 km/km²; yang berarti untuk setiap luas wilayah 1 km² hanya terdapat jalan sepanjang 0,0492 km. Sedangkan rasio mobilitasnya mencapai 7,39 km/1000 orang, dengan kata lain untuk per 1000 penduduk tersedia jalan sepanjang 7,39 km. Bandingkan dengan Indonesia yang mempunyai rasio aksesibilitas mencapai 0,20 km/km² dan rasio mobilitasnya sekitar 1,65 km/1000 orang. Dengan melihat kondisi seperti ini maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesulitan untuk mengakses jalan di Papua paling tinggi dan tingkat mobilitas yang paling rendah di Indonesia.

Grafik II.13 Distribusi Panjang Jalan Menurut Statusnya Tahun 2009 (dalam %)



Sebagian besar jalan di Provinsi Papua dalam kondisi rusak ringan maupun rusak berat, terutama antara tahun 2007-2009, laju kerusakan jalan sangat tinggi sekitar 50,28 persen per tahun, sedangkan yang baik hanya 34,90 persen per tahun. Kondisi inilah yang menyebabkan mengapa pembangunan dan peningkatan jalan terlihat lebih lambat dibandingkan dengan pemeliharaan jalan.

Grafik II.14 Kondisi Jalan Di Provinsi Papua Tahun 2009(dalam %)



Perkembangan panjang jalan dapat dibagi kedalam 6 kawasan pembangunan, yakni Kawasan Jayapura-Lereh, Kawasan Sarmi - Mamberamo, Kawasan Biak-Teluk Cenderawasih, Kawasan Pegunungan Tengah, Kawasan Pantai Selatan-Timika, dan Kawasan Merauke - Asiki - Mappi. Berdasarkan status jalan, penyebaran jalan kabupaten/kota merupakan yang terbanyak dibandingkan jalan nasional maupun provinsi untuk setiap kawasan pembangunan, yakni sekitar 79,18 persen dari total panjang jalan 12.977,62 km. Sementara berdasarkan kawasan, program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan paling banyak terlihat di Kawasan Biak-Teluk Cenderawasih dan Merauke-Asiki-Mappi masing-masing sepanjang 3.903,77 km dan 3.274,33 km.

Tabel II.43 Panjang Jalan Di Provinsi Papua Di Rinci Menurut Status Jalan,Kawasan Pembangunan dan Kabupaten/Kota Tahun 2008

No.	Kawasan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Total
1.	Jayapura-Lereh	519,13	453,63	1 542,59	2 515,35
	Kota Jayapura	-	53,00	385,35	438,35
	Kabupaten Jayapura	519,13	400,63	579,99	1 499,75
	Keerom	-	-	577,25	577,25
2.	Sarmi-Memberamo	-	164,00	144,54	308,54
	Sarmi	-	164,00	144,54	308,54
	Mamberamo	-	-	-	-
3.	Biak-Teluk Cenderawasih	402,21	439,75	3 061,81	3 903,77
	Nabire	314,03	40,00	997,76	1 351,79
	Waropen	-	31,00	-	31,00
	Yapen	53,30	130,50	1 326,25	1 510,05
	Biak Numfor	34,88	200,29	737,80	972,97
	Supiori	-	37,96	-	37,96
4.	Pegunungan Tengah	-	-	2 612,84	2 612,84
	Paniai	-	-	1 173,46	1 173,46
	Puncak jaya	-	-	1 439,38	1 439,38
	Tolikara	-	-	-	-
	Yahukimo	-	-	-	-
	Pegunungan Bintang	-	-	-	-
5.	Pantai Selatan – Timika	-	38,75	632,58	671,33
	Mimika	-	38,75	632,58	671,33
	Asmat	-	-	-	-

No.	Kawasan	Nasional	Provinsi	Kabupaten	Total
6.	Merauke-Asiki, Mappi	604,91	243,00	2 426,42	3 274,33
	Merauke	604,91	243,00	1 330,18	2 178,09
	Boven Digoel	-	-	402,96	402,96
	Mappi	-	-	693,28	693,28
Total		1,526.25	1 175,13	10 276,24	12 977,62

Sumber : RTRW Provinsi Papua, 2009

Perhubungan

Kondisi topografi yang berbukit, jurang, gunung dan kepulauan mengakibatkan sarana dan prasarana transportasi udara menjadi tumpuan utama penduduk Papua selama ini. Ada 5 bandara di Papua yang tersedia untuk melayani rute antar provinsi yaitu Bandara Sentani di Kabupaten Jayapura, Bandara Mopah di Kabupaten Merauke, Bandara Moses Kilangin di Kabupaten Timika, Bandara Frans Kaisepo di Kabupaten Biak, Bandara Nabire di Kabupaten Nabire, dan terakhir Bandara Wamena di Kabupaten Wamena. Empat bandara yang disebutkan pertama sudah dapat menampung pesawat dengan jenis Boeing 737/400 dan DC 10. Sedangkan kapasitas Bandara Nabire dan Wamena hanya untuk pesawat F-27. Selengkapnya infrastruktur bandara pusat penyebaran di Provinsi Papua dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel II.44 Bandar Udara Pusat Penyebaran

Nama Bandara/Kabupaten	Runway (m)	Konstruksi	Kapasitas	Apron (m)	Terminal Penumpang (m)
Sentani – Jayapura	2 180 x 45	Aspal Beton	Boeing 737/400	470 x 81	4 292
Mopah – Merauke	1 850 x 30	Aspal Beton	Boeing 737/400	160 x 80	750
Wamena – Wamena	1 650 x 30	Aspal Kolakan	F-27	180 x 45	660
Nabire – Nabire	1 400 x 30	Aspal Kolakan	F-27	150 x 80	430
Frans Kaisiepo – Biak	3 570 x 45	Aspal Beton	DC - 10	170 x 60	2 224
Moses Kilangin – Timika	2 200 x 45	Aspal Beton	Boeing 737/400	70 x 60	Na

Sumber: Dinas Perhubungan Papua (2008)

Selain bandara antar provinsi yang berkapasitas pesawat besar, di Provinsi Papua juga sudah banyak dibangun fasilitas bandara perintis di beberapa kabupaten, yang umumnya mempunyai kapasitas pesawat kecil seperti DHC-6, dan C.208. Jumlah bandara perintis saat ini kurang lebih sebanyak 39 bandara yang sebagian besar memiliki landasan dengan konstruksi aspal kolakan, aspal penetrasi, aspal beton, coil semen dan rumput atau tanah keras. Khusus untuk Kabupaten Asmat, oleh karena wilayahnya sebagian besar berawa, bandara yang dibangun menggunakan konstruksi plat baja. Selengkapnya kondisi bandara perintis di Papua dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.45 Kondisi Pelabuhan Udara Perintis

Nama Bandara	Runway (m)	Konstruksi	Kapasitas	Apron (m)	T. Penumpang (m)
Serui – Yapen	650 x 20	Aspal Kolakan	DHC - 6	70 x 40	280
Dabra – Jayapura	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	-
Senggeh – Keerom	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	-
Lereh – Jayapura	600 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-

Nama Bandara	Runway (m)	Konstruksi	Kapasitas	Apron (m)	T. Penumpang (m)
Waris – Keerom	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Molof – Keerom	750 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Mararena – Sarmi	700 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	47 x 13	120
Kepi – Mappi	700 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	120
Ewer – Asmat	600 x 18	Plat Baja (PSP)	DHC - 6	-	120
Mindiptanah - Boven Digoel	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Kimaam – Merauke	650 x 18	Soil Cemen	DHC - 6	-	120
Senggo – Mappi	762 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Bade – Mappi	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Kamur – Mappi	700 x 45	Rumput	DHC - 6	-	-
Muting – Merauke	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Okaba – Merauke	600 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-
Tanah Merah - Boven Digul	1,000 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	70 x 40	120
Merdey – Manokwari	600 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Batom - Pegunungan Bintang	850 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	-
Oksibil - Pegunungan Bintang	700 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	60 x 40	120
Tion – Jayawijaya	700 x 30	Rumput	DHC - 6	-	-
Bokondini – Jayawijaya	600 x 23	Rumput	DHC - 6	-	-
Karubaga – Jayawijaya	730 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Mulia - Puncak Jaya	850 x 23	Aspal Penetrasi	DHC - 6	75 x 40	120
Illu - Puncak Jaya	800 x 30	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	-
Ilaga - Puncak Jaya	600 x 25	Rumput	DHC - 6	-	120
Sinak - Puncak Jaya	650 x 18	Rumput	DHC - 6	-	-
Sugapa – Paniai	650 x 24	Rumput	DHC - 6	-	-
Enarotali – Paniai	900 x 20	Aspal Penetrasi	DHC - 6	-	120
Obano – Paniai	730 x 20	Rumput	DHC - 6	-	120
Moanamani – Nabire	1,000 x 18	Rumput	DHC - 6	60 x 40	120
Waghete – Paniai	900 x 18	Rumput	DHC - 6	70 x 40	120
Utarom – Kaimana	1,650 x 30	Aspal Kolakan	F - 28	-	270
Yemburwo - Biak Numfor	1,800 x 23	Aspal	DHC - 6	-	-
Kokonau – Mimika	600 x 18	Aspal Penetrasi	DHC - 6	40 x 30	-
Jila – Mimika	500 x 15	Rumput	DHC - 6	40 x 30	-
Agimuga – Mimika	600 x 15	Rumput	DHC - 6	40 x 30	-
Bomakia - Boven Digul	400 x 24	Rumput	DHC - 6	-	-
Manam – Merauke	750 x 25	Aspal Beton	DHC - 6	-	-

Sumber : Dinas Perhubungan (2008)

Infrastruktur transportasi lainnya yang masih diandalkan oleh penduduk di Papua selama ini adalah angkutan laut, sungai dan penyeberangan. Di sepanjang wilayah pesisir pantai Papua mulai dari Jayapura, Nabire, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Waropen, dan seterusnya sampai ke Merauke sudah banyak dibangun pelabuhan-pelabuhan laut dan dermaga. Tiga diantaranya yang paling besar saat ini adalah pelabuhan laut Jayapura, Biak dan Merauke.

Pada Tabel II.42 terlihat bahwa ketiga pelabuhan besar ini sudah dapat menampung kontainer dengan kapasitas lapangan penumpukan kontainer untuk pelabuhan laut Jayapura yaitu 8.000 m², pelabuhan laut Merauke yaitu 2.450 m², dan pelabuhan laut Biak yaitu 3.600 m². Saat ini pelabuhan dengan dermaga yang paling panjang di Provinsi Papua adalah pelabuhan laut Jayapura dan Biak, masing-masing memiliki dermaga dengan panjang 132 m dan 142 m. Sedangkan untuk kolam labuh pada setiap pelabuhan antara 12.900 m² sampai dengan 19.800 m².

Tabel II.46 Kondisi Pelabuhan Laut Utama Di Provinsi Papua

Fasilitas	Jayapura	Merauke	Biak
Panjang Dermaga (m)	132	74	142
Daya Dukung (ton/m ³)	2.5	2.5	2.5
Kolam Labuh (m ²)	19.800	19.800	12.900
Luas Lantai (m ²)	1.200	240	150
Lapangan Penumpukan Kontainer (m ²)	8.000	2.450	3.600
Gudang Lini I 1(satu) unit (m ²)	2.200	640	800

Sumber : Dinas Perhubungan (2008)

Perumahan

Kondisi perumahan dan permukiman baik di kawasan perkotaan, perdesaan maupun di wilayah pedalaman dan terpencil didominasi oleh rumah dengan kondisi di bawah standar dan belum layak huni. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh: Pola permukiman masyarakat yang terpecah karena memiliki tradisi adat yang kuat, Ketersediaan sarana prasarana lingkungan perumahan dan permukiman yang tidak memadai sehingga terbentuk kawasan kumuh (slum area), Kemampuan ekonomi masyarakat yang masih rendah; dan Pembangunan kawasan perumahan dan permukiman yang berada pada kawasan lindung.

Sampai tahun 2010 pemerintah telah membangun sekitar 13.429 unit rumah untuk memenuhi kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat lokal. Selain pembangunan permukiman penduduk juga dilakukan pemberian bantuan bahan non-lokal, pembangunan sarana air bersih dan pembangunan fasilitas pendukung seperti penerangan kampung, jalan desa, rumah ibadah dan pelayanan kesehatan. Meski demikian, pemerintah daerah akan memperhatikan arsitektur rumah rakyat dengan arsitektur lokal sehingga akan lebih tepat guna dan sesuai budaya setempat.

Provinsi Papua masih tertinggal dibidang ketersediaan air bersih (air ledeng, pompa dan sumur terlindungi yang berjarak 10 meter atau lebih dari penampungan kotoran/tinja) dan fasilitas sanitasi. Masyarakat yang memiliki akses terhadap air bersih di Papua adalah 35% sedangkan rata-rata nasional adalah 59% dan akses terhadap fasilitas sanitasi adalah 56% sedangkan rata-rata nasional adalah 74% (Peach, 2009).

Lingkungan Hidup

Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang sangat besar harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Perkembangan yang terjadi di Papua justru sebaliknya dengan tingginya tingkat penebangan hutan (35%), pembangunan yang tidak memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan, kerusakan hutan bakau dan adanya pencemaran/kerusakan lingkungan pada daerah pantai/perairan dan kegiatan pertambangan yang merusak ekosistem yang ada. Kondisi ini diakibatkan oleh : Tidak adanya penegakan hukum (*law enforcement*) dan Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang tumpang tindih dan cenderung tidak ada koordinasi antar sektor. Saat ini di Papua telah beroperasi 46 HPH dengan luas areal 10.0466.690 Ha, dengan laju penebangan hutan 1000 ha/HPH. Kondisi ini akan mengancam kelestarian alam hayati dan plasma nutfah yang akan sangat berguna bagi masa depan. Pengalihan fungsi lahan telah menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan hidro-orologis, berkurangnya air tanah, erosi dan banjir.

Terdapat 22 kawasan konservasi di Provinsi Papua, yaitu :

- 1 kawasan ditentukan sebagai kawasan strategis nasional, yaitu TN Lorentz
- 11 kawasan ditentukan sebagai kawasan lindung nasional
- 1 kawasan merupakan KKL D
- 9 kawasan lainnya, yang penunjukannya didasarkan pada SK Menteri Pertanian/Kehutanan, ditentukan sebagai kawasan konservasi.

Di samping itu, potensi lestari hutan komersial mencapai 540 juta m³, perairan dengan luas 228.000 km² mempunyai potensi sebanyak 1.3 juta ton. Dengan seluruh kekayaan alam yang begitu besar jumlahnya akhirnya menempatkan Propinsi Papua pada deretan lima besar propinsi berpotensi terkaya di negara Indonesia.

Kekayaan sumberdaya alam berupa terumbu karang pada beberapa daerah pesisir seperti Biak, Yapen Waropen, dan Supiori yang memiliki luas wilayah laut dan memiliki terumbu karang yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, namun terjadi eksploitasi dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggungjawab karena tidak adanya pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Tabel II.47 Luasan Terumbu Karang di Pesisir

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Luas Wilayah Laut
1.	Supiori	Km ²	175,90
2.	Biak Numfor	Km ²	263,31
3.	Yapen	Km ²	114,60
4.	Waropen	Km ²	19,19
5.	Sarmi	Km ²	17,89
6.	Nabire	Km ²	126,26
7.	Mamberamo Raya	Km ²	0,00
8.	Jayapura	Km ²	Na
9.	Kota Jayapura	Km ²	1,41
10.	Mimika	Km ²	Na
11.	Mappi	Km ²	0,00
12.	Asmat	Km ²	Na
13.	Merauke	Km ²	Na

Sumber : Conservation International, 2003, dan hasil analisis

Lahan gambut yang memiliki fungsi tata air sehingga harus dipahami dengan sungguh-sungguh sebagai salah satu ekosistem penting untuk kehidupan. Total seluruh lahan gambut di Papua adalah 10.618.496 Ha yang ada hampir di seluruh kabupaten/kota di Papua.

Kawasan Mangrove terdapat di 13 kabupaten yang luas dan tersebar di 13 kabupaten dengan total luas mangrove pada tahun 2000 yaitu 1,2 juta Ha. Selama enam tahun dari tahun 2000 hingga tahun 2006 luas kawasan mangrove berkurang sekitar 6,71% akibat penebangan dan reklamasi kawasan pesisir yang dikonversi untuk kepentingan lain. Secara garis besar, mangrove memiliki fungsi sebagai penahan ombak, penyaring limbah yang berasal dari daratan (*land base pollution*), tempat bertelur, pemijahan, dan pemeliharaan ikan dan udang, penyerap karbon, penahan abrasi, dan berbagai fungsi lainnya yang saling berkaitan.

Penataan Ruang

Pemerintah Papua berkomitmen untuk mempertahankan kawasan hutan seluas 70% dari luas Provinsi Papua atau 90% dari hutan yang ada dalam mewujudkan Tata Ruang Lestari untuk Mendukung Pembangunan berkelanjutan. Hasil penyusunan RTRWP Papua menunjukkan adanya beberapa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan, yaitu Areal Penggunaan Lain (APL) bertambah 401.975 ha (+47,7%), Hutan Lindung bertambah 3.151.028 ha (+43,8%), Hutan Produksi berkurang 4.960.251 ha (-60%), HPK berkurang 2.847.146 ha (43,9%), HPT bertambah 4.338.821 ha (237,7%), KSA/KPA bertambah 312.225 ha (4,4%). (PIK, 2010).

Tabel II.48 Satuan Wilayah Pengembangan

SWP	Pusat Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Peran dan Fungsi Pusat Pengembangan	Penduduk Tahun 2030 (Jiwa)
SWP I	Kab/Kota Jayapura	Wilayah Pelayanan Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Seluruh Kabupaten Se Provinsi Papua	Ibukota Provinsi dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah utara	747,898
			Simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang ke kawasan internasional	
			Pusat kegiatan industri dan jasa-jasa berskala nasional Simpul utama transportasi skala nasional	
SWP II	Merauke	Wilayah Pelayanan Kabupaten Boven Digoel, Mappi	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah selatan	441,632
			Simpul utama kegiatan ekspor-impor dan kawasan perbatasan dengan PNG.	
			Pusat kegiatan industri dan pertanian berskala nasional Simpul utama transportasi skala nasional	
SWP III	Biak	Wilayah Pelayanan Kabupaten Supiori, Kep. Yapen, Waropen	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di kawasan Teluk Cendrawasih. Simpul utama kegiatan ekspor-impor berskala nasional Pusat kegiatan pertanian, industri dan perdagangan Simpul utama transportasi skala Internasional	306,091

SWP	Pusat Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Peran dan Fungsi Pusat Pengembangan	Penduduk Tahun 2030 (Jiwa)
SWP IV	Nabire	Wilayah Pelayanan Kabupaten Paniai, Dogiyai, Intan Jaya, Deiyai	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	493,081
			Pusat kegiatan pertanian dan pertambangan yang melayani beberapa kabupaten Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten	
			Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Biak	
SWP V	Jayawijaya	Wilayah Pelayanan Kab. Yalimo, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Yahukimo	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	796,675
			Pusat kegiatan pertanian yang melayani beberapa kabupaten	
			Simpul transportasi yang melayani beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah	
SWP VI	Mimika	Wilayah Pelayanan Kabupaten Asmat, Puncak	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Pusat pengembangan utama di bagian wilayah selatan Simpul utama kegiatan ekspor-impor berskala internasional Pusat kegiatan pertambangan dan industri berskala nasional Simpul utama transportasi skala nasional	399,549

SWP	Pusat Pengembangan	Wilayah Pengembangan	Peran dan Fungsi Pusat Pengembangan	Penduduk Tahun 2030 (Jiwa)
SWP VII	Sarmi	Wilayah Pelayanan Kabupaten Mamberamo Raya	Ibukota Kabupaten dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	72,21
			Pusat kegiatan pertanian yang melayani beberapa kabupaten	
			Simpul transportasi yang melayani kabupaten Mamberamo Raya, Jayapura Simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN Jayapura	

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah, menggambarkan kondisi yang belum maju, dari data yang tersedia rata-rata masih sekitar 10,34% perempuan yang masuk dan terlibat dalam organisasi pemerintahan.

Kualitas hidup perempuan dan anak ditentukan dengan mencermati indikasi rasio partisipasi sekolah, kualitas kesehatan perempuan dan anak serta komparasi upah antar gender. Demokratisasi telah mendorong peran perempuan dan peningkatan pemberdayaan perempuan (*gender empowerment*) dalam dunia kerja, partisipasi sosial, dunia politik, ekonomi dan dalam pengambilan keputusan yang tercermin dari indeks pemberdayaan gender pada tahun 2002 sebesar 49%. Namun demikian tradisi dalam hubungan sosial antara laki-laki-perempuan dalam keluarga dan masyarakat belum berpihak pada kepentingan kaum perempuan.

Tabel II.49 Perkembangan Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga Pemerintah Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	16.300	19.478	19.772	23.854	26.766
2.	Jumlah Pekerja Perempuan					
3.	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah					

Sumber : BPS Papua

Penanaman Modal

Jumlah proyek PMDN yang disetujui pemerintah pada tahun 2011 mencapai 61 proyek dengan realisasi nilai investasi mencapai 7.982 triliun rupiah dan realisasi jumlah tenaga kerja 14.049.021 orang. Jumlah PMDN terbanyak di Kabupaten Jayapura (8 proyek), sedangkan nilai investasi terbanyak di Kota Jayapura (857,5 milyar rupiah). Jumlah proyek PMA yang disetujui pemerintah pada tahun 2011 ada 87 proyek dengan realisasi nilai investasi mencapai 11.859 triliun rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 14.049.021 orang. Jumlah PMA terbanyak di Kabupaten Mimika (19 proyek), sedangkan nilai investasi PMA terbesar di sektor pertambangan.

Tabel II.50 Jumlah Investor PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2011 Provinsi Papua

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3+4)
2007	Jumlah Investor	32	54	86
2008	Jumlah Investor	28	65	93
2009	Jumlah Investor	29	74	103
2010	Jumlah Investor	29	79	108
2011	Jumlah Investor	30	87	117

Sumber : BPS Papua

Tabel II.51 Jumlah Investasi PMDN/PMA Tahun 2007 s.d 2011 Provinsi Papua

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2007	86	42.880.897	61	7.982.171
2008	93	62.463.273	64	7.999.698
2009	103	68.181.382	71	8.383.959
2010	108	67.637.075	73	10.652.556
2011	117	67.772.073	117	11.859.878

Sumber : BPS Papua

Tabel II.52 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2007 s.d 2011 Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	11.917.845	11.605.280	11.745.727	13.580.626	14.049.021
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	86	93	103	108	117
3	Rasio daya serap tenaga kerja	138.580	124.788	114.036	125.747	120.077

Sumber : BPS Papua

Jumlah proyek PMDN yang disetujui pemerintah pada tahun 2011 mencapai 30 proyek dengan realisasi nilai investasi mencapai 3,263 triliun rupiah dan realisasi jumlah tenaga kerja 12.400 orang. Jumlah PMDN terbanyak di Kabupaten Jayapura (8 proyek), edangkan nilai investasi terbanyak di Kota Jayapura (857,5 milyar rupiah). Jumlah proyek PMA yang disetujui pemerintah pada tahun 2011 ada 87 proyek dengan realisasi nilai nvestasi mencapai 8,596 triliun rupiah dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 20.131 orang. Jumlah PMA terbanyak di Kabupaten Mimika (19 proyek), sedangkan nilai investasi PMA terbesar di sektor pertambangan.

Sosial

Pada tahun 2011, terdapat 145 panti asuhan yang dikelola oleh swasta dan 4 panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tercatat sekitar 21.871 orang, dimana 24,64 persen penyandang cacat, 24,58 persen jompo terlantar dan 14,16 persen anak terlantar.

Koperasi

Jumlah koperasi di Papua tahun 2011 mencapai 2.483 unit atau naik 7,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Koperasi terdiri dari 14,13 persen KUD dan 85,86 persen koperasi non KUD. Jumlah unit koperasi terbanyak terdapat di Kota Jayapura (335 unit atau 13,5 persen), Kabupaten Mimika (307 unit atau 12,36 persen) dan Kabupaten Merauke (306 unit atau 12,32 persen). Jumlah Koperasi Unit Desa (KUD) turun 2,22 persen dari tahun sebelumnya, yaitu dari 359 unit pada tahun 2010 menjadi 351 unit pada tahun 2011. KUD terbanyak berada di Kabupaten Merauke (62 unit) dan Kabupaten Jayapura (35 unit). Koperasi Non KUD mengalami peningkatan, yaitu dari 1.839 unit pada tahun 2010 menjadi 2.132 unit pada tahun 2011. Koperasi non KUD paling banyak terdapat di Kota Jayapura (330 unit). Anggota koperasi pada tahun 2011 mencapai 127.447 atau turun 17,3 persen dibanding tahun 2010. Jumlah anggota KUD turun dari 45.890 pada tahun 2010 menjadi 43.491 pada tahun 2011, hal yang sama juga terjadi pada jumlah anggota koperasi non KUD yang turun dari 102.269 pada tahun 2010 menjadi 84.845 pada tahun 2011.

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Pemerintahan Daerah; telah dilaksanakan untuk LPSE tetapi belum diikuti untuk layanan perijinan. Informasi yang disajikan dalam website juga belum dioptimalkan sebagai sarana utama promosi daerah dan pelayanan masyarakat sehingga masih dilihat sebagai kebutuhan memenuhi persyaratan.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); sebagai salah satu alat yang disiapkan Oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah belum mendapatkan input konstruktif terkait kepuasan terhadap kinerja pemerintah.

Otonomi Khusus; telah dilaksanakan mulai tahun 2002, dan hingga sekarang telah memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat asli Papua. Meski demikian, hingga saat ini masih terdengar berbagai ketidakpuasan dari masyarakat atas pelaksanaan program otonomi khusus ini yang telah masuk tahun ke 12. Paradigma pelaksanaan pemerintahan era otonomi khusus adalah bertumpu pada kewenangan luas bagi pemerintah provinsi Papua dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan harkat hidup orang asli Papua, sehingga bukan sekedar dana stimulus otonomi khusus.

Belum semua mandat regulasi dalam Undang-Undang 21/2001 diterjemahkan dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdapus), dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), aturan untuk bidang mandat yang belum terintegrasi, kurang sosialisasi untuk perdapus/si yang telah disusun, kurang kapasitas pelaksana dan kelompok pemikir inovatif, belum tersedia panduan umum pembangunan tahunan era otonomi khusus termasuk indikator kinerja sesuai mandat per bidang serta SPM-nya, dan sistem monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan yang belum baku serta belum didukung oleh data dasar dan pembangunan yang memadai. Master Plan pembangunan era otonomi khusus yang harus ditetapkan dalam bentuk Perdapus sebagai mandat warga Papua belum ditetapkan meski sudah 12 tahun berjalan, terutama untuk memastikan program yang menyangkut hajat hidup orang Papua asli, memiliki daya ungkit kuat dan berkelanjutan dan berdampak pada perubahan mind set dan culture set menuju peradaban baru yang produktif.

2.3.2. Urusan Pilihan

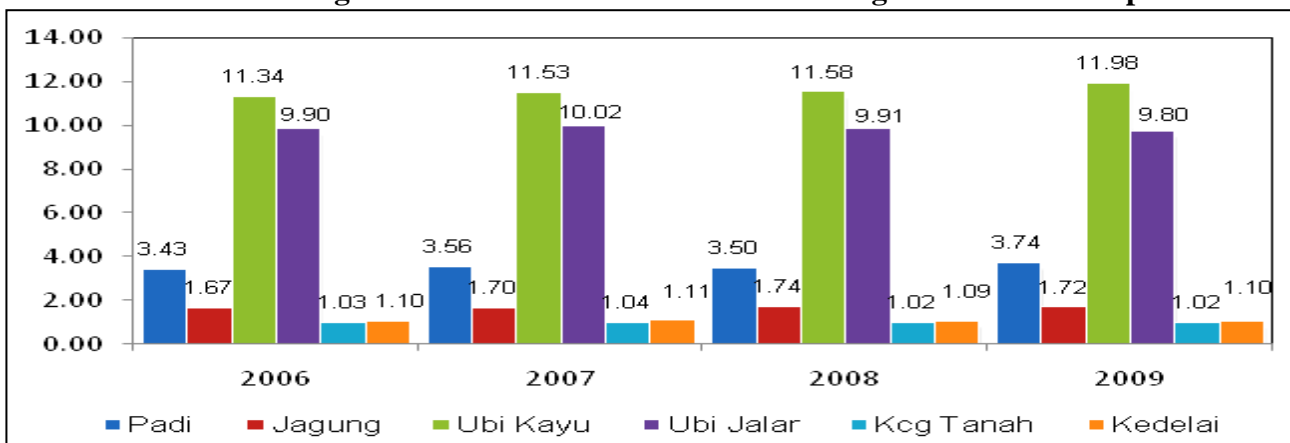
Urusan Pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Provinsi Papua.

Pertanian

Sektor pertanian menyumbang 24% PDRB dan merupakan mata pencaharian pokok 70% warga Papua. Sampai saat ini, masyarakat Papua Asli telah memasuki peradaban agraris awal dalam bertani dan berkebun. Kegiatan bertani dilakukan masih dengan kapasitas terbatas dan sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten). Potensi pertanian di Papua telah ditetapkan oleh pemerintah dalam dokumen MP3EI dengan menetapkan Kabupaten Merauke sebagai lumbung pangan nasional.

Pemerintah Provinsi Papua mengarahkan pembangunan sektor pertanian kepada peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, perluasan aneka ragam hasil produksi pertanian, peningkatan ketrampilan sumber daya manusia khususnya bagi petani, dan peningkatan produksi ekspor komoditi hasil pertanian melalui fasilitasi pemerintah. Perkembangan produktivitas pertanian tanaman pangan di Papua cenderung lambat. Sebagaimana yang disajikan dalam grafik II.15 tingkat produktivitas 6 komoditas tanaman pangan yang strategis setiap tahunnya mengalami kenaikan sangat kecil, bahkan cenderung tetap. Produktifitas lahan untuk tanaman padi sepanjang tahun 2006-2009 rata-rata hanya mengalami peningkatan sekitar 2,59% per tahun, kemudian untuk ubi kayu rata-rata tumbuh 1,88% per tahun, sedangkan kedelai sebesar 0,14% per tahun. Adapun untuk tanaman ubi jalar dan kacang tanah malah terlihat menurun sekitar 0,34% per tahun.

Grafik II.15 Perkembangan Produktifitas Lahan Tanaman Pangan Di Provinsi Papua



Sumber: BPS Papua, 2010 (diolah)

Perkebunan

Perkebunan di Provinsi Papua dalam pengelolaannya sangat terkait erat dengan tiga pelaku usaha yakni masyarakat adat, swasta, dan pemerintah daerah. Luas areal tanaman perkebunan di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2007 sudah mencapai 127.705 hektar dengan jumlah produksi sebanyak 108.178 ton, dengan kata lain tingkat produktifitas lahan yang dihasilkan mencapai 0,85 ton per hektar.

Tabel II. 53 Luas Areal dan Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Pengusahaan Tahun 2007

Jenis Pengusaha	Lahan (hektar)	Produksi (ton)	Produktifitas (ton/hektar)
Rakyat	84.155	46.599	0,55
Negara	10.300	29.200	2,83
Swasta	33.250	32.379	0,97
Jumlah	127.705	108.178	0,85

Sumber: BPS Papua, 2010 (data diolah)

Lahan perkebunan di Provinsi Papua lebih banyak diusahakan oleh rakyat yaitu kurang lebih sekitar 65,90% dari total lahan yang tersedia. Demikian juga dengan jumlah produksinya, didominasi oleh hasil perkebunan rakyat sekitar 43,08% dari total pangsa produksi perkebunan. Namun demikian, tingkat produktifitas lahan perkebunan rakyat ternyata jauh lebih rendah dibandingkan perkebunan negara. Sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.54 secara rata-rata tingkat produktifitas perkebunan negara bisa mencapai 2,83 ton per hektar, sedangkan perkebunan rakyat hanya 0,55 ton perhektar. Ini berarti tingkat teknologi usaha perkebunan yang dilakukan oleh negara jauh lebih baik dibandingkan perkebunan rakyat.

Tabel II.54 Potensi Perkebunan Rakyat Tahun 2008

Jenis Komoditi	Lahan (ha)	Produksi (ton)	Petani (org)	Produktifitas		Penguasaan Lahan (ha/org)
				Lahan (ton/ha)	Tani (ton/org)	
Karet	4.682	1531	6.881	0.33	0.22	0.68
Kelapa Sawit	9.818	16.135	11234	1.64	1.44	0.87
Kopi	8.492	2.664	18536	0.31	0.14	0.46
Kelapa	314	1.252	36252	3.99	0.03	0.01
Coklat	20.964	11.515	24343	0.55	0.47	0.86
Cengkeh	2.061	69	3280	0.03	0.02	0.63
Kelapa Hibrida	122	26	278	0.21	0.09	0.44
Jarak	467	4	547	0.01	0.01	0.85
Lada	41	9	154	0.22	0.06	0.27
Kapuk	737	64	5989	0.09	0.01	0.12
Panili	341	1	490	0.00	0.00	0.70
Jambu Mente	3.356	509	7587	0.15	0.07	0.44
Pinang	1.653	350	5407	0.21	0.06	0.31
Sagu	458	106	1360	0.23	0.08	0.34
Total	53.506	34.235	122338	0.64	0.28	0.44

Sumber: BPS Papua, 2010 (diolah)

Jenis komoditas perkebunan yang paling banyak diusahakan oleh rakyat selama ini adalah kelapa sawit dan coklat. Jumlah produksi kelapa sawit yang diusahakan rakyat sampai dengan tahun 2008 kurang lebih mencapai 16.135 ton atau menguasai pangsa produksi perkebunan rakyatsekitar 47,13%. Sedangkan produksi coklat sebanyak 11.515 ton atau 33,64% dari total produksi perkebunan. Komoditi perkebunan lainnya yang cukup banyak dikelola oleh rakyat adalah karet , kopi , kelapapinang dan sagu.

Kehutanan

Dari tahun ke tahun, luas hutan yang ada di Provinsi Papua semakin berkurang. Pada tahun 2007, luas hutan di Papua sebesar 32.271.799 ha, kemudian pada tahun 2008 turun menjadi 31.690.080 ha (turun 1,80 persen) dan pada tahun 2009 berkurang lagi sebesar 10,83 persen. Luas hutan lindung sebesar 8.277.916 ha atau 29,29 persen dari total keseluruhan. Luas hutan yang digunakan untuk kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam sebesar 5.675.861 ha.

Tabel II.55 Luas Hutan menurut Peta Paduserasi (Ha)

Tahun	Hutan Lindung	Kawasan Suaka Alam	Hutan Produksi		
			Terbatas	Tetap	Hutan Produksi Yang Dikonversikan
2007	6.808.711	na	1.817.062	8.189.687	8.189.687
2008	9.190.585	na	1.763.531	8.833.039	8.833.039
2009	8.277.916	5.675.861	1.904.896	8.135.076	8.135.076

Sumber : BPS Papua, 2010 (diolah)

Adapun produksi kehutanan yang dapat dihasilkan oleh Papua selama ini adalah kayu bulat yang meliputi meranti, merbau, sengon, dan lain-lain, diperkirakan ada 150 jenis kayu komersial yang tersedia di hutan Papua. Selain itu ada juga hasil hutan ikutannya berupa kulit masoi, rotan, kayu gaharu, arang, kulit lawang, tali kuning dan gambir.

Energi dan Sumber Daya Mineral

Energi menjadi salah satu prioritas kebutuhan masyarakat Papua, khususnya listrik. Ketersediaan listrik masih didukung oleh ketersediaan yang sangat terbatas dan cenderung fokus untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kekayaan sumber energi terbarukan yang dimiliki Papua diantaranya danau, sungai besar dan panas bumi sama sekali belum disentuh pemanfaatannya karena terbentur dengan kebutuhan mega investasi. Disisi lain, ketersediaan energi adalah prasyarat dasar pertumbuhan ekonomi khususnya dari sektor manufaktur. Dibutuhkan terobosan besar dari pemerintah daerah dengan menggunakan kewenangan luas otonomi khusus untuk mengembangkan skema pembangunan sumber pembangkit listrik ramah lingkungan melalui sindikasi pendanaan yang ramah. Upaya ini merupakan terobosan jangka panjang dan memiliki daya ungkit yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Potensi bahan galian tambang baik yang strategis maupun dipermukaan seperti tembaga, perak, emas, minyak, gas alam, marmer, pasir kwarsa, kapur dan lain-lain banyak tersedia. Untuk bahan tambang emas dan tembaga diperkirakan proven deposit yang tersedia di kawasan konsesi Freeport saja mencapai sekitar 2.5 milyar ton, belum ditambah dengan 10 titik lainnya yang berada di kawasan Pegunungan Tengah, yang diperkirakan juga mengandung bahan tambang yang berlimpah dengan nilai kurang lebih sama dengan kawasan Freeport.

Struktur perekonomian Papua hingga saat ini didominasi oleh sektor pertambangan, terutama hasil pertambangan PT Freeport dengan rata-rata share 60 persen. Selama tahun 2009, produksi konsentrat tembaga dan emas PT Freeport mencapai 2.468.158 DMT, produksi terbanyak terjadi pada Bulan Mei dengan jumlah produksi 280.555 DMT. Ketergantungan pada satu sektor saja tentu tidak dapat menjamin keberlanjutan sumber pendanaan pembangunan karena suatu saat sumber daya alam sebagai sumber atau modal pembangunan yang terus dikuras tanpa ada penciptaan kembali akan habis. Keberlanjutan sumber pembiayaan pembangunan akan terganggu. Di samping itu, secara nyata bahwa hasil dari sektor pertambangan belum sepenuhnya mampu menjamin peningkatan atau perbaikan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pertambangan. Untuk saat ini tenaga kerja yang bekerja di wilayah tambang masih didominasi oleh tenaga kerja yang berasal dari luar Papua.

Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan dan kelautan, di mana produksi perikanan pada tahun 2009 tercatat 242.969 ton yang terdiri dari 233.165 ton perikanan laut (95,96 persen), 7.515,8 ton dari perairan umum (3,09 persen) dan 2.289,1 ton dari perikanan budidaya (0,94 persen). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi perikanan tahun 2009 naik sebesar 3,64 persen. Adapun nilai produksi perikanan selama tahun 2009 mencapai 4,346 triliun rupiah atau meningkat 37,79 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total nilai produksi tersebut, 95,57 persennya merupakan nilai produksi perikanan laut.

sebelumnya. Dari total nilai produksi tersebut, 95,57 persennya merupakan nilai produksi perikanan laut.

Tabel II.56 Produksi Perikanan (ton)

Tahun	Perikanan Tangkap		Budidaya	Jumlah
	Laut	Umum		
2007	224.190,80	6.926,70	1.587,80	232.705,30
2008	225.054,30	7.311,90	2.072,00	234.438,20
2009	233.165,00	7.515,80	2.289,10	242.969,90
2010	231.543,20	7.519,50	1.052,20	240.115,00
2011	269.257,80	7.624,80	4.350,70	281.233,30

Sumber : PDA Provinsi Papua, BPS Provinsi Papua, 2011

Beberapa jenis komoditi laut yang telah diusahakan oleh nelayan rakyat selama ini dari jenis ikan antara lain ikan kakap, tuna, bawal, merah, kembung, tenggiri, dan lain-lain. Kemudian dari binatang kulit keras yang sangat potensial diantaranya keping dan udang. Terakhir dari binatang kulit lunak adalah cumi-cumi, sontong dan rumput laut. Potensi perikanan tangkap yang sangat besar dan hingga kini belum sepenuhnya digarap dapat menjadi salah satu prioritas pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kendala jarak terhadap pusat-pusat penangkapan ikan harus diatasi dengan segera dan dikelola dengan manajemen yang terintegrasi dari penangkapan hingga pengolahan hasil termasuk pemasarannya. Sumbangan sektor pertanian ikan tangkap harus mampu menggantikan peran sektor pertambangan yang bersifat eksploitatif dan merusak lingkungan dan menimbulkan beban pembangunan berupa hilangnya manfaat sosial yang selama ini seluruh biaya perbaikan lingkungan justru dihitung sebagai pos pengeluaran yang mampu memberikan nilai tambah pada perekonomian.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu daerah dengan produksi perikanan tangkap yang paling tinggi di Papua mengingat lokasinya yang berhadapan dengan perairan lepas Laut Arafuru yang terkenal dengan potensi ikan demersal dan pelagisnya. Namun, potensi tersebut dapat dikembangkan dengan kegiatan ekonomi perikanan dan juga pengelolaan lebih lanjut seperti pengolahan ikan, pengalengan dan lain sebagainya. Usaha pengalengan ikan telah berkembang di Kabupaten Merauke meski dengan kondisi TPI dan PPI yang tidak termanfaatkan secara optimal, dan sudah didukung oleh adanya Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMP). Negara tujuan ekspor dari wilayah Merauke ini mencapai Hongkong, Spanyol, Vietnam, China, Thailand, Australia, Jepang dan Italia untuk jenis komoditi Udang beku. Sedangkan untuk ikan beku negara tujuan ekspor adalah China dan Thailand serta fillet ikan dengan negara tujuan Australia. Berdasarkan pengalaman Kabupaten Merauke, maka perlu ditetapkan wilayah pengembangan cepat tumbuh untuk perikanan tangkap berdasarkan pemetaan RTRWN.

Pariwisata

Provinsi Papua adalah salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki banyak sekali obyek wisata antara lain obyek Wisata Alam, Wisata Gunung, Wisata Bahari, Wisata Pantai, Wisata Sejarah, Wisata Budaya, Wisata Minat Khusus, Wisata Kuliner, Wisata Olah Raga, Wisata Belanja, dan lain-lain.

Di Papua terdapat beberapa pegunungan sebagai obyek wisata, diantaranya yang terkenal adalah pegunungan Jayawijaya yang merupakannya untuk deretan pegunungan yang terbentang memanjang di tengah provinsi Papua Barat dan Papua (Indonesia) hingga Papua Newguinea di Pulau Irian. Selain menjadi tempat wisata bagi para pendaki, Pegunungan Jayawijaya juga menjadi wisata bagi para peminat khusus peneliti geologi dunia. Pegunungan Jayawijaya merupakan satu-satunya pegunungan dan gunung di Indonesia yang memiliki puncak yang tertutup oleh salju abadi. Meskipun tidak seluruh puncak dari gugusan Pegunungan Jayawijaya yang memiliki salju. Beberapa puncak pegunungan Jayawijaya yang dikenal seluruh dunia antara lain: Puncak Jaya (dulu namanya puncak Carstenz Pyramide), Puncak Meren, Puncak Northwall, Puncak Ngga Pulu, Puncak Sudirman dan Puncak Trikora.

Provinsi Papua juga memiliki beberapa taman nasional yang sudah dikenal lama oleh wisatawan manca negara, yang paling terkenal adalah Taman Nasional Lorentz. Dengan luas wilayah sebesar 25.000 km², Taman Lorentz menjadi taman nasional terbesar di Asia Tenggara. Taman Nasional Lorentz merupakan perwakilan dari ekosistem terlengkap untuk keanekaragaman hayati di Asia Tenggara dan Pasifik. Kawasan ini juga merupakan salah satu diantara tiga kawasan di dunia yang mempunyai gletser di daerah tropis. Selain sebagai tempat rekreasi dan wisata alam seperti penjelajahan hutan, pendakian gunung, panorama alam, air terjun, Taman Nasional Lorentz juga dapat ditawarkan sebagai tempat pengamatan berbagai jenis flora dan fauna.

Taman lainnya yang potensial sebagai obyek wisata, khususnya wisata bahari adalah Taman Nasional Teluk Cendrawasih yang secara administratif berada dalam wilayah dua kabupaten, yaitu Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Nabire. Taman Nasional Teluk Cendrawasih merupakan taman nasional perairan laut terluas di Indonesia, terdiri dari daratan dan pesisir pantai (0,9%), daratan pulau-pulau (3,8%), terumbu karang (5,5%), dan perairan lautan (89,8%).

Taman Nasional Wasur yang terletak di Kabupaten Merauke juga merupakan salah satu obyek wisata yang banyak dikunjungi wisatawan. Di taman nasional ini ditemukan sekitar 390 jenis burung, dan terdapat 80 jenis mamalia. Salah satu ciri Taman Nasional Wasur adalah rumah rayap (musamus) yang dikenal juga dengan sebutan rumah semut. Keistimewaan dari rumah rayap ini adalah rancangan ventilasinya yang berupa lorong-lorong yang membantu melindungi dari air hujan, dan membantu melepas panas ke udara ketika musim panas tiba. Rumah rayap ini bisa mencapai ketinggian sampai 5 meter dengan bahan sarangnya terbuat dari rumput dan lumpur yang disusun oleh rayap. Menggunakan campuran dari rumput kering sebagai bahan utama dan liur sebagai semen untuk merekatkannya, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk membangun istana rayap ini.

Di Kabupaten Jayapura ada sebuah danau yang sangat mempesona panoramanya yakni danau Sentani. Dengan luas 3,63 hektar dan ketinggian 75 meter di atas permukaan laut, Danau Sentani telah menjadi salah satu tujuan wisata di Kabupaten Jayapura. Dalam dua tahun terakhir ini Danau Sentani telah berbenah diri, dan menjadi ajang promosi wisata di Provinsi Papua melalui pelaksanaan sebuah festival yang dinamakan Festival Danau Sentani atau FDS. Pada tahun 2010 yang lalu, FDS digelar dengan nuansa unik dan inovatif melalui tiga konsep utama yaitu konsep pagelaran yakni atraksi dan lomba budaya khas Papua, konsep pameran yakni promosi, investasi dan perdagangan dan ketiga adalah konsep wisata yakni tour yang menarik dengan menikmati panorama Danau Sentani yang indah, mengunjungi kampung wisata Tablanusu serta tempat wisata lainnya. Danau ini merupakan tempat yang sangat bagus untuk berenang, bersampan, memancing, bermain ski air dan melakukan beberapa olah raga air lainnya. Selain Danau Sentani, danau lainnya yang juga eksotis dan mempesona adalah Danau Paniai. Danau yang berada di Kabupaten Paniai terletak di daerah pegunungan dan perbukitan yang berhawa sejuk dan menyimpan aneka jenis ikan air tawar dan udang serta nilai-nilai seni budaya Suku Mee dan Suku Moni. Danau Paniai merupakan salah satu danau terbaik dan terindah di Indonesia karena menyuguhkan panorama alam yang rancak, air danau yang biru, dan suasana sekitar nan asri. Disamping itu juga terdapat bebatuan dan pasir di tepian danau, serta dikelilingi oleh tebing-tebing yang tinggi.

Perindustrian dan Perdagangan

Nilai ekspor dan impor Papua mempunyai proporsi yang sangat besar dibandingkan dengan total PDRB. Secara riil nilai ekspor ditambah impor mencapai 62% dari nilai riil PDRB (Sumber BI Jayapura, 2004). Kondisi ini disebabkan oleh pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat Papua berupa bahan makanan, makanan jadi, kendaraan bermotor, bahan bangunan, produk elektronik dan beberapa barang kebutuhan pokok lainnya, sampai saat ini masih didatangkan dari luar Papua dan bahkan dari luar negeri.

Ekspor non migas Provinsi Papua dengan komoditi konsentrat tembaga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total ekspor Provinsi Papua sekitar 70,38% atau mencapai nilai US\$ 538.878.971,28. Sedangkan ekspor non migas lainnya sebesar 23,10% berupa komoditi yang menjadi unggulan Provinsi Papua seperti Plywood, Ikan Beku dan Udang Beku dengan nilai US\$ 176.860548,63.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi khusus daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan mengembangkan potensi daerah sendiri guna mewujudkan kemandirian daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk di dalamnya adalah dana bagi hasil penerimaan sumber daya alam (sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, penambangan gas alam dan penambangan panas bumi), retribusi dan pajak daerah. Pengembangan potensi daerah berkaitan dengan semangat otonomi khusus adalah upaya bagaimana meningkatkan harkat dan martabat masyarakat asli Papua dan ikut terlibat dalam proses pembangunan ekonomi.

Untuk mengukur tingkat kemandirian sebagai organisasi otonom, maka ukuran proporsi pendapatan asli daerah dari keseluruhan pendapatan adalah mutlak diperlukan. Untuk kondisi Papua saat ini, PAD masih sangat rendah (<6,5%) dari total pendapatan diterima, sehingga berbagai upaya strategis dan berdaya ungkit harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menyediakan (ekstensifikasi) sumber pendapatan sekaligus sebagai ukuran keberhasilan membangun investasi yang memberi hasil.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita untuk menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga yang mempengaruhi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Di Provinsi Papua, komposisi pengeluaran untuk konsumsi makanan masih lebih dominan dibandingkan konsumsi non makanan, artinya pemenuhan kebutuhan dasar pangan masih menjadi prioritas pengeluaran konsumsi rumah tangga dibandingkan untuk bentuk konsumsi lainnya. Hal ini dapat menjadi salah satu indikator kemiskinan di daerah. Pada tahun 2010, persentase konsumsi makanan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 60,20 persen pada tahun 2009 menjadi 61,10 persen pada tahun 2010. Kenaikan tersebut mengindikasikan adanya pergeseran pola konsumsi penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk Papua tahun 2010 menurun dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan konsumsi non makanan terbanyak adalah konsumsi untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga.

Tabel II.57 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2007 s/d 2008 Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Total Pengeluaran RT	16.779.623	21.664.172	28.411.502	30.960.683	38.836.000
2.	Jumlah RT	455.907	485.335	494.689	494.689	658.794
3.	Rasio (1./2.)	36,80	44,64	57,43	62,59	58,95

Sumber : Papua Dalam Angka 2012

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Papua pada tahun 2008 mencapai 106,1 dan selalu berada di atas nilai rata-rata nasional hingga tahun 2010. Pada tahun 2011 terjadi penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 103,02 dan berada di bawah rata-rata nasional yaitu 104,81. Penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan dari indeks yang dibayar petani, baik untuk proses usaha maupun konsumsi rumah tangga.

Perkembangan harga barang/jasa secara umum di Papua di tahun 2004 ditunjukkan oleh laju pergerakan IHK di Kota Jayapura. Laju Pertumbuhan IHK sebesar 4,48% pada tahun 2010 lebih cepat dibandingkan tahun 2009 sebesar 1,91%. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan hanya barang-barang konsumsi bila dibanding tahun 2009. Laju inflasi Kota Jayapura pada Juli 2011 sebesar 3,91%, yang mana berada sedikit di bawah laju inflasi nasional sebesar 4,61%. Berdasarkan data BPD tahun 2008 ketersediaan energi di Provinsi Papua mencapai 2.992 Kkal/kapita/hari, walaupun telah memenuhi standar nasional sebesar 2.550 Kkal/kapita/hari namun kontribusi energi tersebut sebagian besar masih berasal dari pangan nabati.

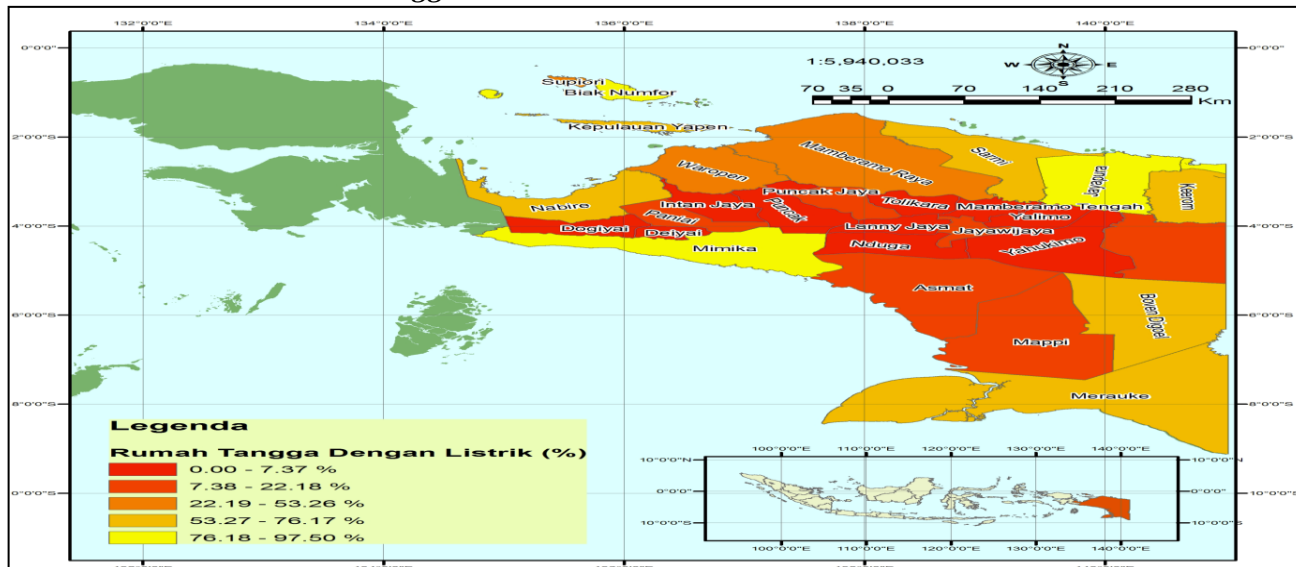
Tingkat konsumsi energi/kalori penduduk Provinsi Papua sebesar 1.826,65 Kkal/kapita/hari atau baru mencapai 83,00 persen dari standar nasional sebesar 2.200 Kkal/kapita/hari. Demikian juga tingkat konsumsi protein sebesar 43,27 gram/kapita/hari atau baru mencapai 87,00 persen dari standar nasional yang dibutuhkan sebesar 50,00 gram/kapita/hari.

a. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di Provinsi Papua masih sangat minim. Kebutuhan listrik di ibukota kabupaten/kota sudah tersedia namun dengan kapasitas pasokan yang terbatas sehingga sering terjadi pemadaman, sedangkan ibukota kabupaten pemekaran dan kawasan perkampungan maupun pedalaman terpencil masih memiliki fasilitas listrik yang sangat terbatas. Pengembangan listrik sebagian besar masih memanfaatkan PLTD sehingga sangat dipengaruhi oleh pasokan BBM. Kekayaan sumberdaya alam yang ada seperti air, laut, angin maupun sinar matahari belum dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan listrik.

Energi listrik memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, dan sudah menjadi bagian kebutuhan dasar sejajar dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Upaya untuk meningkatkan kemajuan daerah di Provinsi Papua melalui pengembangan kapasitas listrik PLN tampaknya sulit direalisasikan. Kondisi ini akibat infrastruktur kelistrikan, khususnya yang dibangun oleh PLN sangat tidak memadai untuk memenuhi permintaan sumber energi listrik dari masyarakat yang selalu meningkat dan lebih besar setiap tahunnya.

Gambar II.12 Peta Rumah Tangga



Pembangkit listrik yang dibangun PLN di Provinsi Papua sampai dengan tahun 2010 hanya sejumlah 246 unit, dengan kapasitas terpasang kurang lebih sebesar 185.276 Kwh. Sementara beban puncak pada pemakaian listrik PLN dari masyarakat rata-rata adalah sebesar 104.904 Kwh. Ini berarti PLN sebenarnya mempunyai kapasitas cadangan sebesar 80.372 Kwh.

Selain kurangnya fasilitas listrik PLN yang tersedia, distribusi penyebaran yang tidak merata juga menjadi masalah kelistrikan di Provinsi Papua. Berdasarkan data BPS tahun 2010, distribusi listrik PLN di Provinsi Papua lebih terkonsentrasi kepada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di Kota Jayapura dan Merauke. Kedua daerah ini mendapat sambungan listrik PLN dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 85.300 kwh (46,04%) untuk Kota Jayapura dan sebesar 21.268 kwh (11,48%) untuk Kabupaten Merauke. Sedangkan di daerah-daerah kecil seperti Kabupaten Mappi, Supiori, Asmat dan Keerom rata-rata kapasitas listrik yang terpasang hanya 538 kwh. Beberapa daerah yang terletak di bagian pedalaman dan pegunungan seperti Kabupaten Yahukimo, Tolikara, Pegunungan Bintang dan Asmat, sampai saat ini belum terpasang listrik PLN. Masyarakat dan pemerintah daerah setempat memanfaatkan mesin disel atau genset untuk membangkitkan tenaga listriknya, yang sudah tentu memiliki kapasitas yang sangat terbatas dan hanya dapat dinikmati oleh sedikit rumah tangga.

Tabel II.58 Kepadatan Jaringan Listrik PLN Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2010

Kabupaten/Kota	Jaringan Listrik (Km)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Km/Km ²)
Merauke	997.3	43.979	0.02
Jayawijaya	578.25	12.680	0.05
Jayapura	584.33	15.309	0.04
Nabire	298.72	16.312	0.02
Mimika	320.86	20.040	0.02
Kep Yapen	189.68	3.131	0.06
Biak Numfor	695.12	2.360	0.29
Boven Digoel	143.22	28.471	0.01
Sarmi	126.88	25.902	0.00
Keerom	228.17	9.365	0.02
Supiori	21.18	24.628	0.00
Kota Jayapura	48.88	775	0.06
Total Papua	47.6041	317.062	0.01

Sumber : Papua Dalam Angka 2011 (diolah)

Minimnya pemerataan fasilitas listrik juga ditunjukkan oleh panjang jaringan listrik dan kepadatan jaringan listrik, di mana yang paling panjang jaringannya adalah di Kota Jayapura sepanjang 1,028.44 km diikuti Kabupaten Merauke 997.30 km. Sedangkan yang paling pendek jaringannya adalah di Kabupaten Waropen yakni 21.18 km. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.25.

Kepadatan jaringan listrik tertinggi di Kota Jayapura dengan setiap luas wilayah 1 km² terdapat jaringan listrik PLN sepanjang 65.47 km disusul Kabupaten Nabire yang mempunyai rasio sebesar 13.29 km/km². Untuk kabupaten-kabupaten lainnya mempunyai rasio yang sangat rendah dibawah 5 km/km², seperti Kabupaten Yapen Waropen dengan rasionya sebesar 0.65 dan Kabupaten Paniai sebesar 0.03. Ini berarti di Kabupaten Yapen Waropen, dalam satu km² hanya terdapat jaringan listrik PLN sepanjang 0.65 km atau 65 meter. Sedangkan di Nabire 3 meter untuk rasio yang sama.

Tabel II.59 Potensi Sungai di Provinsi Papua Sebagai Pembangkit Tenaga Listrik

No	Nama sungai	Lokasi	Kapasitas daya (MW)
1.	Digoel	Boven Digoel	1.522
2.	Eilanden	Asmat	2.291
3.	Lorentz	Asmat, Jayawijaya	232
4.	Cemara	Mimika	237
5.	Otokwa	Mimika	297
6.	Mimika	Mimika	154
7.	Siriwo	Nabire, Paniai	310
8.	Mamberamo	Mamberamo Raya	9.932
9.	Urumuka	Mimika	336
Jumlah			15.631

Sumber : Kanwil DPE Irja dan Dinas Pertambangan Provinsi Papua Tahun 2009

b. Investasi

Kegiatan investasi di Provinsi Papua masih sangat rendah, itupun masih didominasi kegiatan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibandingkan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Jumlah rencana investasi PMDN yang disetujui pada tahun 2009 adalah 29 perusahaan yang tersebar di 11 kabupaten/kota namun hanya 21 perusahaan yang merealisasikannya. jumlah terbanyak di Kabupaten Jayapura yaitu 8 perusahaan (27%), sedangkan sisanya berkisar antara 1 sampai 4 perusahaan. Dari berbagai jenis usaha yang terealisasi sebagian besar bergerak di bidang usaha perkebunan (9 perusahaan) dan industri berbasis kayu (5 perusahaan). Jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditargetkan bekerja di bidang investasi PMDN Pada tahun 2009 adaah 63.311 orang namun realisasinya hanya 118 orang (1,8%). Dilihat dari realisasi nilai investasinya, maka tampak bahwa realisasi nilai investasi PMDN masih sangat rendah yaitu hanya sekitar Rp 1,811 trilyun (2,8%) dari Rp 63 trilyun yang ditargetkan. Kondisi ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II.60 Rencana dan Realisasi PMDN dan PMAdi Provinsi Papua Tahun 2007-2009

Tahun		Jumlah Proyek PMDN (buah)	Jumlah Proyek PMA (buah)	Nilai Investasi PMDN (Rp trilyun)	Nilai Investasi PMA (Rp trilyun)	Jumlah TK PMDN (orang Ind)	Jumlah TK PMA (orang Ind)
2006	Rencana	36	48	18.03	4.81	539,162	33,374
	Realisasi	*)	21	2.81	6.29	11,717	14,317
	%		43.75%	15.59%	130.77%	2.17%	42.90%
2007	Rencana	32	54	37.43	5.38	453,964	92,105
	Realisasi	19	29	1.45	6.52	5,012	17,101
	%	59.38%	53.70%	3.87%	121.19%	1.10%	18.57%
2008	Rencana	28	65	57.39	5.07	459,687	97,446
	Realisasi	21	36	1.47	6.53	4,381	17,871
	%	75.00%	55.38%	2.56%	128.80%	0.95%	18.34%
2009	Rencana	29	74	63.02	5.16	63.311	103.671
	Realisasi	21	42	1.81	6.57	11.45	17.98
	%	72.41%	56.76%	2.87%	127.33%	18.09%	17.34%
2010	Rencana	29	79	62.320	5.310	50,524	106,770
	Realisasi	*)	44	2.401	8.250	12,278	18,892
	%		55.70%	3.85%	155.37%	24.30%	17.69%
2011	Rencana	30	87	62.331	5.316	50.530	114.517
	Realisasi	*)	87	3.263	8.251	12.400	20131
	%		100%	5,23%	155%	24,53%	17,57%

Sumber : BPS Papua (2010)

Dari sisi PMA, jumlah perusahaan yang disetujui untuk melakukan investasi adalah 74 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten/kota di mana yang terbanyak yaitu 24 perusahaan ada di Kabupaten Mimika, khususnya terkait untuk usaha pertambangan. Namun dari rencana tersebut baru 42 PMA yang merealisasikannya. Meskipun nilai investasi yang ditargetkan lebih rendah dibandingkan nilai rencana investasi PMDN, namun dari sisi nilai investasi yang direalisasikan justru melebihi yang ditargetkan yaitu dari Rp 5,1 trilyun terealisasi Rp 6,5 trilyun.

Dari sisi perbankan tampak bahwa perkembangan posisi simpanan dan posisi kredit baik rupiah maupun valuta asing menurut kelompok bank yang ada di Provinsi Papua belum menunjukkan perkembangan yang signifikan karena keberadaan bank khususnya swasta nasional masih terpusat di beberapa kabupaten saja dan kegiatan masyarakat terkait perbankan juga belum maksimal. Kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menyerap dana sebagai modal pinjaman usaha masih relatif rendah sehingga memungkinkan terjadinya *capital out flow* dari Papua yang sangat tinggi karena ketidakmampuan penyerapan dana tersebut. Secara keseluruhan, kemampuan penyerapan dana pinjaman atas simpanan (*Loan to Deposit Ratio*) masih berkisar antara 29% hingga 42%. Apabila dilihat berdasarkan persentase dari kemampuan penyerapan kredit atas simpanan tampak bahwa Bank Perkreditan Rakyat mampu menyalurkan yang terbaik. Namun apabila dilihat dari nilai nominalnya, maka Bank Pemerintah mampu menyalurkan pinjaman dengan nilai tertinggi meski secara persentase masih tetap di bawah 50%. Untuk itu, upaya mendorong berbagai jenis kegiatan usaha yang mampu memberikan nilai tambah di dalam Provinsi Papua khususnya, perlu didorong dan ditingkatkan melalui penciptaan usaha-usaha berbasis lokal dan kemudahan akses pada perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Tabel II.61 Posisi Dana Simpanan dan Posisi Kredit Rupiah dan Valuata Asingdi Provinsi Papua Tahun 2007 - 2009 (Rp trilyun)

Kelompok Bank	2006	2007	2008	2009
Pemerintah				
Simpanan	8,87	10,75	11,08	12,68
Pinjaman	3,24	3,11	4,29	5,56
(%)	36,5	28,9	38,7	43,9
Swasta Nasional				
Simpanan	2,88	1,81	2,64	2,99
Pinjaman	0,52	0,52	0,78	0,97
(%)	18,0	28,7	29,5	32,4
Perkreditan Rakyat				
Simpanan	0,11	0,09	0,11	0,15
Pinjaman	0,11	0,08	0,15	0,18
(%)	100	88,8	136	120
TOTAL				
Simpanan	11,86	12,65	13,83	15,82
Pinjaman	3,87	3,71	5,22	6,71
(%)	32,6	29,2	37,7	42,4

Sumber : BPS Provinsi Papua

c. Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumberdaya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yangtersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

Tabel II.62 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Di Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah Lulusan S1	1.621	1.607	1.895	2.149	2.149
2.	Jumlah Lulusan S2	100	15	250	191	191
3.	Jumlah Lulusan S3	NA	NA	NA	NA	NA
4.	Jumlah Lulusan S1/ S2/S3	1.721	1.622	2.145	2.340	2.340
5.	Jumlah Penduduk	2.015.616	2.056.517	2.097.482	2.833.381	2.928.750
6.	Rasio Lulusan S1/ S2/S3	8,54	7,89	10,23	8,26	7,99

Sumber : Papua Dalam Angka 2012

Tabel II.63 Rasio Ketergantungan Tahun 2007 s/d 2011 Provinsi Papua

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	644.106	646.300	648.200	993.818	975.783
2.	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	29.600	32.500	35.200	27.190	28.978
3.	Jumlah penduduk usia tidak produktif	673.706	678.800	683.400	1.021.008	1.004.761

No	Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
4.	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	1.341.910	1.377.700	1.414.100	1.812.372	1.923.989
5.	Rasio ketergantungan	50,21	49,27	48,33	56,34	52,22

Sumber : Papua Dalam Angka 2012

Semakin banyak penduduk usia produktif yang berpendidikan berarti semakin mampu suatu daerah untuk mengembangkan aktifitas ekonominya. Indikator yang biasa digunakan adalah rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang menggambarkan total rasio ketergantungan penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 56 ke atas) bagi penduduk usia produktif (kelompok umur 15-55 tahun). Indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur dampak keberhasilan pembangunan kependudukan di suatu daerah. Pembangunan di bidang kependudukan dikatakan berhasil jika nilai rasio ketergantungannya rendah. Semakin rendahnya nilai *dependency ratio* berarti semakin rendah angka beban ketergantungan.

Rasio ketergantungan penduduk di Provinsi Papua cukup tinggi yaitu mencapai 48,3%, artinya setiap penduduk usia produktif harus menanggung 48 jiwa tidak produktif sehingga pendapatan keluarga lebih diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Terkait dengan IPM, besarnya angka ketergantungan akan mengurangi keluasaan pilihan bagi usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap turunnya angka IPM.

1.5. Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia telah menyebabkan terjadinya sejumlah perubahan penting dan mendasar dalam tata pemerintahan dan tata kelola keuangan daerah yang pada akhirnya berimplikasi pada penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 11 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah yang bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

SPM disusun oleh pemerintah pusat melalui kementerian sektoral, dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penyusunan dan pengembangan SPM dilakukan oleh kementerian teknis dibawah koordinasi dari Ditjen Otda Kementerian Dalam Negeri. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 mengenai Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Pelaksanaan penerapan SPM untuk Pemerintah Provinsi meliputi 9 bidang SPM yakni perumahan rakyat, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pekerjaan umum, ketahanan pangan, kesenian, dan perhubungan. Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintahan daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian. Pemerintah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah membina dan mengawasi penerapan SPM oleh pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah kerjanya. Sementara itu, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah. Pembinaan dan pengawasan atas penerapan SPM oleh pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Integrasi kedalam dokumen perencanaan dilakukan dengan memberikan pemahaman bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Hal yang pertama perlu dilakukan adalah menyusun rencana pencapaian SPM dengan menghitung kondisi awal tingkat pencapaian SPM setelah itu menghitung target pelayanan dasar yang akan dicapai kemudian disesuaikan dengan target-target sasaran di dalam dokumen perencanaan. Dikarenakan kegiatan ini merupakan satu kesatuan, yang dimulai dari penyusunan data dasar dan setting target maka kegiatan tersebut dilakukan setelah kegiatan penyusunan data dasar dan penentuan target dilaksanakan.

2.6 Millenium Development Goals (MDGs)

MDGs merupakan komitmen nasional dan global dalam upaya mensejahterakan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan. Upaya percepatan pencapaian target *MDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat nasional dan ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Sebagaimana telah diketahui, Pemerintah Indonesia bersama-sama 188 negara lainnya telah berpartisipasi dan menandatangani Deklarasi Milenium pada KTT Milenium_PBB yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2000. Deklarasi ini kemudian menyepakati tujuan-tujuan pembangunan global yang tertuang dalam *MDGs*. Sebagai salah satu penandatanganan deklarasi millennium, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk merealisasikan dan memantau perkembangan pencapaian *MDGs* tersebut.

Dengan adanya *MDGs*, kondisi Indonesia dapat diperbandingkan dengan negara-negara lain secara lebih baik. Hal ini diharapkan dapat menjadi landasan agar pelaksanaan kerjasama pembangunan antara Negara miskin dan berkembang dengan Negara maju menjadi lebih baik dimasa yang akan datang. Secara nasional, *MDGs* mempunyai peranan sebagai salah satu alat ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan terkait bidang-bidang yang tercakup dalam *MDGs*. Oleh karena itu, *MDGs* menjadi masukan yang penting dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional di Indonesia.

Saat ini target-target *MDGs* telah diurusutamakan dalam berbagai dokumen perencanaan Provinsi Papua (RPJPD, RPJMD, RKPD), perencanaan SKPD (Renstra, Renja SKPD) dan implementasi pembiayaan dalam dokumen anggaran (DPA). Dalam konteks inilah maka Provinsi Papua sebagai salah satu daerah otonom di wilayah NKRI, secara bersama-sama dengan daerah lainnya mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan dan mensukseskan pencapaian *MDGs* tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

MDGs terdiri dari delapan tujuan utama dengan indicator terukur secara kuantitatif serta waktu pencapaiannya. Delapan tujuan utama tersebut adalah :

1. Memberantas kemiskinan dan Kelaparan Ekstrem;
2. Mewujudkan Pendidikan Dasar Untuk Semua;
3. Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
4. Menurunkan Angka Kematian Anak;
5. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil;
6. Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan Penyakit Menular lainnya;
7. Memastikan Kelestarian Lingkungan; dan
8. Mengembangkan Kemitraan Global untuk Pembangunan.

2.7 Gambaran umum kondisi daerah :

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, menunjukkan pertumbuhan yang sama dengan rencana, pertumbuhan cukup tinggi melampaui pertumbuhan nasional misal pada tahun 2009 sebesar 12.41 persen sedikit menurun pada tahun berikutnya 2010 sebesar 11.08 tetap lebih besar dari PDB nasional rata-rata 8.7 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Papua cukup baik dan perlu dijaga stabilitas pertumbuhannya.

Sementara itu rata laju inflasi lebih kecil dari yang direncanakan yaitu 6.54 persen. Laju inflasi provinsi Papua pada tahun 2009 hanya 1.92 sementara pada tahun 2011 hanya 3.40. hal ini dikarenakan harga-harga di sekitar provinsi Papua yang sudah terlanjut tinggi dan pertumbuhan kenaikan harga yang relatif jenuh.

Demikian pula kesenjangan kesejahteraan masyarakat nampak kecil hal ini di tunjukkan dengan Gini coefisient yang cukup kecil 0.22, bahkan dalam realisasinya rata-rata di bawah angka tersebut.

Kesejahteraan sosial nampak cukup baik, angka melek huruf nampak cukup rendah sementara rata-rata lama sekolah nampak nampak cukup tinggi namun masih dalam ruang yang pantas untuk daerah seperti Provinsi Papua yang mempunyai kases yan terbatas dalam banyak hal. Hampir semua indikator menunjukkan angka yang lebih kecil dari sasaran tahunan.

Indikator Kesehatan, menunjukkan kecenderugn yang baik, untuk semua hal seperti Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan angka yang lebih kecil dari rencana, kecuali Angka usia harapan hidup, Persentase balita gizi buruk masih lebih besar dari sasaran.

Sementara itu untuk bidang ketenagakerjaan, nampak cukup baik. Misalnya pada tahun 2011 sebesar 4.19 hal ini sejalan dengan penjelasan sebelumnya dimana tingkat serapan kerja di atas 96 %.

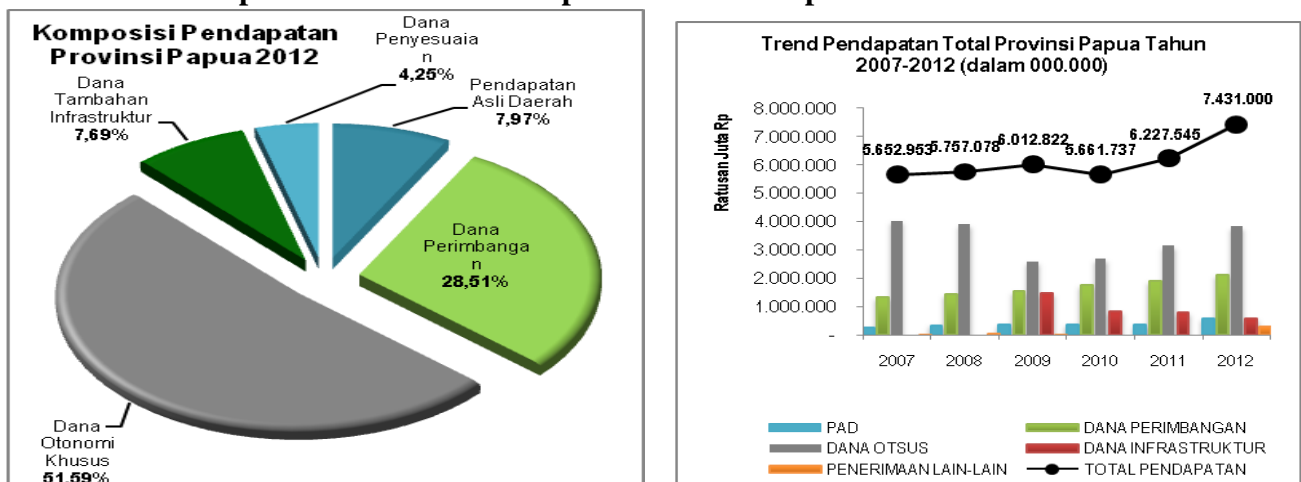
Secara umum dapat dikatakan bahwa pembangunan di Provinsi Papua sudah berjalan sebagaimana yang diharapkan, Provinsi Papua telah membenahi diri untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Provinsi Papua telah memiliki perencanaan yang baik dengan pengelolaan organisasi yang cukup memadai. Kedepan Provinsi Papua perlu memperhatikan indikator-indikator lain yang masih perlu pembenahan. Hal penting yang perlu dilakukan adalah lompatan (akselerasi) pembangunan, hal ini dapat berwujud dalam terobosan-terobosan pembangunan, melalui pembukaan isolasi daerah tertinggal, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang dapat mengurangi *economic cost* dari pembangunan berkelanjutan.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Untuk memperoleh gambaran pendanaan keuangan selama 5 (lima) tahun mendatang maka dibutuhkan pemahaman yang baik bagaimana dinamika dan karakteristik kinerja keuangan daerah di 6 (enam) tahunan terakhir dalam beberapa segi. Melihat dari beberapa data historis yang disajikan pada Grafik III.1 dibawah dapat dilihat pertama adalah pendapatan total Provinsi Papua yang tiap tahun mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,59 persen dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012. Jika dilihat pada komposisi pendapatan di Provinsi Papua dapat dilihat bahwa Dana Otonomi Khusus selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir mengalami kenaikan. Komposisi tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Grafik III.1 Komposisi dan Trend Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2007 s/d 2012



Sumber : Sumber : BPKAD Provinsi Papua(diolah)

Jika dilihat dari Grafik III.1 bahwa trend Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan tidak terlalu signifikan hanya 19,62persen pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk mendorong tumbuhnya PAD belum maksimal dilakukan. Sementara itu dana perimbangan juga tidak menunjukkan pertumbuhan yang memadai hanya naik 9,84 persen pertahun dari tahun 2007 sampai dengan 2012. Namun gambaran ini memang

tidak dapat digunakan untuk mengukur kinerja daerah, karena dialokasikan oleh pusat sesuai dengan indeks yang dimiliki daerah. Sedangkan dana Otsus mengalami pertumbuhan hanya 1,06 persen pertahun, selain itu jika kita memperhatikan pertumbuhan dana infrastruktur mengalami pertumbuhan yang negatif yakni -25,00 persen pertahun, hal ini dapat dilihat pada grafik III.1 bahwa dana infrastuktur dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 cenderung menurun, ditahun 2009 dana infrastruktur mencapai Rp. 1,4 trilyun dan ditahun 2012 turun menjadi Rp. 571 miliar.

Tabel III.1
Rata-Rata Pertumbuhan Relaisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2007-2012 Provinsi Papua

No	URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN							
1.1	Pendapatan Asli Daerah	268.238.544.645	357.741.754.696	369.727.113.036	380.025.633.524	363.100.749.954	592.117.234.714	19,62
1.1.1.	Pajak Daerah	198.197.317.285	259.185.991.678	242.788.565.711	252.434.826.256	275.091.605.790	401.691.933.696	16,68
1.1.2.	Retribusi Daerah	20.526.258.694	19.710.392.088	20.576.682.593	21.171.950.088	18.889.330.977	15.773.346.925	-4,79
1.1.3.	Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	22.715.988.150	26.418.177.843	28.926.619.817	30.340.833.072	19.887.905.137	22.598.925.557	1,97
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	26.798.980.516	52.427.193.087	77.435.244.915	76.078.024.108	49.231.908.050	152.053.028.536	63,03
1.2	Pendapatan Transfer	5.371.714.118.261	5.357.136.380.541	5.643.095.225.403	5.257.399.077.896	5.864.444.394.580	6.838.882.326.170	5,28
1.2.1	Dana Perimbangan	1.325.966.118.261	1.436.993.483.541	1.563.054.900.403	1.762.534.289.896	1.893.484.847.030	2.118.450.110.170	9,84
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	201.295.348.622	198.461.591.855	203.582.806.979	252.799.169.554	269.335.254.508	311.768.070.269	9,53
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	248.375.773.639	201.897.066.686	219.971.329.424	286.182.154.342	275.748.034.522	130.708.425.901	-7,18
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	876.294.996.000	1.002.431.825.000	1.058.227.764.000	1.148.497.966.000	1.276.285.908.000	1.569.782.444.000	12,52
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	-	34.203.000.000	81.273.000.000	75.055.000.000	72.115.650.000	106.191.170.000	43,33
1.2.2	Lainnya	4.045.748.000.000	3.920.142.897.000	4.080.283.250.000	3.519.176.625.500	3.970.959.547.550	4.720.432.216.000	3,79
1.2.2	Dana Otonomi Khusus	4.045.748.000.000	3.920.142.897.000	2.610.040.325.000	2.695.001.625.500	3.157.459.547.550	3.833.402.135.000	1,06
1.2.3	Dana Penyesuaian	-	-	242.925.000	-	-	315.601.510.000	100,00
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	1.470.000.000.000	824.175.000.000	813.500.000.000	571.428.571.000	-25,00
1.3	Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah	13.000.000.000	42.200.000.000	-	-	-	-	62,31
1.3.5	Pendapatan Hibah	-	7.700.000.000	-	-	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Dana Darurat	13.000.000.000	34.500.000.000	-	-	-	-	32,69
	JUMLAH PENDAPATAN	5.652.952.662.906	5.757.078.135.237	6.012.822.338.439	5.661.736.548.920	6.227.545.144.534	7.430.999.560.884	5,95

Dari tabel diatas dapat diperhatikan bahwa total pendapatan transfer Pemerintah Provinsi Papua secara total mengalami kenaikan 5,28 persen pertahun dari tahun 2007-2012. Pendapatan transfer untuk DAU (Dana Alokasi Umum) mengalami kenaikan 12,52 persen pertahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kebutuhan pemerintah untuk melakukan pelayanan publik tiap tahun meningkat, selain itu pendapatan transfer lain yang diterima adalah berupa Dana Otsus, Dana Penyesuaian, dan Dana Tambahan Infrastuktur.

3.1.1 Ketergantungan/Kemandirian Fiskal

Ketergantungan fiskal merupakan gambaran kemampuan daerah otonom dalam memenuhi kebutuhan finansial untuk pembangunan. Ketergantungan fiskal ini dinyatakan dalam *Derajat Otonomi Fiskal Daerah* (DOFD) yang merupakan hasil dari proporsi/perbandingan total PAD dengan Total Pendapatan pada tahun yang sama. Selama kurun waktu 2007-2011, secara rata-rata DOFD Provinsi Papua 5,93 persen sehingga masuk dalam kategori rendah. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Papua hanya mampu membiayai 5,93 persen kebutuhan pembangunannya dari pendapatan sendiri, sedang sisanya masih harus dipenuhi dengan Dana Transfer dari Pemerintah pusat. Rata-rata DOFD provinsi secara nasional dalam periode yang sama adalah 41,76 persen. PAD Provinsi Papua hanya 3,10 persen terhadap penerimaan PAD Provinsi DKI Jakarta (tertinggi), dan 26,81 persen dari rata-rata PAD provinsi lain.

Tabel III.2 Derajat Otonomi Fiskal dan Rata-Rata Provinsi

Tahun	Provinsi Papua			DOFD Provinsi
	PAD	Total Pendapatan	DOFD	
2007	268.238.544.645	5.652.952.662.906	4,75%	43,76%
2008	357.741.754.696	5.757.078.135.237	6,21%	41,81%
2009	369.727.113.036	6.012.822.338.439	6,15%	44,32%
2010	380.025.633.524	5.661.736.548.920	6,71%	37,63%
2011	363.100.749.954	6.227.545.144.534	5,83%	41,31%
Rata-rata			5,93%	41,76%

Sumber: diolah dari APBD Provinsi Papua 2007-2011

Dengan menggunakan *moving average method*, pertumbuhan angka DOFD dapat diprediksi untuk 5 tahun ke depan. Prediksi ini menggunakan data normal selama lima tahun terakhir (2007-2011). Dua tahun sebelumnya (2006 dan 2007) merupakan tahap awal kebijakan pemerintah daerah yang dampaknya baru dirasakan dalam bentuk peningkatan PAD tahun 2009-2011. Dalam enam tahun ke depan DOFD Provinsi Papua diperkirakan pada angka rata-rata 6,86 persen per tahun, dengan pertumbuhan setiap tahunnya seperti pada Tabel III.3. Prediksi menunjukkan pada tahun 2014 jumlah dana yang terserap sebesar Rp 8.205.789.371.812, dengan DOFD sebesar 6,86%.

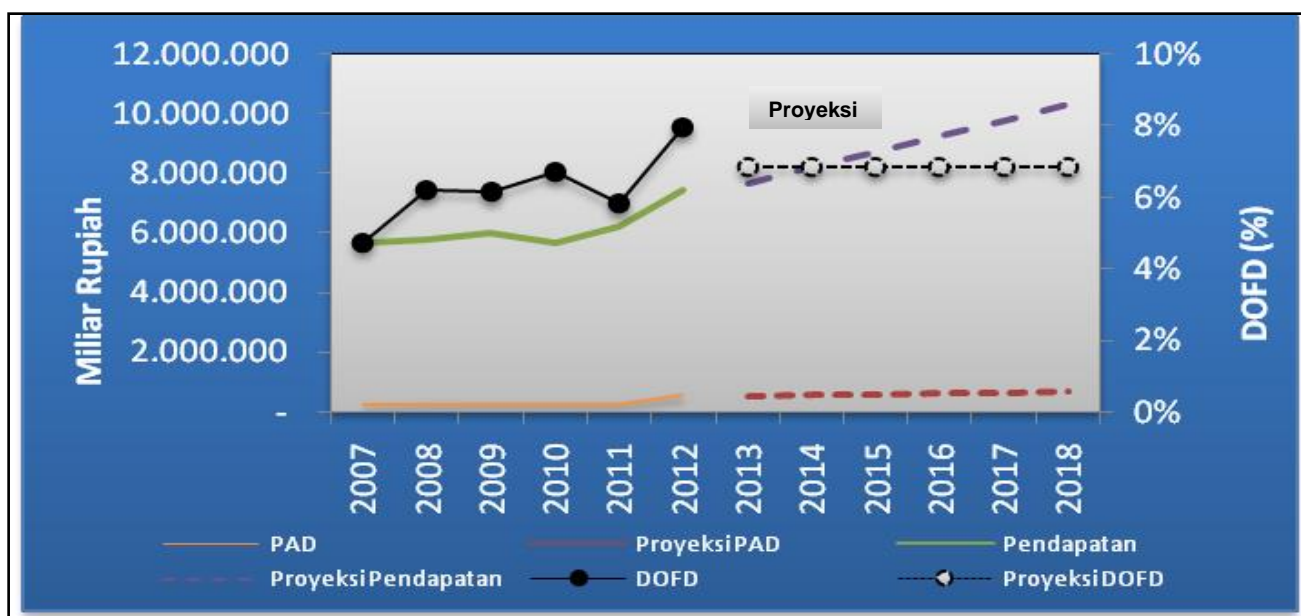
Tabel III.3 Prediksi Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Pemerintah Provinsi Papua (Periode 2013-2018)

Tahun	Provinsi Papua		
	PAD	Total Pendapatan	DOFD
2013	527.341.720.823	7.680.714.783.097	6,87%
2014	563.337.819.608	8.205.789.371.812	6,87%
2015	599.333.918.393	8.730.863.960.527	6,86%
2016	635.330.017.178	9.255.938.549.242	6,86%
2017	671.326.115.963	9.781.013.137.957	6,86%
2018	707.322.214.749	10.306.087.726.672	6,86%
Jumlah	3.703.991.806.714	53.960.407.529.308	6,86%

Sumber: diolah dari APBD Provinsi Papua 2007-2011

Jika dituangkan dalam bentuk Grafik seperti Tabel III.2 dibawah dapat dilihat bahwa proyeksi PAD Provinsi Papua nampaknya tidak mengalami kenaikan yang begitu signifikan pada tahun 2018 nanti. Hal ini dikarenakan melihat kecenderungan pertumbuhan PAD dari tahun 2007 hingga 2012 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar. Melihat hal tersebut ternyata sangat berdampak pada DOFD Provinsi Papua di periode 2013-2018 mendatang yang mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 6,86 persen per tahun.

Grafik III.2Proyeksi PAD, Total Pendapatan dan DOFD Provinsi Papua Tahun 2013 s/d 2018



Sumber : diolah dari APBD Provinsi Papua 2007-2011

3.1.2 Kinerja Pelaksanaan APBD

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (0) memperlihatkan rata-rata Realisasi Pendapatan Daerah selama 5 tahun terakhir (2007-2011) sebesar Rp. 5,86 triliun per tahun. Angka pendapatan ini meningkat rata-rata Rp. 143 miliar per tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada penerimaan Dana Transfer naik Rp. 123 miliar/tahun dan PAD naik Rp. 23 miliar/tahun. Dengan metode *moving average*, ditemukan pertumbuhan pendapatan pada angka 3,98 persen. Dalam periode yang sama pertumbuhan Dana Transfer 2,61 persen dan PAD yang mencapai 8,76 persen.

Dengan menggunakan data yang sama dalam khususnya pada bagian belanja daerah, terdapat angka Realisasi Belanja Daerah secara rata-rata sebesar Rp. 5,75 triliun per tahun. Kenaikan nilai Belanja Daerah sebesar Rp. 130 miliar per tahun (bandingkan dengan kenaikan Pendapatan Daerah Rp. 143 miliar per tahun). Peningkatan per tahun terutama terjadi pada Belanja Operasi Rp. 165 miliar, Belanja Modal Rp. 124 miliar, dan Belanja Transfer ke Kabupaten/Kota Rp. 7,60 miliar. Satu-satunya belanja yang menurun dalam periode ini (TA 2007 - 2011) adalah Belanja Tak Terduga. Dengan metode *moving average*, di dapatkan pertumbuhan Belanja Daerah 2,45 persen. Dalam periode ini pertumbuhan Belanja Operasi 4,39 persen, Belanja Modal dalam 4 tahun terakhir sebesar 10,8 persen, dan Belanja Transfer Rp. 9,61 persen.

Untuk sisi pembiayaan ditemukan masalah konsistensi dalam pengungkapan pos-pos pembiayaan. Akibatnya, data yang disampaikan BPK maupun BPKAD Provinsi Papua belum dapat digunakan secara baik untuk tujuan analisis pada bagian ini. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK sebagai sumber informasi keuangan penting ternyata belum dapat mengungkapkan nilai Penerimaan Pembiayaan. Kelemahan ini dengan mudah ditemukan dalam Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Nilai SiLPA yang dipastikan ada pada setiap akhir tahun anggaran ternyata tidak diungkapkan dalam 3 tahun pemeriksaan (Realisasi LRA 2008, dan 2009).

Pengeluaran pembiayaan setiap tahun dilakukan untuk Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal, dan Pembayaran Pokok Utang. Nilai Pengeluaran Pembiayaan mencapai rata-rata Rp. 120 miliar lebih per tahun. Pengeluaran pembiayaan yang terbesar adalah Dana Cadangan, yang mencapai nilai Rp. 100 miliar per tahun – kecuali tahun 2009 yang mencapai jumlah Rp. 200 miliar.

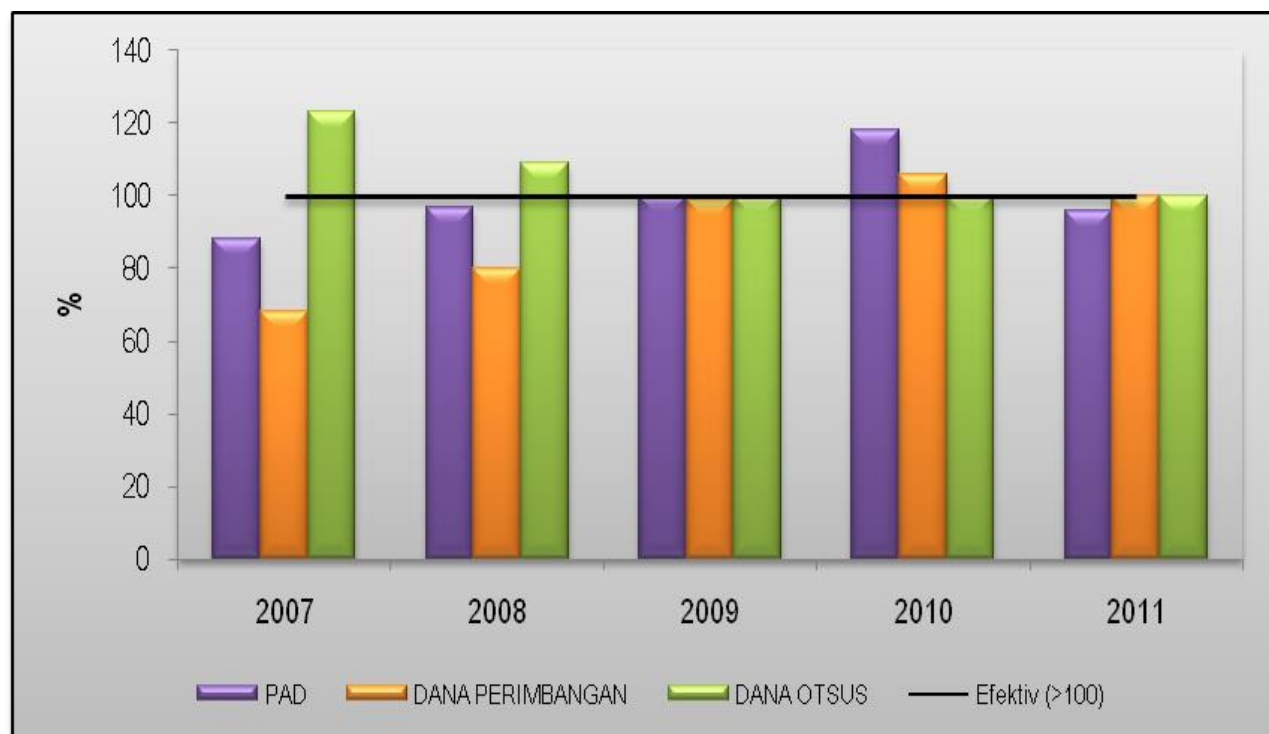
Tabel III.4 Realisasi APBD Provinsi Papua Periode Tahun Anggaran 2007-2011

URAIAN	REALISASI APBD TAHUN:					Rata-rata
	2007	2008	2009	2010	2011	
PENDAPATAN						
Pendapatan Asli Daerah	268.238.544.645	357.741.754.696	369.727.113.036	380.025.633.524	363.100.749.954	347.766.759.171
Pajak Daerah	198.197.317.285	259.185.991.678	242.788.565.711	252.434.826.256	275.091.605.790	245.539.661.344
Retribusi Daerah	20.526.258.694	19.710.392.088	20.576.682.593	21.171.950.088	18.889.330.977	20.174.922.888
Hasil Pengelolaann Kekayaan Daerah yg Dipisahk	22.715.988.150	26.418.177.843	28.926.619.817	30.340.833.072	19.887.905.137	25.657.904.804
Lain-lain PAD yang Sah	26.798.980.516	52.427.193.087	77.435.244.915	76.078.024.108	49.231.908.050	56.394.270.135
Pendapatan Transfer	5.371.714.118.261	5.357.136.380.541	5.643.095.225.403	5.257.399.077.896	5.864.444.394.580	5.498.757.839.336
Dana Perimbangan	1.325.966.118.261	1.436.993.483.541	1.563.054.900.403	1.762.534.289.896	1.893.484.847.030	1.596.406.727.826
Dana Bagi Hasil Pajak	201.295.348.622	198.461.591.855	203.582.806.979	252.799.169.554	269.335.254.508	225.094.834.304
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	248.375.773.639	201.897.066.686	219.971.329.424	286.182.154.342	275.748.034.522	246.434.871.723
Dana Alokasi Umum	876.294.996.000	1.002.431.825.000	1.058.227.764.000	1.148.497.966.000	1.276.285.908.000	1.072.347.691.800
Dana Alokasi Khusus	-	34.203.000.000	81.273.000.000	75.055.000.000	72.115.650.000	65.661.662.500
Lainnya	4.045.748.000.000	3.920.142.897.000	4.080.283.250.000	3.519.176.625.500	3.970.959.547.550	3.907.262.064.010
Dana Otonomi Khusus	4.045.748.000.000	3.920.142.897.000	2.610.040.325.000	2.695.001.625.500	3.157.459.547.550	3.285.678.479.010
Dana Penyesuaian	-	-	242.925.000	-	-	242.925.000
Dana Tambahan Infrastruktur	-	-	1.470.000.000.000	824.175.000.000	813.500.000.000	1.035.891.666.667
Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah	13.000.000.000	42.200.000.000	-	-	-	27.600.000.000
Pendapatan Hibah	-	7.700.000.000	-	-	-	7.700.000.000
Pendapatan Dana Darurat	13.000.000.000	34.500.000.000	-	-	-	23.750.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	5.652.952.662.906	5.757.078.135.237	6.012.822.338.439	5.661.736.548.920	6.227.545.144.534	5.862.426.966.007
BELANJA						
Balanja Operasi	4.100.644.583.896	4.528.528.347.023	3.942.202.805.669	4.130.885.061.529	4.762.070.057.903	4.292.866.171.204
Balanja Pegawai	685.523.431.375	769.500.402.932	826.156.299.567	777.065.779.301	866.786.394.314	785.006.461.498
Balanja Barang	575.705.463.571	682.075.010.164	891.988.194.602	1.260.514.916.732	1.351.970.752.489	952.450.867.512
Balanja Hibah	-	5.630.000.000	442.780.000	61.440.129.856	133.847.556.000	40.272.093.171
Balanja Bantuan Sosial	587.704.702.850	534.314.519.702	500.127.970.500	391.137.476.640	283.208.629.100	459.298.659.758
Balanja Bantuan Keuangan	2.251.710.986.100	2.537.008.414.225	1.723.487.561.000	1.640.726.759.000	2.126.256.726.000	2.055.838.089.265
Balanja Modal	1.524.824.800.472	1.049.192.740.138	1.199.489.101.030	1.404.550.459.868	1.421.658.223.557	1.319.943.065.013
Balanja Tanah	22.986.454.434	15.562.338.513	7.354.953.000	11.010.089.000	19.551.612.500	15.293.089.489
Balanja Peralatan dan Mesin	171.975.709.314	198.002.457.736	189.080.656.700	187.558.882.800	244.432.223.134	198.209.985.937
Balanja Bangunan dan Gedung	169.115.812.066	237.007.648.297	266.196.166.377	261.532.240.878	326.245.046.100	252.019.382.744
Balanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.124.964.662.968	538.642.980.007	636.345.986.323	851.726.147.790	797.825.286.403	789.901.012.698
Balanja Aset Tetap Lainnya	35.782.161.690	59.977.315.585	100.511.338.630	92.723.099.400	33.604.055.420	64.519.594.145
Balanja Tak Terduga	70.490.521.830	82.818.210.300	48.187.817.418	5.710.600.000	2.978.368.924	42.037.103.694
Balanja Tak Terduga	70.490.521.830	82.818.210.300	48.187.817.418	5.710.600.000	2.978.368.924	42.037.103.694
Transfer	73.242.042.020	90.127.829.000	104.319.213.863	109.328.770.345	103.669.062.498	96.137.383.545
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota	73.242.042.020	90.127.829.000	104.319.213.863	109.328.770.345	103.669.062.498	96.137.383.545
JUMLAH BELANJA	5.769.201.948.218	5.750.667.126.461	5.294.198.937.980	5.650.474.891.742	6.290.375.712.882	5.750.983.723.457
SURPLUS (DEFISIT)	(116.249.285.312)	6.411.008.776	718.623.400.459	11.261.657.178	(62.830.568.348)	111.443.242.551
PEMBIAYAAN						
Penerimaan Pembiayaan	917.007.522.010	-	-	142.102.552.322	955.938.778.571	671.682.950.968
Penggunaan SilPA	917.007.522.010	-	-	1.105.583.875.984	955.938.778.571	992.843.392.188
Pengeluaran Pembiayaan	191.557.172.330	-	225.000.000.000	153.364.209.500	111.212.398.291	170.283.445.030
Pembentukan Dana Cadangan	164.000.000.000	-	200.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	141.000.000.000
Penyertaan Modal	5.000.000.000	-	25.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	12.500.000.000
Pembayaran Pokok Utang	22.557.172.330	-	-	43.364.209.500	1.212.398.291	22.377.926.707
Pembiayaan Netto	725.450.349.680	-	(225.000.000.000)	(11.261.657.178)	844.726.380.280	333.478.768.196
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	609.201.064.368	6.411.008.776	493.623.400.459	963.481.323.662	781.895.811.932	570.922.521.839

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Kinerja keuangan daerah juga dapat dinilai berdasarkan efektivitas pendapatan, yang merupakan perbandingan realisasi terhadap target (anggaran). Angkaini ditampilkan Tabel III.4 dan Grafik III.2. Efektivitas pendapatan terjadi bila nilai realisasi lebih tinggi daripada anggaran sehingga rasio pendapatan terhadap anggaran di atas 100 (seratus) persen. Dalam kondisi itu pemerintah daerah dinilai berhasil (efektif) meningkatkan pendapatan. Dalam kurun 2007-2011, kelompok Pendapatan terbilang hampir cukup mendekati efektif yakni 98 persen. Jika melihat per komponen, maka yang bisa dikatakan efektif adalah komponen Dana Otsus yang dimana dalam periode 2007-2011 mempunyai rasio mencapai 100 persen bahkan lebih, sedangkan pada komponen PAD di tahun 2010 sudah menunjukkan rasio yang sangat efektif dengan angka 118 persen akan tetapi di tahun 2011 turun menjadi 96 (sembilan puluh enam) persen.

Grafik III.3 Rasio Efektivitas Komponen Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2007-2011



Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Pendapatan dari Dana Transfer khususnya Dana Perimbangan dari tahun 2007-2010 mengalami trend yang positif dimana tahun 2007 rasio efektivitas hanya mencapai 68 persen dan di tahun 2011 mencapai nilai 106 (seratus enam) persen dan di tahun 2011 mempunyai nilai rasio sebesar 100 (seratus) persen. Jika melihat secara keseluruhan komponen yang memiliki rasio yang paling efektif adalah Dana tahun 2007-2008, PAD dan Dana Perimbangan di tahun 2010. Sedangkan jika dilihat komponen yang memiliki rasio paling terendah adalah Dana Perimbangan di tahun 2007-2008. Pengukuran menggunakan rasio efektivitas di atas dinilai cukup baik untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Provinsi Papua dari tahun 2007-2011. Dari gambaran 5 (lima) tahun sebelumnya maka bisa memberikan suatu arah kebijakan yang kiranya bisa mendorong agar pendapatan pemerintah Provinsi Papua bisa lebih efektif terutama pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimana merupakan komponen yang menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai belanja dengan pendapatan daerah sendiri bukan dari transfer pemerintah pusat.

Tabel III.5 Target dan Realisasi APBD Provinsi Papua Periode TA 2007-2011

URAIAN	2007			2008			2009			2010			2011		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
PENDAPATAN															
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	305.168.400.000	268.238.544.645	88	369.750.000.000	357.741.754.696	97	371.221.122.750	369.727.113.036	100	322.176.000.000	380.025.633.924	118	378.700.598.000	363.100.749.954	96
Pajak Daerah	201.230.000.000	199.197.317.285	98	243.750.000.000	259.185.991.678	106	290.250.000.000	242.788.565.711	84	248.500.000.000	252.434.826.256	102	259.000.000.000	275.091.605.790	106
Retribusi Daerah	21.245.400.000	20.526.258.694	97	20.000.000.000	19.710.392.088	99	22.500.000.000	20.576.682.593	91	20.500.000.000	21.171.950.088	103	21.671.950.000	18.899.330.977	87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	23.115.000.000	22.715.988.150	98	26.000.000.000	26.418.177.843	102	29.000.000.000	28.926.619.817	99	29.176.000.000	30.340.833.072	104	32.340.832.000	19.887.905.137	61
Lain-lain PAD yang Sah	59.580.000.000	26.738.980.516	45	80.000.000.000	52.427.193.087	66	29.295.122.750	77.432.244.915	264	24.000.000.000	76.078.024.108	317	66.687.816.000	49.231.908.050	75
<i>Pendapatan Transfer</i>	5.246.808.000.000	5.371.714.119.281	102	5.375.574.722.000	5.357.136.360.541	100	5.655.296.858.000	5.643.095.225.403	100	5.152.661.679.000	5.257.399.077.896	102	5.457.595.990.550	5.650.344.394.580	100
<i>Dana Perimbangan</i>	1.951.060.000.000	1.325.966.118.261	66	1.785.431.825.000	1.436.993.483.541	80	1.573.500.760.000	1.563.054.900.403	99	1.657.796.891.000	1.762.534.289.896	106	1.690.126.443.000	1.893.484.847.030	100
Dana Bagi Hasil Pajak	120.250.000.000	201.295.348.622	167	171.500.000.000	198.461.591.855	116	177.500.000.000	203.582.806.979	115	177.500.000.000	252.799.169.554	142	265.988.489.000	269.335.254.508	101
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	204.515.000.000	248.375.773.639	121	247.500.000.000	201.897.066.686	82	256.500.000.000	219.971.329.424	86	256.500.000.000	288.182.154.342	112	215.717.876.000	275.748.034.522	110
Dana Alokasi Umum	876.295.000.000	876.294.996.000	100	1.002.431.825.000	1.002.431.825.000	100	1.058.227.760.000	1.058.227.764.000	100	1.148.497.966.000	1.148.497.966.000	100	1.276.285.908.000	1.276.285.908.000	100
Dana Alokasi Khusus	750.000.000.000	-	0	364.000.000.000	34.203.000.000	9	81.273.000.000	81.273.000.000	100	75.056.000.000	75.055.000.000	100	96.154.200.000	72.115.650.000	75
Lainnya	3.295.748.000.000	4.045.748.000.000	123	3.590.142.897.000	3.920.142.897.000	109	4.079.796.098.000	4.080.040.325.000	100	3.494.864.788.000	3.494.864.788.000	100	3.957.459.547.550	3.957.459.547.550	100
Dana Otonomi Khusus	3.295.748.000.000	4.045.748.000.000	123	3.590.142.897.000	3.920.142.897.000	109	4.079.796.098.000	4.079.797.400.000	100	3.494.864.788.000	3.494.864.788.000	100	3.957.459.547.550	3.957.459.547.550	100
Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	-	-	242.925.000	100	-	-	-	-	-	100
<i>Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah</i>	-	13.000.000.000	-	25.200.000.000	42.200.000.000	-	38.546.111.250	-	-	24.175.000.000	24.311.837.500	101	13.500.000.000	13.500.000.000	100
Pendapatan Hibah	-	-	-	7.700.000.000	7.700.000.000	-	17.000.000.000	-	-	24.175.000.000	24.311.837.500	101	13.500.000.000	13.500.000.000	100
Pendapatan Dana Donatur	-	-	-	17.500.000.000	34.500.000.000	-	17.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN BELAJA	5.551.976.400.000	5.652.952.662.906	102	5.770.524.722.000	5.757.078.135.237	100	6.063.064.092.000	6.012.822.338.439	99	5.499.012.679.000	5.661.736.548.920	103	6.239.786.588.550	6.227.545.144.534	100
<i>Belanja Operasi</i>	4.335.556.253.422	4.100.644.583.896	95	4.853.763.683.667	4.528.528.347.023	93	4.616.256.240.940	4.602.059.062.280	85	4.682.059.062.280	4.130.885.061.529	88	5.315.613.931.636	4.762.070.057.903	90
Belanja Pegawai	725.812.276.348	685.523.431.375	94	868.298.244.626	769.500.402.932	89	892.987.919.465	826.156.299.567	93	897.806.806.363	777.065.779.301	87	929.597.579.740	866.786.394.314	93
Belanja Barang	672.135.449.029	575.705.463.571	86	775.226.180.053	682.075.010.164	88	1.059.507.874.475	1.059.507.874.475	100	1.421.517.680.625	1.260.514.916.732	89	1.492.182.780.896	1.351.970.752.489	91
Belanja Hibah	-	-	-	5.645.000.000	5.630.000.000	-	7.707.000.000	442.780.000	6	93.233.500.000	61.440.129.856	7	359.594.355.000	133.847.586.000	37
Belanja Bantuan Sosial	618.916.903.045	587.704.702.850	95	596.404.601.096	534.314.519.702	90	546.021.633.000	496.710.497.292	92	496.710.497.292	391.137.476.640	79	347.926.947.000	283.208.629.100	81
Belanja Bantuan Keuangan	2.318.691.825.000	2.251.770.986.100	97	2.808.209.657.892	2.537.008.414.225	90	2.110.031.814.000	1.722.790.376.000	82	1.772.790.376.000	1.640.726.759.000	93	2.186.312.289.000	2.126.256.726.000	97
<i>Belanja Modal</i>	1.749.307.771.801	1.524.824.800.472	87	1.186.322.030.240	1.048.192.740.138	88	1.613.766.568.079	1.199.489.101.030	74	1.624.457.673.058	1.404.550.459.669	86	1.567.314.748.064	1.421.658.223.557	91
Belanja Tanah	56.000.622.000	22.986.454.434	41	19.877.571.000	15.562.338.513	79	68.957.350.000	7.354.953.000	11	18.848.000.000	11.010.069.000	58	32.438.430.000	19.551.612.500	60
Belanja Perawatan dan Mesin	208.260.132.200	171.975.709.314	83	230.920.556.022	198.002.457.736	86	290.866.165.654	189.080.656.700	65	269.456.986.330	187.568.882.800	70	251.685.311.675	244.432.223.134	97
Belanja Bangunan dan Gedung	209.658.411.384	169.115.812.066	81	258.789.793.565	237.007.648.297	92	279.619.721.700	266.196.166.377	96	283.746.683.042	261.532.240.878	92	370.494.359.550	326.245.046.100	88
Belanja Jalan, ligasi dan Jaringan	1.227.168.869.217	1.124.964.662.968	92	597.617.514.962	538.642.980.007	90	833.515.683.475	636.345.988.323	76	938.674.789.986	851.726.147.790	91	854.113.019.339	797.825.266.403	93
Belanja Asst Tetap Lainnya	48.213.737.000	35.782.161.690	74	79.206.594.691	59.977.315.585	76	140.807.627.250	100.511.338.630	71	113.731.222.700	92.723.099.400	82	58.583.627.500	33.604.055.420	57
<i>Belanja Tak Terduga</i>	81.243.651.000	70.490.521.830	87	82.875.303.000	82.918.210.300	100	49.415.946.981	48.187.817.418	98	33.918.088.317	5.710.600.000	17	21.098.877.850	2.978.368.924	14
Belanja Tak Terduga	81.243.651.000	70.490.521.830	87	82.875.303.000	82.918.210.300	100	49.415.946.981	48.187.817.418	98	33.918.088.317	5.710.600.000	17	21.098.877.850	2.978.368.924	14
Transfer	76.903.725.000	73.242.042.020	95	97.627.829.000	90.127.829.000	92	104.343.346.000	104.319.213.863	100	109.328.770.345	109.328.770.345	100	104.683.000.000	103.669.062.498	99
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota	76.903.725.000	73.242.042.020	95	97.627.829.000	90.127.829.000	92	104.343.346.000	104.319.213.863	100	109.328.770.345	109.328.770.345	100	104.683.000.000	103.669.062.498	99
JUMLAH BELAJA SURPLUS (DEFISIT)	6.243.007.401.223	5.769.201.948.218	92	6.220.608.845.907	5.750.667.126.461	92	6.383.782.092.000	5.294.198.937.980	83	6.449.765.594.000	5.650.474.891.742	88	7.008.600.497.550	6.290.375.712.882	90
	(691.031.001.223)	(116.249.285.312)		(450.084.123.907)	(6.411.008.776)		(320.718.000.000)	(718.623.400.459)		(950.750.915.000)	(11.261.657.178)		(768.903.909.000)	(62.830.568.348)	
PEMBIAYAAN															
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	883.374.501.223	917.007.522.010	104	560.084.123.907	600.718.000.000	104	600.718.000.000	600.718.000.000	100	1.104.750.915.000	142.102.552.322	13	955.734.000.000	955.938.778.571	100
Penggunaan SILPA	883.374.501.223	917.007.522.010	104	560.084.123.907	600.718.000.000	104	600.718.000.000	600.718.000.000	100	1.104.750.915.000	142.102.552.322	13	955.734.000.000	955.938.778.571	100
<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>	192.343.500.000	191.557.172.330	100	110.000.000.000	280.000.000.000	100	280.000.000.000	225.000.000.000	80	154.000.000.000	153.364.209.500	100	186.830.191.000	111.212.398.291	60
Pembentukan Dana Cadangan	164.000.000.000	164.000.000.000	100	100.000.000.000	200.000.000.000	100	200.000.000.000	200.000.000.000	100	100.000.000.000	100.000.000.000	100	100.000.000.000	100.000.000.000	100
Penyertaan Modal	5.000.000.000	5.000.000.000	100	10.000.000.000	80.000.000.000	31	80.000.000.000	25.000.000.000	31	10.000.000.000	10.000.000.000	100	85.000.000.000	10.000.000.000	12
Pembayaran Pokok Utang	23.343.500.000	22.597.172.330	97	10.000.000.000	10.000.000.000	100	10.000.000.000	44.000.000.000	99	1.830.191.000	43.364.209.500	99	1.830.191.000	1.212.398.291	66
<i>Pembayaran Netto</i>	691.031.001.223	725.450.349.680	105	450.084.123.907	320.718.000.000	71	320.718.000.000	(225.000.000.000)	-	950.750.915.000	(11.261.657.178)	-	768.903.909.000	844.726.380.280	110
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	-	695.201.064.366	-	-	6.411.008.776	-	-	493.623.400.459	-	-	963.481.323.662	-	-	781.895.811.932	-
Jumlah Realisasi															
	1.738.833.795.855	1.747.016.120.750	100	1.738.833.795.855	1.747.016.120.750	100	1.738.833.795.855	1.738.833.795.855	100	1.738.833.795					

3.1.3 Neraca Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menetapkan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD memuat 4 jenis laporan yaitu Laporan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dari tahun 2007 sampai dengan 2011 didapatkan gambaran sebagai berikut :

- a. Aset pemerintah daerah telah meningkat 3,6 kalilipat, dari nilai Rp.3,8 triyun pada tahun 2006 menjadi Rp.14 trilyun pada tahun 2010. Nilai Aset Tetap meningkat paling besar (5 kali), yaitu dari nilai Rp.2,5 triyun menjadi Rp12,1 triyun dan potensial meningkat lebih agresif ke depan karena komitmen yang tinggi dalam penyediaan asset. Komponen terbesar dalam Aset Tetap ini adalah Jalan, Irigasi dan Jaringan.
- b. Akun Kas yang terdapat dalam Aset Lancar cenderung naik sejak tahun 2006 sampai 2009, sebelum turun kembali di tahun 2010. Akun Kas ini meningkat sangat tinggi dari tahun 2008 ke tahun 2009 (83%) dari nilai Rp616 miliar menjadi Rp1.126 miliar. Kondisi ini menjelaskan ada dana yang sangat besar tersimpan dalam Kas Daerah di akhir tahun (sekitar 7-9 persen dari Total Aset). Kondisi ini juga mengindikasikan belum optimalnya penyerapan anggaran. Data SiLPA dalam pos Penerimaan Pembiayaan juga mendukung fakta ini. Rata-rata penyerapan anggaran 87,74 persen. Penyerapan terendah terjadi dalam Belanja Tanah (36 persen), Belanja Dana Hibah (63 persen), dan Belanja Peralatan dan Mesin (77 persen).
- c. Akun Investasi Permanen yang merupakan wujud penyertaan modal pada perusahaan daerah rata-rata mencapai nilai Rp150 miliar. Bila Investasi ini dibandingkan dengan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan (rata-rata Rp24 miliar) maka didapatkan persentase pengembalian Pemda sebesar 16 (enam belas) persen. Tingkat pengembalian (*return*) ini merupakan prestasi yang baik bila dibandingkan tingkat pengembalian perusahaan swasta pada umumnya.
Kelompok Aset Tetap yang bertambah 3,6 kali lipat menjelaskan adanya penambahan kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan. Jadi untuk kurun waktu 2006-2010 kapasitas itu telah meningkat dengan pesat (hampir 100 persen per tahun). Kapasitas itu terutama meningkat di prasarana jalan dan jembatan yang masih sangat dirasakan minim di Provinsi Papua.
- d. Dana Cadangan yang dibentuk Pemerintah Provinsi Papua setiap tahun meningkat Rp100 miliar. Sangat disayangkan bahwa pembentukan Dana Cadangan ini belum diatur peruntukannya. Ketentuan pembentukan Dana Cadangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengharuskan ada ketetapan peruntukan. Bila tidak, Dana Cadangan ini tidak dapat dicairkan setiap tahun anggaran. Dengan demikian ketentuan tentang pembentukannya Dana Cadangan ini belum memenuhi peraturan.

Rasio keuangan daerah ditampilkan dalam tabel III.6. Beberapa informasi yang diperoleh dari rasio keuangan tersebut antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Papua memiliki kemampuan riil yang tinggi dalam menyelesaikan utang-utang jangka pendek yang timbul sebagai dampak transaksi masa lalu (rasio lancar).
- b. Pemerintah Provinsi Papua mempunyai Aset dan Ekuitas yang menjamin pembayaran kewajiban (Total Kewajiban Terhadap Ekuitas dan Total Kewajiban Terhadap Aset).
- c. Tingkat pengembalian Investasi Permanen Daerah cukup baik (di atas 16 persen). Fakta ini menjelaskan bahwa penanaman modal dalam di perusahaan daerah cukup menjajikan bagi penerimaan PAD di masa yang akan datang (Tingkat Pengembalian Investasi Permanen Daerah).
- d. Total Belanja berkontribusi terhadap PAD (di atas 5 persen). Hal ini berarti setiap kenaikan Belanja Rp100 dapat meningkatkan PAD Rp5 (Total Belanja Terhadap PAD). Kenaikan Aset diikuti kenaikan PAD (sekitar 3 persen). Hal ini berarti setiap kenaikan Aset Rp100 dapat meningkatkan PAD Rp3 (Total Aset Terhadap PAD). Kedua rasio ini menjelaskan bahwa tidak semua aset daerah berkontribusi pada peningkatan PAD.

- e. Selama 3 tahun pertama ada tendensi kebijakan untuk meningkatkan belanja pegawai yang sejalan dengan meningkatnya belanja daerah. Dalam TA 2006, 2008, dan 2009 porsi belanja pegawai terus meningkat yaitu 12 persen, 13 persen dan 16 persen (Total Belanja Pegawai terhadap Total Belanja).
- f. Dalam 4 tahun terakhir ada tendensi kebijakan untuk meningkatkan belanja barang dan jasa yang sejalan dengan meningkatnya belanja daerah. Dalam TA 2007, 2008, 2009 dan 2010 porsi belanja barang dan jasa terus meningkat yaitu 10 persen, 12 persen, 17 persen dan 22 persen (Total Belanja Barang dan Jasa terhadap Total Belanja).

Tabel III.6 Neraca Pemerintah Daerah Provinsi Papua Per-Akhir TA 2007 – 2011

URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
ASET						
ASET LANCAR						
Kas	609.941.303.559	616.175.995.319	1.125.865.901.581	963.546.093.300	762.860.537.251	840.903.414.346
Investasi Jangka Pendek						
Piutang	1.414.162.475	732.293.950	721.182.000	221.757.004	1.605.035.430	853.626.022
Piutang Lain-lain	17.920.082.759	9.706.718.582	11.906.111.751	12.490.955.994	13.883.338.171	23.064.200.948
Persediaan	14.646.940.467	17.477.000.624	27.164.480.668	43.111.353.680	123.566.020.810	40.524.523.003
Jumlah Aset Lancar	643.922.489.260	644.092.008.475	1.165.657.676.000	1.019.370.159.978	921.376.906.578	908.589.426.805
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen	21.199.093.976	18.415.427.000	17.505.742.483	16.016.672.837	14.802.115.337	18.603.687.385
Investasi Permanen	145.283.579.100	145.283.579.100	174.841.411.705	193.575.201.202	207.356.475.215	167.132.325.563
Jumlah Investasi Jangka Panjang	166.482.673.076	163.699.006.100	192.347.154.188	209.591.874.039	222.158.590.552	185.736.012.947
ASET TETAP						
Tanah	1.196.029.216.434	1.203.743.171.434	1.217.714.124.434	1.249.596.018.264	1.269.198.940.764	1.063.438.898.222
Peralatan dan Mesin	293.467.363.958	508.817.524.886	700.625.041.216	968.026.417.421	1.221.074.806.266	689.985.244.544
Gedung dan Bangunan	695.851.571.256	885.015.058.769	1.139.520.273.615	1.365.590.801.425	1.570.194.075.364	1.076.880.773.486
Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.048.960.947.656	6.740.125.481.882	7.276.734.135.759	8.047.714.771.800	8.893.293.696.394	6.332.321.013.729
Aset Tetap Lainnya	35.782.161.690	95.736.677.275	280.719.753.775	368.243.187.969	399.231.933.789	199.191.573.200
Konstruksi dalam Pengerjaan	181.246.624.599	63.928.348.844	64.181.069.821	182.748.379.482	250.477.187.866	136.218.786.865
Akumulasi Penyusutan				0	0	
Jumlah Aset Tetap	8.451.337.885.593	9.497.366.263.090	10.679.494.398.620	12.181.919.576.361	13.603.470.640.443	9.498.036.290.045
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan	201.177.214.913	204.324.727.543	416.901.717.871	548.548.566.654	679.859.423.711	347.801.941.782
Jumlah Dana Cadangan	201.177.214.913	204.324.727.543	416.901.717.871	548.548.566.654	679.859.423.711	347.801.941.782
ASET LAIN NYA						
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran						
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian						
Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
Aset Tidak Berwujud						
Aset Lain-Lain	57.713.561.828	58.254.152.049	59.061.138.050	61.822.861.050	61.822.861.050	59.734.914.805
Jumlah Aset Lainnya	57.713.561.828	58.254.152.049	59.061.138.050	61.822.861.050	61.822.861.050	59.734.914.805
TOTAL ASET	9.520.633.824.670	10.567.736.157.257	12.513.462.084.729	14.021.253.038.082	15.488.688.422.334	10.989.942.767.250
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang PFK	740.241.191	1.354.843.925	18.387.567.897	64.769.638	189.927.431	3.579.598.546
Utang Bunga				11.250.000	11.250.000	11.250.000
Utang Pajak						
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang						
Pendapatan Diterima di Muka						
Utang Jangka Pendek Lainnya				90.000.000	90.000.000	90.000.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	740.241.191	1.354.843.925	18.387.567.897	166.019.638	291.177.431	3.613.348.546
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri						
Utang Luar Negeri						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang						
JUMLAH KEWAJIBAN	740.241.191	1.354.843.925	18.387.567.897	166.019.638	291.177.431	3.613.348.546
EKUITAS DANA						
EKUITAS DANA LANCAR						
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	609.201.062.368	614.821.151.394	1.107.478.333.684	963.481.323.662	781.895.811.931	725.576.338.945
Cadangan Piutang	19.334.245.234	10.439.012.532	12.627.293.751	12.712.712.998	15.488.373.601	28.340.530.001
Cadangan Persediaan	14.646.940.467	17.477.000.624	27.164.180.688	43.111.353.680	123.566.020.810	23.289.058.829
Dana yg Harus Disediakan untuk						
Pendapatan yang Ditangguhkan				-101.250.000	-101.250.000	-16.875.000
					236.772.803	
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	643.182.248.069	642.737.164.550	1.147.269.808.123	1.019.204.140.340	921.085.729.145	777.189.052.774
EKUITAS DANA INVESTASI						
Diinvestasikan dlm Investasi Jangka	166.482.248.069	163.699.006.100	192.347.154.188	209.591.874.039	222.158.590.552	166.132.187.539
Diinvestasikan dlm Aset Tetap	8.451.337.885.593	9.497.366.263.090	10.679.494.398.620	12.181.919.576.361	13.603.470.640.443	7.674.930.165.282
Diinvestasikan dlm Aset Lainnya	57.713.561.828	58.254.152.049	59.061.136.050	61.822.861.050	61.822.861.050	39.475.285.163
Dana yg Harus Disediakan untuk						
Pembayaran Utang Jangka Panjang						
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	8.675.533.695.490	9.719.319.421.239	10.930.902.688.858	12.453.334.311.450	13.887.452.092.045	7.880.537.637.984
EKUITAS DANA CADANGAN						
Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	201.177.214.913	204.324.727.543	416.901.717.871	548.548.566.654	679.859.423.711	235.445.396.307
Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	201.177.214.913	204.324.727.543	416.901.717.871	548.548.566.654	679.859.423.711	235.445.396.307
JUMLAH EKUITAS DANA	9.519.893.158.472	10.566.381.313.332	12.495.074.214.852	14.021.087.018.444	15.488.397.244.901	8.893.172.087.065
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.520.633.399.663	10.567.736.157.257	12.513.461.782.749	14.021.253.038.082	15.488.688.422.332	8.896.945.304.877

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Proporsi Penggunaan Anggaran

Pemenuhan kebutuhan aparatur di Provinsi Papua jika dilihat pada Tabel III.7 dibawah dari tahun 2010-2012 mengalami fluktuasi dimana di tahun 2010 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai 2,4 trilyun rupiah kemudian naik menjadi 2,6 trilyun rupiah ditahun 2011 dan dtahun 2011 mengalami penurunan belanja pemenuhan kebutuhan aparatur menjadi 2,5 trilyun rupiah.

Tabel III.7 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2010-2012

No	Uraian	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	299.236.307.529	337.631.919.787	363.539.704.010
2	Belanja Tambahan Penghasilan	228.096.472.980	260.335.641.625	265.261.143.964
3	Belanja Penerimaan Lainnya	9.079.785.000	8.452.810.000	7.722.360.000
4	Belanja pemungutan Pajak Daerah	12.840.201.500	12.717.500.000	5.000.000.000
5	Belanja Pelaksanaan Otonomi Khusus	30.220.000.000	24.705.000.000	1.860.000.000
6	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	-	-	7.618.251.300
B	Belanja Langsung			
1	Belanja Honorarium PNS	64.359.090.670	75.982.520.358	61.204.086.553
2	Belanja Honorarium PNS	78.577.847.444	92.146.483.840	81.414.180.420
3	Belanja Uang Lembur	4.347.869.616	5.017.495.670	3.168.570.000
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	16.968.953.500	18.698.860.100	18.546.500.000
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	33.339.251.062	31.098.162.934	24.318.265.750
6	Belanja premi asuransi kesehatan	3.623.682.000	4.617.708.208	2.769.800.000
7	Belanja makanan dan minuman pegawai	84.424.241.641	109.106.012.327	119.813.053.946
8	Belanja pakaian dinas dan atributnya	6.335.091.665	8.592.541.000	8.176.143.325
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.633.729.500	2.535.335.800	4.001.302.280
10	Belanja perjalanan dinas	215.722.836.303	248.217.026.777	261.585.611.301
11	Belanja perjalanan pindah tugas	86.670.000	207.858.000	447.013.000
12	Belanja Pemulangan Pegawai	958.000.000	315.000.000	865.000.000
13	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll)	1.404.550.459.868	1.421.658.223.557	1.309.177.867.378
TOTAL		2.494.400.490.278	2.662.036.099.983	2.546.488.853.227

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Jika dilihat pada belanja modal yang nilainya mencapai 1 trilyun rupiah, hal ini dapat mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan aparatur paling banyak menyerap anggaran belanja terutama untuk kebutuhan fisik seperti tanah dan gedung, kendaraan dan lain sebagainya.

Tabel III.8 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Papua Tahun 2008-2011

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase (%)
		(Rp)	(Rp)	
1.	2009	2.287.611.633.327	5.519.198.937.980	41,45
2.	2010	2.494.400.490.278	5.803.839.101.242	42,98
3.	2011	2.662.036.099.983	6.401.588.111.173	41,58
4.	2012	2.546.488.853.227	7.442.219.066.144	34,22

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Pemenuhan kebutuhan aparatur jika dibandingkan dengan total pengeluaran riil dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mempunyai rata-rata belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari total pengeluaran sebesar 40 persen pertahun, hal ini dapat dikatakan bahwa belanja yang dikeluarkan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cukup besar.

Tabel III.9 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Provinsi Papua Tahun 2008-2011 (%)

Uraian Belanja	2008	2009	2010	2011
Belanja Tidak Langsung	65,47	55,96	49,34	52,32
Belanja Pegawai	9,53	11,08	10,26	10,15
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Hibah/ subsidi	0,10	0,01	1,09	2,13
Bantuan Sosial	9,20	9,45	6,92	4,51
Bagi Hasil ke Daerah Bawahan	1,55	1,97	1,93	1,65
Bantuan ke Daerah Bawahan	43,67	32,55	29,04	33,83
Tidak Terduga	1,43	0,91	0,10	0,05
Bantuan kepada Lembaga Vertikal	-	-	-	-
Belanja Langsung	34,53	44,04	50,66	47,68
Belanja Pegawai	4,37	4,54	3,50	3,55
Belanja Barang dan Jasa	11,98	16,85	22,31	21,51
Belanja Modal	18,18	22,65	24,86	22,62

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Analisis Pembiayaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan dimasa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Analisis ini sekurang-kurangnya dilakukan melalui :

a) Analisis sumber penutup defisit riil

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah

Data menunjukkan bahwa dana penutup defisit riil anggaran berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya seperti terlibat selama tahun 2010 defisit riil yang terjadi adalah sebesar Rp. (142.102.552.322,-) tertutupi oleh SiLPA sebesar Rp. 1.105.583.875.984,-

Berdasarkan tabel analisis diatas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil sebagai berikut.

b) Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SILPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SILPA Pemerintah Daerah, penyumbang SilPA terbesar adalah pelampauan penerimaan lain-lain yang sah sebesar 335.26% selanjutnya disusul oleh pelampauan penerimaan PAD dengan pertumnuhan 165,15%. Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA di provinsi Papua bukanlah karena lemahnya daya serap anggaran atau budgetary slack yang dilakkan oleh SKPD.

Tabel III.10 Penutup Defisit Riil Anggaran Provinsi Papua Tahun 2008-2011

NO	Uraian	2009	2010	2011	2012
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	5.757.078.135.237	6.012.822.338.440	5.661.736.548.920	6.227.545.144.534
	Dikurangi realisasi:				
2.	Belanja Daerah	5.294.198.937.980	5.650.474.891.742	6.290.375.712.882	7.239.767.120.200
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	225.000.000.000	153.364.209.500	111.212.398.291	202.451.945.944
A	Defisit riil	462.879.197.257	362.347.446.698	-628.639.163.962	-1.012.221.975.666
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan :				
4.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-	1.105.583.875.984	955.938.778.571	779.591.449.131
5.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
6.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-
7.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
8.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
9.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	1.105.583.875.984	955.938.778.571	779.591.449.131
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	493.623.400.459	963.481.323.662	781.895.811.932	768.371.943.871

Sumber : BPKAD Provinsi Papua

Tabel III.11 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Papua

No.	Uraian	2010		2011		Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
1.	Jumlah SiLPA	1.105.583.875.984	100%	955.938.778.571	100%	-13.54%
2.	Pelampauan penerimaan PAD	22.223.933.524	2%	58.925.749.954	6%	165.15%
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	245.606.529.896	22%	323.377.456.030	34%	31.66%

No.	Uraian	2010		2011		Rata-Rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	109.380.527.500	10%	476.094.759.550	50%	335.26%
5.	Pelampauan Penerimaan Dana Otsus	0	-	0	-	
6.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya					
7.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan					
8.	Kegiatan lanjutan					

Sumber : APBD Provinsi Papua 2010-2011

c) Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa riil pembiayaan anggaran tahun berkenaan menunjukkan bahwa pemerintah daerah provinsi Papua mempunyai kapasitas pendanaan daerah yang cukup untuk membiayai proses pembangunan.

Namun perlu di analisis lebih lanjut bahwa SiLPA tahun 2010 Rp. 1.105.583.875.984,- dan tahun 2011 sebesar Rp 955.938.778.571,- masih terlalu besar dibandingkan dengan total anggaran pendapatan di tahun yang sama. Hal ini dapat indikasikan bahwa SiLPA secara terstruktur terjadi. yang mungkin disebabkan oleh proyeksi perencanaan pendapatan yang terlalu kecil atau proyeksi belanja yang terlalu besar. sehingga kesan yang muncul adalah penghematan atau prestasi karena pendapatan telah melampaui target.

Tabel III.12 Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Provinsi Papua

No.	Uraian	2008	2009	2010
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Saldo kas neraca daerah	616.175.995.319	1.125.865.901.531	963.546.093.300
	Dikurangi:			
2.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.354.843.925	18.387.567.90	166.019.638
3.	Kegiatan lanjutan			
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	614.821.151.394	1.125.847.513.963	963.380.073.662

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

3.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan memuat penghitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Dalam kerangka pendanaan ini dibuat perkiraan belanja wajib yang mengikat (fix cost). dan sumber-sumber penerimaan yang mendukung kapasitas fiskal untuk membiayai kebutuhan belanja.

3.3.1. Proyeksi Data Masa Lalu

Pengeluaran yang wajib dilakukan Pemerintah Provinsi Papua terdiri dari beberapa jenis Belanja Operasional yaitu, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Keuangan (porsi dana Otsus untuk kabupaten/kota). Ini bagian belanja yang harus dikeluarkan setiap tahun anggaran. Selain itu terdapat Transfer Wajib yang wajib diserahkan Provinsi Papua dari penerimaan pajak daerah (pajak kendaraan bermotor dan pajak-pajak lain). Besaran Belanja Operasional Wajib dan Transfer Wajib tahun 2007-2011 dihitung pertumbuhan seperti terlihat dalam Tabel III.13 dibawah ini.

Tabel III.13 Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Tahun 2007-2011

URAIAN	2007	2008	2009	2010	2011	Pertumbuhan
Belanja Operasional Wajib						
Belanja Pegawai	685.523.431.375	769.500.402.932	826.156.299.567	777.065.779.301	866.786.394.314	14,51%
Belanja Barang dan Jasa	575.705.463.571	682.075.010.164	891.988.194.602	1.260.514.916.732	1.351.970.752.489	20,61%
Belanja Bantuan Keuangan	2.251.710.986.100	2.537.008.414.225	1.723.487.561.000	1.640.726.759.000	2.126.256.726.000	6,69%
Transfer Wajib						
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota	73.242.042.020	90.127.829.000	104.319.213.863	109.328.770.345	103.669.062.498	15,37%

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

Dengan menggunakan data realisasi APBD 5 tahun lalu (2006-2011) disusun proyeksi untuk 5 tahun ke depan (2013–2018). Proyeksi ini didasarkan pada asumsi bahwa berbagai peraturan perundang-perundangan, perkembangan perekonomian nasional/daerah serta kebijakan fiskal dan transfer dana perimbangan yang terjadi dan dijalankan pada masa lalu akan berlaku dan terjadi di masa datang secara konsisten. Dengan demikian proyeksi disikapi sebagai kondisi minimal yang akan dimiliki. Dengan menggunakan pola pertumbuhan pendapatan dan belanja di atas diproyeksikan APBD seperti dalam tabel di atas.

Tabel III.14 Proyeksi Pendapatan Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018 (dalam miliar rupiah)

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	PENDAPATAN						
1.1	Pendapatan Asli Daerah	553.069	600.091	647.113	694.135	741.157	788.179
1.1.1.	Pajak Daerah	379.049	409.758	440.468	471.177	501.887	532.597
1.1.2.	Retribusi Daerah	16.878	16.146	15.413	14.681	13.949	13.216
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	23.272	22.736	22.200	21.664	21.128	20.592
1.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	133.870	151.451	169.032	186.612	204.193	221.774
1.2	Pendapatan Transfer	7.680.641	10.247.782	11.452.514	13.603.564	15.754.615	17.905.666
1.2.1	Dana Perimbangan	2.111.231	2.365.241	2.518.520	2.671.799	2.825.078	2.978.357
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	320.960	344.223	367.486	390.749	414.012	437.275
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	197.090	188.502	179.914	171.326	162.739	154.151
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	1.593.180	1.718.302	1.843.424	1.968.546	2.093.668	2.218.790
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	0	114.213	127.695	141.177	154.659	168.141

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.2.2	Lainnya	5.569.410	7.882.541	8.933.994	10.931.765	12.929.537	14.927.309
1.2.2	Dana Otonomi Khusus	4.367.022	4.936.222	5.505.422	6.074.622	6.643.823	7.213.023
1.2.3	Dana Penyesuaian	630.960	946.319	1.261.677	1.577.036	1.892.394	2.207.753
1.2.4	Dana Tambahan Infrastruktur	571.429	2.000.000	3.428.571	4.857.143	6.285.714	7.714.286
1.3	Lain-2 Pendapatan Daerah Yang Sah						
1.3.5	Pendapatan Hibah						
1.3.6	Pendapatan Dana Darurat						
JUMLAH PENDAPATAN		8.233.710	10.847.872	12.099.626	14.297.699	16.495.772	18.693.844

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Ruang Fiskal Daerah pada dasarnya merupakan ukuran besarnya dana daerah dalam satu tahun anggaran yang bisa digunakan secara bebas oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya. Ukuran ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar pendapatan daerah harus dibelanjakan untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari (*fix cost*), seperti gaji PNS, dan berbagai jenis pendapatan yang bersifat ditentukan penggunaannya (*earmarked*). Semakin besar dana yang masih bisa digunakan secara bebas oleh daerah ditunjukkan dengan Ruang Fiskal yang semakin besar.

Tabel III.15 Ruang Fiskal (Kapasitas riil fiskal) Provinsi Papua Periode 2007 – 2011

Uraian	2007	2008	2009	2010	2011
Total Pendapatan	5.652.952.662.906	5.757.078.135.237	6.012.822.338.439	5.661.736.548.920	6.227.545.144.534
DAK	-	34.203.000.000	81.273.000.000	75.055.000.000	72.115.650.000
Pendapatan Hibah	-	7.700.000.000	-	24.311.837.500	13.500.000.000
Dana Darurat	13.000.000.000	34.500.000.000	-	-	-
Dana Penyesuaian dan Otsus	4.045.748.000.000	3.920.142.897.000	4.080.040.325.000	3.494.864.788.000	3.957.459.547.550
Belanja Pegawai Tidak Langsung	685.523.431.375	769.500.402.932	826.156.299.567	777.065.779.301	637.779.464.886
Ruang Fiskal	908.681.231.531	991.031.835.305	1.025.352.713.872	1.290.439.144.119	1.546.690.482.098
Rasio RF Terhadap Pendapatan	16,07%	17,21%	17,05%	22,79%	24,83%

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

Tabel data di atas menampilkan RF yang terus meningkat dalam periode tahun 2007 – 2011. Ruang Fiskal (RF) sebesar Rp. 908 miliar pada tahun 2007, menjadi Rp1.546 miliar pada tahun 2011. Rasio RF terhadap Pendapatan juga makin baik, yaitu dari 16,07 persen di tahun 2007 menjadi 24,83 persen pada tahun 2011. Rasio ini secara rata-rata 18,47 persen. Ruang Fiskal ini meningkat 9 persen per tahun. Suatu kondisi keuangan yang baik.

Kapasitas riil Provinsi Papua tahun 2013 menjangkau Rp. 5.605.439 triliun sedang pada tahun 2017 akan meningkat menjadi Rp. 7.055.829 triliun jumlah ini cukup besar untuk melakukan akselerasi pembangunan di Propinsi Papua.

Catatan bahwa belanja bantuan keuangan besarnya tergantung proporsi pembagian dana otsus untuk kabupaten dan provinsi. Berdasarkan berbagai asumsi yang ditetapkan, dapat dihitung kapasitas riil keuangan daerah Provinsi Papua, yang disajikan pada tabel III.16 di bawah ini :

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk mendanai pembangunan daerah di Provinsi Papua naik dari tahun ke tahun. Pada tahun 20013 akan terjadi surplus sebesar Rp2.539.046.405.090,- pada tahun 2011 akan menjadi Rp.2.286.624.720.641,-. Gambaran ini menunjukkan bahwa pada dasarnya provinsi Papua dapat melakukan akselerasi yang lebih baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di tahun-tahun terakhir ini.

Tabel III.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

No.	Uraian	Proyeksi (000.000)				
		2014	2015	2016	2017	2018
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	10,847,872	12,099,626	14,297,699	16,495,772	18,693,844
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	782,233	807,555	832,876	858,198	883,519
	Total penerimaan	11,630,105	12,907,181	15,130,575	17,353,969	19,577,364
	Dikurangi:	0	0	0	0	0
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	2,684,639	2,914,074	3,143,509	3,372,944	3,602,379
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	8,945,466	9,185,552	11,987,066	13,981,025	15,974,985

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (di olah)

Dari kapasitas keuangan riil tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedidangan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3 (tiga) prioritas penggunaan dana yaitu :

1. Prioritas I, terdiri dari program *dedicated* dan mandat undang-undang :

- Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dari perhitungan 80% total dana otonomi khusus sesuai dengan Panduan Umum Penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Papua;
- Belanja hibah pembebasan biaya pendidikan wajib belajar 12 tahun;
- Belanja hibah pembebasan biaya kesehatan bagi keluarga miskin.

2. Prioritas II, terdiri dari :

- Penyediaan layanan akses dan mutu pendidikan semua jenjang dan jenis (formal dan non formal) serta beasiswa S-2 dan S-3 bagi orang Papua (ORPA);
- Penyediaan layanan akses kesehatan bagi masyarakat miskin, peningkatan gizi masyarakat, dan pencegahan penyakit menular dan endemik;
- Penyediaan insentif bagi pengembangan investasi daerah dan produk unggulan daerah non tambang untuk kesejahteraan berkelanjutan;
- Penyediaan perumahan rakyat yang layak huni dan terjangkau;
- Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan *public utilitas* untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lokal;
- Pembangunan tenaga listrik dan penyediaan jaringan tingkat kampung;
- Peningkatan mutu sanitasi lingkungan dan air bersih termasuk persampahan.

3. Prioritas III, terdiri dari :

- Beasiswa S-2 dan S-3 untuk aparatur pemerintah;
- Penyediaan sistem penghargaan dan hukuman berbasis kinerja;
- Dukungan bagi lembaga keagamaan;
- Peningkatan mutu pendidikan tinggi di Papua;
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Setelah prioritas I dan II ditetapkan, maka untuk penetapan prioritas III untuk belanja tidak langsung yang kemampuan pendanaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dijabarkan lagi tiap tahunnya selama 5 (lima) tahun perencanaan RPJMD. Sehingga pengalokasian pada prioritas III untuk belanja tidak langsung tersebut lebih jelas, transparan, akuntabel dan pengelokasiannya sesuai dengan perencanaan.

3.4. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah 2013-2018

Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan yang baik ialah pengelolaan yang bisa mengoptimalkan potensi - potensi pembangunan suatu daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah meningkatkan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi pembebanan tugas dan tanggung jawab ke Daerah yang semakin besar kepada daerah telah diserahkan sumber pendanaan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, baik melalui skema transfer maupun penyerahan kewenangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir menjadi Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kewenangan yang seluas - luasnya, nyata dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan dan dekonsentrasi yang merupakan penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut , penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi tahapan yang sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya dalam mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka melakukan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Papua dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

- (1) Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah; serta
- (2) Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pada komponen Pendapatan terdiri atas :

- (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Otsus; serta
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Kebijakan anggaran mendasarkan pada pendekatan kinerja dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan diantaranya dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya-upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan.

Arah kebijakan keuangan daerah Provinsi Papua dititik beratkan pada :

1. Kebijakan pendapatan keuangan daerah Provinsi Papua diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Semua potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya (intensifikasi), dan diupayakan sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Beberapa langkah strategis untuk mendukung pencapaian target iniantara lain dilakukan dengan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah, Optimalisasi Aset Daerah, Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.
2. Kebijakan belanja keuangan daerah Provinsi Papua diarahkan untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis, terutama untuk mendukung kebutuhan dana program strategis yang memiliki nilai tambah (value-added).
3. Arah pembiayaan Provinsi Papua diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut diatas (pembiayaan penerimaan). Sebaliknya, apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada pos-pos pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan.

3.4.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan proporsi rata-rata dibawah 4,376% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-Lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU dan Dana Otsus secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Gambaran umum pendapatan daerah tahun 2013–2018 adalah sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
Adapun sumber-sumber pendapatan daerah di Provinsi Papua berasal dari berbagai komponen yaitu :
 - a. Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan serta Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dimaksudkan untuk menampung penerimaan-penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah di Luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Bunga Deposito.
 - c. Penerimaan dari dana perimbangan yang meliputi: Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK dan penerimaan lain-lain.
 - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Sumbangan dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri dan dari Pendapatan Lain-lain.

Terkait dengan arah pengelolaan keuangan peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Provinsi Papua perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan PAD yaitu dengan :

- a) Melalui perbaikan manajemen diharapkan setiap potensi pendapatan daerah dapat direalisasikan. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perbaikan serta penyederhanaan sistem dan prosedur. Perbaikan manajemen ini baik pada internal Pemerintah Provinsi Papua maupun pada BUMD.
 - b) Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha yang kondusif bagi berlangsungnya investasi.
2. Peningkatan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil
- Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian. Sementara itu dana Otonomi Khusus dikelola dengan melibatkan pemerintah kabupaten / kota, dengan pembangian 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah provinsi dan 80% (delapan puluh persen) untuk pemerintah kabupaten/kota.

3.4.2 Arah Pengelolaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efektifitas). Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan (transparansi), selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (akuntabilitas).

Arah pengelolaan belanja daerah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

2. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

4. Optimalisasi belanja langsung

Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Transparan dan akuntabel

Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

3.4.3 Kebijakan Pembiayaan

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan ketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur pembiayaan seperti mengatur defisit anggaran dan pinjaman daerah (*sub national deficit, borrowing and debt*) dan mengatur surplus anggaran dan penyertaan modal (*investment*).

**BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah akan dapat mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Analisis isu-isu strategis diidentifikasi berdasarkan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang sangat mendesak dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan serta disusun berdasarkan isu strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang; termasuk untuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Isu-isu strategis adalah isu-isu yang jika diprioritaskan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Jika isu strategis ini tidak ditangani maka tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka permasalahan pembangunan jangka menengah Provinsi Papua dibagi ke dalam 4 permasalahan utama, yaitu permasalahan bidang birokrasi/pemerintahan daerah, aksesibilitas/infrastruktur daerah, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta permasalahan dari segi sosial dan budaya. Permasalahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

a. Masalah Infrastruktur

Berbagai kebutuhan infrastruktur dasar masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat dengan penyediaan yang harus memperhatikan pola sebaran pemukiman penduduk dalam kelompok-kelompok kecil dan tersebar dengan kondisi geografis yang berat.

Perumahan Rakyat

- Sebagian besar penduduk wilayah pedalaman dan pegunungan belum memiliki perumahan layak huni;
- Sebagian besar warga belum terjangkau dengan fasilitas listrik;
- Kebutuhan air bersih belum terjangkau oleh sebagian besar penduduk;
- Sanitasi lingkungan masih jauh dari rata-rata nasional.

Media Telekomunikasi dan Komunikasi

- Masih minimnya penggunaan media komunikasi seperti internet dengan berbagai fasilitasnya (web, email dll) dalam menunjang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah;
- Telekomunikasi dan penyiaran untuk kebutuhan komunikasi dan penyebaran informasi kepada warga masih belum menjangkau banyak wilayah kampung;
- Belum optimalnya komunikasi dan informasi pelaksanaan pembangunan serta publikasi hasil-hasilnya secara baik dan merata kepada semua lapisan masyarakat.

Perhubungan

- Jaringan jalan dan jembatan belum menjangkau banyak wilayah pemukiman penduduk sehingga pelayanan dasar belum dirasakan oleh sebagian besar penduduk;
- Sarana transportasi laut, sungai dan penyeberangan yang dibutuhkan untuk mendorong pergerakan ekonomi warga dan pelayanan dasar masih sangat terbatas;
- Terbatasnya kualitas dan kuantitas bandara termasuk bandara perintis dalam mendukung pelayanan transportasi udara yang merupakan alat transportasi dominan di Papua.

b. Masalah Perekonomian

Upaya pembangunan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.

Perekonomian Rakyat

- Belum efektifnya pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menunjang pendapatan keluarga berbasis hak masyarakat adat;

- Belum efektifnya pelaksanaan RESPEK dalam memicu pertumbuhan produktivitas kampung;
- Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pasar yang luas baik dalam skala nasional maupun internasional;
- Belum terhubungnya pengembangan industri pariwisata daerah dengan berbagai potensi alam dan budaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adat dan penduduk lokal;
- Masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas kebudayaan dan hasil-hasilnya, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk lokal;
- Belum optimalnya peran masyarakat adat dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan penduduk;
- Belum adanya konsep/Rencana Aksi pengembangan ekonomi rakyat yang lebih komprehensif dan terintegrasi mulai dari tahap produksi sampai tahap pemasaran yang mengarah pada kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

Perekonomian Daerah

- Pendapatan penduduk yang bekerja di sektor pertanian sangat rendah dibanding sektor ekstraktif pertambangan;
- Belum berkembangnya penelitian dan teknologi budidaya untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas pertanian guna menjaga ketahanan pangan;
- Kurangnya regulasi yang dapat melindungi kepentingan ekonomi daerah karena hampir semua nilai tambah produksi dari bahan baku yang dihasilkan Papua terjadi di luar Papua;
- Ancaman berkurangnya sumber daya keuangan pemerintah daerah pasca berakhirnya penerimaan dana Otsus Papua (8 tahun lagi);
- Kurangnya sumbangan dan keterkaitan sektor pertambangan terhadap pertumbuhan sektor-sektor pertanian dan jasa;
- Kurangnya kelembagaan dan infrastruktur ekonomi yang berpihak pada penduduk lokal, terutama dalam pembinaan usaha dan perkreditan.

Investasi dan Kemitraan Usaha

- Kemitraan antara penanam modal dengan warga lokal sebagai pemilik hak ulayat atas tanah belum efektif dilaksanakan sesuai Perdasus dan tuntutan Otonomi Khusus Papua;
- Kurangnya pemberdayaan dan pendampingan warga lokal dan masyarakat adat dalam menghadapi berbagai isu dan permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian kerjasama dengan investor;
- Masih minimnya proses produksi lanjutan yang dikerjakan oleh investor untuk meningkatkan nilai tambah dan penyediaan tenaga kerja di Provinsi Papua;
- Masih kurang efektifnya promosi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- Meluasnya pemberitaan dan wacana media tentang masalah keamanan dan masalah tanah ulayat yang kurang ditanggapi Pemerintah Daerah.

Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Minimnya SDM (tenaga penyuluh), sarana dan prasarana penyuluhan.
- Kurangnya produktifitas dan kualitas hasil produksi pertanian rakyat, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan.
- Rendahnya harga produksi di tingkat petani
- Kuantitas dan kualitas produksi sangat terbatas (rendahnya Produktivitaspetani)
- Tingginya kerawanan pangan di wilayah pegunungan, pedalaman dan terpencil
- Rendahnya Gizi masyarakat dan keragaman pangan; dan
- Bergesernya bahan konsumsi penduduk asli Papua terhadap bahanmakanan dari luar Papua (beras telah mengantikan sagu, ubi-ubian dan pisang)
- Belum efektifnya pemanfaatan lahan pertanian.

Perindustrian dan Perdagangan

- Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal, baik SDA maupun budaya, dalam pengembangan industri kecil, menengah dan kerajinan rumah tangga.
- Kurangnya pembinaan pelaku usaha industri dan perdagangan dalam aspek produksi, pemasaran, keuangan serta kewirausahaan.
- Belum optimalnya rintisan pengembangan komoditas unggulan untuk tujuan ekspor.

c. Masalah Sosial Budaya

Pembangunan bidang kesejahteraan masyarakat (sosial budaya) mencakupi berbagai pelayanan dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga. Sejumlah masalah sosial budaya yang teridentifikasi sampai saat ini dikelompokkan dalam : pendidikan, kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan, kepemudaan dan olahraga, dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pendidikan

- Terbatasnya akses PAUD Formal;
- Akses terhadap pelayanan pendidikan dasar 9 tahun masih terbatas;
- Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif;
- Rendahnya kesiapan anak untuk bersekolah SD menyebabkan tingginya angka mengulang kelas awal SD;
- Distribusi guru yang belum merata secara proporsional;
- Tingginya angka ketidakhadiran guru melaksanakan tugas masih tinggi;
- Kurangnya data dan informasi pendidikan;
- Belum terlaksananya akuntabilitas pendidikan-regulasi, pelaporan, pengawasan dan sanksi;
- Tingginya angka buta aksara dewasa, terutama di wilayah pegunungan;
- Kurangnya kapasitas SDM dalam menyusun perencanaan, pelaporan, pengendalian dan pengawasan pendidikan;
- Pembukaan program keahlian SMK tidak didasarkan pada analisis kebutuhan pasar kerja dan kecenderungan pembangunan daerah.

Kesehatan

- Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah;
- Masih tingginya angka kasus malaria sebagai penyakit endemik;
- Masih tingginya angka penyakit HIV/AIDS dan TB;
- Status gizi ibu dan anak terutama dari keluarga miskin sangat rendah;
- Terbatasnya prasarana dan sarana kesehatan;
- Status kesehatan ibu dan anak masih rendah serta Status gizi masyarakat masih rendah;
- Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM bidang kesehatan (dokter, mantri, dan bidan);
- Masih kurangnya pendekatan promotif dan preventif kesehatan bagi masyarakat dan UKBM seperti Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pos Kesehatan Kampung (Poskeskam).

Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- Tingginya arus migrasi penduduk dari luar Provinsi Papua yang berdampak pada tingginya persaingan pencari kerja, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, dan meningkatnya masalah sosial kemasyarakatan;
- Tingginya arus urbanisasi dari wilayah pedesaan (kampung) ke wilayah perkotaan
- Kurangnya pertumbuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia kerja
- Rendahnya pendidikan, kompetensi dan ketrampilan pencari kerja penduduk asli Papua
- Tingginya tingkat partisipasi kerja orang asli Papua
- Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dari angkatan kerja berpendidikan SMA dan Pendidikan tinggi

Kepemudaan dan Olahraga

- Kurang tersedianya data kepemudaan dan peta pembinaan pembinaan dan pengembangan kepemudaan;
- Terbatasnya fasilitas pengembangan kepemudaan;
- Masih rendahnya pengembangan potensi olahraga unggulan daerah termasuk pembibitan ;
- Terbatasnya jumlah dan kapasitas pembina dan pelatih olahraga serta rendahnya dukungan prasarana olahraga rekreasi dan olahraga masyarakat.

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Rendahnya Indeks Pembangunan Gender sebagai akibat tingginya buta aksara kaum perempuan; demikian juga dengan partisipasi sekolah, proposi upah gender dan proposi perempuan bekerja tanpa upah;
- Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender dalam berbagai aspek kehidupan sosial seperti peran rendahnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan, dalam politik, dalam pemerintahan, dalam kehidupan kemasyarakatan;
- Masih rendahnya pemahaman hak-hak dasar kaum perempuan dan perlindungan anak
- Belum adanya pelayanan terhadap anak-anak yang menghadapi masalah kekerasan dalam rumah tangga;
- Masih rendahnya pengakuan pada hak-hak dasar anak dalam keluarga dan masyarakat.

d. Masalah Lingkungan Hidup

Kualitas kehidupan manusia ikut dipengaruhi oleh kondisi dan kualitas lingkungan hidup sekitarnya. Lingkungan berdampak langsung pada ketersediaan sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidup, seperti ketersediaan air, prasarana jalan dan jembatan. Lingkungan yang tidak terpelihara dapat dipastikan berdampak pada menurunnya kapasitas dan daya dukung lingkungan terhadap pembangunan keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya yang sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan keseharian.

- Masih rendahnya pemahaman pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai sebuah fungsi ekosistem untuk mendukung kehidupan manusia;
- Belum tumbuhnya paradigma pembangunan berkelanjutan;
- Pemenuhan kebutuhan pembangunan daerah terlebih dalam era otonomi daerah yang semakin memicu cepatnya eksploitasi sumber daya alam;
- Marginalisasi masyarakat asli Papua yang masih peramu karena hilangnya akses pada aset kehidupannya;
- Adanya perbedaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah Kota/Kabupaten;
- Perencanaan pembangunan yang disusun selama ini cenderung berwawasan jangka pendek dan belum berpihak pada keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari;
- Tingginya ancaman tingkat eksploitasi di kawasan hutan baik untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, permukiman, pemekaran wilayah dan pembukaan lahan untuk kebutuhan investasi lainnya;
- Belum dilakukan penilaian kekayaan sumber daya hayati dan plasma nutfah Papua sebagai kekayaan leluhur Papua yang memberi dampak kesejahteraan;
- Belum dilaksanakannya skema kompensasi bagi masyarakat Papua dalam menurunkan emisi gas rumah kaca melalui penjagaan hutan hujan, bakau dan terumbu karang.

e. Masalah Tata Pemerintahan dan Politik

Pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan DPRP dan MRP dalam menyelenggarakan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Masalah Tata Pemerintahan dan Politik ini dikelompokkan dalam: administrasi umum pemerintahan, pemberdayaan aparatur dan otonomi daerah dan keuangan daerah.

Administrasi Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Aparatur dan Otonomi Daerah

- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana belanja bantuan keuangan alokasi dana otonomi khusus dalam sektor pendidikan, kesehatan dan beberapa program yang disepakati;
- Belum optimalnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang dibiayai baik dari APBD Provinsi maupun APBN;
- Belum optimalnya Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah, Ketatalaksanaan; Analisis Jabatan serta Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah;
- Struktur organisasi belum mencerminkan kebutuhan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai amanat UU No. 21/2001 dan potensi serta tantangan daerah.

Kepegawaian Daerah

- Belum optimalnya pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai dan analisis jabatan sebagai dasar pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, produktifitas pegawai;
- Masih rendahnya kualitas aparatur Pemerintah Daerah baik kompetensi maupun spesialisasi sesuai potensi dan tantangan daerah;
- Konfigurasi struktur organisasi pemerintah belum merefleksikan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien (MRP, legislatif dan eksekutif);
- Budaya komunikasi pemerintahan belum mampu mengatasi berbagai kebuntuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- Restrukturisasi organisasi pemerintahan Provinsi Papua belum didukung dengan acuan standar kinerja/SPM, Standart operating and procedure dan belum mempertimbangkan semangat pembangunan di era Otsus.

Keuangan Daerah

- Rendahnya indeks kemandirian fiskal karena Kurangnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pendapatan daerah di akhir periode Otsus;
- Belum efektifnya transparansi keuangan, terutama pengelolaan dana yang bersumber dari Otsus;
- Masih banyaknya temuan BPK yang mengindikasikan adanya masalah keuangan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah;
- Minimnya kapasitas pengelola keuangan yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas keuangan;
- Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi pedoman untuk mencegah berbagai masalah pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;
- Belum ditetapkannya sebagian besar regulasi bidang keuangan yang diharuskan perundang-undangan seperti perdasu pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi dan perdasu pembagian dana Otonomi Khusus Papua;
- Belum dilibatkannya MRP dalam memberikan pertimbangan alokasi dan penggunaan dana Otonomi Khusus Papua;
- Belum optimalnya implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (Performance Budgeting).

Pengawasan Daerah

- Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota;
- Masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, dan banyaknya praktek KKN pada semua tingkatan pemerintahan;
- Belum optimalnya tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
- Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga-lembaga pengawas dan lembaga-lembaga penegak hukum;
- Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

f. Masalah Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Daerah

Perencanaan Pembangunan

- Belum adanya konsistensi arah dan kebijakan dalam dokumen pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan pembangunan tahunan;
- Masih kurangnya kesadaran aparat pemda dalam menyusun dan menggunakan dokumen perencanaan untuk kebutuhan pembangunan daerah;
- Belum tersedianya Perdasu tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana;
- Belum terciptanya keselarasan penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan Politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) termasuk pendekatan budaya khas Papua;
- Belum terciptanya keselarasan Perencanaan Pembangunan dengan amanat OTSUS mendorong Perlindungan, Keberpihakan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua;
- Belum optimalnya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif pada setiap tahapan dan jenjang pemerintahan daerah di Provinsi Papua;
- Belum konsistennya kaitan antara penganggaran program/kegiatan tahunan dengan perencanaan lima tahun (RPJMD) dan tahunan (RKPD);
- Belum terciptanya Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Daerah maupun SKPD yang berbasis kinerja;
- Belum terbangun dan berfungsinya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Terbatasnya kapasitas dan kompetensi staf perencana, termasuk MONEV dan pengendalian Pembangunan;
- Belum memadainya data dasar pembangunan dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Belum optimalnya Sinergi Perencanaan Pembangunan di Daerah baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk antara Pemerintah dengan Mitra Pembangunan.

Penataan Ruang

- Masih adanya pelanggaran terhadap ketentuan penataan.
- Masih banyaknya dampak negatif yang diakibatkan berbagai aktivitas pemanfaatan ruang.
- Belum adanya kesesuaian perencanaan ruang (RTRW) antara provinsi dan Kabupaten/Kota.

g. Masalah Data dan Statistik Daerah

- Belum terbangunnya sistem database pembangunan daerah provinsi;
- Keterbatasan data baik kuantitas maupun kualitas;
- Belum terkoordinasi dan terkonsolidasinya data pembangunan daerah.

h. Masalah Pemberdayaan Masyarakat Kampung

- Belum adanya regulasi yang dapat menjamin konsistensi program pemberdayaan kampung;
- Belum optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan kampung: minimnya jumlah pendamping, kurangnya kualitas pendamping, kualitas dan ketepatan waktu pelaporan, masalah transparansi dan akuntabilitas keuangan;
- Masih rendahnya tingkat kemandirian warga dalam pelaksanaan program pemberdayaan;
- Kurangnya perhatian program pemberdayaan terhadap kegiatan ekonomi rakyat.

i. Masalah Ketentraman dan Ketertiban

- Tingginya kegiatan pelintas batas di wilayah perbatasan dengan PNG;
- Masih tingginya kesenjangan pendapatan yang mengakibatkan kecemburuan dan konflik;
- Belum optimalnya Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan PERDA;
- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sistem hukum nasional dan hukum adat;
- Belum optimalnya koordinasi untuk penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (antara Pemda, TNI dan POLRI);
- Masih adanya konflik sosial kemasyarakatan secara horizontal;
- Masih adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan;
- Perang suku antar suku dan kelompok masyarakat masih sering terjadi;
- Kurangnya pelembagaan budaya perang antar suku untuk memajukan pariwisata yang inovatif;
- Kurangnya pemberdayaan warga, masyarakat adat dan lembaga keagamaan untuk mendukung terciptanya ketertiban di tengah-tengah masyarakat;
- Masih kurangnya sosialisasi dan pendekatan yang dapat menarik simpati warga dalam memelihara ketertiban;
- Masih tingginya potensi terjadinya perselisihan antara warga dan penanam modal, dan antar warga lokal dan penduduk pendatang;
- Masalah pertanahan memunculkan konflik antar warga, dan warga dengan pemerintah dan investor terkait jaminan kepastian berusaha;
- Rendahnya penerimaan penduduk terhadap peraturan perundang-undangan pertanahan nasional.

j. Masalah Penegakan Hukum dan HAM

- Belum optimalnya pemberian Bantuan Hukum kepada warga masyarakat;
- Masih kurangnya penelitian dan pengkajian produk hukum daerah;
- Belum ditetapkannya sejumlah Perdasus dan Perdas yang mengatur hak-hak dasar orang asli Papua: berperspektif gender dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual orang asli Papua;
- Belum optimalnya implementasi Perdasi/Perdasus tentang Masyarakat Adat dan Peradilan Adat;
- Belum tuntasnya penyelesaian kasus Pelanggaran HAM di Papua;
- Masih rendahnya kapasitas aparat penegak hukum yang profesional, jujur, dan berwibawa;
- Belum dibentuknya Pengadilan HAM di Papua;
- Belum adanya penanganan dan pemulihan oleh Negara terhadap korban pelanggaran HAM di Papua;
- Belum tersedianya peradilan, rumah tahanan anak dan penjara khusus anak;
- Belum tersedianya penjara khusus perempuan;
- Masih terdapatnya gerakan beberapa kelompok warga membuat gerakan untuk pemisahan Papua dari NKRI.

k. Masalah Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

- Belum optimalnya peran lembaga-lembaga politik dalam pembinaan demokrasi.
- Belum terbangunnya budaya politik yang sehat, dewasa bermutu, dan bertanggungjawab
- Belum berperannya lembaga-lembaga adat dalam pembinaan dan perlindungan masyarakat.
- Masih adanya konflik sosial kemasyarakatan secara horizontal.
- Kurangnya wawasan dan kesadaran sebagian warga dalam berbangsa dan bernegara dalam NKRI;
- Kurang optimalnya implementasi Otsus dalam bidang politik, seperti belum terbentuknya partai politik lokal, belum dirangkulnya kelompok warga untuk menyatukan kepentingan mereka dalam partai politik lokal dalam kerangka NKRI;
- Masih kurangnya kesadaran sebagian warga untuk mengambil peran dalam pesta politik-pemilukada, pemilihan umum, dan pemilihan anggota legislatif;
- Kurang efektifnya pesta demokrasi sebagai wujud pelembagaan suara rakyat dalam pemilu dan pemilukada.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa depan. Isu strategis, apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 5 (lima) tahun kedepan; gambaran umum kondisi daerah; isu internasional; isu nasional dan isu regional.

a. Isu Internasional

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang, adalah komitmen Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan pada UN Summit tahun 1990 oleh PBB. Dengan telah diadopsinya komitmen MDG's oleh Indonesia, merupakan keharusan bagi kabupaten Nduga untuk mencermati indikator dan target yang harus dicapai. Selain MDG's, isu internasional yang saat ini sedang berkembang dan akan memberikan efek bagi masa depan pembangunan dunia dan Indonesia secara umum dan kabupaten Nduga secara khusus, antara lain: penerapan green economic global (ekonomi ramah lingkungan), krisis ekonomi global yang masih mengancam perekonomian, perdagangan bebas WTO, APEC dan AFTA yang cenderung mengarah kepada perdagangan bebas dunia global dan regional, penerapan sumber alternative mengantisipasi semakin menipisnya cadangan mineral dunia mengantisi semakin menipisnya cadangan mineral dunia, mengantisipasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat dan mengantisipasi hambatan jarak antar waktu.

b. Isu atau Kebijakan Nasional

Selain memerhatikan isu skala internasional dan regional, hal-hal lain yang menjadi pertimbangan perumusan isu-isu strategis adalah 11 prioritas pembangunan nasional, yaitu :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan kemiskinan;
5. Ketahanan pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim investasi dan iklim usaha;

8. Energi;
9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan paska konflik; dan
11. Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi.

Sejalan dengan 11 prioritas tersebut, kebijakan Propinsi Papua juga memerhatikan dokumen RPJMN, sesuai dengan perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Berdasarkan arahan pembangunan wilayah Papua, sasaran pembangunan wilayah Papua dalam dokumen RPJMN dalam kurun waktu 2010-2014 adalah untuk :

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Papua ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, dan pendapatan per kapita;
2. Meningkatnya standar layanan jasa pendidikan;
3. Meningkatnya standar layanan jasa kesehatan;
4. Tercapainya tingkat produksi pangan dengan tingkat ketersediaan minimal 90% dari tingkat kebutuhan domestik untuk pengamanan kemandirian pangan;
5. Meningkatnya peran sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata dalam perekonomian wilayah Papua; dan
6. Meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya tambang dan hutan.

Melengkapi perencanaan pembangunan nasional, baru-baru ini pemerintah pusat menerbitkan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dalam rangka mewujudkan visi sebagai negara maju dan sejahtera pada tahun 2025, Indonesia mempercepat transformasi ekonomi. Untuk itu disusun MP3EI yang mengedepankan pendekatan not bussiness as usual, melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan terfokus pada prioritas yang konkrit dan terukur.

Dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi tersebut, wilayah pengembangan dibagi menjadi beberapa koridor, salah satunya adalah Koridor Ekonomi Papua-Kepulauan Maluku. Koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Tema pembangunan koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku adalah sebagai **Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan Nasional**. Strategi pembangunan ekonomi koridor ekonomi Papua-Kepulauan Maluku difokuskan pada 5 kegiatan ekonomi utama, yaitu Pertanian pangan-MIFEE (Merauke Integrated Food & Energy Estate), Tembaga, Nikel, Migas, dan Perikanan.

c. Isu atau Kebijakan Daerah (Regional/Provinsi)

1. Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua sebagai yang terendah di Indonesia.
2. Masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pendidikan dasar dan menengah termasuk non-formal akibat rendahnya ketersediaan layanan pendidikan untuk masyarakat di daerah terpencil, pendekatan yang tidak sesuai dengan kondisi geografis dan pola permukiman serta budaya masyarakat setempat.
3. Belum tersedianya sistem jaminan pemenuhan biaya pendidikan gratis (operasional dan personal) dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah khususnya bagi Orang Papua Asli sesuai mandat UU Otsus, menyebabkan tingginya biaya pendidikan yang harus ditanggung masyarakat.
4. Masih rendahnya akses masyarakat asli Papua pada pemenuhan kesehatan dasar akibat rendahnya ketersediaan sarana kesehatan, rendahnya distribusi tenaga kesehatan dan non kesehatan, ketersediaan obat-obatan secara merata, serta tingginya biaya kesehatan akibat belum meratanya distribusi jaminan kesehatan masyarakat.
5. Masih tingginya angka kematian ibu, kematian bayi baru lahir dan balita, angka balita kurang Gizi, serta penyakit endemis malaria dan menular berbahaya.
6. Masih rendahnya ketersediaan perumahan yang layak huni dan terjangkau dengan sanitasi lingkungan dan air bersih yang bermutu dan ketersediaan listrik yang merata.

7. Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat perkotaan dan pedesaan karena pemberdayaan ekonomi yang belum sepenuhnya bertumpu pada kekuatan ekonomi kerakyatan dalam memastikan adanya mata pencaharian (livelihood) yang menyebabkan rendahnya nilai tambah dan produktivitas di wilayah pedesaan.
8. Masih rendahnya angka kemandirian fiskal akibat belum optimalnya pemanfaatan sumber pendapatan asli daerah dari produk unggulan daerah non migas diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta sumber pendapatan un-conventional lainnya diantaranya skema kompensasi penurunan emisi gas rumah kaca.
9. Belanja pemerintah cenderung tidak efisien sehingga menciptakan kesenjangan sosial dan politik ekonomi yang menempatkan masyarakat pada posisi absolute konsumtif.
10. Dis-harmony hubungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota akibat miss-management dalam penetapan orientasi dan strategi pembangunan sehingga meninggalkan peran kabupaten/kota sebagai jenjang pemerintahan dengan kewenangan tersendiri.
11. Terbaikannya peran masyarakat Adat termasuk perempuan Papua yang seceraketerwilan oleh MRP (Majelis Rakyat Papua) selaku mitra utama pemerintah sehingga proses pengembangan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan banyak yang bertentangan dengan prinsip dasar dan hak dasar masyarakat adat.
12. Tidak Konsistennya penyelenggaraan pembangunan Papua karena belum tersedia masterplan pembangunan (RPJP) sebagai kesepakatan warga menuju peradaban baru yang dicita-citakan bersama.
13. Pembangunan infrastruktur strategis yang tidak berkesinambungan sehingga konektivitas antar daerah masih terhambat.
14. Masih adanya tuntutan dari kelompok masyarakat Papua untuk memisahkan diri dari NKRI karena tidak terlaksananya rekonsiliasi akibat perbedaan pemahaman sejarah bangsa dan ketidakpuasan pada kebijakan publik yang belum menjawab permasalahan mendasar pembangunan.
15. Pengendalian dan pengurangan aksi korupsi, kolusi dan nepotisme belum berjalan dengan baik.
16. Tidak jelasnya mind set dan culture-set birokrasi pemerintah daerah yang berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas pelayanan publik dalam pencapaian prioritas pembangunan.
17. Penataan dan pemanfaatan ruang bagi pembangunan tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten / Kota maupun stakeholder lainnya.
18. Distribusi pembiayaan pembangunan era otonomi khusus yang belum proporsional antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam penyediaan layanan yang lebih kontekstual.
19. Belum optimalnya pengembangan potensi olahraga prestasi dan perlindungan nyata atas kekayaan intelektual serta kebudayaan luhur asli Papua termasuk penilaian atas sumberdaya hayati dan plasma nutfah asli Papua berdasarkan penelitian dan pengembangan secara berkelanjutan dan memastikan penguatan akar budaya Papua dalam menghadapi gempuran modernisasi.
20. Rendahnya kepercayaan investor karena belum adanya upaya konstruktif dalam penegakan hukum, pengembangan sistem informasi pembangunan daerah yang mendukung pertumbuhan investasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Periode 2013-2018 merupakan tahap kedua dalam proses pencapaian Visi jangka panjang Provinsi Papua. Visi Jangka panjang yang harus diwujudkan seperti yang telah dituangkan dalam dokumen Rancangan RPJPD Provinsi Papua tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut :

PAPUA YANG MANIDIRI SECARA SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI, DAN POLITIK

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian serta sebagai kelanjutan RPJMD tahun 2006-2011, maka RPJMD periode kedua tahun 2013-2018 ditujukan untuk memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing lokal yang berkelanjutan serta pemenuhan infrastruktur daerah.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua tetap difokuskan, dengan meningkatkan pencapaian IPM; menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran; pertumbuhan ekonomi riil yang berkualitas; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kondisi lokal; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; kesejahteraan dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah; percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat asli Papua.

Kualitas SDM Masyarakat Papua menjadi dasar untuk mampu meningkatkan daya saing perekonomian lokal yang dilakukan melalui penguatan di bidang pertanian, tanaman pangan, pemanfaatan hasil hutan non kayu, pemanfaatan potensi perikanan, dan pemanfaatan potensi sumber daya alam sebagai sumber alternatif pembangunan. Potensi ini dapat dikembangkan apabila disertai dengan peningkatan kemampuan dan pengetahuan untuk memanfaatkannya dan didukung oleh kemampuan pemerintah daerah untuk memfasilitasinya melalui pengembangan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur; peningkatan kualitas lembaga maupun sekolah kejuruan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mampu mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Percepatan peningkatan tujuan diatas harus didukung dengan pengembangan dan pemantapan jaringan infrastruktur transportasi yang telah ada, peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin dan tenaga surya untuk kelistrikan; serta peningkatan ketersediaan air bersih untuk mendukung kegiatan usaha maupun kegiatan rumah tangga dan fasilitas umum lainnya.

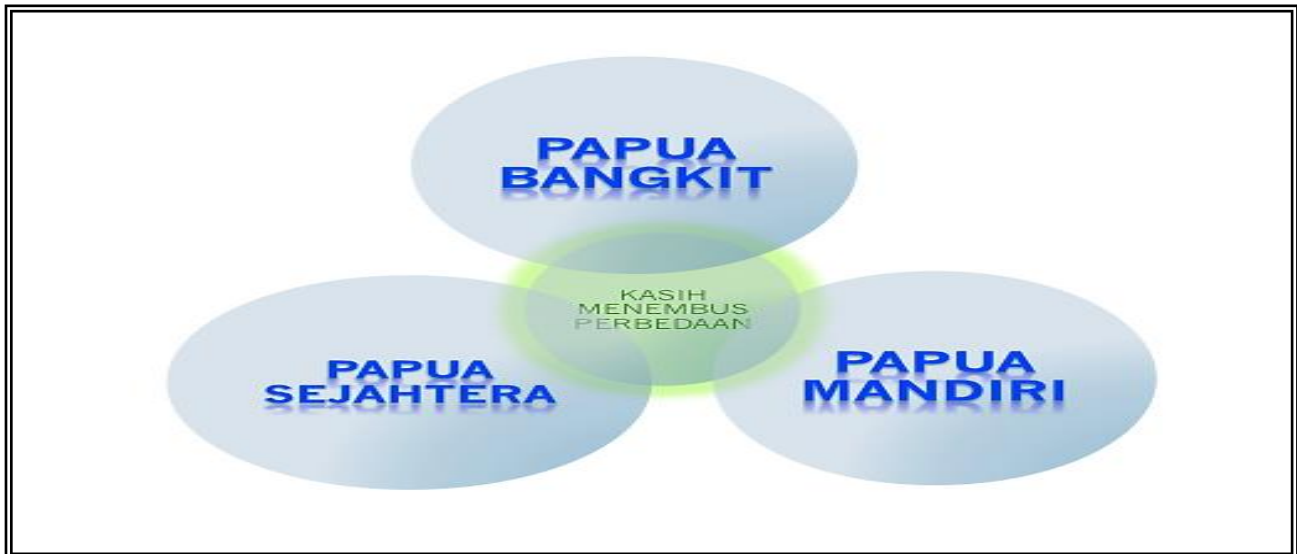
Untuk mencapai kemandirian ekonomi lokal yang berkelanjutan, maka pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup harus didasarkan pada kesadaran masyarakat dan partisipasi aktif semua pihak termasuk semua fungsi kelembagaan dan peran pemerintah daerah dalam mendorong dan melaksanakan proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sehingga, sumber daya alam sebagai modal penguatan kegiatan ekonomi lokal dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat asli Papua, serta modal pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu, perencanaan tata ruang Provinsi Papua yang telah dihasilkan dan diselaraskan dengan pemanfaatan lahan dan pola ruang dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan harus secara konsisten dilaksanakan dan dipatuhi. Tujuan dan arahan pembangunan nasional yang akan dilaksanakan di Papua harus diselaraskan dengan perencanaan daerah yang telah disusun dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan ketentuan daerah.

Sejalan dengan prioritas pembangunan tahap kedua RPJP Daerah Provinsi Papua tahun 2005-2025 dan visi dan misi pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua periode 2013-2018, maka visi atau kondisi masa depan yang diharapkan terwujud adalah sebagai berikut :

PAPUA BANGKIT, MANDIRI DAN SEJAHTERA

Jika memperhatikan pernyataan visi diatas, maka kesejahteraan yang hakiki multidimensional dalam tatanan peradaban baru sebagai cita-cita bersama akan dapat terwujudjika prasyarat kemandirian masyarakat Papua dalam berbagai aspek kehidupandapat terpenuhi setelah berhasil bangkit dari keterpurukan multidimensional. Korelasi antara Papua Bangkit, Mandiridan Sejahtera sebagai visi pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.1
Visi Papua 2013-2018



Dari gambar diatas tampak jelas bahwa PAPUA BANGKIT merupakan landasan utama untuk mewujudkan PAPUA MANDIRI DAN SEJAHTERA, selanjutnya untuk mewujudkan visi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera diselimuti dengan prinsip **Kasih Menembus Perbedaan** dimana dengan kasih inilah yang menembus segala sekat-sekat perbedaan yang ada, inilah yang disebut Papua yang baru dalam bingkai **Peradaban Baru Papua**.

Penjelasan masing-masing elemen visi diatas adalah sebagai berikut :

PAPUA BANGKIT

Terwujudnya Masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diridari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi dilevel individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan mengambil peran di berbagai sektor pembangunan.Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) semakin baik.

PAPUA MANDIRI

Terwujudnya kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja,serta didukung pengembangan Industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan subsektor unggulan yang semakin baik.

PAPUA SEJAHTERA

Terwujudnya semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan yang luas dalam seluruh kehidupannya. Secara sederhana, sejahtera dipahami sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari “rasa lapar” dan “rasa takut”. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

5.2. Misi

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan bagaimana komitmen terus dijaga kepada segenap *Stakeholders*. Berdasarkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berakhlak Mulia.
4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal.
5. Percepatan Konektivitas Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antara Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

Penjelasan masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan suasana aman, tenram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua. Terwujudnya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*law enforcement*) dan terjaganya ketertiban umum. Kondisi dan suasana aman, tenteram dan nyaman merupakan potensi dan modal dasar pembangunan di Provinsi Papua. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan iklim kondusif bagi terciptanya kenyamanan bagi seluruh Masyarakat Papua dan investasi ke Papua untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya dilakukan dengan penciptaan tata kehidupan masyarakat Papua yang religius dan berbudaya melalui optimalisasi peran lembaga keagamaan dan lembaga adat sebagai mitra pemerintah daerah dalam rangka aktualisasi dan penghormatan terhadap nilai-nilai budaya asli Papua. Pijakan pada nilai-nilai agama dan adat diperlukan agar upaya penciptaan keamanan dan ketertiban itu dilembagakan sendiri oleh masyarakat. Selain itu meningkatkan rasa aman, tenteram dan nyaman diupayakan melalui penegakan hukum dan revitalisasi peran masyarakat, dengan mendorong komunikasi yang intensif antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah daerah.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Berwibawa Serta Penguatan Otsus

Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta penguatan Otonomi Khusus Papua dalam Implementasinya sesuai dengan amanat UU No. 21 tahun 2001. Dinamika dan tuntutan masyarakat saat ini, menuntut setiap aparatur pemerintahan profesional dan akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi. Salah satu upayanya, adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktek-praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Selain memberantasan praktek KKN, reformasi birokrasi harus kita jalankan dengan meningkatkan budaya kerja, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip *good governance*. Aparatur harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif efisien dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Oleh karena itu perubahan *mind-set*, *culture-set* dan pengembangan budaya kerja harus dilakukan secara lebih cepat dan terarah. Demikian juga upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*) dan bebas KKN harus diinisiatif dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Reformasi Birokrasi ini juga akan mendorong hubungan kelembagaan yang harmonis antara Provinsi dan kabupaten/kota serta penguatan implementasi Otonomi Khusus Papua. Penguatan Otonomi khusus Papua dilakukan dengan mewujudkan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, MRP dan DPRP dalam memperluas dan memperkuat kewenangan daerah dalam kerangka Otsus demi terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, hak politik dan hak budaya.

3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia

Maksud dari misi ini adalah Meningkatkan Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika dengan mengembangkan sistem nilai yang positif sesuai kearifan lokal budaya asli masyarakat Papua. Sebaliknya, kebiasaan masyarakat yang tidak baik perlu untuk terus diminimalisir. Sumberdaya manusia adalah kekuatan yang bersumber dari manusia yang dapat disebut sebagai tenaga atau kekuatan (energi atau *power*). Daya yang bersumber dari manusia ini sering dipadankan dengan istilah *man power*. Membangun manusia berkualitas berarti membentuk manusia yang utuh dan bernilai positif dengan indikator-indikator kualitas antara lain adalah: sehat, sehingga mampu bekerja keras, tangguh dan ulet dalam menghadapi persoalan, cerdas berpikir dan bertindak, terampil dan memiliki kompetensi, mandiri, memiliki tanggung jawab, produktif, kreatif, inovatif, beorientasi ke masa depan, disiplin dan berbudi. Pengembangan sumberdaya manusia (SDM), yang juga merupakan subjek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus hidup manusia sejak kandungan hingga akhir hidup. Pembangunan SDM dapat dilihat dari tiga dimensi, yaitu kualitas, kuantitas dan persebaran penduduk. Kualitas SDM suatu daerah dikatakan membaik antara lain ditandai dengan meningkatnya status kesehatan dan taraf pendidikan masyarakat dengan ukuran penilaian berupa Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

4. Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal

Maksud dari tujuan Misi ini adalah Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal yang ditandai dengan terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro ekonomi, meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari yang mendukung peningkatan pekenomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. Perekonomian daerah dapat bergerak apabila sektor riil dapat bergerak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Sektor riil dapat bergerak hanya apabila investasi dapat masuk ke wilayah Papua yang tentunya didukung oleh iklim investasi yang kondusif mengingat potensi sumberdaya alam yang besar berupa pertanian dan perkebunan, kelautan dan perikanan serta pariwisata. Perekonomian masyarakat dapat tangguh dan mencapai tingkat kesejahteraan yang merata berawal dari optimalisasi potensi unggulan yang berdaya saing serta didukung oleh sarana prasarana perekonomian yang memadai baik berupa jaringan irigasi, jaringan jalan, jaringan jembatan dan lapangan terbang. Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera menuntut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan, mampu meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat secara luas hingga ke perkampungan, serta berdaya saing tinggi didukung oleh pengusaha dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam mengembangkan sumber-sumber daya pembangunan. Hal ini memberi pengertian antara lain bahwa pembangunan struktur perekonomian harus diperkuat dengan mendudukkan sektor industri berbasis potensi kampung sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisiensi, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik, agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Mencapai ketahanan ekonomi yang tangguh membutuhkan dukungan elemen masyarakat dimulai dari tingkatan paling bawah, sehingga dengan demikian faktor peningkatan pelayanan dasar pembangunan perkampungan harus menjadi faktor penting dan prioritas dalam rangka percepatan pembangunan perekonomian daerah.

5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Maksud dari misi ini adalah meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah diwujudkan dengan meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah, meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni, meningkatkan ketersediaan air bersih, meningkatnya ketersediaan energi listrik dan ramah lingkungan. Selain itu terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten. Penyediaan dan percepatan infrastruktur yang lebih merata dan terpadu yang ditujukan untuk mendukung perekonomian daerah dengan prinsip *Community dan Commodity Based Infrastructure, Integration dan Sustainability*. Ketiga Prinsip dan konsep dasar ini dimaksudkan bahwa pembangunan Infrastruktur dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diseluruh wilayah, pemacu pertumbuhan dan pengembangan wilayah, pembentukan struktur ruang dan Interaksi antar wilayah. Percepatan pembangunan infrastruktur makin penting jika dilihat dari berbagai dimensi. Percepatan pertumbuhan ekonomi jelas membutuhkan tambahan kuantitas dan perbaikan kualitas infrastruktur. Pengembangan ekonomi tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian. Hingga saat ini, walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, namun kesenjangan infrastruktur masih terasa, baik di di wilayah ibukota kabupaten dan kota maupun di perkampungan kawasan cepat tumbuh. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas dalam pembangunan dalam lima tahun kedepan karena menjadi faktor pendorong utama untuk pencapaian ke 4(empat) misi lainnya.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, ditetapkan kriteria dan indikator-indikator makro sebagai perwujudan pencapaian visi dan misi Provinsi Papua tahun 2013-2018. Penjabaran indikator makro keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Indikator Makro Pembangunan
Tahun 2013-2018

No	Indikator	Kondisi Awal (2011)	Target Tahun 2018
1.	IPM	65,36	70.00
2.	Persentase penduduk Miskin	31,98%	25%
3.	Laju pertumbuhan ekonomi riil	9,27%	> 7%
4.	PDRB Perkapita	24,54 Jt	>30 Jt
5.	Tingkat Konektivitas Antar Daerah	-	Meningkat

5.3. Tujuan dan Sasaran

Penetapan Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

- **Tujuan ditetapkan** dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan harus menunjukkan suatukondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan nasional.
- **Sasaran adalah** penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Provinsi Papua dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta target. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaranadalah tolok ukur keberhasilanpencapaianasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertaidenganrencanatingkatcapaian (target).

Tujuan dan Sasaran Misi 1

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan Berbudaya

Pembinaan dan pengamalan nilai-nilai budaya lokal dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat penting dilaksanakan agar tercipta kehidupan yang aman, damai dan kondusif.

Terdapat 2 sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah :

Sasaran 1 : Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.

Sasaran 2 : Meningkatkan Masyarakat Papua yang Berbudaya

Tujuan 2 : Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua

Terciptanya Rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Dengan rasa aman dan nyaman maka aktivitas pembangunan dapat berjalan dengan baik serta perekonomian daerah akan berkembang khususnya Investasi ke Papua.

Terdapat 2 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua
- Sasaran 2 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua

Tujuan dan Sasaran Misi 2

Tujuan 1 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel

Di era reformasi birokrasi saat ini, perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah salah satu fokus dari reformasi birokrasi. Pemerintahan daerah yang ditopang oleh aparatur dengan kinerja baik, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan mampu menciptakan pemerintahan yang bersih, profesional dan efektif dalam menjaankan tugasnya. Lebih lanjut, kondisi ini diharapkan mampu menjamin kinerja pemerintah dalam menciptakan pelayanan publik yang prima, serta menciptakan kepastian hukum dan akuntabilitas publik.

5 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur
- Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi
- Sasaran 4 : Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN
- Sasaran 5 : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik

Tujuan 2 : Mewujudkan Hubungan Kerja antara Provinsi dan Kabupaten/kota yang harmonis

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi tidak terlepas dari kerjasama yang baik antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kontribusi hasil pembangunan 29 Kabupaten dan Kota merupakan agregat dalam pencapaian target-target pembangunan di Provinsi oleh karena itu kerjasama yang harmoni harus diwujudkan dalam bentuk sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah secara integratif.

Terdapat 3 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota
- Sasaran 2 : Terbentuknya Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku)

Tujuan 3 : Mewujudkan Hubungan Kerja sama Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRD dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Hubungan yang harmoni antar lembaga yaitu Pemerintah Daerah, DPRD dan MRP merupakan salah satu syarat utama dalam Pelaksanaan Otsus di Papua sehingga Penerapan pelaksanaan Otsus untuk kesejahteraan masyarakat orang asli Papua dapat berjalan dengan konsisten.

1 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRD dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.

Tujuan 4 : Mewujudkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen

Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua harus dilaksanakan secara konsekuen sesuai dengan amanat UU 21 tahun 2001 dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Untuk itu dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ini diperlukan revitalisasi dan penguatan kewenangan daerah sehingga pembangunan di Papua berjalan sesuai dengan amanat dari UU Otsus itu sendiri.

Ada 2 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Rekonstruksi Undang-undang No. 21 Tahun 2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua)
- Sasaran 2 : Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.

Tujuan 5 : Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-fungsi Pemerintahan

Birokrasi pemerintahan daerah tidak saja menitikberatkan kepada kualitas atau kinerja aparatur, namun juga kepada kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencerminkan kebutuhan fungsi-fungsi pemerintahan.

Ada 3 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan
- Sasaran 2 : Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan
- Sasaran 3 : Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (*Mind set*) Aparatur Pemerintah Daerah

Tujuan dan Sasaran Misi 3

Sesuai dengan misi ketiga pembangunan daerah, yaitu; “**Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia**” maka terdapat 2 tujuan pokok yang akan dicapai oleh daerah, masing-masing adalah :

Tujuan 1 : Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan

Salah satu hal yang utama dalam mewujudkan kualitas SDM Papua adalah peningkatan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan berupa pelayanan administrasi kependudukan, peningkatan peran lembaga keagamaan dan perempuan dalam pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan sosial, dan pengembangan nilai-nilai budaya.

Terdapat 5 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan
- Sasaran 2 : Terwujudnya masyarakat religius
- Sasaran 3 : Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas
- Sasaran 4 : Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
- Sasaran 5 : Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua

Tujuan 2 : Meningkatkan Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika

Peningkatan mutu sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5 tahun kedepan yang didasarkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan.

Ada 4 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Meningkatnya prestasi olahraga
- Sasaran 2 : Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan
- Sasaran 3 : Terwujudnya masyarakat yang sehat
- Sasaran 4 : Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil

Tujuan dan Sasaran Misi 4

Sesuai dengan misi keempat pembangunan daerah, yaitu; **“Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal”** maka terdapat 2 tujuan pokok yang akan dicapai oleh daerah, masing-masing adalah :

Tujuan 1 : Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri

Pengembangan perekonomian rakyat dengan komoditas-komoditas yang berorientasi pasar dengan nilai jual tinggi dengan Fokus perhatian pada pembangunan ekonomi daerah dan ekonomi rakyat yang mencakup : pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan dan jasa, koperasi dan UKM, industri, penanaman modal serta pertambangan dan energi. Basis kebijakan diarahkan pada pemberdayaan rakyat melalui peningkatan kapasitas dalam mengelola usaha yang pada akhirnya akan dapat mewujudkan Masyarakat Papua yang adil dan sejahtera.

Terdapat 7 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
- Sasaran 2 : Tercapainya stabilitas makro ekonom
- Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
- Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah
- Sasaran 5 : Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah
- Sasaran 6 : Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja
- Sasaran 7 : Terselenggaranya promosi potensi kepariwisataan daerah

Tujuan 2 : Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dgn memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan

Pengelolaan SDA secara terpadu dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah serta tetap memperhatikan kelestarian serta kesinambungansehingga pengelolaannya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat Orang Asli Papua secara mandiri dan berkelanjutan.

Terdapat 2 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah ::

- Sasaran 1 : Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat
- Sasaran 2 : Meningkatnya pendapatanmasyarakat adat pemilik hak ulayat

Tujuan dan Sasaran Misi 5

Sesuai dengan misi kelima pembangunan daerah, yaitu; “**Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedepankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**” maka terdapat 2 tujuan pokok yang akan dicapai oleh daerah, masing-masing adalah :

Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah

Pembangunan Infrastruktur meliputi transportasi, air bersih, listrik dan telekomunikasi. Untuk pengembangan transportasi meliputi jalan dan jembatan, prasarana dan sarana perhubungan darat, laut, udara dan ASDP. Pembangunan jaringan transportasi terpadu tersebut untuk membuka akses untuk menerobos isolasi wilayah, maupun membuka akses keluar untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, permukiman penduduk dan perdagangan di dalam dan di luar negeri.

Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan baru secara otomatis telah mendorong terbukanya daerah-daerah terisolir yang dilakukan oleh kabupaten-kabupaten untuk membuka wilayah-wilayah distrik. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara tidak langsung juga telah mengakibatkan terbukanya akses secara kewilayahan di Provinsi Papua. Selain itu Pengembangan jaringan transportasi mendukung pembangunan kawasan tumbuh cepat yang memiliki potensi dan komoditas unggulan masing-masing.

Ada 6 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah ::

- Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas antar wilayah
- Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah
- Sasaran 3 : Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan informasi antar wilayah
- Sasaran 4 : Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni
- Sasaran 5 : Meningkatnya pemenuhan air bersih
- Sasaran 6 : Meningkatnya pemenuhan energi murah dan ramah lingkungan

Tujuan 2 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan

Pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Papua dalam proses pembangunan ke depan. Pelaksanaan pembangunan yang tetap memperhatikan lingkungan yang seimbang dan lestari mutlak diperlukan guna menjaga sumber daya alam sehingga tidak rusak dan terpelihara secara sistematis.

Terdapat 4 Sasaran pokok yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan ini adalah :

- Sasaran 1 : Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
- Sasaran 2 : Terwujudnya Papua sebagai paru-paru dunia
- Sasaran 3 : Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan
- Sasaran 4 : Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan

Gambaran keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Propinsi Papua

Misi I : Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan Berbudaya.	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Kesadaran Menjalankan Nilai-nilai Keagamaan - Frekuensi dialog antar umat beragama - Tingkat Aktivitas Keagamaan
		Meningkatnya Masyarakat Papua yang berbudaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat aktualisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat - Frekwensi Dialog Lintas Budaya
2.	Meningkatkan rasa aman, tenram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua.	Meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum serta terjaganya ketertiban umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Angka Kriminalitas - Tingkat Konflik Vertikal - Tingkat Konflik Horisontal (antar suku) - Tingkat Kejahatan <i>Trans Nasional (Crime Clearance)</i> - Tingkat Kenyamanan Investasi. - Tingkat ketaatan Masyarakat terhadap Hukum.
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tenram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran melalui Lembaga Adat.
Misi II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi Aparatur Pemda yang Profesional, Akuntabel dan Disiplin - Tingkat Prestasi Kerja dan Disiplin Aparatur
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah - Jumlah Dokumen Perencanaan - Tingkat ketersediaan data Perencanaan
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khusus - Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) - Persentasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
		Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik.	<ul style="list-style-type: none"> - Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) - Proporsi Belanja Anggaran Publik yang lebih Besar daripada Belanja Aparatur.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
2.	Mewujudkan Hubungan Kerja antara Provinsi dan Kabupaten/kota yang harmonis	Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota - Jumlah Kerjasama antar Kabupaten/Kota - Terbentuknya Badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah Adat
3.	Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen	Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat wilayah - Frekwensi Kerjasama tiga tungku
		Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.	<ul style="list-style-type: none"> - Terbangunnya Kemitraan yang Sinergi dan Harmonis antara Pemerintah Daerah dengan lembaga DPRP - Ditetapkan seluruh Perdasus dan Perdasi sesuai Amat Undang-undang Otsus - Mengawal Implementasi Kebijakan Otsus secara Konsisten
		Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah rekonstruksi - Tingkat Pendidikan Orang Asli Papua - Angka Harapan hidup Orang Asli Papua - Proporsi Keluarga Orang Asli Papua yang memiliki Rumah Layak Huni - Proporsi Komunitas Adat Terpencil (KAT) berdaya Sosial - Jumlah Penduduk Miskin Orang Asli Papua
		Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah, DPRP dan MRP.	<ul style="list-style-type: none"> - Perdasus dan Perdasi yang ditetapkan
4.	Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-fungsi Pemerintahan.	Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Efisiensi dan efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
		Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang miskin Struktur kaya Fungsi
		Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (<i>Mind set</i>) Aparatur Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintah Daerah

Misi III : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia			
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.	Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan.	Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> - Laju pertumbuhan penduduk. - Ketersediaan dan keakuratan data penduduk.
		Terwujudnya masyarakat yang religius.	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan Narkotika dan pemakaian Zat Adiktif. - Jumlah Konflik akibat SARA. - Tingkat Kriminalitas.
		Terwujudnya layanan sosial yang berkualitas.	<ul style="list-style-type: none"> - Cakupan KAT. - Cakupan Layanan PMKS.
		Terwujudnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Pembangunan Gender. - Indeks Pemberdayaan Gender.
		Lestarinya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua.	<ul style="list-style-type: none"> - Apresiasi dan aktualisasi terhadap seni dan budaya. - Jumlah Kelompok seni dan budaya. - Frekuensi festival budaya.
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika.	Meningkatnya prestasi olahraga.	<ul style="list-style-type: none"> - Prestasi Papua pada perhelatan olahraga tingkat Nasional (PON). - Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti dalam PON. - Partisipasi Atlet Papua di event Nasional dan Internasional. - Jumlah pelatih yang bersertifikasi Nasional.
		Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan.
		Terwujudnya Masyarakat yang Sehat.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah wirausaha muda asli Papua. - Usia Harapan Hidup. - Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup. - Tingkat Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. - Frekuensi pengawasan obat dan makanan. - Angka Kecukupan Gizi (AKG). - Terpenuhinya sanitasi dasar. - Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. - Prevalensi Kekurangan Gizi pada anak balita (%). - Kasus Malaria (AMI) per 1.000 penduduk. - Cakupan Imunisasi dasar (persen).

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) SD, SMP dan SMA - Angka Partisipasi Murni (APM) (%) SD, SMP dan SMA - Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) SD, SMP dan SMA - Jumlah S1, S2 dan S3 asli Papua - Prosentase Melek Huruf > 15 th - Kemampuan Baca-Tulis-Berhitung SD kelas 3 - Jumlah Inovasi/penelitian daerah

Misi IV : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri.	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> - Terbentuknya sistem pelayanan perijinan secara terpadu (satu atap). - Terlaksananya promosi potensi investasi dalam dan luar negeri. - Meningkatnya persetujuan dan realisasi investasi. - Tersedianya dan meningkatnya jumlah dan kualitas sarana pendukung investasi (jalan produksi, jalan usahatani, pelabuhan peti kemas, energi listrik, bandara). - Tersedianya PERDASI investasi dan aturan pelaksanaannya.
		Tercapainya stabilitas makro ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya peningkatan neraca perdagangan daerah. - Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi. - Terkendalinya laju inflasi. - PDRB atas Harga Berlaku. - <i>Share</i> PDRB Harga Berlaku.
		Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK.	<ul style="list-style-type: none"> - Menguatnya kapasitas kelembagaan koperasi dan UKMK. - Meluasnya pangsa pasar produk koperasi dan UKMK. - Meningkatnya kapasitas modal usaha koperasi dan UKMK. - Meningkatnya realisasi penyaluran skim kredit UKMK. - Meningkatnya pendapatan masyarakat.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
		Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah.	<ul style="list-style-type: none"> - Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku industri kecil dan menengah. - Meluasnya pangsa pasar produk industri. - Meningkatnya kapasitas modal usaha industri. - Meningkatnya realisasi penyaluran skim kredit bagi industri kecil dan menengah. - Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah.
		Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD. - Tersedianya PERDASI tentang Pengelolaan BUMD.
		Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya persentase penyerapan Tenaga Kerja. - Menurunnya angka pengangguran. - Tersedianya regulasi tentang ketenagakerjaan. - Meningkatnya ketrampilan pencaker.
		Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya promosi potensi pariwisata. - Bertambahnya jumlah <i>event</i> pariwisata. - Meningkatnya sarana prasarana wisata. - Meningkatnya jumlah daerah objek tujuan wisata. - Meningkatnya kunjungan wisatawan. - Meningkatnya investasi di sektor pariwisata. - Meningkatnya pelaku usaha wisata. - Terwujudnya pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat.
2.	Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dgn memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan.	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi lahan produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan/perikanan/ kehutanan. - Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan daerah. - Terwujudnya kecukupan pangan dan gizi. - Meningkatnya produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal. - Tersedianya cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat.

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kapasitas kelembagaan petani. - Tersedianya tenaga penyuluh/pendamping ditingkat masyarakat. - Tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian.
		Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pendapatan masyarakat pemilik hak ulayat.
Misi V : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan			
1.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah.	Meningkatnya konektivitas antar wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat ketersediaan dan fungsional jalan nasional dan provinsi. - Terbangunnya jaringan jalan PKN-PKW, antar PKW serta PKW-PKL. - Tingkat ketersediaan dan fungsional bandara. - Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP).
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase cakupan sistem jaringan sumberdaya air terhadap irigasi. - Prosentase cakupan sistem Pengendalian banjir dan abrasi. - Tingkat ketersediaan air tanah.
		Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.	<ul style="list-style-type: none"> - Prosentase ibu kota distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi.
		Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Rasio elektrifikasi. - Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi alternative. - Daya terpasang.
		Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.	<ul style="list-style-type: none"> - tingkat ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni. - Meningkatnya ketersediaan air bersih.
2.	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan.	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
		Papua sebagai paru-paru dunia.	<ul style="list-style-type: none"> - Emisi GRK. - Serapan GRK. - Luas tutupan hutan primer dan sekunder.
		Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.
		Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan.	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pemangku kepentingan yang memahami pembangunan berkelanjutan. - Jumlah dokumen perencanaan yang mengakomodir pembangunan berkelanjutan.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua. Sumberdaya alam Tanah Papua yang berlimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkesinambungan dengan memperhitungkan kebutuhan dan kesejahteraan generasi yang akan datang. Sumberdaya yang dapat diperbaharui dikelola dengan memperhatikan kelangsungan fungsi-fungsi ekologis sehingga tetap lestari dan produktif, sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui akan dimanfaatkan dengan memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang.

Sehubungan dengan itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mencapai suatu masyarakat dan wilayah Papua yang damai, sejahtera dan aman serta didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut.

6.1. Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

6.1.1 Prinsip dan Nilai Dasar Pembangunan

5 Prinsip dasar pembangunan adalah :

1. Perlindungan (Protection), sesuai amanat Undang-undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, bahwa kebijakan pembangunan Provinsi Papua diarahkan pada perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.
2. Keberpihakan (Affirmative), Afirmatif bagi orang asli Papua adalah kebijakan diskriminasi positif yang diambil dengan tujuan agar Orang Asli Papua memperoleh kesempatan mendapatkan layanan yang lebih dengan alasan perbedaan kondisi awal sehingga dapat memperoleh peluang yang setara untuk bersaing dengan kelompok/golongan lain dalam bidang yang sama.
3. Pemberdayaan (Empowerment), bahwa arah kebijakan pembangunan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Orang Asli Papua dalam segala bidang pembangunan.
4. Keterpaduan (Integrated), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua tahun 2013-2018 harus mampu memperkuat sinergi antar bidang, antar ruang dan waktu. Setiap SKPD pelaksana pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta pengendalian, monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan.
5. Tata Pemerintahan yang Baik (good Governance), bahwa pelaksanaan pembangunan wajib mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Adapun nilai dasar pembangunan 5(lima) tahun kedepan adalah :

1. **Kecukupan (sustenance)** : pembangunan diarahkan agar masyarakat merasa tercukupi semua kebutuhan dasar (basic need) seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan.
2. **Jati diri (Self Esteem)** : pembangunan membentuk motivasi seluruh masyarakat untuk berkeinginan untuk maju atau *need achivement*, menghargai diri sendiri & memiliki rasa percaya diri yg tinggi.
3. **Kebebasan (Freedom)** : pembangunan dilaksanakan dengan mendorong nilai-nilai demokrasi dan penghormatan terhadap HAM sehingga masyarakat bebas dalam bersikap dan berperilaku, rasa takut, perbudakan, kebodohan, kemiskinan, dan stigmasasi.

6.1.2 Strategi Dasar Pembangunan

Strategi dasar adalah strategi yang menjiwai seluruh arah kebijakan pembangunan selama lima tahun, yaitu :

1. **Pembangunan yang bertumpu pada rakyat dan mengutamakan kepentingan rakyat (People Centered Development).**

Seluruh kebijakan pembangunan sebesar-besarnya diarahkan pada kesejahteraan masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Untuk itu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan harus memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta menggunakan pendekatan yang sesuai dengan budaya dan adat masyarakat lokal. Sehingga pelayanan kepada masyarakat hendaklah merupakan Harapan Seluruh Rakyat (**HASRAT**) Papua khususnya Rakyat yang berada di kampung-kampung. Oleh karena itu **HASRAT PAPUA** seperti Pendidikan yang bermutu dan terjangkau, pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan mudah, kemandirian perekonomian masyarakat, peningkatan pelayanan sosial, dan pemenuhan infrastruktur dasar akan menjadi prioritas utama pembangunan dalam lima tahun kedepan dan Pembangunan manusia merupakan indikator utama mengukur akselerasi perkembangan pembangunan selama lima tahun ini.

2. **Pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan (Growth), Pemerataan (Equity) dan Berkelanjutan (Sustainable)**

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata sehingga dampak pertumbuhan itu dirasakan oleh seluruh masyarakat khususnya Orang Asli Papua. Kebijakan pembangunan ekonomi tidak semata-mata mengejar pertumbuhan tapi yang paling esensial adalah dampak dari pertumbuhan itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Prinsip pembangunan ekonomi dilakukan melalui: Perubahan Pola Pikir, Pengwilayahan Komoditas, dan Petik Olah Jual. **Perubahan pola pikir** dimaksudkan bahwa masyarakat khususnya Orang Asli Papua akan ditingkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola Sumber Daya lokal yang ada disekitarnya sehingga menjadi dapat bernilai ekonomi sekaligus dapat memenuhi kebutuhannya. **Pengwilayahan Komoditas** diartikan bahwa prioritas pengembangan perekonomian daerah didasarkan pada komoditas unggulan setiap wilayah atau daerah. **Petik, Olah dan Jual** dimaksudkan bahwa menyiapkan sistem pemasaran yang terintegrasi dari saat panen, pasca panen dan pemasaran atau penjualan. Oleh karena itu Pertumbuhan ekonomi dalam pembangunan lima tahun ke depan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur perkembangan pembangunan yang terjadi, merupakan suatu indikator antara bukan hasil akhir yang akan dicapai.

Selain itu pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dan menghormati hak-hak adat masyarakat setempat. Pelaksanaan pembangunan harus dengan pendekatan **KASIH**, menjadikan pembangunan yang dilaksanakan dapat menghilangkan perasaan masyarakat Papua terhadap bentuk *ketidakadilan, marginalisasi, ketimpangan dan diskriminasi*. Sehingga dengan pendekatan Kasih ini akan menghilangkan konflik dalam masyarakat dan pembangunan dapat terus terjaga dan terpelihara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan itu pembangunan juga harus memperlihatkan perencanaan dan pentahapan yang jelas serta sistematis, sehingga dapat berkesinambungan.

3. Kewilayahan Dinamis Terpadu (Spasial Dynamic Integrated)

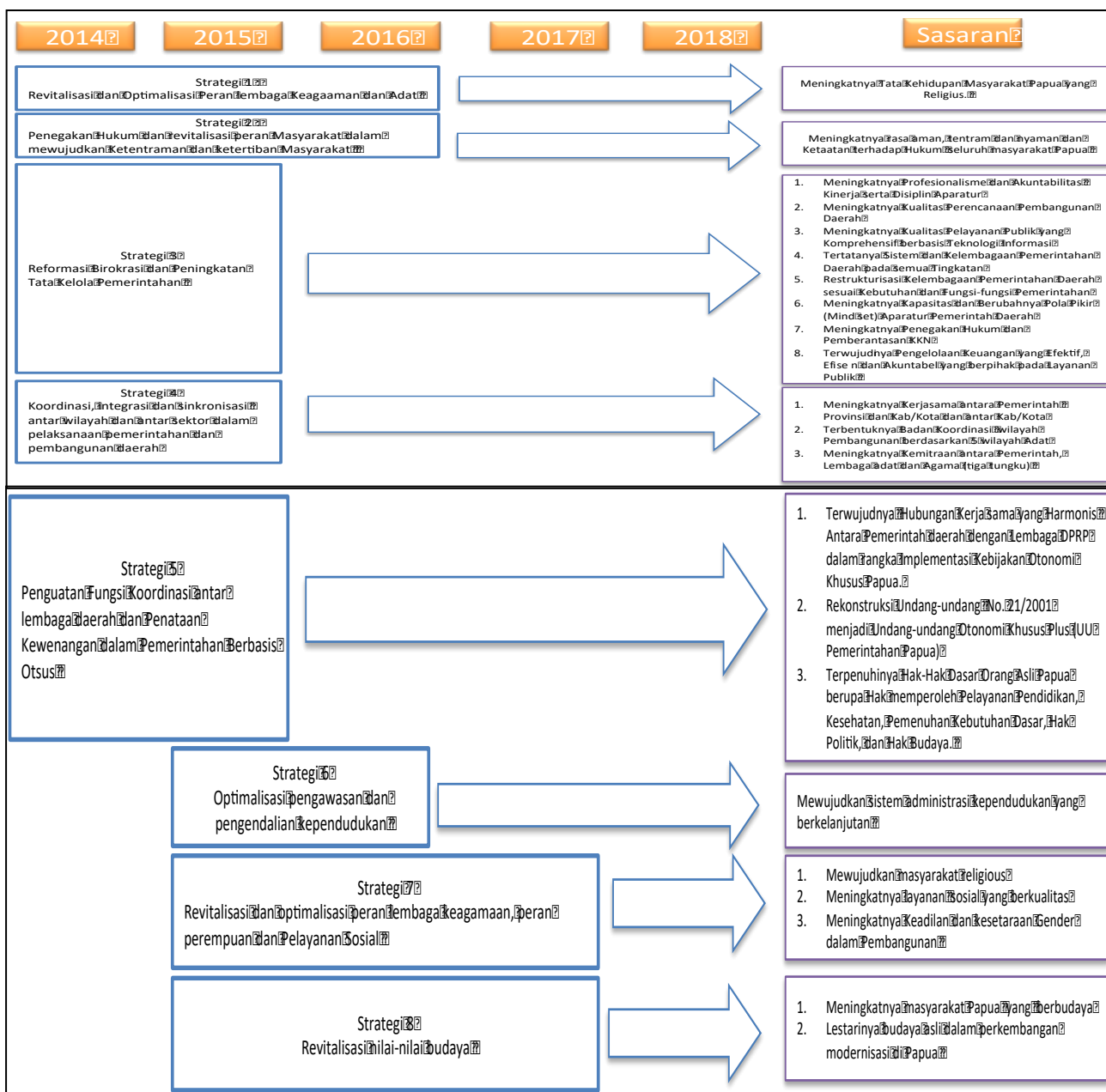
Pembangunan berorientasi pada pengembangan wilayah dan integrasi seluruh wilayah. Penyediaan Infrastruktur wilayah diarahkan pada menghilangkan ketimpangan antar wilayah dengan menerapkan prinsip keadilan pembangunan antar wilayah. Selanjutnya pembangunan kewilayahan ini akan difokuskan pada beberapa wilayah prioritas berdasarkan 5 wilayah satuan adat.

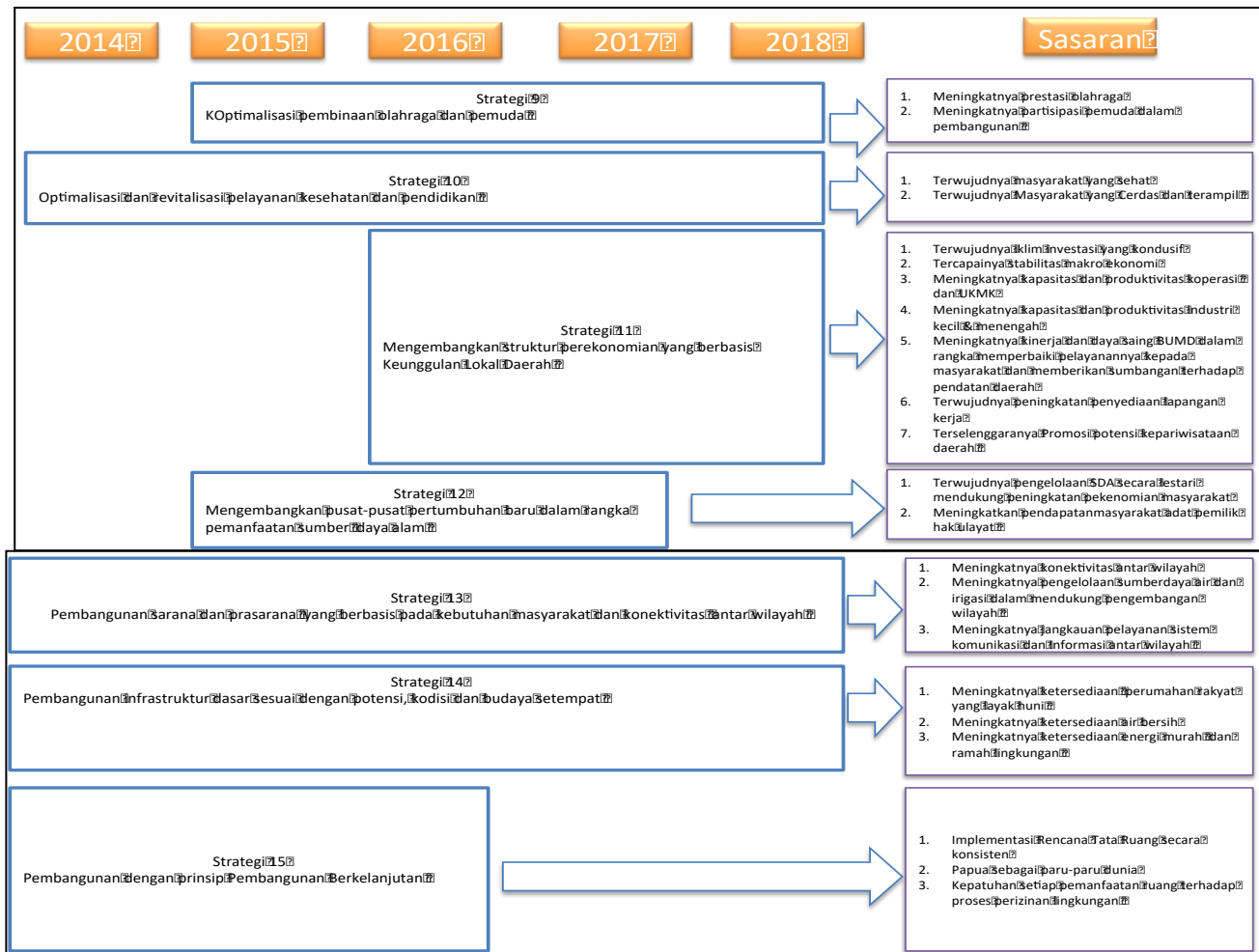
6.1.3 Strategi Pencapaian Sasaran

Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab cara pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan jangka waktu pencapaian sasaran-sasaran tersebut. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan.

Strategi Pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar VI.1
Strategi dan Jangka Waktu Pencapaiannya





Dari tabel 6.1, dapat dijelaskan maksud dari masing-masing strategi diatas, sebagai berikut :

a. Strategi 1: Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat

Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat dalam rangka mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua.

Strategi Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat diprioritaskan dari tahun 2014-2015, diharapkan dengan dijalankannya strategi Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan dan adat pada 2(dua) tahun pertama agar tercipta suasana yang kondusif dan dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sehingga stabilitas dan kontinuitas pembangunan dapat terjaga dan berjalan dengan baik.

b. Strategi 2: Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Strategi Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat diprioritaskan tahun 2014-2015, diarahkan pada meningkatnya rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua, melalui Mendorong Komunikasi yang Intensif antara Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan dengan dijalankannya strategi ini, maka akan tercipta suasana yang kondusif untuk mendukung berlangsungnya pembangunan dan akan mendorong pertumbuhan perekonomian Papua khususnya laju Investasi masuk ke Papua.

c. Strategi 3: Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Strategi Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dalam rangka meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur, meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah, meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi, Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan, Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi, meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah, Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN dan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik.

Strategi reformasi birokrasi diprioritaskan dilaksanakan pada tahun 2014-2015. Diharapkan dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi pada 2 (dua) tahun pertama agar aparatur pemerintah daerah dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya sehingga dapat memberikan pelayanan publik secara lebih baik. Pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik tersebut harus memenuhi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, transparansi dan akuntabilitas.

d. Strategi 4 : Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah

Strategi Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah diprioritaskan pada tahun 2014, diarahkan pada membangun Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota, pembentukan Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 (lima) wilayah adat, dan Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku). Dengan berjalannya strategi ini pelaksanaan pembangunan daerah akan terintegrasi dan bersinergi antara Provinsi dan Kab/kota atau antara Kabupaten dan Kota serta sinergi dan kemitraan antara pemerintah, lembaga adat dan agama. Dengan dilaksanakannya strategi ini pada awal pelaksanaan RPJMD merupakan pondasi atau dasar pelaksanaan pembangunan daerah karena pembangunan dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah (Provinsi dan seluruh kabupaten/kota), agama dan adat saling berbanding tangan mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

e. Strategi 5 : Penguatan Fungsi Koordinasi antar lembaga daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus

Strategi Penguatan Fungsi Koordinasi antar lembaga daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus, dalam rangka mewujudkan Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRD dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua, Rekonstruksi Undang-undang No. 21/2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua) dan pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya. Strategi ini diprioritaskan pada tahun 2014, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai arah dan amanah dari UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua untuk pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua.

f. Strategi 6 : Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan

Strategi Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan, diarahkan pada terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkesinambungan, melalui Penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, penyediaan hasil kajian kependudukan. Dengan pelaksanaan strategi ini yang diprioritaskan pada tahun 2015-2016 diharapkan layanan sosial akan terlaksanakan dengan baik dan tepat sasaran khususnya bagi Orang Asli Papua.

- g. Strategi 7 : Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial**
Strategi Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial, akan diprioritaskan pada tahun 2015-2017 dalam rangka mewujudkan layanan sosial yang berkualitas dan Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan Mendorong kemandirian peran lembaga keagamaan, Pembinaan dan pemberdayaan PMKS dan KAT, Memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- h. Strategi 8 : Revitalisasi nilai-nilai budaya**
Strategi Revitalisasi nilai-nilai budaya diarahkan dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua, dengan diprioritaskan pada Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; Pengembangan kesenian yang berbasis budaya; Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan 5 wilayah adat. Strategi Revitalisasi nilai-nilai budaya diprioritaskan pelaksanaannya pada tahun 2015-2017.
- i. Strategi 9 : Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda**
Strategi Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda, diarahkan pada Mendorong pembinaan Olahraga berprestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional melalui Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini. Selain itu strategi ini juga diarahkan pada Mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan melalui Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan. Strategi Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda akan diprioritaskan pada tahun 2015-2018.
- j. Strategi 10 : Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan**
Strategi Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan, diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan cerdas, melalui Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan Kesehatan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama dan sosial lainnya, Mendekatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara merata diseluruh wilayah, Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama serta Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Strategi Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan prioritas utama pembangunan selama 5 (lima) tahun yang merupakan program Harapan Seluruh Rakyat Papua (HASRAT Papua).
- k. Strategi 11 : Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah**
Strategi mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah, akan diprioritaskan pada tahun 2016-2018 diharapkan dengan berjalannya strategi ini akan mewujudkan iklim investasi yang kondusif, Tercapainya stabilitas makro ekonomi, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah, Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, serta Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah.

l. Strategi 12 : Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam

Strategi Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam akan diprioritaskan pada tahun 2015-2017, diharapkan akan mewujudkan Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat melalui Mendorong pertumbuhan wilayah2 strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah shg dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yg dapat menggerakkan wilayah tertinggal. Selain itu juga akan mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi hasil hutan dan SDA lainnya.

m. Strategi 13 : Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah

Strategi Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah, merupakan strategi yang mendukung pelaksanaan seluruh strategi yang ada dengan demikian strategi ini merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan RPJMD ini. Strategi ini diarahkan untuk mewujudkan Meningkatnya konektivitas antar wilayah, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah serta Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah. Prioritas pembangunan pada strategi ini diarahkan pada Pengembangan wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengurangi kesenjangan inter dan antar wilayah. Strategi Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah akan diprioritas selama 5 (lima) tahun dari 2014-2018.

n. Strategi 14 : Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat

Strategi Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat, akan diprioritaskan pelaksanaannya dari tahun 2014-2018. Diharapkan dengan pelaksanaan strategi ini akan Meningkatnya pemenuhan perumahan rakyat yang layak huni, Meningkatnya ketersediaan layanan air bersih, serta Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan. Prioritas strategi Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat yaitu : Mempercepat Pembangunan Pemanfaatan energi murah dan ramah lingkungan, Rumah layak huni serta Sarana Prasarana air bersih.

o. Strategi 15 : Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Strategi Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan akan diprioritaskan pada tahun 2014-2015, diharapkan dengan pelaksanaannya akan mewujudkan Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten, Papua sebagai paru-paru dunia, serta Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan. Prioritas strategi ini diarahkan pada Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan, Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Memperkuat implementasikan RAD GRK, Membangun *Green Investment*, Peningkatan kualitas lingkungan, Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan, serta Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

6.2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Papua terbagi menjadi 2 (dua) arah kebijakan yaitu :

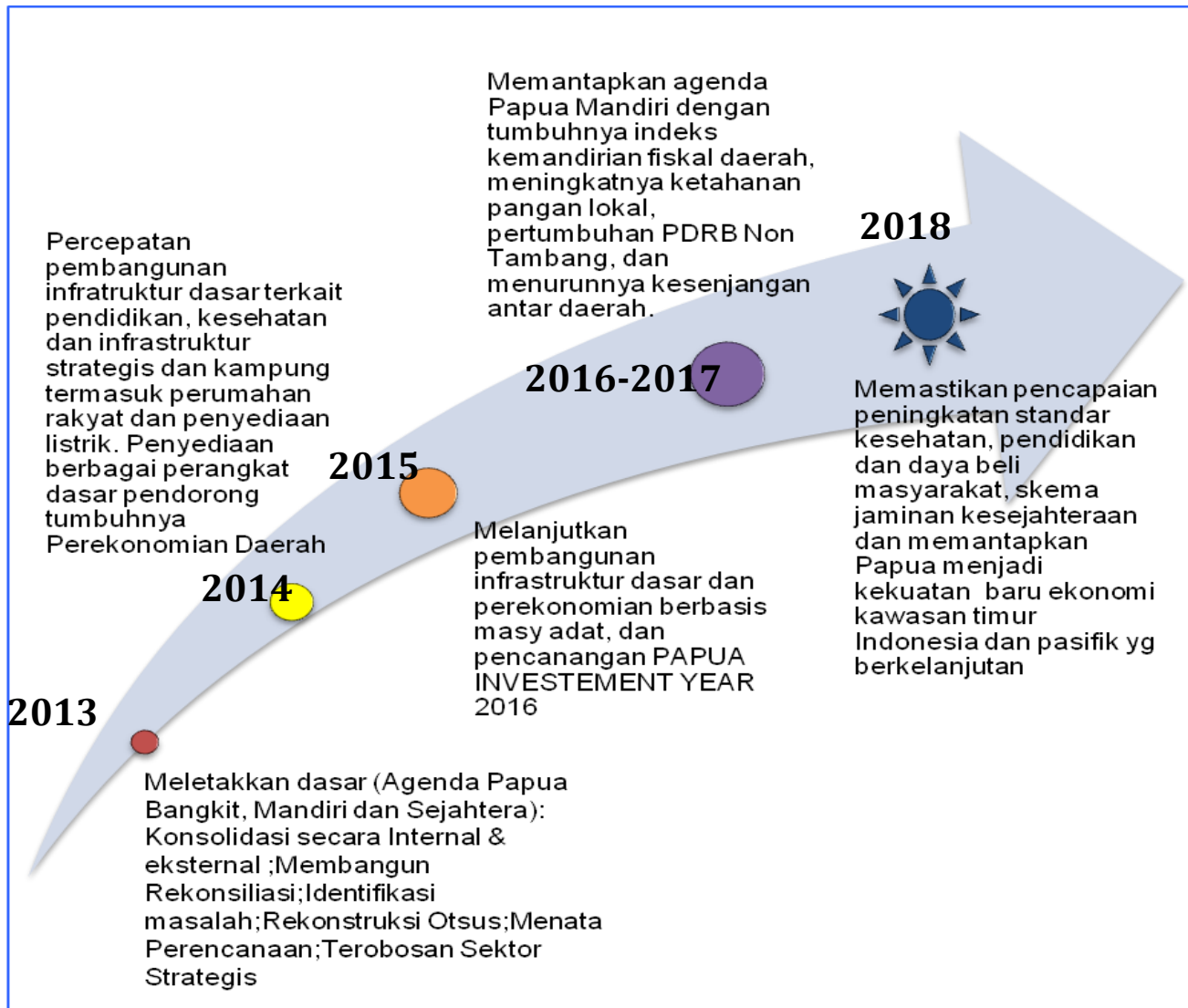
1. Arah Kebijakan Pengembangan wilayah
2. Arah Kebijakan Bidang Pembangunan

6.2.1 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

6.2.2 Arah Kebijakan Bidang Pembangunan

Arah kebijakan Provinsi Papua merupakan fokus pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Pentahapan ini mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan fokus dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Fokus pembangunan Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar 6.1 sebagai berikut :

Gambar VI.2
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Papua 2013-2018



Fokus atau tema pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun, akan menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan fokus atau tema pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan pembangunan Papua selama lima tahun ditetapkan seperti pada gambar sebagai berikut :

Gambar 6.3
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Papua



Tahun 2013 merupakan tahun untuk meletakkan dasar (Agenda Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera) dengan kelengkapan dokumen perencanaan strategis, Proporsi dana Otsus, Restrukturisasi dan Reformasi Birokrasi.

Arah Kebijakan Tahun 2014

Pembangunan Provinsi Papua tahun 2014 diarahkan pada :

- 1) Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius;
- 2) Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum;
- 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
- 4) Terwujudnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kab/kota serta antar kab/kota;
- 5) Terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat;
- 6) Terwujudnya hubungan harmonis antara lembaga daerah, rekonstruksi otsus, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua;

- 7) Pelestarian budaya asli Papua;
 - 8) Terwujudnya masyarakat sehat;
 - 9) Terwujudnya masyarakat cerdas dan terampil;
 - 10) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
 - 11) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik;
 - 12) Implementasi tata Ruang secara konsisten.
-
1. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius, merupakan langkah awal pembangunan tahun 2014 yang difokuskan pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan, Menjamin kebebasan setiap Umat Beragama dalam menjalankan ajaran Agamanya, Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan, Bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Yayasan Pengelola Pendidikan Keagamaan, Memfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya, Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Hal Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Pemantapan Keterwakilan Etnik Orang Asli Papua dalam lembaga MRP, Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga MRP.
 2. Terciptanya terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum, merupakan prioritas tahap tahun 2014 yang diprioritaskan pada Peningkatan Peran Aparatur Penegak Hukum dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan.
 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan langkah awal dalam pembangunan tahun 2014, fokus prioritas yang akan dilaksanakan adalah Penataan Sistem Kepegawaian dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal /Non Formal bagi Aparatur, Penetapan Standar Operasional dan Standar Pelayanan minimum (SOP & SPM), Pengembangan sistem Reward dan Punishmen serta jenjang karier yang jelas dalam peningkatan kualifikasi SDM Aparatur, Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal, Penerapan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) dalam mendukung konsistensi perencanaan dan penganggaran, Penerapan Perencanaan Pembangunan berbasis Data, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah, Menerapkan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan serta Pemanfaatan IPTEK untuk Peningkatan Daya Saing Daerah, Peningkatan Kapasitas Aparat penegak Hukum, peningkatan Keasadaran Masyarakat terhadap Hukum dan Paeraturan Perundang-undangan yang berlaku, Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran serta Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen. Diharapkan dengan fokus prioritas ini akan terbentuk aparatur daerah yang profesional dan peka terhadap permasalahan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dengan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah maka akan mendukung peningkatan perekonomian daerah khususnya pertumbuhan Investasi daerah.
 4. Terwujudnya kerjasama antara pemerintah provinsi dan Kab/kota serta antar kab/kota, merupakan dasar dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka peningkatan sinergitas pembangunan daerah. Fokus prioritas diarahkan pada inisiasi pembentukan Badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah adat. Terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat menjadi dasar untuk menjaga dan memelihara stabilitas pembangunan (Development Stability) dan kesinambungan pembangunan (Development continuity).
 5. Terwujudnya kemitraan pemerintah, agama dan adat, difokuskan pada peningkatan keberdayaan masyarakat kampung.
 6. Terwujudnya hubungan harmonis antara lembaga daerah, rekonstruksi otsus, peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Orang Asli Papua. Fokus prioritas diarahkan pada Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPRP, Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPRP dalam rangka Penyusunan Perdasus dan Perdasi serta mengawal Implentasi Kebijakan Otsus secara Konsisten.

7. Pelestarian Budaya Papua, diarahkan pada Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; Pengembangan kesenian yang berbasis budaya, Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan 5 wilayah adat.
8. Terwujudnya masyarakat sehat, difokuskan pada Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal; Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; **Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita** melalui : Penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONEC dan PONEK; Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; Perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; Peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader serta); Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita; Peningkatan kemitraan bidan dan dukun; **Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular** melalui : Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, termasuk imunisasi; Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga surveilans; Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; Kesehatan lingkungan dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi; Surveilans penyakit tidak menular; Promosi dan pemberdayaan masyarakat; serta Koordinasi dan kerjasama pengendalian HIV dan AIDS antara lain mencakup : kesehatan, pendidikan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pemuda, kependudukan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi, agama, dan budaya; **Perbaikan status gizi masyarakat**, melalui : Peningkatan asupan zat gizi makro dan mikro; Surveilans pangan dan gizi; Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; Pemberian Makanan tambahan bagi bayi dan anak-anak Peningkatan pemenuhan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat; **Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat**, melalui Pemberlakuan jaminan kesehatan Papua dalam bentuk Kartu Papua Sehat (KPS) yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan lainnya (Jamkesmas, Jampersal) yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat asli Papua; Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua di seluruh puskesmas dan jaringannya (khususnya bayi, balita, ibu hamil dan lansia); **Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat**, melalui : Mengutamakan pemberdayaan masyarakat termasuk mengaktifkan kembali praktik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, Mengintegrasikan kegiatan pelayanan gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mengembangkan kegiatan gizi masyarakat dengan memberdayakan lembaga masyarakat setempat seperti lembaga gereja, kelompok pengajian, PKK dan organisasi perempuan lainnya; **Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya**,

melalui Peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan; Peningkatan kompetensi SDM kesehatan; Kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dalam rangka penyediaan tenaga kesehatan yang dapat bertugas sesuai dengan kondisi lokal Papua dan organisasi profesi; **Peningkatan pelayanan kesehatan, primer, sekunder dan tersier**, melalui : Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke); Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional; Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

9. Terwujudnya masyarakat cerdas dan terampil difokuskan pada Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain); Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; **Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : *Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA*; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; *Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung)*; Peningkatan mutu proses pembelajaran; Peningkatan kesempatan lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP, serta Penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan memasukkan kurikulum berbasis kearifan lokal Papua yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika, berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman. Peningkatan kualitas dilakukan juga melalui pendidikan anak yang berprestasi dan pemberian beasiswa; **Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal; Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki jiwa kewirausahaan; Peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri Peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan Peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal; **Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat**, melalui: (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan; **Akselerasi dan afirmasi kualitas pendidikan** melalui : pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi; Pendidikan 1000 Doktor (PhD); Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; Peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; Peningkatan keaksaraan dan peningkatan minat baca; Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, pendidikan dan penyediaan berbagai tunjangan guru; Penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah Peningkatan profesionalisme guru sehingga mempunyai mental dan jiwa melayani pada daerah-daerah terpencil; Peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan Penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.

10. Meningkatnya konektivitas antar wilayah difokuskan pada Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab. Mamberamo Raya) : Pembangunan Jalan Ring Road Jayapura-Sentani; Pembangunan Jembatan Holtekamp; Peningkatan Jalan Waena-Arso V; Lintas Mamta-Lapago : Pembangunan jalan jayapura-elelim-wamena-mulia; Pembangunan Jembatan tersebar di wilayah mamta; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH SAERERI (Kab. Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Waropen, Kab. Kepulauan Yapen : Peningkatan Jalan Biak-Supiori; Pembangunan Jalan Serui-Ansus; Pembangunan Jalan Koweda-Botawa; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH HA ANIM (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat) : Peningkatan Jalan Merauke- Keppi; Pembangunan Jalan Tanah Merah-Mindiptana-Oksibil; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH LAPAGO (Kab. Jayawijaya, Kab. Lany Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga) : Peningkatan Jalan Wamena-Habema-Kenyam-Nduga; Peningkatan Jalan Wamena- Tiom; Peningkatan Jalan Wamena- Tolikara- Mulia; Pembangunan Jalan Wamena-Tolikara-Dekai; Pembangunan Jalan Mulia-Wewoluk-Sinak; Pembangunan Jalan Pasvaley-Kobakma; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MEEPAGO (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mimika) : Pembangunan Jalan Maatadi (Deiyai) - Digikebo (Dogiyai); Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali; Pembangunan Jalan Duntek (Dogiyai) - Munayepa/Iyei (Paniai); Pembangunan Jalan Sugapa - Hitadipa - Ilaga; Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan; Pembangunan Jaringan Irigasi; Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai, Pembangunan Bandara WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab Mamberamo Raya) : Peningkatan Bandara Sentani; Pembangunan Bandara Mamberamo Raya; Pembangunan Bandara Sarmi; Pembangunan Bandara Senggi, Pembangunan Bandara WILAYAH SAERERI (Kab. Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Waropen, Kab. Kepulauan Yapen : Peningkatan Bandara Frans Kaisepo Biak Numfor; Pembangunan Bandara Kamanap Serui; Pembangunan Bandara Botawa Waropen, Pembangunan Bandara WILAYAH HA ANIM (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat) : Peningkatan Bandara Moppah Merauke; Pembangunan Lapter Tanah Merah; Peningkatan Lapter Keppi, Pembangunan Bandara WILAYAH LAPAGO (Kab. Jayawijaya, Kab. Mimika Kab. Lany Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga) : Peningkatan Bandara Wamena; Peningkatan Bandara Dekai; Pembangunan Bandara Elelim; Peningkatan Bandara Oksibil; Peningkatan Bandara Mulia; Pembangunan Bandara Sinak Puncak; Peningkatan Lapter Tiom; Peningkatan Lapter Tolikara; Peningkatan Lapter Kobakma; Peningkatan Lapter Nduga, Pembangunan Bandara WILAYAH MEEPAGO (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mimika) :v Peningkatan Bandara Moses Kilangi Timika; Pembangunan Bandara Wanggara Nabire; Pembangunan Bandara Wagheta Deiyai; Pembangunan Bandara Sugapa Intan Jaya; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA (Kota Jayapura, Kab Jayapura, Kab Keerom, Kab Peg Mamberamo Raya) : Pembangunan Pelabuhan Depapre; Pembangunan Pelabuhan Sarmi, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH SAERERI (Kab. Biak Numfor, Kab Supiori, Kab Waropen, Kab. Kepulauan Yapen : Peningkatan Pelabuhan Biak Numfor; Peningkatan Pelabuhan Serui; Pembangunan Pelabuhan Waropen, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH HA ANIM (Kab. Merauke, Kab. Mappi, Kab. Boven Digoel, Kab. Asmat) : Pembangunan Pelabuhan Kelapa dua Merauke; Pembangunan Pelabuhan Tanah Merah; Pembangunan Pelabuhan Keppi; Pembangunan pelabuhan Mindiptana, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH LAPAGO (Kab. Jayawijaya, Kab. Lany Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yahukimo, Kab. Yalimo, Kab. Mamberamo Tengah, Kab. Puncak Jaya, Kab. Puncak, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Nduga) : Pembangunan Pelabuhan Kenyam; Pembangunan Pelabuhan Dekai, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MEEPAGO (Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Deiyai, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Mimika) : Peingkatan Pelabuhan Pomako; Peningkatan Pelabuhan Nabire; Peningkatan pelabuhan Napan, Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.

11. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, dirioritaskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.
12. Implementasi tata Ruang secara konsisten, diprioritaskan pada Sosialisasi rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR, Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Implementasi RAD GRK, *Green Investment*, Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Sosialisasi dan *Pilot Project* Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Arah Kebijakan Tahun 2015

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2015 diarahkan pada :

- 1) Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius;
 - 2) Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum;
 - 3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
 - 4) Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan;
 - 5) Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas;
 - 6) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
 - 7) Pelestarian budaya asli Papua;
 - 8) Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 - 9) Terwujudnya masyarakat yang sehat;
 - 10) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil;
 - 11) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat;
 - 12) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
 - 13) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik;
 - 14) Implementasi tata Ruang secara konsisten.
1. Terwujudnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014, pada tahun 2015 difokuskan pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keagamaan, Menjamin kebebasan setiap Umat Beragama dalam menjalankan ajaran Agamanya, Memfasilitasi Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan, Bantuan kepada Lembaga Keagamaan dan Yayasan Pengelola Pendidikan Keagamaan, Memfasilitasi terciptanya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya.
 2. Terciptanya rasa aman dan nyaman serta ketaatan hukum, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014, yang difokuskan pada Peningkatan Peran Aparatur Penegak Hukum dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan.
 3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 difokuskan pada Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal, Penerapan Perencanaan Pembangunan berbasis Data, Mengoptimalkan Sinergi antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat di Daerah, Melakukan Perubahan Pola Pikir Aparatur melalui Pendidikan dan Pembinaan Kepribadian Aparatur, Menyempurnakan Struktur Jabatan Struktural dan Mekanisme Jabatan Fungsional, Menata Kembali Hubungan Kerja antar SKPD di Propinsi dan antara Propinsi dan Kabupaten/Kota, Mengembangkan Budaya Kerja Aparatur dalam rangka peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. Diharapkan dengan fokus prioritas ini akan terbentuk aparatur daerah yang profesional dan peka terhadap permasalahan masyarakat serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu dengan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah maka akan mendukung peningkatan perekonomian daerah khususnya pertumbuhan Investasi daerah.

4. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan, pada tahun 2015 difokuskan pada Penyusunan kebijakan pengendalian penduduk, penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, penyediaan hasil kajian kependudukan, Kebijakan pertumbuhan penduduk asli Papua yang berkualitas; Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; Penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; Kesehatan reproduksi; Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah.
5. Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 difokuskan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT.
6. Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, difokuskan pada Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi.
7. Pelestarian budaya asli Papua, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 difokuskan pada Penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya; Pengembangan kesenian yang berbasis budaya; Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; Pengembangan kurikulum yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal; Pengembangan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal (seni dan budaya) melalui pelatihan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif yang berbasis seni dan budaya serta pengembangan kampung wisata yang berbasis seni dan budaya dengan berdasarkan 5 wilayah adat.
8. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, difokuskan pada Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini; Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.
9. Terwujudnya masyarakat yang sehat, difokuskan pada Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal; Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; **Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita** melalui : Penyediaan sarana kesehatan yang mampu melaksanakan PONEK dan PONEK; Peningkatan pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih; peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4); Peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; Perbaikan kesehatan dan gizi ibu hamil; Peningkatan peran posyandu dalam rangka peningkatan kesehatan anak; Penyediaan tenaga pelayanan kesehatan bayi dan balita (dokter, bidan dan kader serta); Perbaikan kualitas lingkungan dalam rangka penurunan faktor risiko kesehatan bagi bayi dan balita; Peningkatan kemitraan bidan dan dukun; **Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular** melalui : Pencegahan dan penanggulangan faktor

risiko, termasuk imunisasi; Peningkatan jumlah dan kualitas tenaga surveilans; Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); Penguatan penemuan penderita dan tata laksana kasus; Kesehatan lingkungan dengan menekankan pada akses terhadap air minum dan sanitasi dasar serta perubahan perilaku hygiene dan sanitasi; Surveilans penyakit tidak menular; Promosi dan pemberdayaan masyarakat; serta Koordinasi dan kerjasama pengendalian HIV dan AIDS antara lain mencakup : kesehatan, pendidikan, transportasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan sosial, perlindungan anak, pemuda, kependudukan, hukum dan hak asasi manusia, komunikasi dan informasi, agama, dan budaya; **Perbaikan status gizi masyarakat**, melalui : Peningkatan asupan zat gizi makro dan mikro; Surveilans pangan dan gizi; Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pola hidup sehat dan penerapan gizi seimbang; Pemberian Makanan tambahan bagi bayi dan anak-anak Peningkatan pemenuhan gizi berbasis masyarakat melalui posyandu dan keluarga sadar gizi; Peningkatan jumlah, kualitas, dan penyebaran tenaga gizi. Penanganan masalah gizi memerlukan upaya komprehensif dan terkoordinasi, dari mulai proses produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi yang cukup nilai gizinya dan aman dikonsumsi. Oleh karena itu, kerjasama lintas bidang dan lintas program terutama pertanian, perdagangan, perindustrian, pendidikan, agama, kependudukan, perlindungan anak, ekonomi, kesehatan, pengawasan pangan dan budaya sangat penting dalam rangka sinkronisasi dan integrasi kebijakan perbaikan status gizi masyarakat.; **Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat**, melalui Pemberlakuan jaminan kesehatan Papua dalam bentuk Kartu Papua Sehat (KPS) yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan lainnya (Jamkesmas, Jampersal) yang menjamin akses dan kualitas pelayanan serta tata kelola administrasi yang akuntabel dan transparan bagi masyarakat asli Papua; Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat dan peningkatan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua di seluruh puskesmas dan jaringannya (khususnya bayi, balita, ibu hamil dan lansia); **Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat**, melalui : Mengutamakan pemberdayaan masyarakat termasuk mengaktifkan kembali praktik pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, Mengintegrasikan kegiatan pelayanan gizi pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Mengembangkan kegiatan gizi masyarakat dengan memberdayakan lembaga masyarakat setempat seperti lembaga gereja, kelompok pengajian, PKK dan organisasi perempuan lainnya; **Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya**, melalui Peningkatan jumlah, jenis, mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan; Perencanaan, pengadaan, dan pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan; Penyempurnaan sistem insentif dan penempatan SDM kesehatan sesuai dengan tingkat kesulitan; Peningkatan kompetensi SDM kesehatan; Kerjasama antara institusi pendidikan tenaga kesehatan dengan penyedia pelayanan kesehatan dalam rangka penyediaan tenaga kesehatan yang dapat bertugas sesuai dengan kondisi lokal Papua dan organisasi profesi; **Peningkatan pelayanan kesehatan, primer, sekunder dan tersier**, melalui: Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke); Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional; Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyediaan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

10. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, difokuskan pada Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain); Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; **Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : *Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA*; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; *Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung)*; Peningkatan mutu proses pembelajaran; Peningkatan kesempatan lulusan SD untuk melanjutkan ke SMP, serta Penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan memasukan kurikulum berbasis kearifan lokal Papua yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, kerjasama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (soft skills), jiwa kewirausahaan, serta memperkuat pendidikan akhlak mulia, kewarganegaraan, dan pendidikan multikultural serta toleransi beragama guna mewujudkan peserta didik yang bermoral, beretika, berbudaya, beradab, toleran, dan memahami keberagaman. Peningkatan kualitas dilakukan juga melalui pendidikan anak yang berprestasi dan pemberian beasiswa; **Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : Peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan non-formal; Pembangunan dan rehabilitasi gedung-gedung SMA/SMK; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; Peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki jiwa kewirausahaan; Peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri Peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan Peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal; **Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat**, melalui: (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan; **Akselerasi dan afirmasi kualitas pendidikan** melalui : pendidikan anak berprestasi dan unggul Papua dari jenjang SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi; Pendidikan 1000 Doktor (PhD); Penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan non-formal; Peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk masyarakat usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; Peningkatan keaksaraan dan peningkatan minat baca; Peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi, pelatihan, pendidikan dan penyediaan berbagai tunjangan guru; Penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah Peningkatan profesionalisme guru sehingga mempunyai mental dan jiwa melayani pada daerah-daerah terpencil; Peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan Penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.

11. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, difokuskan pada Optimalisasi lahan produksi pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan/kehutanan, Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.
12. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 difokuskan pada Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO. Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai, Pembangunan Bandara WILAYAH WILAYAH SAERERI ; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.
13. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diprioritaskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.
14. Implementasi tata Ruang secara konsisten, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2014. Tahun 2015 difokuskan pada pada Sosialisai rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR, Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Implementasi RAD GRK, *Green Investment*, Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Sosialisasi dan *Pilot Project* Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Arah Kebijakan Tahun 2016

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2016 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada :

- 1) Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas;
- 2) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- 3) Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 4) Terwujudnya masyarakat yang sehat;
- 5) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil;
- 6) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
- 7) Tercapainya stabilitas makro ekonomi;
- 8) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK;
- 9) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah;
- 10) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah;
- 11) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah;
- 12) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat;
- 13) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.

1. Terwujudnya masyarakat Papua yang berbudaya dan Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua, difokuskan pada Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Adat dalam Hal Aktualisasi Nilai-nilai Budaya, Memfasilitasi Tumbuh Kembangnya Peran Lembaga Adat.
2. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada penyediaan data kependudukan yang akurat khususnya Orang Asli Papua yang bersumber pada sensus penduduk dan survei kependudukan, Kebijakan pertumbuhan penduduk asli Papua yang berkualitas; Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana; Penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB; Kesehatan reproduksi; Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah.
3. Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT.
4. Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi.
5. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini; Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.
6. Terwujudnya masyarakat yang sehat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal; Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; **Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular; Perbaikan status gizi masyarakat; Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat; Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat; Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya;** Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke); Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional; Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

7. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain); Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; **Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : *Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA*; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; *Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung)*; **Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua**; **Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat**; **Akselarasi dan afirmasi kualitas**; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.
8. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, difokuskan pada reformasi prosedur peijinan investasi, mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
9. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, difokuskan pada Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, Pengendalian laju inflasi.
10. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, difokuskan pada Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah, Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah, Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Pengembangan sarana promosi hasil produksi, Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
11. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, difokuskan pada Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta, Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir, Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.
12. Meningkatkan kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.
13. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, difokuskan pada Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan Penyediaan peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
14. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, difokuskan pada promosi dan pemasaran obyek pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, promosi pariwisata dalam dan luar negeri, pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.

15. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Optimalisasi lahan produksi pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan/kehutanan, Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.
16. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, difokuskan pada Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu, Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat, Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat, Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
17. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO. Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai, Pembangunan Bandara WILAYAH WILAYAH SAERERI ; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.
18. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diprioritaskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.
19. Implementasi tata Ruang secara konsisten, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada pada Sosialisai rencana tata ruang, pemetaan tanah ulayat masyarakat adat dan pemetaan WPR, Penegakan hukum terhadap rencana tata ruang, Implementasi RAD GRK, *Green Investment*, Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan, Sosialisasi dan *Pilot Project* Pembangunan Berkelanjutan di Kampung, Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana.

Arah Kebijakan Tahun 2017

Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2017 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada terwujudnya :

- 1) Layanan sosial yang berkualitas;
- 2) Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan;
- 3) Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, Terwujudnya masyarakat yang sehat;
- 4) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil;
- 5) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
- 6) Tercapainya stabilitas makro ekonomi;
- 7) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK;

- 8) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah;
 - 9) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah;
 - 10) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja;
 - 11) Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah;
 - 12) Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat;
 - 13) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 14) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.
-
1. Meningkatnya layanan sosial yang berkualitas, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2015. Tahun 2016 difokuskan pada Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial, serta pemberdayaan komunitas adat terpencil dan layanan pendidikan khusus bagi KAT.
 2. Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh SKPD. Mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, serta peningkatan perlindungan perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan dan kesehatan reproduksi.
 3. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini; Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.
 4. Terwujudnya masyarakat yang sehat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat berbasis kearifan lokal; Pengembangan sarana dan prasarana serta peraturan dalam rangka mendukung upaya kesehatan berbasis masyarakat; Mobilisasi masyarakat dalam rangka pemberdayaan, advokasi, kemitraan dan peningkatan sumber daya pendukung; Kemitraan kesehatan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Pengembangan sistem peringatan dini untuk penyebaran informasi terjadinya wabah dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat; **Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita; Pengendalian penyakit Endemik, menular serta penyakit tidak menular; Perbaikan status gizi masyarakat; Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan masyarakat; Revitalisasi fungsi Posyandu dalam pelayanan kesehatan masyarakat; Ketersediaan tenaga kesehatan secara merata di semua Puskesmas dan jaringannya;** Pembangunan Rumah Sakit rujukan berstandar nasional di 4 (empat) wilayah (Kab. Nabire, Jayawijaya, Biak dan Merauke); Pembangunan dan rehabilitasi rumah sakit Jayapura berstandar Internasional; Peningkatan dan pembenahan jumlah puskesmas dan jaringannya serta pengembangan puskesmas rawat inap, yang didukung fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai terutama pada daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta daerah dengan aksesibilitas relatif rendah; Pengembangan pelayanan kesehatan yang berbasis kondisi lokal Papua (pelayanan kesehatan pro aktif/bergerak, puskesmas keliling, flying health care, puskesmas apung termasuk penyiapan mobile medical service); Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan rujukan; Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Puskesmas bagi pelayanan kesehatan primer di puskesmas; Peningkatan utilisasi fasilitas kesehatan, termasuk dengan menjalin kemitraan dengan masyarakat dan swasta.

5. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Kemitraan pendidikan dengan lembaga agama dan lembaga sosial lainnya; Mendorong kemandirian lembaga-lembaga/ yayasan-yayasan keagamaan dalam pengelolaan pendidikan (YPK, YPPK, YAPIS, lain-lain); Peningkatan manajemen pendidikan; Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penyelenggaraan PAUD yang holistik dan integratif untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal sehingga memiliki kesiapan untuk memasuki jenjang pendidikan selanjutnya; **Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua** melalui : *Pemantapan implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA*; Penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang; *Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP serta Rumah Guru sesuai dengan kondisi lokal khas Papua (pendidikan berpola asrama, SD kecil dan guru kunjung)*; **Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata dengan biaya serendah-rendahnya bagi masyarakat khususnya orang asli Papua**; **Peningkatan minat dan budaya gemar membaca masyarakat**; **Akselarasi dan afirmasi kualitas**; Penguatan Sistem Inovasi Daerah melalui penataan kelembagaan Iptek, penguatan Sumber Daya Iptek dan penataan jaringan Iptek; Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, teknologi kesehatan dan obat tradisional serta pelaksanaan Prospek; Penelitian tentang sosial budaya dan biodiversity Papua.
6. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, difokuskan pada reformasi prosedur peijinan investasi, mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
7. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, difokuskan pada Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, Pengendalian laju inflasi.
8. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah, Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah, Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Pengembangan sarana promosi hasil produksi, Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
9. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta, Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir, Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri. Meningkatkan kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah.
10. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan Penyediaan peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.

11. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada promosi dan pemasaran obyek pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, promosi pariwisata dalam dan luar negeri, pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.
12. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan perekonomian masyarakat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Optimalisasi lahan produksi pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan/kehutanan, Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se-Papua.
13. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu, Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat, Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat, Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
14. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2016. Tahun 2017 difokuskan pada Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO. Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai, Pembangunan Bandara WILAYAH WILAYAH SAERERI ; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.
15. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, diprioritaskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.

Arah Kebijakan Tahun 2018

Arah kebijakan pada tahun 2018 ini merupakan tahap terakhir dari periode RPJMD 2012-2016, pada tahap ini juga melaksanakan pencapaian-pencapaian pada tahap-tahap berikutnya dari sasaran yang masih belum tercapai, sehingga pada tahap ini diharapkan keseluruhan sasaran dan indikatornya yang telah ditetapkan dapat tercapai keseluruhannya dan apa yang diamanatkan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penjabaran visi dan misi yang ada didalam dokumen RPJMD dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan visi **Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera**. Arah Pembangunan Provinsi Papua tahun 2018 tetap melanjutkan pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, dengan diarahkan pada terwujudnya :

- 1) Prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
- 2) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif;
- 3) Tercapainya stabilitas makro ekonomi;
- 4) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK;

- 5) Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah;
 - 6) Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah;
 - 7) Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah;
 - 8) Meningkatnya konektivitas antar wilayah; 9) Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.
-
1. Meningkatnya prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Peningkatan dan pembangunan sarana prasarana olahraga berstandar Nasional dan Internasional dalam rangka persiapan pencalonan Papua sebagai Tuan Rumah PON 2020, Pembinaan Olahraga prestasi, pembinaan olah raga masyarakat dan pembinaan olahraga usia dini; Pembinaan organisasi kepemudaan, pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan, pelatihan kewirausahaan dan keterampilan yang menghasilkan pemuda yang unggul dan berdaya saing serta sosialisasi dan penyuluhan bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, iman dan ketakwaan.
 2. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, difokuskan pada reformasi prosedur peijinan investasi, mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
 3. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa, Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri, Pengendalian laju inflasi.
 4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah, Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah, Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah, Pengembangan sarana promosi hasil produksi, Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah, Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
 5. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah, Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah, Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta, Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir, Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah.
 6. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, Penyiapan tenaga kerja siap pakai dan Penyediaan peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
 7. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada promosi dan pemasaran obyek pariwisata, pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata, promosi pariwisata dalam dan luar negeri, pengembangan obyek pariwisata unggulan, pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.

8. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Optimalisasi lahan produksi pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan/kehutanan, Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersediaan cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat, meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, Penyediaan tenaga penyuluh/ pendamping ditingkat masyarakat, Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.
9. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu, Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat, Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat, Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
10. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan; Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO. Pembangunan Jaringan Air Bersih tersebar di 5 Wilayah Adat; Pembangunan Pengaman Pantai, Pembangunan Bandara WILAYAH WILAYAH SAERERI ; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan terminal Type B; Pengadaan Sarana Angkutan; Pembangunan Fasilitas Transportasi Darat Tersebar di Seluruh Wilayah Papua, Pembangunan Pelabuhan WILAYAH MAMTA; WILAYAH SAERERI; WILAYAH HA ANIM; WILAYAH LAPAGO; WILAYAH MEEPAGO; Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.
11. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, merupakan kelanjutan arah kebijakan pada tahun 2017. Tahun 2018 difokuskan pada Pembangunan dan Pengembangan Rumah Layak Huni tersebar di lima Wilayah Adat, Pembangunan dan Pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, Pembangunan PLTA Urumuka, Pembangunan PLTA Mamberamo, Pembangunan Energi Baru Terbarukan, Pembangunan PLTA Supiori.

Tabel VI. 1
Strategis dan Arah Kebijakan

Misi I : Mewujudkan Suasana Aman, Tenteram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan Berbudaya.	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.	Revitalisasi dan Optimalisasi Peran lembaga Keagamaan	Peningkatan Peran Lembaga Keagamaan
		Meningkatnya Masyarakat Papua yang Berbudaya		Peningkatan Kerjasama Pemerintah dan Lembaga Adat dalam Rangka Aktualisasi dan Penghormatan terhadap Nilai-nilai Budaya Asli Papua.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2.	Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua	Meningkatnya Rasa Aman, Tentram dan Nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum Seluruh Masyarakat Papua.	Penegakan Hukum dan Revitalisasi peran Masyarakat dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.	Mendorong Komunikasi yang Intensif antara Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam Mewujudkan Rasa Aman, Tentram dan Nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua		Peningkatan Peran Lembaga Masyarakat Adat

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Akuntabel.	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kapasitas aparatur dan Kelembagaan Pemerintah daerah
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan melalui Standar-Standar Pelayanan Publik
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi		Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran
		Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN		Mendorong Penerapan Teknologi Informasi Pendukung Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik		Menegakkan Hukum dan Pemberantasan KKN secara Konsisten, Transparan dan Adil
				Meningkatkan Kinerja Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua tingkatan.</p> <p>Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan.</p> <p>Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah.</p>		<p>Melakukan Perubahan Pola Pikir Aparatu menjadi Pelayanan Masyarakat dan Penataan struktur Organisasi Pemerintahan yang Mencerminkan Fungsi-fungsi Pemerintahan</p>
2.	<p>Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-fungsi Pemerintahan.</p>	<p>Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota.</p> <p>Terbentuknya Badan Koordinasi wilayah Pembangunan berdasarkan 5 wilayah Adat.</p> <p>Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku).</p>	<p>Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi antar Wilayah dan antar Sektor dalam Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah</p>	<p>Peningkatan Harmonisasi antara Pemerintah, Provinsi dan Daerah</p>
3.	<p>Mewujudkan Hubungan Kerja sama Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.</p>	<p>Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.</p>	<p>Penguatan Fungsi Koordinasi antar Lembaga Daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Otsus.</p>	<p>Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan serta Penguatan Kapasitas DPRP dalam Rangka Implementasi Kebijakan Otsus Papua Secara Murni dan Konsekwen.</p>
4.	<p>Mewujudkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen.</p>	<p>Rekonstruksi Undang-undang No. 21/2001 menjadi Undang-undang Otonomi Khusus Plus (UU Pemerintahan Papua).</p> <p>Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak, Politik dan Hak Budaya.</p>		<p>Peningkatan Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Rancangan UU Otsus Plus (UU Pemerintah Papua).</p> <p>Mendorong terpenuhinya Seluruh Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua.</p>

Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan	Terwujudnya administrasi kependudukan yang berkelanjutan.	Optimalisasi pengawasan dan pengendalian kependudukan.	Peningkatan administrasi kependudukan.
		Terwujudnya yang masyarakat religius.		Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial.
		Meningkatnya jangkauan/cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial.		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial serta jaminan sosial.
		Terwujudnya keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan.		Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan serta perencanaan yang responsive gender.
		Lestarnya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua.		Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah.
		Meningkatnya prestasi olah raga.		
2.	Meningkatkan Kualitas SDM Papua yang berdaya saing dan beretika.	Meningkatnya prestasi olahraga.	Optimalisasi olah raga dan pemuda.	Peningkatan pembinaan prestasi olah raga dan penyediaan sarana pendukung.
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan.		Peningkatan pembinaan pemuda dan pramuka.
		Terwujudnya masyarakat yang sehat	Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pemenuhan gizi.
		Terwujudnya Masyarakat yang cerdas dan terampil.		Peningkatan Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan pendidikan yang berkualitas.
				Peningkatan dan pengembangan IPTEK.

Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif	Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah	<p>Penyederhanaan prosedur, perijinan yang menghambat kelancaran arus B/J dan pengembangan kegiatan jasa perdagangan dan pasar domestik.</p> <p>Mengintegrasikan pengembangan usaha sesuai dengan daya dukung dan karakteristik daerah dan pengusaha serta potensi usaha di setiap Kab/Kota di Provinsi Papua.</p>
		Tercapainya stabilitas makro ekonomi dengan tetap mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan berkualitas serta peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan.		Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi
				Menjaga stabilitas perekonomian daerah berlandaskan oleh capaian indikator ekonomi.
				Menciptakan inovasi baru untuk memperkuat struktur perekonomian daerah dengan berbasis industry dan bisnis pertanian menerapkan IPTEK.
		Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendataan daerah.		Memantapkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, responsibilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan BUMN.

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin.</p>		<p>Penyempurnaan system penyediaan dan distribusi pangan secara merata dan harga terjangkau.</p> <p>Peningkatan kemampuan petani dan penguatan lembaga pendukungnya, pengamanan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing produk pertanian dan perikanan serta pemanfaatan hutan untuk diversifikasi produksi pangan.</p> <p>Peningkatan kapasitas kelembagaan pendukung ketahanan pangan berbasis masyarakat.</p> <p>Peningkatan system kewaspadaan dini dalam gizi dan rawan pangan.</p>
		<p>Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK.</p>	<p>Meningkatnya produktivitas UKMK dengan laju pertumbuhan lebih tinggi dari laju produktivitas.</p>	<p>Meningkatnya keterpaduan antara tenaga kerja terdidik dan trampil dengan adopsi penerapan teknologi</p> <p>Mengembangkan UKMUK melalui pendekatan kelompok pada sector industry dan bisnis pertanian didukung pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha.</p> <p>Mengembangkan UKMUK untuk berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industry, percepatan pengalihan teknologi dan peningkatan kualitas SDM.</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				<p>Meningkatkan system dan strategi dalam menumbuhkan wirausaha baru (lokal) berbasis IPTEK.</p> <p>Mendorong perkuatan struktur industri pada sub sektor yang memiliki potensi keuntungan kompetitif.</p> <p>Memperluas akses masyarakat terhadap sumberdaya produktif untuk pengembangan usaha.</p> <p>Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pertanian dikampung melalui peningkatan kualitas dan kontinuitas ketersediaan berbasis sumberdaya lokal.</p>
		<p>Perbaiki iklim ketenagaan kerjaan dengan upaya menurunkan tingkat pengangguran.</p>		<p>Meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi.</p> <p>Menciptakan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki regulasi ketenagakerjaan yang terkait rekrutmen, TK, out sourcing, pengupahan, PHK dan jaminan keselamatan kerja.</p> <p>Meningkatkan kualitas SDM ketenagakerjaan melalui pembekalan teknis dan peningkatan awasan kerja.</p>

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Terselenggaranya promosi daerah melalui peningkatan kepariwisataan daerah.		<p>Meningkatkan efektivitas kelembagaan promosi pariwisata (dalam dan luar daerah).</p> <p>Optimalisasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan jasa pelayanan pariwisata secara terpadu.</p> <p>Peningkatan pengembangan dan pelestarian obyek wisata daerah dng peran pelaku usaha masyarakat.</p>
		Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh Papua dan berkurangnya kesenjangan ekonomi antar wilayah.		<p>Mengembangkan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah sehingga dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yang dapat menggerakkan wilayah tertinggal.</p> <p>Meningkatkan pembangunan di wilayah-wilayah tertinggal dan terisolasi</p>
2.	Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dgn memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari	Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam	<p>Menyelenggarakan revitalisasi pertanian untuk diversifikasi usaha mendukung produksi pangan.</p> <p>Pengamanan ketahanan pangan.</p> <p>Peningkatan produktivitas, produksi dan daya saing pertanian dan perikanan.</p>

Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan				
No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah.	Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah.	Peningkatam aksesibilitas, konektivitas dan komunikasi antar wilayah.
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah.		
		Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.		
		Meningkatkan ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat.	Peningkatan pemenuhan dan ketersediaan infrastruktur dasar.
		Meningkatnya ketersediaan air bersih.		
		Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan.		
2.	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	Sosialisasi dan implementasi pembangunan berkelanjutan.	Peningkatan tertib tata ruang.
		Papua sebagai paru-paru dunia.		Meminimalkan emisi GRK dan memaksimalkan serapan GRK dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
		Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.		Peningkatan kepatuhan terhadap proses perizinan lingkungan.
		Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan.		Peningkatan pemahaman dan penerapan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan kebijakan umum bertujuan menjelaskan cara yang ditempuh untuk menterjemahkan strategi ke dalam rencana program-program prioritas pembangunan. Kebijakan umum pembangunan memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Kebijakan umum Provinsi Papua dalam menterjemahkan strategi dan arah kebijakan pembangunan lima tahunan, yaitu :

a. Strategi 1: Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur SKPD yang representatif.
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam aktivitas keagamaan.
3. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial.
4. Penguatan Kapasitas Lembaga Adat dalam Pembangunan.
5. Pemantapan Representasi Kultural Orang Asli Papua dalam Lembaga MRP.

b. Strategi 2 : Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Mendorong Komunikasi yang Intensif antara Aparat Penegak Hukum, Masyarakat dan Pemerintah Daerah

c. Strategi 3 : Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :

1. Menyempurnakan system kepegawaian daerah, rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, mutasi dan peningkatan disiplin serta sistem Kinerja Aparatur
2. Mengembangkan dan menerapkan Standar Operasional prosedur dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) secara konsisten
3. Meningkatkan pengelolaan keuangan Daerah
4. Meningkatkan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
5. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6. Peningkatan Sinergitas antara Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota serta peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah
7. Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi dalam Manajemen Pemerintahan serta Pemanfaatan IPTEK untuk Peningkatan Daya Saing Daerah
8. Mendorong Peningkatan Kesadaran dan Ketaatan terhadap Hukum dan Peraturan yang berlaku
9. Memantapkan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengintegrasian Perencanaan, Penganggaran serta Pengawasan melalui Sistem Informasi Manajemen.
10. Melakukan Perubahan Pola Pikir Aparatur melalui Pendidikan dan Pembinaan Kepribadian Aparatur.
11. Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan.

- d. Strategi 4 : Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Pembentukan dan berjalannya badan Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah Adat
 2. Peningkatan Kerjasama, Kemitraan dan Penguatan Kapasitas Lembaga DPRP serta Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga DPRP dalam rangka Penyusunan Perdasus dan Perdasi serta mengawal Implementasi Kebijakan Otsus secara Konsisten.
 3. Penyusunan Rancangan UU Otsus Plus (UU Pemerintah Papua)
 4. Pemenuhan Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.
- e. Strategi 6 : Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Penyerasian Pengendalian Penduduk
 2. Revitalisasi Program KB
- f. Strategi 7 : Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Mendorong kemandirian peran lembaga keagamaan.
 2. Pembinaan dan pemberdayaan PMKS dan KAT.
 3. Memfasilitasi keterlibatan perempuan dalam pembangunan dan mendorong keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan.
- g. Strategi 8 : Revitalisasi nilai-nilai budaya
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Mempertahankan dan mengembangkan Budaya dan Seni Papua
- h. Strategi 9 : Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Mendorong pembinaan Olahraga berprestasi dan penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional
 2. Mendorong partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan
- i. Strategi 10 : Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu :
1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelayanan Kesehatan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama dan sosial lainnya.
 2. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas secara merata diseluruh wilayah.
 3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan mengoptimalkan peran lembaga-lembaga agama.
 4. Mendekatkan fasilitas dan pelayanan pendidikan yang berkualitas.
 5. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan non-formal khususnya pemberantasan Buta Huruf.
 6. Meningkatkan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
 7. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan IPTEK.

- j. Strategi 11 : Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Menyiapkan prosedur, perijinan investasi
 2. mengembangkan sistem promosi dan peluang investasi daerah
 3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung investasi
 4. Menyediakan Regulasi pendukung investasi
 5. Menjaga pelaksanaan kebijakan fiskal mengarah pada kesinambungan fiskal dengan tetap memberi ruang gerak bagi peningkatan kegiatan ekonomi
 6. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produktivitas koperasi dan UKMK
 7. Mendorong produktivitas industri kecil dan menengah
 8. Pembukaan dan perluasan lap. Kerja
 9. Revitalisasi fungsi lembaga promosi pariwisata
- k. Strategi 12 : Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Mendorong pertumbuhan wilayah2 strategis dan cepat tumbuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDA dalam mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan daerah shg dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan yg dapat menggerakkan wilayah tertinggal
 2. Mengembangkan usaha pemanfaatan kayu, pengembangan industri kayu rakyat, pengembangan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan
 3. Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan
 4. mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pemanfaatan potensi hasil hutan
- l. Strategi 13 : Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Pengembangan wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan sarana dan prasarana untuk mengurangi kesenjangan inter dan antar wilayah
- m. Strategi 14 : Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Mempercepat Pembangunan Pemanfaatan energi murah dan ramah lingkungan, Rumah layak huni serta Sarana Prasarana air bersih.
- n. Strategi 15 : Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan
Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai strategi ini, yaitu:
1. Peningkatan pembinaan penataan ruang dan pertanahan
 2. Peningkatan kapasitas penegakan hukum terhadap rencana tata ruang
 3. Memperkuat implementasikan RAD GRK
 4. Membangun *Green Investment*
 5. Peningkatan kualitas lingkungan
 6. Peningkatan kapasitas sistem perizinan lingkungan
 7. Peningkatan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
 8. Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

Rincian kebijakan umum dan program pembangunan daerah adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini.

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Indikasi rencana program prioritas Provinsi Papua berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengelompokan pagu pada program di tiap-tiap SKPD dapat dilakukan untuk kurun waktu lima tahun masa pembangunan jangka menengah. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi SKPD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Pencapaian target kinerja program (*outcome*) di masing-masing urusan sesungguhnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten/Kota, dan Sumber-sumber pendanaan lainnya). Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada penentuan program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap SKPD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berkaitan dengan pencapaian visi dan misi, maka ditetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan Harapan Seluruh Rakyat (HASRAT) Papua. Prioritas pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

I. BIDANG PEMERINTAHAN DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Mengevaluasi dan melanjutkan program-program pembangunan saat ini berdasarkan prioritas kebutuhan, ketersediaan pendanaan, dan jangka waktu pemanfaatan.
2. Singkronisasi dan harmonisasi hubungan kerja antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang belum berjalan harmonis dan strategis.
3. Penegakkan hukum, stabilitas keamanan, ketertiban umum dan HAM melalui pemantapan koordinasi kerja antara Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.
4. Peningkatan kualitas iman, ketaqwaan, dan emosional masyarakat dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.
5. Memperkuat kapasitas kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka memperpendek jalur birokrasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pusat di daerah.
6. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur pemerintah daerah yang bersih, berwibawa, dan disiplin dalam melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat.

7. Penyelesaian persoalan tapal batas antar Negara, provinsi dan antar kabupaten yang menjadi potensi konflik dalam pembangunan.
8. Penataan kembali sistem pemerintahan di Provinsi Papua yang mengalami distorsi akibat mis-manajemen dari pengambil kebijakan daerah.
9. Sinkronisasi sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.

II. BIDANG PENGUATAN OTONOMI KHUSUS

1. Kompensasi dan rekonsiliasi bagi masyarakat adat yang menyatakan diri untuk memisahkan diri dari NKRI akibat tuntutan adat yang masih membelenggu.
2. Pembangunan semesta sebagai tindak lanjut rekonsiliasi yang berkomitmen dan konsisten.
3. Penguatan kapasitas dan peran serta masyarakat adat dalam pembangunan
4. Penguatan kedudukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 melalui legitimasi Peraturan Pemerintah, Perdasus dan Perdasi.
5. Proteksi, keberpihakan dan pemberdayaan masyarakat asli Papua diberbagai bidang dalam kerangka Otonomi Khusus.
6. Penyelesaian rencana tata ruang dan tata wilayah yang hingga saat ini belum didukung oleh suatu dokumen sebagai acuan pembangunan.

III. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Pemantapan kualitas pendidikan dan peningkatan kualitas SDM untuk menjawab tantangan pembangunan.
3. Pengembangan dan peningkatan budaya, seni, olah raga dan intelektualitas sebagai wujud pengakuan jati diri.
4. Penanganan orang cacat dan manula sebagai komponen yang tidak terpisahkan dalam proses pembangunan.
5. Pengurangan tingkat kematian ibu dan anak yang masih sangat tinggi serta peningkatan asupan gizi yang memadai.
6. Pemberian jaminan sosial bagi manula, orang cacat dan ibu rumah tangga asli Papua.
7. Pembebasan biaya kesehatan dan pendidikan bagi keluarga tidak mampu.
8. Pengembangan prestasi olah raga, kreatifitas seni dan penguatan budaya lokal.
9. Pengembangan hak-hak masyarakat adat Papua.
10. Penguatan dan pemberdayaan kapasitas perempuan.
11. Pengembangan kapasitas kampung.

IV. BIDANG PERKONOMIAN

1. Pengembangan perekonomian rakyat berbasis komoditas, pengolahan dan pemasaran.
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur dan *public utilitas* untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lokal.
3. Menurunkan, harga-harga bahan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan.
4. Peningkatan perekonomian usaha mikro, kecil dan menengah
5. Memberikan kemudahan, keringanan dan insentif bagi pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja.

V. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN SARANA PRASARANA

1. Mewujudkan Provinsi Papua Terang dengan ketersediaan pasokan listrik dan air bersih bagi seluruh masyarakat kawasan pesisir sampai pegunungan
2. Mewujudkan Pembangunan Perumahan Layak Huni bagi Masyarakat Papua berbasis Lokal
3. Akselerasi pembangunan infrastruktur kampung.
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur-infrastruktur lintas daerah

Urusan pemerintahan yang kewenangan penyelenggaraannya dilaksanakan pemerintah Provinsi, dapat dikelompokkan berdasarkan 4 (empat) bidang pembangunan :

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi urusan pendidikan, perpustakaan, kesehatan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan.
2. Bidang Infrastruktur, meliputi urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, serta energi dan sumberdaya mineral
3. Bidang perekonomian, meliputi urusan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal daerah, perdagangan, industri, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketegakerjaan, ketahanan pangan, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, serta pariwisata.
4. Bidang Pemerintahan, meliputi urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Kepegawaian, kearsipan serta komunikasi dan informasi.

Berdasarkan pengelompokan tersebut diatas dan mempertimbangkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah pada lima tahun kedepan, maka dapat ditetapkan Rencana Kebutuhan Indikatif pendanaan selama periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Rakyat : 30-37 persen
 - a. Urusan pendidikan : minimal 15 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah. Pemenuhan 15 persen anggaran pendidikan merupakan wujud implementasi HASRAT Papua yaitu pelayanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Ini juga menjadi program prioritas tahun 2013-2018, yaitu Penuntasan Buta aksara dan Wajib Belajar 9 tahun serta pencaangan wajib belajar 12 tahun.
 - b. Urusan kesehatan : alokasi diarahkan ke proporsi 15 persen dari total kapasitas riil pendanaan daerah. Alokasi pembiayaan diprioritaskan pada pelayanan kesehatan yang murah, mudah dan berkualitas. Program prioritas diprioritaskan pada Kesehatan Ibu, bayi dan balita, pemenuhan gizi.
 - c. Urusan perpustakaan, kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial, kepemudaan dan olah raga serta kebudayaan masing-masing mendapat proporsi alokasi sampai dengan sebesar 7 persen dari total kapasitas riil pendanaan daerah.
2. Bidang Infrastruktur dan Prasarana : 30 Persen
 - a. Urusan Pekerjaan Umum : minimal 18 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah. Pemenuhan 18 persen anggaran merupakan wujud implementasi HASRAT Papua dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga mendorong penurunan harga-harga barang di daerah-pegunungan, selain itu meningkatkan pemenuhan energi listrik, kebutuhan perumahan yang layak huni dan ketersediaan air bersih. Program prioritas tahun 2013-2018 adalah pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, bandara dan dermaga; program pembangunan rumah layak huni, dan program air bersih.

- b. Urusan Perhubungan : minimal 8 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah. Pemenuhan 10 persen anggaran dalam rangka meningkatkan konektivitas antar wilayah khususnya sarana transportasi udara, laut dan ASDP. Program prioritas tahu 2013-2018 akan difokuskan pada pembangunan dan peningkatan sarana dan parasarana perhubungan udara, pembangunan dan peningkatan pelabuhan dan dermaga.
 - c. Urusan Energi dan SDM minimal 3 persen dari kapasitas riil pendanaan daerah, Urusan Lingkungan Hidup dan urusan perencanaan minimal 1 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah.
3. Bidang Perekonomian Rakyat : 15 persen
- a. Urusan yang termasuk dalam urusan rumpun hijau seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, minimal 10 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah. Pemenuhan 10 persen anggaran ini merupakan wujud Impelementasi peninglatan perekonomian berbasis masyarakat, peningkatan ketahanan pangan untuk mendukung Generasi Emas (GEMAS) Papua khususnya pemenuhan makananan bergizi bagi Ibu Hamil dan Balita (Program 1000 hari kehidupan pertama).
 - b. Urusan Koperasi, UKM, perindustrian dan perdagangan serat pariwisata mendapatkan anggaran minimal 5 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah yang diprioritaskan pada membentuk dan mengatur sistem pengolahan dan penjualan komoditas unggulan daerah.
4. Bidang Pemerintahan Umum: 18 persen
- Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, Administrasi keuangan daerah, Kepegawaian, kearsipan serta komunikasi dan informasi mempunyai proporsi sebesar 18 persen dari nilai total kapasitas riil pendanaan daerah.

BAB IX

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/ hasil) dari kegiatan (output/ keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran, karena hasil (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam hal ini, dalam melihat kinerja daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan untuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; dan
4. terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk mengukur keberhasilan inilah, maka diperlukan satu indikator yang ditetapkan dan disepakati bersama dan mampu menggambarkan kemajuan capaian pembangunan, khususnya di era otonomi khusus Papua. Indikator kinerja juga diharapkan disepakati oleh publik sebagai subyek pembangunan untuk memastikan terjadinya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB X

PEDOMAN TRANSISI

Recana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2018 disusun berdasarkan sasaran pokok RPJPD tahun 2005-2025 untuk potongan tahun 2013-2018. Untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di akhir periode RPJMD maka perlu ditetapkan pedoman dan kaidah masa transisi.

3.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan pada tahun transisi setelah RPJMD berakhir maka proses pembangunan harus tetap berjalan, selama proses penyusunan RPJMD periode berikutnya. Bahkan jika dilihat pengalaman sebelumnya, Provinsi Papua membutuhkan 2 tahun transisi sebelum memiliki gubernur terpilih.

1. RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pemilukada) dalam hal ini adalah untuk tahun anggaran 2019.
2. RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) antara lain bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
3. Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

3.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua terpilih dan menjadi pedoman bagi setiap SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan pedoman untuk menyusun RKPD dan RENJA. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Masyarakat dan dunia usaha agar turut berpartisipasi dalam mencapai sasaran pembangunan dengan menyelaraskan upaya-upaya masing-masing komponen sesuai bidang kehidupan atau usahanya;
2. SKPD berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD dan menjadi pedoman dalam menyusun Renja SKPD setiap tahun;
3. SKPD berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Bappeda berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke dalam Renstra SKPD.
5. Bappeda harus menerjemahkan RPJMD kedalam RKPD tiap tahun sesuai kebijakan, prioritas, dan program indikatif yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Bappeda Provinsi Papua berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.
6. Badan/dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Papua, Pemerintah Kabupaten/ Kota, serta masyarakat, termasuk dunia usaha, agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2013-2018 ini dengan sebaik-baiknya.
7. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Papua ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2013 hingga 2018.
8. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Papua, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD Propinsi Papua Tahun 2013-2018, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja-SKPD).

9. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang nantinya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra-SKPD Kabupaten/Kota, harus memperhatikan RPJMD Propinsi Papua Tahun 2013-2017.
10. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Propinsi Papua dengan Rencana Strategis (Renstra) Badan/Dinas/Unit Satuan Kerjadan RPJMD Kabupaten/Kota.
11. Konsepsi prioritas dalam dokumen RPJMD Propinsi Papua Tahun 2013-2018 ini baik mengenai aspek program maupun wilayah, hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan, dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non-prioritas.

Konsepsi deskripsi program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja, tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas pentingnya sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Propinsi Papua 2013-2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua berkewajiban melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018 ke dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD). Untuk menjaga sinergitas, harmonisasi dan sinkronisasi dengan RPJMD kabupaten/kota, maka Bapeda Provinsi Papua berkewajiban melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Kabupaten/Kota.

BAB XI PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua tahun 2013-2018 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua. RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018 akan menjadi pendorong dalam membangun Provinsi Papua menuju Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Papua tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, kerjasama yang kuat antara pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRP , serta kerjasama masyarakat Provinsi Papua.

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

**Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM**

ROSINA UPESSY, SH